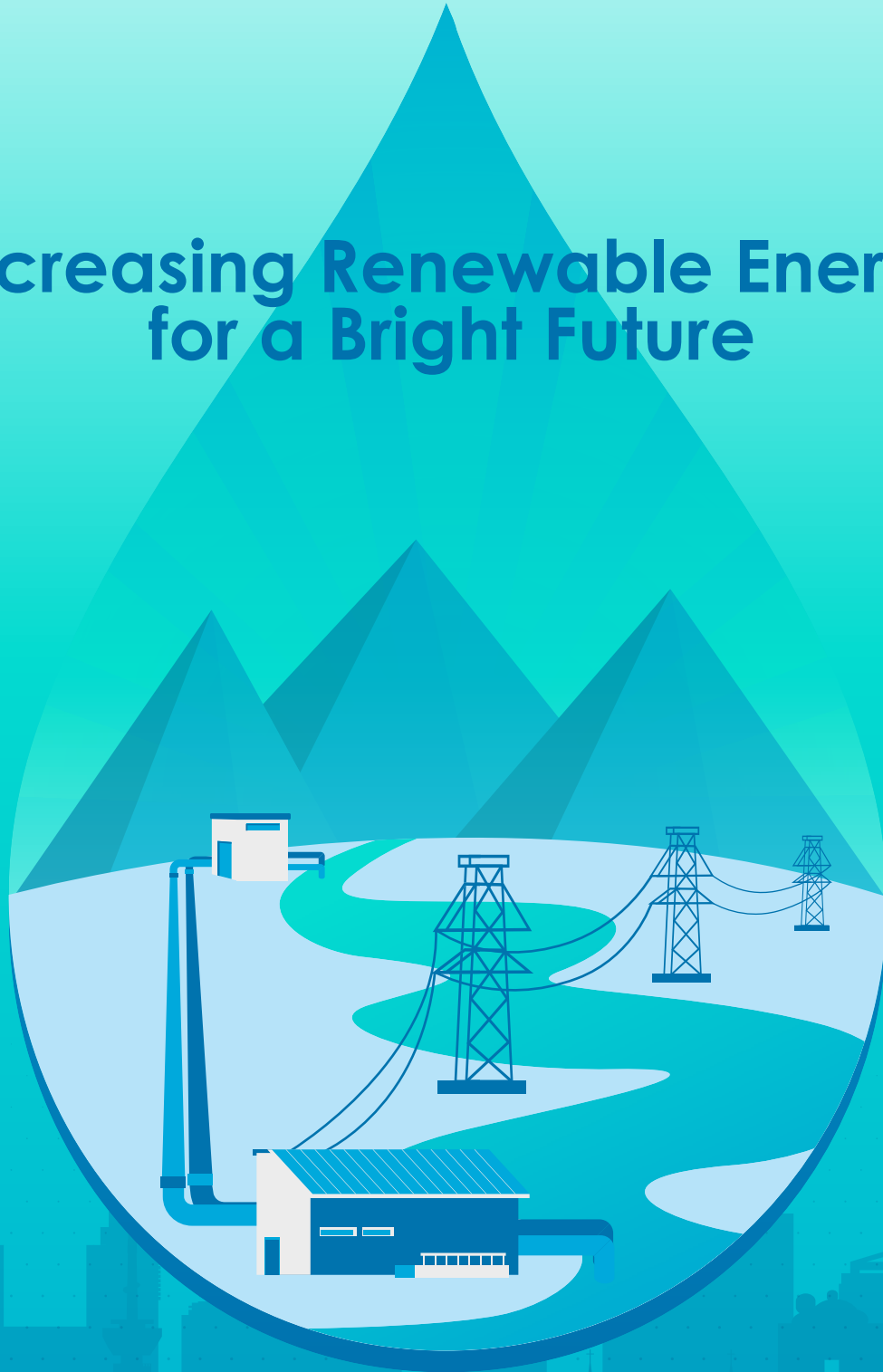




Increasing Renewable Energy for a Bright Future



LAPORAN TAHUNAN

2022

ANNUAL REPORT

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Disclaimer

Selamat datang di Laporan Tahunan dan Keberlanjutan PT Arkora Hydro Tbk. Laporan Tahunan dan Keberlanjutan ini memuat mengenai kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, dan Tata Kelola Perusahaan di sepanjang tahun 2022. Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan dan Keberlanjutan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perseroan. PT Arkora Hydro Tbk tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya, yang digunakan sebagai dasar pertimbangan asumsi tersebut akan membawa hasil-hasil tertentu di masa mendatang. Pada Laporan ini memuat kata “Arkora Hydro”, “Perseroan”, dan “Perusahaan” yang mengacu pada PT Arkora Hydro. Kata-kata ganti tersebut digunakan untuk memudahkan penyebutan.

Welcome to Annual Report and Sustainability Report of PT Arkora Hydro Tbk. This Annual Report and Sustainability Report contain financial conditions, operating results, projections, plans, strategies, policies, and Corporate Governance throughout 2022. The prospective statements in this Annual Report and Sustainability Report were prepared based on various assumptions regarding current and future conditions of the Company. PT Arkora Hydro Tbk does not guarantee that the valid documents used as the basis for such assumptions will bring the expected results. This report contains the words “Arkora Hydro”, and “the Company” which refer to PT Arkora Hydro to facilitate simple mentioning of the Company.

TENTANG LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEBERLANJUTAN

About The Annual Report And Sustainability Report

PT Arkora Hydro Tbk menerbitkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022. dan merupakan laporan ke-2 Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini menggunakan pedoman POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Laporan Keberlanjutan yang mengacu pada ketentuan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan. Pada Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun 2022 ini dilengkapi dengan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independen dan ditandatangani oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 40 tahun 2007.

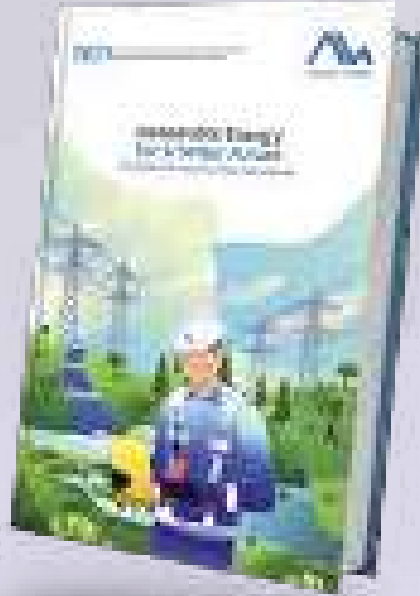
Berdasarkan peraturan yang berlaku, laporan ini disajikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris, dalam bentuk edisi cetak dan elektronik. Sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2022 ini dapat dilihat dan diunduh dari situs resmi Perusahaan di www.arkora-hydro.com.

PT Arkora Hydro Tbk publishes the Annual Report and Sustainability Report for the fiscal year ending December 31, 2022, making this the Company's second published report This Annual Report and Sustainability Report refer to the guidelines in POJK No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies and SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 concerning Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies, as well as the Sustainability Report which refers to POJK provisions No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Companies. The 2022 Annual Report and Sustainability Report are accompanied by the Company's Financial Statements which have been audited by independent auditors and signed by the Directors in accordance with the provisions of Law No. 40 of 2007.

In compliance with the prevailing regulations, this report is presented in Indonesian and English, in print and electronic editions. As a form of information disclosure to the public, the 2022 Annual Report and Sustainability Report can be viewed and downloaded from the Company's official website at www.arkora-hydro.com.

KESINAMBUNGAN TEMA 2022

Theme Continuity



2021

Renewable Energy for A Better Future

Energi Terbarukan Untuk Masa Depan Yang lebih baik

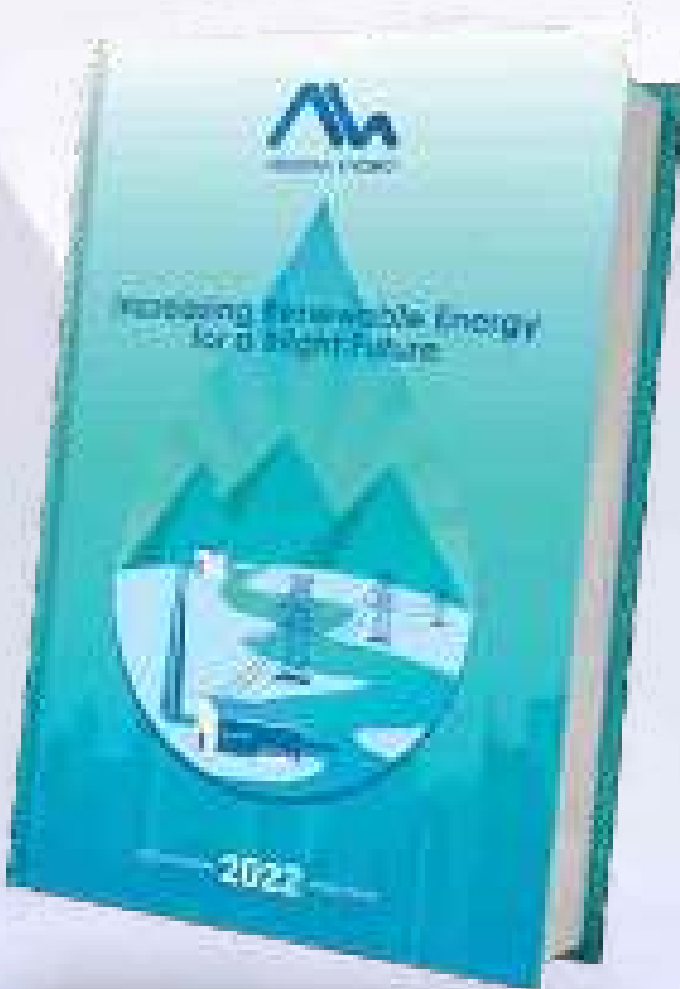
PT Arkora Hydro Tbk hadir dengan tujuan mempercepat perkembangan energi terbarukan di Indonesia melalui pembangunan PLTA aliran sungai langsung (*run-of-river*), terutama di daerah terpencil yang belum memiliki pasokan listrik. Penggunaan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) dipilih oleh Arkora Hydro dalam menjalankan operasional bisnisnya karena tidak dapat dipungkiri, manfaat EBT sangatlah penting untuk mewujudkan ketahanan energi di masa depan. Di samping itu, pemanfaatan EBT dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu mengurangi pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan jika dibandingkan dengan energi tak terbarukan. Artinya, EBT yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alami tidak akan habis jumlahnya dan dapat bersifat berkelanjutan apabila dikelola dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa EBT sebagai energi yang berkelanjutan (*sustainable energy*). Arkora Hydro sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik melalui sumber energi baru dan terbarukan (EBT) berkomitmen, bersama masyarakat membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pemanfaatan EBT.

PT Arkora Hydro Tbk is present with the aim of accelerating the development of renewable energy in Indonesia through the construction of run-of-river hydropower plants, especially in remote areas that are yet to have electricity supply. Arkora Hydro favors new and renewable energy (NRE) sources in carrying out its business operations as it is undeniable that the benefits of NRE are highly crucial to realize energy security in the future. Moreover, the use of NRE is considered more environmentally friendly as it can minimize environmental pollution and environmental damage when compared to non-renewable energy. This means that NRE is produced from energy resources that naturally will not run out in quantity and can be sustainable if managed properly. Therefore, it can be said that NRE is a sustainable energy. Arkora Hydro as a company engaged in power generation through new and renewable energy (NRE) sources is committed, together with the community, to building a better future for all Indonesian people through the use of NRE.

2022

Growing Strong to Realize Clean Energy for Indonesia

Tumbuh Tangguh Menghasilkan Energi Bersih untuk Indonesia



PT Arkora Hydro Tbk hadir tidak semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomi. Namun lebih dari itu, keberadaan Arkora Hydro harus dapat memberikan manfaat bagi seluruh kepentingan, terutama bagi masa depan Indonesia. Arkora Hydro melalui bidang usahanya, bertekad mendukung program Pemerintah menuju *Net Zero Emission* (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat, demi masa depan negeri ini./ PT Arkora Hydro Tbk does not only seek economic profit. Beyond the economic profit, Arkora Hydro shall provide benefits for all interests, particularly for the future of Indonesia. Through the business line, Arkora Hydro is determined to support the Government's program into Net Zero Emission (NZE) in 2060 or sooner, for the nation's future

Arkora Hdyro telah menargetkan pembangunan 13 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan total kapasitas mencapai 140,5 megawatt (MW). Dari 13 PLTA tersebut, yang telah beroperasi adalah PLTA Cikopo di Jawa Barat dan PLTA Tomasa di Sulawesi Tengah. Dengan produksi sebanyak 17,4 MW yang dijual ke PT PLN (Persero). Selain itu, 2 (dua) PLTA yang masih dalam tahap konstruksi, yaitu PTLA Yeantu di Sulawesi Tengah berkapasitas 10 MW dengan target *commissioning on date* (COD) atau beroperasi pada kuartal I-2023. Sedangkan PLTA Kukusan 2 di Lampung, Sumatra berkapasitas 5,4 MW ditargetkan beroperasi pada kuartal IV-2024. Kami akan berupaya untuk terus aktif mengembangkan potensi-potensi tenaga air agar dapat mengalirkan energi listrik kepada masyarakat, sekaligus mewujudkan energi bersih untuk Indonesia./ Arkora Hydro has targeted the construction of 13 Hydro Power Plant (HPP) with the total capacity of 140.5 megawatt (MW). The project costs approximately 1.8 million-2.2 million US Dollar per MW. Out of the 13 HPPs, the Cikopo HPP in West Java and Tomasa HPP in Central Sulawesi have been operating, generating 17.4 MW sold to PT PLN (Persero). Additionally, there are 2 (two) HPPs in construction, namely the Yeantu HPP in Central Sulawesi with the capacity of 10 MW, which is targeted to commisioning on date (COD) or operating in the 1st quarter of 2023. Meanwhile, the WKS-2 HPP in Lampung, Sumatra, with a capacity of 5.4 MW is targeted to operate in the 4th quarter of 2024. We will strive to actively develop the hydropower potentials to distribute electricity to the community, all while generating a clean energy for Indonesia

DAFTAR ISI

Table of Content

01

KILAS KINERJA 2022

2022 PERFORMANCE HIGHLIGHTS

Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Data Highlights	8
Grafik Ikhtisar Keuangan Chart of Financial Highlights	9
Ikhtisar Saham Share Highlights	10
Informasi Terkait Suspensi, Delisting, dan Relisting Saham Information on Suspension, Delisting, and Relisting of Shares	11
Informasi Terkait Aksi Korporasi Information on Corporate Action	11
Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi Information on Bonds, Sukuk, and/or Convertible Bonds	11
Peristiwa Penting 2021 Significant Events in 2021	12

02

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report	14
Laporan Direksi Board of Directors Report	26

03

PROFIL PERUSAHAAN

CORPORATE IDENTITY

Identitas Perusahaan Corporate Identity	38
Sekilas Tentang Arkora Hydro Arkora Hydro at A Glance	43
Jejak Langkah Milestones	39

Bidang Usaha Line of Business	44
Visi dan Misi Vision and Mission	46
Nilai-Nilai Budaya Perusahaan Corporate Cultural Values	47
Keanggotaan Asosiasi Industri Industry Association Membership	48
Struktur Organisasi Organizational Structure	48
Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	49
Profil Manajemen Management Profile	49
Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition	55
Informasi Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, atau Ventura Bersama Information on Subsidiaries, Associates, or Joint Ventures	59
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Professionals and Insitutions	65
Wilayah Operasional Operational Area	68
Sumber Daya Manusia Human Resources	71

04

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALIYSIS

Tinjauan Ekonomi Makro Macroeconomic Overview	76
Tinjauan Industri Industry Overview	76
Tinjauan Operasional Operational Overview	77
Tinjauan Per Segmen Operasi Overview Per Operating Segment	78
Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektabilitas Piutang Solvency and Collectability Rate	85
Rasio-Rasio Keuangan Perusahaan Company Financial Ratios	86
Struktur Modal Perusahaan Capital Structure	86
Ikatan Material untuk Investasi Barang dan Modal Material Commitments for Capital and Goods Investment	87
Realisasi Investasi Barang dan Modal Realization of Goods and Capital Investment	87

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan	88
Material Facts and Information Subsequent to Accountant Report Date	
Kebijakan Dividen	89
Dividend Policy	
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal	91
Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, Debt/Capital Restructuring	
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi	91
Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Restructuring	
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023	92
Comparison between Realized Performance with 2022 Targets and 2023 Projections	
Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan	92
Changes in the Laws and Regulations with Significant Effect	
Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Berpengaruh Signifikan	92
Changes in Accounting Policy that Significantly Impact the Company	
Aspek Pemasaran	94
Marketing Aspect	
Prospek Usaha	95
Business Prospect	

05

TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE IDENTITY

Tata Kelola Perusahaan	96
Good Corporate Governance	
Penerapan	97
Prinsip Tata Kelola di Perusahaan	
Implementation of Governance Principles In The Company	
Dasar Hukum	98
Penerapan Tata Kelola di Perusahaan	
Legal Basis for Implementing Corporate Governance	
Struktur Tata Kelola	99
Governance Structure	

Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham	101
Shareholders and General Meeting Of Shareholders	
Dewan Komisaris	115
Board of Commissioners	
Direksi	120
Board of Directors	
Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	126
Remuneration Policy of the Board of Commissioners and Board of Directors	
Pengungkapan Hubungan Afiliasi	127
Affiliation Disclosure	
Komite Audit	128
Audit Committee	
Komite Nominasi dan Remunerasi	133
Nomination and Remuneration Committee	
Sekretaris Perusahaan	137
Corporate Secretary	
Unit Audit Internal	159
Internal Audit Unit	
Sistem Pengendalian Internal	142
Internal Control System	
Akuntan Publik	143
Public Accountant	
Sistem Manajemen Risiko	143
Risk Management System	
Kode Etik	145
Code Of Conduct	
Perkara Penting	146
Legal Cases	
Sanksi Administratif	146
Administrative Sanctions	
Akses Informasi dan Data Perusahaan	146
Access to Company Information and Data	
Sistem Pelaporan Pelanggaran	148
Whistleblowing System	
Kebijakan Anti Korupsi dan Kebijakan Anti Gratifikasi	149
Anti-Corruption Policy and Anti-Gratification Policy	

06

LAPORAN KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY REPORT

Strategi Keberlanjutan	156
Sustainability Strategy	
Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan	157
Sustainability Aspect Performance Highlights	
Tata Kelola Keberlanjutan	158
Sustainable Governance	

Kinerja Keberlanjutan	160
Sustainability Performance	
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan	170
Responsibility On Sustainable Product/ Service Development	
Referensi Silang GRI Standard	175
Cross Reference GRI Standard	
Referensi SEOJK No. 16/ SEOJK.04/2021: Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik	172
SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Reference On Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies	
Lembar Umpan Balik	178
Feedback Form	
Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya	180
Response To Feedback On The Previous Year Report	
Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan dan Keberlanjutan 2021	181
PT Arkora Hydro Tbk	
The Board of Commissioners' and The Board of Directors' Statement of Responsibility for the 2021 Annual Report and Sustainability Report of PT Arkora Hydro Tbk	

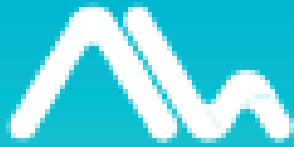
07

LAPORAN KEUANGAN

Financial Report

Halaman Ini Sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

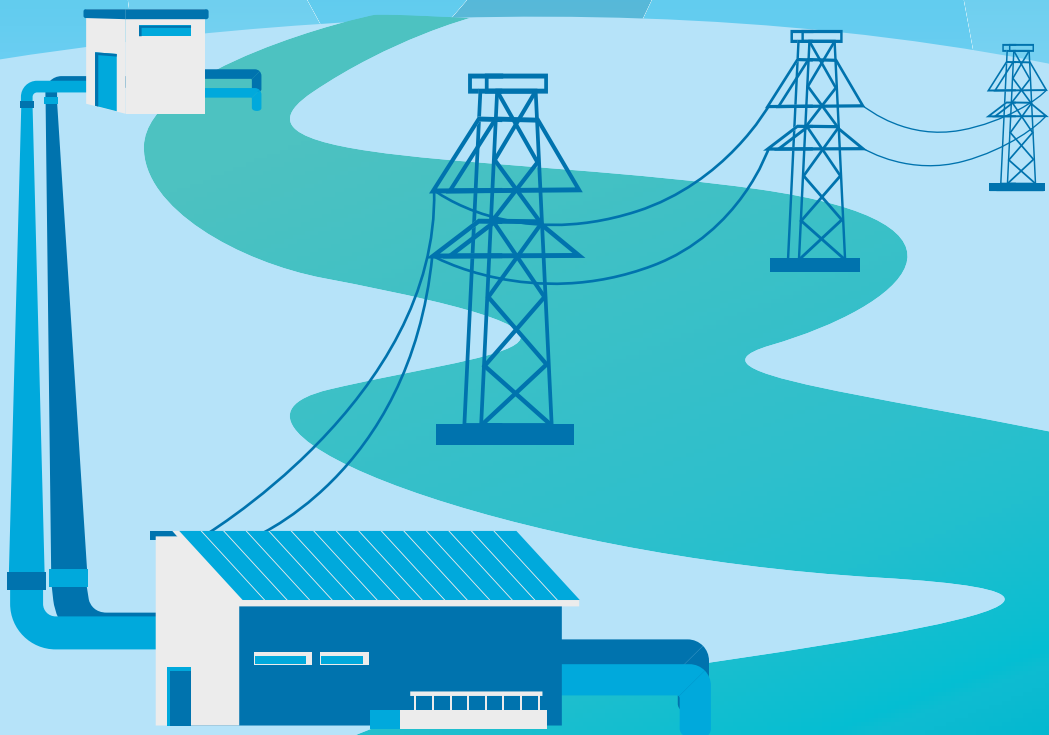


ARKORA HYDRO

KILAS KINERJA 2022

2022 PERFORMANCE HIGHLIGHTS

01



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Key Financial Highlights

LAPORAN LABA RUGI

Statements of Profit (LOSS)

Dalam ribuan Rupiah / in thousands of Rupiah

Uraian / Description	2022	2021	2020
Pendapatan / Revenues	247.884.493	198.393.420	52.094.112
Beban Pokok Pendapatan / Cost of Revenues	(120.765.053)	(89.276.247)	(22.944.234)
Laba Kotor / Gross Profit	127.119.440	109.117.174	29.149.878
Laba (Rugi) Sebelum Pajak / Profit (Loss) Before Tax	79.795.263	75.470.963	(25.834.511)
Manfaat (Beban) Pajak / Tax Benefit (Expenses)	(27.088.417)	(25.740.620)	2.872.939
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Net Profit (Loss) for the Year	52.706.846	49.730.343	(22.961.572)
Laba (rugi) yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk / Net Income (Loss) Attributable to Owners of the Company	52.660.421	48.959.115	(22.628.491)
Laba (rugi) yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali / Net Income (Loss) Attributable to Non-Controlling Interest	46.424	771.228	(333.080)
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Income (Loss) for the Year	52.739.990	50.310.798	(21.020.822)
Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk / Comprehensive Income (Loss) Attributable to Owners of the Company	52.712.222	49.488.547	(20.764.793)
Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali / Comprehensive Income (Loss) Attributable to Non-Controlling Interest	27.769	822.251	(256.030)
Laba (Rugi) Per Saham / Earnings (Loss) per Share	20	19	(8)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Statements of Financial Position

Dalam ribuan Rupiah / in thousands of Rupiah

Uraian / Description	2022	2021	2020
Aset Lancar / Current Assets	182.777.803	53.834.676	49.791.152
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	765.165.431	634.779.071	510.797.090
Jumlah Aset / Total Assets	947.943.234	688.613.747	560.588.242
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	160.822.461	167.047.861	18.123.235
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	387.109.581	350.540.265	421.750.185
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	547.932.042	517.588.126	439.873.420
Ekuitas / Equity	400.011.192	171.025.620	120.714.822

RASIO-RASIO KEUANGAN

Financial Ratios

Dalam ribuan Rupiah / in thousands of Rupiah

Uraian / Description	2022	2021	2020
Rasio Usaha / Business Ratio			
Gross Profit Margin	51,28%	55,00%	55,96%
Return on Asset	5,56%	7,22%	(4,10%)
Return on Equity	13,18%	29,08%	(19,02%)



Rasio Likuiditas / Liquidity Ratio			
Rasio Lancar / <i>Current Ratio</i>	113,7%	32,23%	274,74%
Rasio Solvabilitas / Solvency Ratio			
Liabilitas terhadap Aset / <i>Debt to Asset Ratio</i>	0,58x	0,75x	0,78x
Liabilitas terhadap Ekuitas / <i>Debt to Equity Ratio</i>	1,37xw	3,03x	3,64x

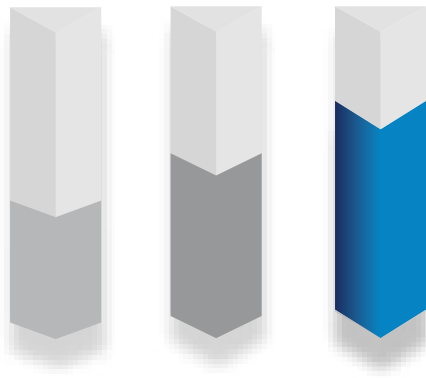
GRAFIK IKHTISAR KEUANGAN

Chart Of Financial Highlights

Jumlah Aset Total Assets

Dalam ribuan Rupiah / in thousands of Rupiah

560.588.242 688.613.747 947.943.234



2020

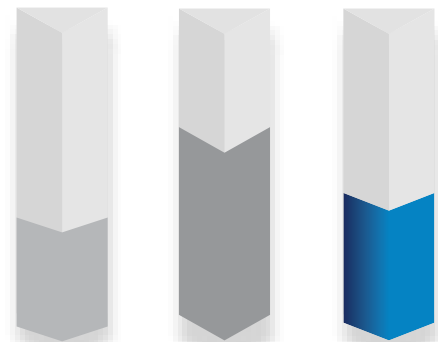
2021

2022

Laba Bersih Net Profit

Dalam ribuan Rupiah / in thousands of Rupiah

...



2020

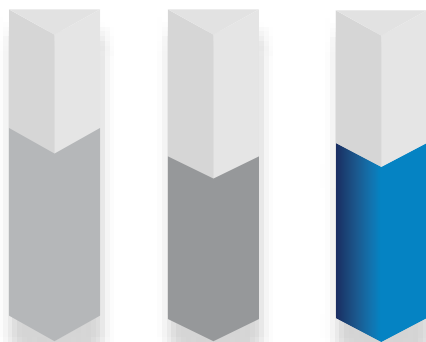
2021

2022

Jumlah Ekuitas Total Equities

Dalam ribuan Rupiah / in thousands of Rupiah

120.714.822 171.025.620 400.011.192



2020

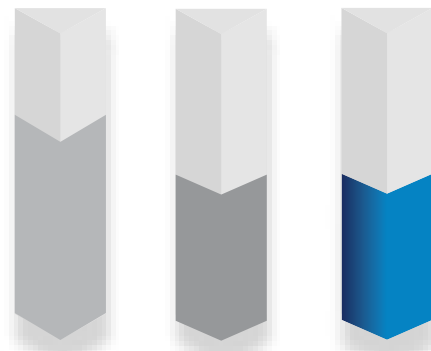
2021

2022

Pendapatan Revenues

Dalam ribuan Rupiah / in thousands of Rupiah

52.094.112 198.393.420 274.884.493



2020

2021

2022

IKHTISAR SAHAM

Share Highlights

Pada tanggal 8 Juli 2022, PT Arkora Hydro Tbk secara resmi mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX) dengan kode saham ARKO. Perseroan menawarkan sejumlah 579.900.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu) lembar saham baru pada penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO), atau setara dengan 20% enlarged capital, dengan harga penawaran Rp300,- per lembar saham. Hingga 31 Desember 2022, tidak terdapat penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal yang dilakukan Perseroan.

On July 8, 2022, PT Arkora Hydro Tbk officially listed its shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with the ticker code ARKO. The Company offered a total of 579,900,000 (five hundred seventy-nine million nine hundred thousand) new shares in an Initial Public Offering (IPO), or equivalent to 20% of enlarged capital, with an offering price of Rp300,- per share. As of December 31, 2022, there were no reverse stock, stock dividend, securities conversion, as well as additions and reductions of capital implemented by the Company.

Data kinerja saham Perseroan sejak tanggal 8 Juli 2022 hingga 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Data on the performance of the Company's shares from July 8, 2022 to December 31, 2022 can be seen in the following table:

Periode / Period	Harga Pembukaan (Rp/lembar saham) / Opening Price (Rp/share)	Harga Tertinggi (Rp/lembar saham) / Highest Price (Rp/share)	Harga Terendah (Rp/lembar saham) / Lowest Price (Rp/share)	Harga Penutupan (Rp/ lembar saham) / Closing Price (Rp/share)	Jumlah Saham Beredar (lembar saham) / Outstanding Shares	Volume Perdagangan (lembar saham) / Trade Volume (shares)	Kapitalisasi Pasar (miliar rupiah) / Market Capitalization (billion rupiah)
2022							
Kuartal III / 3rd Quarter	300	835	260	715	2.928.495	...	2.093.873.925
Kuartal IV / 4th Quarter	710	755	545	625	2.928.495	...	1.830.309.375

***) Terhitung mulai 8 Juni 2022. / From July 8, 2022**



KINERJA SAHAM 2022

2022 Share Performance



INFORMASI TERKAIT SUSPENSI, DELISTING, DAN RELISTING SAHAM

Hingga 31 Desember 2022, Arkora Hydro tidak pernah menerima sanksi apa pun termasuk sanksi yang memberi pengaruh secara signifikan terhadap aktivitas perdagangan saham di bursa efek mana pun.

AKSI KORPORASI DAN AKTIVITAS PERDAGANGAN SAHAM.

Pada tanggal 8 Juli 2022, PT Arkora Hydro Tbk secara resmi mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX) dengan kode saham ARKO. Selanjutnya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tidak terdapat aksi korporasi yang dilakukan Perseroan, meliputi pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, pembagian saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham.

INFORMASI OBLIGASI, SUKUK, DAN/ATAU OBLIW

Hingga 31 Desember 2022, Arkora Hydro tidak pernah menerbitkan obligasi, sukuk, dan obligasi konversi.

INFORMATION ON SUSPENSION, DELISTING, AND RELISTING OF SHARES

Until December 31, 2022, Arkora Hydro was not imposed to sanctions with significant influence on stock trading activities on any stock exchange.

CORPORATE ACTIONS AND STOCK TRADING ACTIVITIES

On July 8, 2022, PT Arkora Hydro Tbk officially listed its share in Indonesia Stock Exchange (BEI/IDX) with the code ARKO. Furthermore, the Company did not take any corporate actions until December 31, 2022, including stock split, share mergers, stock dividends, distribution of bonus shares, and changes in the par value of shares.

INFORMATION ON BONDS, SUKUK, AND/OR

As of December 31, 2022, Arkora Hydro has never issued any bonds, sukuk and convertible bonds.

PERISTIWA PENTING 2022

2022 Event Highlights



08 JULI 2022
JULY 8, 2022

**Melakukan
Initial Public Offering**
Conducted Initial Public Offering

24 MARET 2022
MARCH 24, 2022

**Power Purchase Agreement
(PPA) PT Arkora Energi Baru**



07 OKTOBER 2022
OCTOBER 7, 2022

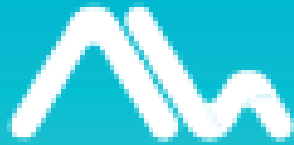
**Dimulainya konstruksi
pembangunan PLTA Kukusan 2**
Construction of PLTA Kukusan 2

12 NOVEMBER 2022
NOVEMBER 12, 2022

**Diundang sebagai salah satu narasumber
pada acara Launching of ESG Framework
and Manual : ESG Implementation for
Infrastructure Financing in Indonesia**

Invited as a speaker in Launching of ESG Framework and Manual: ESG Implementation for Infrastructure Financing in Indonesia



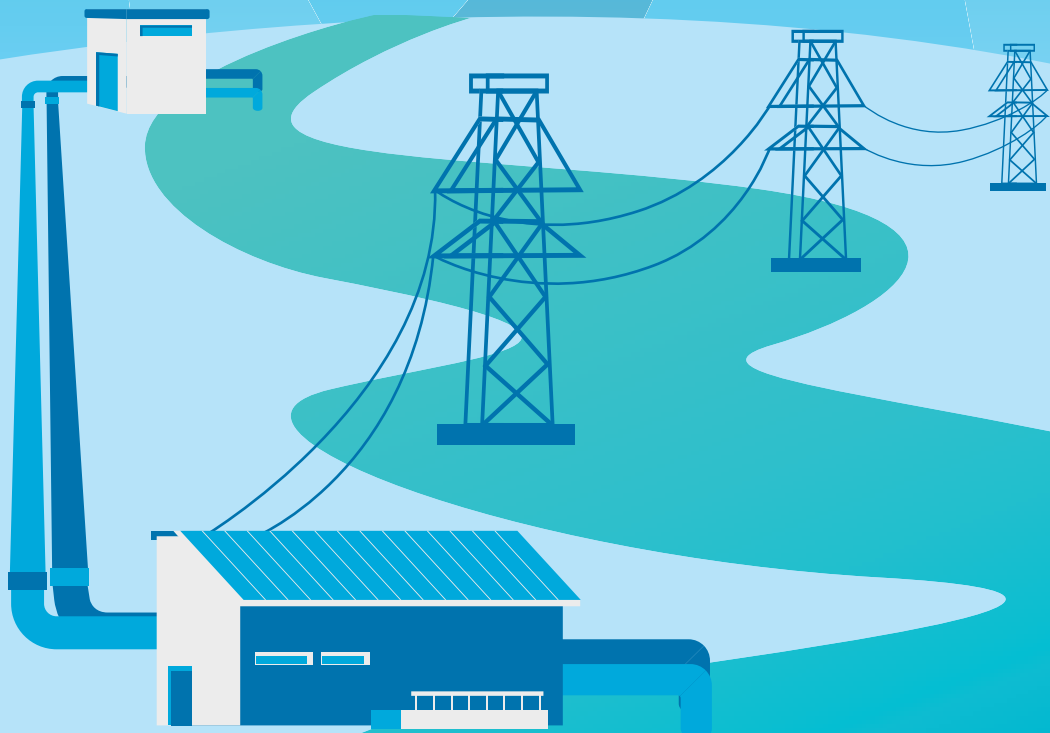


ARKORA HYDRE

LAPORAN MANAJEMEN

BROAD OF COMMISSIONERS REPORT

02





Di tahun 2022 Perseroan berhasil membukukan perolehan pendapatan usaha sebesar Rp247,88 miliar, naik 24,95% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp198,39 miliar. Apabila dibandingkan dengan target RKAP 2022 mengalami kenaikan sebesar 100,82%. / In 2022, the Company successfully recorded corporate revenue of Rp247.88 billion, an increase of 24.95% compared to Rp198.39 billion in 2021. When compared to the 2022 RKAP target, the Company experienced a 100.82% increase.

Arya Pradana Setiadharma

Komisaris Utama
President Commissioner





LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board Of Commissioners Report

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Honorable Shareholders and Stakeholders,

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, PT Arkora Hydro Tbk mampu menghadapi dinamika bisnis yang penuh tantangan, dengan mencatatkan kinerja yang positif. Kemampuan Perusahaan menerapkan strategi Perseroan membuahkan pencapaian kinerja keuangan dan operasional yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2022.

Kami juga mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena Perusahaan pada tanggal 8 Juli 2022 telah berhasil menggelar pencatatan (*listing*) perdana saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam perdagangan perdana di pasar sekunder, saham Arkora Hydro dibuka di Rp 300 atau sama dengan harga penawaran umum perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Dalam aksi korporasi tersebut, Arkora Hydro berhasil meraih dana segar dari pasar modal sebanyak Rp 182,67 miliar melalui penerbitan 608.895.000 saham baru. Pencapaian ini tentunya berkat kerja keras dan dedikasi dari seluruh insan Perusahaan.

Dalam perjalanan bisnis di sepanjang tahun buku 2022, Dewan Komisaris telah melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, bertanggung jawab, dan penuh kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara independen, dengan berpedoman pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Praise be to the Almighty God for His grace and blessings, PT Arkora Hydro Tbk managed to face the challenging business dynamic with a positive performance while recording a positive performance. The Company's capability in implementing strategy bears fruit as the Company reached financial and operational performance achievement as stipulated in the 2022 Corporate Work Plan and Budget (RKAP).

We would also like to express our gratitude to the Almighty God because on July 8, 2022, the Company has successfully held initial public offering on the Indonesia Stock Exchange (IDX). In the initial trading on the secondary market, Arkora Hydro's shares opened at Rp300 or the same as the initial public offering (IPO) price. In the corporate action, Arkora Hydro managed to obtained fresh funds from the capital market of Rp 182.67 billion through the issuance of 608,895,000 new shares. This achievement is without a doubt due to the hard work and dedication of all Company personnel.

During the business journey in the 2022 fiscal year, the Board of Commissioners has carried out their supervisory and advisory functions to the Board of Directors with good intentions, responsibility, and prudence for the Company's interests. In carrying out their duties, the Board of Commissioners supervised independently in accordance with the Article of Association, the prevailing laws and regulations, as well as the Good Corporate Governance principles.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada para Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan Perusahaan dalam menjalankan tugas pengawasan kepengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi, izinkan kami menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022.

SITUASI PEREKONOMIAN TAHUN 2022

Mengacu pada laporan *World Economic Outlook* (WEO) oleh International Monetary Fund (IMF) edisi Januari 2023, mencatat pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 mencapai 3,2% atau lebih rendah 2,7% dari tahun lalu. IMF mengingatkan bahwa perekonomian global di tahun 2022 dan 2023 mengalami sejumlah tantangan, di antaranya inflasi yang lebih tinggi, ketatnya kondisi keuangan di sebagian besar wilayah, perang Rusia ke Ukraina, dan pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Menyikapi situasi inflasi yang semakin tinggi, para pembuat kebijakan melakukan normalisasi moneter dan fiskal yang tidak pernah terjadi sebelumnya selama pandemi Covid-19 agar dapat menurunkan permintaan serta menjinakkan lonjakan inflasi.

Lebih lanjut, IMF memaparkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat mengalami kontraksi pada semester I/2022. Begitu pula pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa yang juga berkontraksi pada kuartal II/2022. Sementara itu, Cina masih terbelenggu kebijakan *zero covid policy* dan krisis di sektor properti. IMF memprediksi inflasi global akan terjadi peningkatan, dari 4,7% pada 2021 menjadi 8,8% pada tahun 2022. Kendati demikian, IMF memproyeksi tekanan inflasi akan turun menjadi 6,5% pada 2023 dan menuju 4,1% pada 2024.

Di tengah kondisi ekonomi dunia yang mengalami perlambatan, situasi ekonomi Indonesia menunjukkan penguatan. Berdasarkan Data Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 yang sebesar 5,4% *year on year* (yoy) di tahun 2022. Akselerasi pemulihan ekonomi di tahun 2022 terutama didorong oleh kasus pandemi Covid-19 yang lebih terkendali karena pemenuhan vaksinasi Covid-19 yang jauh lebih tinggi. Pemulihan ekonomi nasional dapat dilihat dengan terjadinya pemulihan di seluruh *leading sector*, di antaranya sektor

As a form of our responsibility to the Shareholders and stakeholders in carrying out the supervisory duties on the management of the Company conducted by the Board of Directors, please allow us to present the Annual Report for the 2022 fiscal year.

ECONOMIC SITUATION IN 2022

The January 2023 edition of *World Economic Outlook* (WEO) report by the International Monetary Fund (IMF) reports that the global economic growth in 2022 reached 3.2% or 2.7% lower than that of the previous year. IMF reminded that the global economics in 2022 and 2023 face many turbulences, among others are higher inflation, the tight financial condition in majority of countries, the Russia-Ukraine war, and the prolonged Covid-19 pandemic. In handling the increasing inflation, the policy makers implemented monetary and fiscal normalization, which never happened during the Covid-19 pandemic, to reduce demand and inflation spikes.

Furthermore, IMF explains that the United States of America's Gross Domestic Product (GDP) experienced a contraction during the first semester of 2022. The economic growth in Europe areas experienced contraction in the second quarter of 2022. Meanwhile, China is still bound to the zero covid policy and crisis in the property sector. IMF predicts the global inflation will see an increase, from 4.7% in 2021 to 8.8% in 2022. Nevertheless, the IMF projects inflationary pressure will climb down to 6.5% in 2023 and decrease to 4.1% in 2024.

Amid the slowing global economic condition, Indonesia's economic situation shows signs of strengthening. According to the data from Statistics Indonesia (BPS), Indonesia experiences 5.4% year on year (yoy) economic growth in 2022. The acceleration of economic recovery in 2022 is particularly motivated by the more controllable Covid-19 cases due to high vaccination rate. The national economic recovery can be seen from all leading sector recovery, among which are the industrial, mining, agricultural, trade, and construction sectors. Additionally, the economics of Indonesia's trade



industri, pertambangan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Di samping itu, perekonomian negara-negara mitra dagang Indonesia juga mengalami pemulihan, yang pada akhirnya hal ini berdampak terhadap peningkatan ekonomi di dalam negeri.

Dari kinerja APBN hingga kuartal III tahun 2022, penguatan ekonomi Indonesia didukung oleh neraca perdagangan, konsumsi rumah tangga, dan investasi sebagai penopang utama. Selain itu, penerimaan negara juga masih menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa pemulihan ekonomi nasional masih dapat terjaga. Meski perekonomian nasional menunjukkan tren pemulihan, tetap harus dilakukan penguatan koordinasi. Hal ini untuk mewaspadaikan perkembangan risiko perekonomian global, termasuk menyiapkan respons kebijakan.

Terjadinya pemulihan ekonomi dalam negeri juga didukung oleh respons kebijakan ekonomi yang tepat melalui kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif, terukur dan efektif, serta efektivitas implementasi agenda reformasi struktural baik implementasi UU Cipta Kerja dan UU perpajakan. Dukungan upaya Pemerintah dalam menjaga stabilitas harga-harga, terutama pangan dan energi, serta penciptaan lapangan kerja secara signifikan, kesiapan bertransformasi digital dan inovasi untuk masa depan rupanya juga mampu memberikan kontribusi bagi pemulihan ekonomi Indonesia.

Sementara itu terkait pertumbuhan pembangkit listrik Energi Terbarukan (EBT), menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diproyeksikan pada tahun 2022 EBT tidak dapat mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Hal ini disebabkan implementasi EBT di Tanah Air memiliki banyak tantangan, sehingga berdampak terhadap realisasi pengadaan pembangkit EBT. Adapun target bauran energi hingga 2022 hanya 15,07%. Pada bulan Mei 2022, pengadaan pembangkit EBT baru mencapai 66 Megawatt (MW) dari target 647,8 MW di 2022. Sementara hingga akhir 2021 disimpulkan bahwa realisasi pengadaan EBT baru mencapai 12,16%, sehingga diproyeksi tidak akan mencapai target. Apabila tahun 2022 ingin mencapai target, pertumbuhan bauran energi yang harus dikejar ialah sebesar 3%.

partner countries are beginning to recover, which eventually leads to the improvement of domestic economy.

From the state budget performance as of the third quarter of 2022, Indonesia's economic recovery were supported by the balance of trade, household consumption, and investments as its main pillars. In addition, the state revenue continued to demonstrate high growth. This proves that the national economic recovery can still be maintained. Even though the national economy shows a trend of recovery, coordination still needs to be strengthened to keep an eye on developments in global economic risks, including preparing policy responses.

The occurrence of domestic economic recovery was also supported by the precise economic policy response through accommodative, measured, and effective fiscal and monetary policy, as well as the effectiveness of structural reformation agenda implementation, be it the implementation of the Jobs Creation Law and the Tax Law. The Government support in maintaining price stability, especially in the food and energy sector, along with the significant jobs creation, preparedness to transform digitally and innovate for the future also contributed to Indonesia's economic recovery.

Related to the New and Renewable Energy (NRE) growth, the Ministry of Energy and Mineral Resources projected that NRE cannot achieve the target determined by National Energy General Plan (RUEN) in 2022. This was due to the many challenges in implementing NRE in Indonesia, therefore impacting the realization of NRE power plants procurement. The energy mix target as of 2022 was only 15.07%. In May 2022, the procurement of new EBT plants reached 66 Megawatts (MW) of the target of 647.8 MW. Meanwhile, until the end of 2021 it was concluded that the realization of EBT procurement had only reached 12.16%, so it was projected that it would not reach the target. If the target was to be achieved in 2022, the energy mix growth that must be reached is 3%.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI

Secara umum, kinerja keuangan Perusahaan tahun 2022 dapat terjaga dengan baik. Hal ini terlihat dari upaya Perusahaan yang dapat mencapai hampir semua target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Perseroan berhasil membukukan perolehan pendapatan usaha sebesar Rp247,88 miliar, naik 24,95% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp198,39 miliar. Apabila dibandingkan dengan target RKAP 2022 mengalami kenaikan sebesar 100,82%. Peningkatan tersebut mendorong peningkatan laba bersih Perseroan yang mencapai 52,71 miliar atau naik 5,99% dibandingkan dengan tahun 2021, dan telah memenuhi 93,20% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan dari kinerja produksi PT Arkora Hydro, Tbk di tahun 2022 telah berhasil mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan total produksi sebesar 353.051 MWh.

Atas seluruh pencapaian tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam mengelola Perusahaan di tahun buku 2022. Dewan Komisaris berharap, capaian yang diraih di tahun buku 2022 tersebut dapat memotivasi Direksi dan seluruh insan Perusahaan untuk dapat mempertahankan kinerjanya demi keberlangsungan Perseroan di masa mendatang.

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kinerja keuangan dan operasional Perusahaan. Selanjutnya, nasihat dan masukan yang dipaparkan oleh Dewan Komisaris dijadikan acuan bagi Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perusahaan. Untuk meningkatkan kualitas pemberian nasihat, Dewan Komisaris senantiasa mengikuti sejumlah isu penting yang meliputi bidang ekonomi, lingkungan, sosial serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap aktivitas bisnis yang dilakukan Perseroan.

Di samping itu, Dewan Komisaris juga telah melaksanakan penilaian terhadap kinerja Direksi di sepanjang 2022, yang juga merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab pada fungsi pengawasan. Mengacu pada hasil penilaian

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

Generally, the Company's financial performance was well-maintained as seen from the Company's efforts in being able to reach almost all the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) targets. The Company managed to record operating revenues of Rp247.88 billion, a 24.95% uprise compared to 2021, which amounted to Rp198.39 billion. When compared to the 2022 RKAP target, it has climbed up by 100.82%. This increase led to an increase in the Company's net profit which reached Rp52.71 billion or a 5.99% increase compared to 2021 and has fulfilled 93,20% of the determined target. Meanwhile, in terms of production performance in 2022, PT Arkora Hydro successfully managed hydro power plant (HPP) with total production of 353.051 MWh.

For all of these achievements, the Board of Commissioners evaluated that the Board of Directors has properly carried out their duties and responsibilities in managing the Company in the 2022 fiscal year. The Board of Commissioners hope that the 2022 achievements are able to motivate the Board of Directors and all personnel of the Company to maintain this good performance for the Company's continuity in the future.

The Board of Commissioners has carried out their supervisory and advisory functions toward the financial and operational performance throughout 2022. Moreover, the advice and input presented by the Board of Commissioners were used as references for the Board of Directors in managing the Company. To enhance the quality of the advisory, the Board of Commissioners always keep themselves updated with important issues covering the economy, environmental, social sectors, and development of laws and regulations that may have an impact to the Company's business activities.

Additionally, the Board of Commissioners has also carried out an assessment of the Board of Directors' performance throughout 2022, which is a part of their responsibility in the supervisory functions. Referring to this assessment result, the



tersebut, secara umum Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi dan jajaran terkait telah melakukan pengelolaan Perusahaan di tahun 2022 dengan baik.

Dewan Komisaris juga melakukan penilaian terhadap komite-komite di bawah Dewan Komisaris, yakni Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Risiko Bisnis. Dari penilaian tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menunjukkan kinerja yang memuaskan di sepanjang tahun 2022. Hal ini tercermin dari kinerja komite-komite yang telah sesuai dengan Piagam Komite. Selain itu, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Risiko Bisnis dinilai selalu memberikan respons secara cepat dan tepat kepada Dewan Komisaris, melalui rapat-rapat yang dilakukan. Di tahun 2022 Komite Audit telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat. Sementara Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali rapat. Sedangkan Komite Risiko Bisnis hingga tahun ini belum terbentuk, sehingga fungsinya dijalankan oleh Direktur.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI YANG DIJALANKAN DIREKSI

Salah satu tugas pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan strategi yang dijalankan Direksi. Dalam proses perumusan strategi yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris memberikan arahan dan masukan agar strategi dan kebijakan sejalan dengan perkembangan usaha dan Perusahaan yang terjadi di tahun 2022. Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab terhadap implementasi rencana strategi tersebut.

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di sepanjang tahun 2022 Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan seluruh jajaran terkait. Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan, Dewan Komisaris menilai bahwa PT Arkora Hydro Tbk telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan pendapatan dan layanan Perusahaan, sehingga dapat memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan.

Board of Commissioners assessed that overall, the Board of Directors and other related ranks has managed the Company well in 2022.

The Board of Commissioners has also conducted assessment on committees under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Business Risk Committee. Based on the assessment, the Board of Commissioners assessed that the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Business Risk Committee have performed satisfactorily throughout 2022. This is reflected in the committees' performance in accordance with the Committee Charter. Moreover, the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Business Risk Committee are considered to always response precisely and quickly through the implemented meetings. In 2022, the Audit Committee held 1 (one) meeting, whereas the Nomination and Remuneration Committee held 1 (one) meetings. Meanwhile as of this year, the Business Risk Committee has not been established, thus its functions are carried out by the Directors.

SUPERVISION OF THE BOARD OF DIRECTORS STRATEGY IMPLEMENTATION

One of the supervisory duties carried out by the Board of Commissioners is monitoring the Board of Directors' strategy implementation. In the formulation process of the strategy implemented by the Board of Directors, the Board of Commissioners gives directions and inputs so that the strategies and policies in line with the business and the Company's development in 2022. The Board of Commissioners are also responsible for the strategy plan implementation.

In accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, throughout 2022, the Board of Commissioners has carried out supervisory on the Company's strategy implementation, which was implemented by the Board of Directors and all related ranks. Based on the supervision, the Board of Commissioners saw that PT Arkora Hydro Tbk has carried out several efforts to increase income and enhance the Company's services, so that it may fulfil all stakeholders' expectations.

Di sepanjang tahun 2022, Perusahaan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam rangka mendorong pertumbuhan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, di antaranya:

1. Menjalin relasi dengan baik kepada pelanggan utama Perseroan.
2. Memilah jasa-jasa profesional pendukung proyek pembangkit listrik Perseroan yang kompeten dan berpengalaman.
3. cMemperoleh pendanaan yang kompetitif serta meminimalisir risiko keuangan selama pengerjaan proyek.
4. Sumber daya keuangan merupakan aspek yang cukup krusial dalam proyek pembangkit listrik Perseroan.
5. Melakukan ekspansi dan diversifikasi usaha.

MEKANISME FREKUENSI PEMBERIAN NASIHAT

Dewan Komisaris selalu menerapkan hubungan kerja yang sangat harmonis dengan Direksi, dengan mengedepankan prinsip saling menghormati wewenang masing-masing pihak. Hal ini dilakukan karena terdapat masing-masing pihak, baik Dewan Komisaris dan Direksi memiliki batasan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasan terhadap implementasi strategi yang disusun oleh Direksi dengan baik. Selain itu, Dewan Komisaris selalu memberikan arahan, saran, dan rekomendasi yang solutif kepada Direksi melalui forum formal maupun informal yang diselenggarakan secara rutin.

Kebijakan pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan juga dimanfaatkan oleh Dewan Komisaris secara baik dalam rangka pemberian nasihat dan evaluasi terhadap perkembangan dan kinerja operasi Perusahaan, serta kondisi keuangan Perusahaan. Pada tahun 2022 rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali, dengan tingkat kehadiran Dewan Komisaris secara keseluruhan adalah 100%.

Selain melakukan rapat gabungan dengan Direksi, Dewan Komisaris juga melakukan rapat-rapat dengan komite-komite di bawah Dewan Komisaris, yakni Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Risiko Bisnis guna membahas tanggung jawab masing-masing.

Throughout 2022, the Company has implemented a few strategic steps to encourage the sustainable growth based on the Good Corporate Governance principles, among others are:

1. Maintaining good and harmonious relationship with the Company's main customer.
2. Sorting the competent and experienced professional services which support the Company's power generation projects.
3. Gathering competitive funding as well as minimizing financial risks throughout the project.
4. Financial resources are quite a crucial aspect of the Company's power plant projects.
5. Expansion and diversification of business.

ADVISORY MECHANISM AND FREQUENCY

The Board of Commissioners always maintains a harmonious work relationship with the Board of Directors by prioritizing the principle of respecting each other's authorities. This is conducted as both the Board of Commissioners and the Board of Directors have their own limitations in their responsibilities. The Board of Commissioners carried out their supervisory duties toward the strategy implementation carefully designed by the Board of Directors. Additionally, the Board of Commissioners always gives solutional directions, suggestions, and recommendations for the Board of Directors through both formal and informal forum which is held periodically.

The joint meeting of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors policy is well-utilized by the Board of Commissioners in providing advice and evaluation of the Company's development, operations performance, and financial condition. In 2022, the Board of Commissioners and Board of Directors held 2 (two) joint meetings with 100% overall attendance level of the Board of Commissioners.

In addition to the joint meeting with Board of Directors, the Board of Commissioners also held meetings with committees under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, as well as the Business Risk Committee to discuss each of the Committee's responsibilities.



PENERAPAN GCG DAN PENGELOLAAN TJSL

Dalam menjalankan usahanya, PT Arkora Hydro Tbk senantiasa menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Perusahaan senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris menyadari bahwa penerapan *best practices Good Corporate Governance* (GCG) dapat membantu Perusahaan memberikan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan sekaligus mewujudkan cita-citanya.

Di sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris menilai bahwa Perusahaan telah menerapkan praktik GCG secara efektif, efisien, dan menyeluruh. Dewan Komisaris mendorong Direksi agar selalu mengupayakan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG dengan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang, sehingga aspek dari tata kelola, manajemen risiko, maupun pemenuhan kepatuhan bisa terpenuhi secara menyeluruh dan lebih optimal.

Dalam hal pengelolaan SDM, Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan keterampilan SDM melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan. Di tahun 2022, Perusahaan memberikan pelatihan pada pengembangan kapasitas pekerja sebanyak 1 (satu) kali. Ke depannya, Perusahaan akan terus meningkatkan upayanya untuk menyelenggarakan pelatihan pengembangan kompetensi kepada para karyawan.

Untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, Perseroan juga memberikan dampak positif untuk lingkungan dan sosial dengan konsisten melakukan program Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara konsisten setiap tahun. Di tahun 2022, Perusahaan telah mengeluarkan biaya TJSL sebesar Rp42.2450.000. Sejumlah kegiatan TJSL bidang kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh Perseroan di tahun 2022, antara lain:

1. Melakukan renovasi pembangunan dinding pagar pembatas SDN 2 Panawa, Garut, Jawa Barat.
2. Memberikan bantuan hewan kurban sebanyak 11 ekor kambing.

GCG IMPLEMENTATION AND SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY MANAGEMENT

In carrying out the business, PT Arkora Hydro Tbk consistently adheres to the prevailing laws and regulations. Henceforth, the Company continuously upholds the Good Corporate Governance (GCG) principles and the applicable laws and regulations. The Board of Commissioners is aware that implementing best practices Good Corporate Governance (GCG) may help the Company provide added value for all stakeholders while simultaneously realizing its objectives.

Throughout 2022, the Board of Commissioners assessed that the Company has effectively, efficiently, and thoroughly practiced GCG. The Board of Commissioners encouraged the Board of Directors to always strive to sustainably improve the quality of GCG implementation in the coming years, so that the governance aspects, risk management, and compliance fulfilment can be conducted thoroughly and optimally.

In terms of HR management, the Company is committed to improving the skills of its human resources by organizing various training courses. In 2022, the Company conducted 1 (one) HR development trainings. The Company will continuously improve efforts in organizing trainings and competency developments for the employees.

To maintain a harmonious relationship with all stakeholders, the Company consistently contributes positive environmental and social impacts by organizing Social and Environmental Responsibility activities annually. In 2022, the Company incurred Rp42,245,000 for CSR. Several CSR activities in the community sectors organized by the Company in 2022 are as follows:

1. Renovating and building the walls and fences of SDN 2 Panawa in Garut, West Java.
2. Donating 11 goats for Qurban.

Melalui upaya ini, Perseroan berharap dapat terus memberikan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris akan senantiasa mendukung pelaksanaan pemenuhan komitmen ini dengan mengawasi penyelenggaraan program dan pemberian masukan.

PANDANGAN TERHADAP PROSPEK USAHA PERUSAHAAN 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79/2014 dan Peraturan Presiden No. 22/2017 menetapkan bahwa di tahun 2025 Indonesia harus mencapai bauran energi terbarukan sebesar 23% dari energi primer. Mengacu pada peraturan tersebut, PT Arkora Hydro Tbk optimis tahun 2023 Perusahaan dapat meraih pertumbuhan yang lebih berkualitas dibandingkan tahun 2022.

Optimisme Perusahaan didukung oleh kondisi Indonesia sebagai negara yang dialiri ratusan sungai yang memiliki potensi tersembunyi yang tersebar di seluruh Nusantara. Potensi tersebut, yaitu adanya debit aliran sungai sebagai sumber energi baru terbarukan (EBT) yang bermanfaat bagi generasi mendatang seiring dengan terus tumbuhnya permintaan listrik nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut potensi sumber energi dari air di tahun 2021 mencapai 75.000 Mega Watts, sementara pemanfaatannya masih kurang dari 10%. Kondisi ini tentu menjadi peluang yang menjanjikan bagi Arkora Hydro yang bidang usahanya bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan yang berasal dari aliran air atau Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Hingga kini Perusahaan terus aktif mencari proyek hidro berpotensi besar di atas 25 MW. Khusus untuk site-site dengan kapasitas di atas 25 mega watt (MW), saat ini ada beberapa lokasi yang sedang dipelajari secara mendalam oleh Perusahaan untuk dapat dikembangkan dan dibangun dalam waktu dekat. Proyek-proyek tersebut berkapasitas di atas 30 MW per project. Selain proyek berkapasitas di atas 25 MW, Arkora Hydro sudah memiliki proyek mini hydro dengan kapasitas 5 MW-10 MW dengan total 50 MW yang sudah di dalam DPT PLN.

Through these efforts, the Company hopes to continue providing added values for all stakeholders. Therefore, the Board of Commissioners will always support the implementation of commitment fulfilment by monitoring the program implementation and giving input.

VIEWS ON THE COMPANY'S BUSINESS PROSPECT IN 2023

Government Regulation (PP) No. 79/2014 and Presidential Regulation No. 22/2017 stipulates that in 2025, Indonesia should reach renewable energy mix at 23% of primary energy. Referring to the regulations, PT Arkora Hydro Tbk is optimistic that in 2023, the Company will achieve quality growth compared to 2022.

The Company's optimism is supported by Indonesian's condition as a country which has hundreds of rivers with hidden potentials all over the Archipelago. With the aforementioned potentials, the river discharge as the new renewable energy (NRE) will prove as beneficial as the national electricity demand gradually increases.

The Ministry of Energy and Mineral Resources stated that the water-sourced energy in 2021 reaches 75,000 MW, while the utilization of the source is still under 10%. This condition certainly becomes an opportunity for Arkora Hydro in its business line as a new and renewable energy power plant from water, or hydro-powered plants.

To date, the Company actively finds high potential hydro projects above 25 MW. There are several locations where the Company currently conducts in-depth studies to be developed soon, for sites with capacities above 25 MW. These projects have capacities above 30 MW per project. In addition to the projects with capacities above 25 MW, Arkora Hydro already has mini-hydro projects with 5 MW-10 MW capacities and a total of 50 MW from DPT PLN.



Dewan Komisaris meyakini, Perusahaan mampu mencapai target yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan strategi-strategi inovatif yang dilakukan oleh Perusahaan. Terlebih Pemerintah juga mendukung upaya Indonesia menuju energi baru dan terbarukan berbasis teknologi hijau. Peluang emas ini akan dimanfaatkan secara serius oleh Perusahaan di masa sekarang maupun di masa mendatang. Dengan demikian Perusahaan tidak hanya dapat terus meraih pertumbuhan berkualitas dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan bisnisnya, namun juga bisa memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

PANDANGAN TERHADAP IMPLEMENTASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Implementasi *Whistleblowing System* (WBS) atau sistem pelaporan pelanggaran dinilai dapat menciptakan kondisi kerja yang terbuka, jujur, dan bertanggung jawab di lingkungan Perusahaan. Melalui penerapan WBS yang menyeluruh, dapat mendeteksi terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam operasional bisnis Perseroan yang berpotensi merugikan Perusahaan.

Keberadaan WBS sangat penting demi keberlanjutan bisnis Perseroan. Oleh sebab itu, Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi untuk selalu melakukan fungsi kontrol dalam Perusahaan dengan mengembangkan WBS. Dewan Komisaris juga mendorong seluruh insan Perusahaan untuk selalu melaporkan setiap pelanggaran atau indikasi *fraud* yang ditemukan di lingkungan Perusahaan.

Perusahaan senantiasa menjalankan WBS dengan bijaksana dan adil. Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan sistem pelaporan pelanggaran telah berjalan baik. Hal ini tercermin dengan tidak adanya laporan pengaduan yang ditemukan Perusahaan di tahun 2022.

Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi dan seluruh insan Perusahaan yang mematuhi setiap peraturan yang berlaku. Untuk mengoptimalkan implementasi WBS, Dewan Komisaris senantiasa mendukung peningkatan kualitas penerapan WBS dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.

The Board of Commissioners believes that the Company is capable of reaching the set targets through innovative strategies, especially with the Government's support in effort to lead Indonesia into green technology-based new and renewable energy. The Company seizes this golden opportunity to be utilized earnestly both in the present and in the future. Therefore, not only the Company will be able to continuously achieve quality growth and be capable in developing the business, but is also able to provide benefits for all stakeholders.

VIEWS ON THE WHISTLEBLOWING SYSTEM IMPLEMENTATION

Whistleblowing System (WBS) implementation is considered to have the capacity to create open, honest, and responsible work conditions in the Company's environment. Through a thorough WBS, the Company can detect violations and fraud within the Company's business operations that have the potential to harm the Company.

The existence of WBS is essential for the Company's business sustainability. Therefore, the Board of Commissioners continuously encourages the Board of Directors to carry out their control functions in the Company by developing WBS. The Board of Commissioners also encourages every personnel in the Company to report any violations or fraud indications found in the Company's environment.

The Company always carries out the WBS wisely and fairly. The Board of Commissioners sees the WBS implementation has been well-conducted. This is reflected in the absence of complaint reports found by the Company in 2022.

The Board of Commissioners appreciates the performance of the Board of Directors and all Company's personnel in complying with the prevailing regulations. To optimize WBS implementation, the Board of Commissioners always supports the WBS quality enhancement in realizing a clean and full of integrity workplace.

INFORMASI PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2022, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 22 September 2022 Berikut komposisi dari Dewan Komisaris per 31 Desember 2022:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan
Arya Pradana Setiadharma	Komisaris Utama / President Commissioner	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 Dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years
Abhay Narayan Pande	Komisaris / Commissioner	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 Dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years
Iwan Hadiangoro	Komisaris / Commissioner	Akta No. 84 tanggal 22 September 2022 / Deed No. 84 dated September 22, 2022	5 tahun / 5 years
Drs. Indarto S.H	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 Dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years
Nicko Widjaja	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Akta No. 84 tanggal 22 September 2022 / Deed No. 84 dated September 22, 2022	5 tahun / 5 years

APRESIASI KAMI

Dewan Komisaris mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Direksi, seluruh insan PT Arkora Hydro, dan juga para pemegang saham, mitra kerja, konsumen, serta pemangku kepentingan yang telah memberikan kepercayaan dan dukungannya demi keberlangsungan usaha Perseroan. Dewan Komisaris berharap kerja sama dan kepercayaan yang telah terjalin selama ini dapat terus terawat dengan baik sehingga dapat menciptakan nilai prositif dan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

INFORMATION ON CHANGES IN THE BOARD OF THE COMMISSIONERS COMPOSITION

Throughout 2022, there were changes in the Board of the Commissioners' composition in accordance with the General Meeting of the Shareholders Resolution dated September 22, 2022 The Board of Commissioners' composition as of December 31, 2022:

OUR APPRECIATION

The Board of Commissioners would like to express our gratitude to the Board of Directors, all personnel of PT Arkora Hydro, and also the shareholders, partners, customers, and all stakeholders who have put their trust and support for the sake of the Company's business continuity. The Board of Commissioners hopes that the collaboration and trust that have been build may prosper so that it may create positive value and better performance in the future.

Jakarta, 13 Maret 2023 / Jakarta, March 13, 2023
Atas Nama Jajaran Komisaris PT Arkora Hydro Tbk /
On behalf of the Board of Commissioners of PT Arkora Hydro Tbk,

Arya Pradana Setiadharma
Komisaris Utama / President Commissioner



Halaman Ini Sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank



Perseroan berhasil mencapai Rp52,70 miliar atau naik 5,99% dibandingkan dengan tahun 2021, dan telah memenuhi 93,20% dari target yang telah ditetapkan / The Company successfully achieved Rp52.70 billion, or a 5.99% increase compared to 2021, and has accomplished 93.20% of the set target.

Aldo Henry Artoko

Direktur Utama
President Director





LAPORAN DIREKSI

Board Of Director Report

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dear Shareholders and Stakeholders,

Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa sehingga Perseroan dapat meraih pertumbuhan yang berkualitas di tengah situasi ekonomi yang masih menunjukkan ketidakpastian. Bagi Perusahaan, tahun 2022 merupakan momentum pertumbuhan. Hal ini dapat dilihat keberhasilan Perusahaan yang mencatatkan laba bersih yang melonjak 58% pada kuartal pertama 2022.

Pencapaian yang membanggakan tersebut diraih berkat komitmen seluruh insan Perusahaan yang berupaya memberikan kinerja terbaiknya. Kami mengapresiasi seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perseroan yang telah bekerja keras dan menunjukkan loyalitasnya sehingga Perusahaan mampu meraih pencapaian kinerja yang berkualitas.

Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan kinerja PT Arkora Hydro Tbk untuk tahun buku 2022, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan pengelolaan Perusahaan di sepanjang tahun 2022.

PEMULIHAN PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL

Perekonomian dunia di tahun 2022 masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, bahkan diproyeksikan akan menurun di tahun 2023. Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dan konflik geopolitik dunia, memberi dampak yang luas terhadap aspek ekonomi, kemanusiaan, dan keuangan, sehingga menimbulkan resesi di berbagai negara dan ketidakpastian pasar keuangan.

Menurut laporan International Monetary Foundation (IMF) yang terbit pada periode Juli 2022, mencatatkan penurunan proyeksi pertumbuhan global tahun 2022 yang menjadi 3,2%

We offer our gratitude to the Almighty God, for the Company has achieved quality growth amid the uncertain economic situation. For the Company, the year 2022 is the moment of growth. This can be witnessed through the Company's success that managed to record a 58% uprise of its net profit in the first quarter of 2022.

This marvelous achievement can only be reached through the commitment of all personnel of the Company who gave their best performances. We appreciate all ranks of management and the Company's employees who put their hard work and show their loyalty, so that the Company achieved the quality performance.

Furthermore, let us present PT Arkora Hydro Tbk's performance for the 2022 fiscal year, as a form of our responsibility to the shareholders and stakeholders in carrying out the management of the Company throughout 2022.

NATIONAL AND GLOBAL ECONOMIC RECOVERY

The global economic in 2022 is yet to show any significant development and is even projected to experience downfall in 2023. The prolonged Covid-19 pandemic and the world geopolitical conflict widely impacts the economy, humanity, and monetary, causing various countries hitting the recession as well as uncertainties in the financial market.

According to the International Monetary Foundation (IMF) report published in July 2022, the projection of 2022 global growth fell 0.4% to 3.2% year on year (yoy) from the report

year on year (yoy), atau menurun 0,4% dibandingkan laporan pada April 2022. Sementara itu, situasi ekonomi Amerika telah mengalami resesi, karena pertumbuhan ekonominya berturut-turut berkontraksi pada kuartal I sebesar 1,6% dan kuartal II sebesar 0,9%. Sedangkan kondisi ekonomi Tiongkok dibandingkan kuartal sebelumnya tumbuh rendah 0,4% (yoy) pada kuartal II 2022 atau berkontraksi 4,4%. IMF memprediksi laju inflasi global akan meningkat dari 4,7% pada 2021 menjadi 8,8% pada tahun 2022.

Di tengah perlambatan ekonomi global dan kenaikan inflasi laju kinerja ekonomi nasional terus menguat pada triwulan III 2022. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa perkembangan tersebut dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi triwulan III 2022 yang mencapai 5,72% (yoy), lebih tinggi dari capaian triwulan sebelumnya sebesar 5,45% (yoy). Kinerja ekonomi yang tetap kuat tersebut ditopang oleh berlanjutnya perbaikan permintaan domestik dan tetap tingginya kinerja ekspor.

Pemulihan ekonomi nasional juga ditunjukkan pada kinerja berbagai lapangan usaha tetap baik. Diprakirakan ke depan, pertumbuhan ekonomi nasional tetap kuat didorong oleh perbaikan permintaan domestik sejalan dengan terus meningkatnya mobilitas dan berlanjutnya penyelesaian Program Strategis Nasional (PSN). Namun demikian, dampak perlambatan ekonomi global terhadap kinerja ekspor dan potensi tertahannya konsumsi rumah tangga akibat kenaikan inflasi patut diwaspadai.

Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang dipengaruhi oleh penanganan pasien Covid-19 yang kembali mengalami peningkatan di triwulan III 2022. Sedangkan dari sisi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mengalami pertumbuhan. Pada keterangan persnya, Kementerian ESDM menyatakan bahwa di tahun 2022 ESDM memberikan sumbangsih besar terhadap pemasukan negara. Tercatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM di tahun 2022 mencapai 122,2% dari target, yakni sebesar Rp588,3 triliun.

Pada laporannya, Kementerian SDM juga menyampaikan bahwa pada 2022 konsumsi listrik per kapita mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 1.268 kWh/kapita. Hal ini tidak terlepas dari tumbuhnya kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 74 Giga Watt (GW) di 2022 untuk menjaga kebutuhan listrik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

from April 2022. Meanwhile, the United States of America's economic situation suffers from recession as their economic growth contracted successively in the first quarter by 1.6% and in the second quarter by 0.9%. Meanwhile, China's economic condition experienced a slow growth, 0.4% (yoy) from the previous quarter in the second quarter of 2022 or contracted 4.4%. The IMF predicted the global inflation rate will rise from 4.7% in 2021 to 8.8% in 2022.

Amid the slowing economic growth and increasing inflation, the national economic performance continued to strengthen in the 3rd quarter of 2022. Statistics Indonesia states that the growth can be viewed from the 3rd quarter growth in 2022 that reached 5.72% (yoy), higher than the previous quarterly growth which was marked at 5.45% (yoy). The constantly strong economic performance was supported by the continuous domestic demand improvement and the high export activities.

The national economic recovery is shown to be performing well in various business fields. The national economic growth is forecasted to remain strong as it is driven by domestic demand improvement that aligns with the increasing mobility and the continuing implementation of National Strategic Program (PSN). However, the impact of the slowing global economic on the export activities performance and the potential for restrained household consumption due to rising inflation should become an alert.

Sectors with the highest growth are the health services and social activities, which was due to the increase of Covid-19 patient treatment throughout the 3rd quarter of 2022. The Mineral and Energy Resources (ESDM) sector also experienced growth. In the press statement, the Ministry of Energy and Mineral Resources stated that in 2022 ESDM has largely contributed to the national income. The realization of Non-Tax State Revenue (PNBP) for the ESDM sector in 2022 reached 122.2% of the target, amounting to Rp588.3 trillion.

In its report, the Ministry of Energy and Mineral Resources recorded a rise of electricity consumption per capita in 2022 compared to the previous year, with the total of 1,268 kWh/capita. This is closely related to the growing capacity of the installed power plant amounting to 74 Giga Watt (GW) in 2022 to maintain electricity demand in driving economic growth.



Sementara itu Badan Energi Internasional (IEA) menyatakan bahwa pembangkit listrik EBT (Energi Baru Terbarukan) meningkat lebih dari menjadi 8.169 Terawatt Hour (TWh) pada 2022 dibanding tahun 2016 yang pencapaiannya lebih dari 6.012 TWh atau setara dengan konsumsi listrik gabungan China, India dan Jerman. IEA menyampaikan bahwa EBT akan mencapai 29% dari campuran energi global dalam waktu 5 (lima) tahun, meningkat dibandingkan dengan perkiraan tahun lalu yang sebesar 24%.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN HASIL YANG DICAPAI

Tahun 2022 merupakan momentum pertumbuhan bagi Perusahaan. Terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi di sepanjang tahun 2022, Perusahaan berhasil mencapai kinerja operasional yang melebihi target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh para Pemegang Saham.

Dari sisi kinerja keuangan, Perusahaan berhasil mencatatkan perolehan pendapatan usaha sebesar Rp247,88 miliar, naik 24,95% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp198,39 miliar. Sementara bila dibandingkan dengan target RKAP 2022 mengalami kenaikan sebesar 100,82%. Peningkatan tersebut mendorong peningkatan laba bersih Perseroan yang mencapai Rp52,71 miliar atau naik 5,99% dibandingkan dengan tahun 2021, dan telah memenuhi 93,20% dari target yang telah ditetapkan.

Sementara dari sisi produksi, PT Arkora Hydro, Tbk di tahun 2022 telah mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan total produksi listrik sebesar 353.051 Mwh. Perseroan terbukti mampu memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan energi listrik PT PLN (Persero) dari sumber Energi Baru Terbarukan (EBT).

Di samping itu, Perusahaan berhasil meraih prestasi yang membanggakan. Perusahaan telah mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) melalui pengoperasian pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Di tahun 2022, Arkora Hydro telah mengoperasikan 2 (dua) PLTA sebesar 17,4 megawatt (MW) di Jawa Barat dan Sulawesi Tengah. Arkora Hydro sedang melakukan pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 10 MW di Sulawesi Tengah-2 dengan target commissioning date pada kuartal I 2023 dan pembangkit 5,4 MW di Lampung, Sumatera, dengan target commissioning date pada kuartal IV 2024.

In the meantime, the International Energy Agency (IEA) stated that New and Renewable Energy (NRE) power generation increased by more than 8,169 Terawatt Hours (TWh) in 2022 compared to 2016, which achieved more than 6,012 TWh or the equivalent of the combined electricity consumption in China, India and Germany. The IEA said that NRE would reach 29% of the global energy mix within 5 (five) years, an increase compared to last year's estimation of 24%.

COMPARISON BETWEEN THE TARGET AND ACHIEVED RESULT

2022 was a momentum of growth for the Company. Despite facing several obstacles throughout 2022, the Company managed to achieve operational performance beyond the 2022 Company Work Plan and Budget's target set by the Shareholders.

From the financial performance aspects, the Company records operating revenue amounting to Rp247.88 billion, a 24.95% increase from Rp198.39 billion in 2021. Compared to the 2022 RKAP target, the operating revenue increases by 100.82%. The increase promotes the rise of the Company's net profit, which reaches Rp52.71 billion, or a 5.99 % climb compared to 2021, and has fulfilled 93.20% from the determined target.

From its production side, PT Arkora Hydro Tbk has managed operating hydro-powered plants (HPP) with the total electricity generation of 353.051 MWH. The Company is proven to be able to contribute to fulfilling PT PLN (Persero) electricity demand from New Renewable Energy (NRE)

Additionally, the Company proudly achieved a major accomplishment. The Company has accelerated the NRE development through operating the hydro power plants. In 2022, Arkora Hydro has operated 2 (two) HPP with the capacity of 17.4 megawatt (MW) in West Java and Central Sulawesi. Arkora Hydro is currently constructing 10 MW-capacity hydro power plant in Central Sulawesi-2 with commissioning date target in the 1st quarter of 2023 and 5.4 MW-capacity in Lampung, Sumatera with commissioning date in the 4th quarter 2024.

Sementara sejalan isu prioritas Presidensi G-20, yaitu transisi energi, PLN telah menyelenggarakan penandatanganan kerja sama strategis dengan sejumlah perusahaan energi dalam kaitannya dengan upaya menuju karbon netral 2060. Anak usaha Arkora Hydro, PT Arkora Energi Baru merupakan salah satu perusahaan yang ikut dalam acara penandatanganan kesepakatan jual-beli listrik (Power Purchasing Agreement/PPA) untuk PLTA Kukusan 2. Pembelian listrik dari PLTA Kukusan 2 akan dilakukan PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung.

Penandatanganan PPA ini merupakan komitmen jangka panjang Arkora Hydro untuk terus membangun pembangkit listrik tenaga air yang merupakan bagian penting dari energi baru terbarukan. Perusahaan meyakini, melalui green financing dan dukungan stakeholders, pembangunan PLTA di Indonesia dapat ditingkatkan guna mencapai target EBT 23% pada 2025.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERSEROAN

Untuk dapat mencapai tujuan, penting bagi Perusahaan untuk melakukan perumusan strategi dan kebijakan strategis. Oleh karena itu, Direksi wajib merumuskan strategi dan kebijakan strategis berdasarkan analisa pasar, perilaku konsumen, dan kemampuan Perusahaan. Selanjutnya, strategi bisnis dan kebijakan strategis yang telah dirumuskan oleh Direksi, dikonsultasikan dengan Dewan Komisaris untuk mendapatkan arahan dan nasihat.

Di tengah tekanan situasi ekonomi yang masih cukup tinggi, Perseroan di tahun 2022 berupaya untuk berfokus pada peningkatan produktivitas melalui implementasi inisiatif strategis yang meliputi:

1. Memperluas hubungan dan merawat hubungan secara baik kepada para pelanggan utama dan mitra Perusahaan.
2. Menunjuk jasa-jasa profesional pendukung proyek pembangkit listrik Perseroan yang kompeten dan berpengalaman.
3. Memperoleh pendanaan yang kompetitif serta meminimalisir risiko keuangan selama pengerjaan proyek.
4. Sumber daya keuangan merupakan aspek yang cukup krusial dalam proyek pembangkit listrik Perseroan.
5. Melakukan ekspansi dan diversifikasi usaha.

On the other hand, aligning with the G-20 Presidency priority issue in energy transition, PLN signed a strategic cooperation agreement with several energy companies in relation to the effort in achieving carbon neutral in 2060. An Arkora Hydro's subsidiary, PT Arkora Energi Baru is one of the companies who agreed to sign Power Purchasing Agreement for Kukusan-2 mini hydro power plant (MHPP). The power from Kukusan-2 MHPP is purchased by PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung.

The PPA signing is Arkora Hydro's long-term commitment to continuously develop hydro power plant as a significant part of new renewable energy. The Company believes through green financing and support from stakeholders, the HPP construction in Indonesia can be increased to achieve the 23% NRE target in 2023.

THE COMPANY'S STRATEGY AND STRATEGIC POLICY

To achieve its goals, it is essential for the Company to formulate strategies and strategic policies. Thus, the Board of Directors shall formulate strategies and strategic policies based on the market analysis, consumers' behavior, and the Company's capabilities. Moreover, the business strategies and the strategic policies that have been prepared by the Board of Directors are consulted to the Board of the Commissioners for direction and advice.

Amid the high economic pressure, the Company strives to focus on enhancing productivity by implementing strategic initiatives, including:

1. Expanding network and nurturing good relationships with the Company's main customer and partners.
2. Appointing competent and experienced professional services that support the Company's power generation project.
3. Gaining competitive financing and minimizing financial risks throughout the work project.
4. Financial resources are a crucial aspect in the Company's power generation project.
5. Expanding and diversifying the business.



PERANAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERSEROAN

Direksi sebagai manajemen puncak memiliki peran penting dalam merumuskan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan, yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Proses perumusan strategi dimulai dengan penentuan arah visi dan misi Perusahaan, yang dilakukan melalui brainstorming antara Direksi dan Dewan Komisaris. Selanjutnya, Direksi menyusun strategis Perusahaan. Arahan strategis tersebut kemudian dikelola dan dikembangkan oleh Direksi pada masing-masing lini bisnis Perusahaan.

Direksi juga menyusun kebijakan strategis, yang dijadikan sebagai pedoman atau peraturan Perusahaan dalam menjalankan usahanya. Penyusunan kebijakan strategis tersebut juga melibatkan unit terkait. Selanjutnya hasil dari penyusunan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan tersebut akan diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris melalui persetujuan dalam RJPP. (mohon konfirmasi data)

PROSES YANG DILAKUKAN DIREKSI UNTUK MEMASTIKAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Dalam rangka mencapai target yang diinginkan, Perseroan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan mengacu pada RJPP yang telah disahkan. Program kerja disusun oleh seluruh lini Perusahaan dengan memperhatikan target pencapaian operasional, pengembangan, keuangan, dan sumber daya manusia.

Direksi senantiasa memantau strategi dan kebijakan strategis Perusahaan telah diimplementasikan dengan optimal. Secara berkala Direksi menyelenggarakan rapat dengan unit terkait guna meminta laporan pertanggungjawaban. Direksi juga kerap terlibat langsung memantau proses implementasi strategi Perseroan agar dapat berjalan efisien dan efektif.

ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN FORMULATING STRATEGY AND STRATEGIC POLICY OF THE COMPANY

The Board of Directors as the top management has an important role in formulating the Company's strategies and strategic policies, which are included in the Company Long Term Plan (RJPP). The formulation process begins with the determination of the direction of Company's vision and missions, which was implemented in a brainstorming session between the Board of Directors and the Board of Commissioners. Next, the Board of Directors prepares the Company's strategies. The strategic directions are then managed and developed by the Board of Directors in all of the Company's business lines.

The Board of Directors also formulates the strategic policies, which becomes the Company's guidelines or regulations in practicing its business. The formulation of the strategic policies involves related units. Afterward, the results of the strategies and strategic policies formulation will be submitted to the Board of Commissioners by the Board of Directors through approval in RJPP.

PROCESS CARRIED OUT BY THE BOARD OF DIRECTORS IN ENSURING THE STRATEGY IMPLEMENTATION

In order to achieve the expected targets, the Company prepares a Company Work Plan and Budget (RKAP) that refers to the ratified RJPP. The work program is prepared by all lines of the Company by considering operational, development, financial and human resource achievement targets.

The Board of Directors always monitors the strategy and strategic policies to ensure that they are optimally implemented. Periodically, the Board of Directors holds meetings with related units to request accountability reports. The Board of Directors is also involved in directly in monitoring the Company's strategy implementation process so it can be conducted efficiently and effectively.

TANTANGAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI DAN LANGKAH PENYELESAIANNYA

Di sepanjang tahun 2022, terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi kinerja Perusahaan, yakni

1. Volatilitas nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain.
2. Kondisi pandemi Covid-19 yang belum pulih sepenuhnya, sehingga menyebabkan terhambatnya proses kontrak kerja sama dengan PT PLN (Persero).
3. Tingkat inflasi yang meningkat, sehingga harga bahan baku meningkat.
4. Nilai suku bunga yang meningkat, sehingga mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.
5. Kualitas SDM yang perlu ditingkatkan.

Untuk itu, Perseroan melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi sejumlah kendala tersebut dengan melakukan berbagai inisiatif sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan kinerja keuangan, Perseroan melakukan efisiensi biaya operasional dan biaya bunga pinjaman.
2. Perseroan berupaya untuk memberikan pelatihan kepada para karyawan, terutama yang bertugas di site sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik.

Di tengah dinamika ekonomi global yang masih belum menentu, Perusahaan terus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi setiap kendala yang terjadi. Perseroan tetap optimistis dengan kemampuan usaha ke depan sehingga mampu meraih capaian positif yang ditargetkan.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pada tanggal 8 Juli 2022 Perusahaan telah berubah status menjadi perusahaan terbuka. Salah satu alasan yang mendorong Perusahaan untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO) adalah Perusahaan ingin memiliki akses modal yang luas untuk mendapatkan pendanaan yang mendukung visinya dalam mengembangkan potensi energi terbarukan Indonesia yang berdampak terhadap pengurangan emisi karbon melalui pembangkitan listrik tenaga air. Arkora Hydro mengucapkan terima kasih kepada para investor yang telah memberikan kepercayaannya dalam mengelola bisnis Perseroan.

CHALLENGES AND OBSTACLES FACED AND THE SOLUTION

Throughout 2022, the Company faced a few obstacles that affects its performance, namely:

1. Volatility of Rupiah exchange rate against foreign currencies.
2. The Covid-19 pandemic condition which has not yet to fully recover, therefore hindering the cooperation contract with PT PLN (Persero).
3. Rising inflation rate, which consequently leads to the rising materials price.
4. Increasing interest rates, thus affecting the Company's financial performance.
5. Human resources quality that needs to be improved.

In facing the obstacles, the Company applied various initiatives, among others are as follows:

1. To optimize financial performance, the Company carries out operational costs efficiency and loan interest rate.
2. The Company strives to provide training for employees, mainly on-site employees so they may carry out their duties well.

Amid the uncertain global economy dynamic, the Company continuously apply the precautionary principle in anticipating every obstacle that occurs. The company remains optimistic about its future business capabilities so that it can achieve the targeted positive results.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

On July 8, 2022, the Company changed its status to a public company. One of the reasons that prompted the Company to conduct an Initial Public Offering (IPO) was that the Company wanted to have broad access to capital to obtain funding that supports its vision in developing Indonesia's renewable energy potential which has an expected impact on reducing carbon emissions through hydroelectric power generation. Arkora Hydro would like to thank the investors who have shown their trust in managing the Company's business.



Perusahaan memahami, dengan adanya perubahan status Perseroan yang menjadi perusahaan terbuka tersebut, Arkora Hydro memiliki tanggung jawab untuk menjalankan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG). Melalui penerapan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh, Perusahaan dapat terhindar dari risiko-risiko yang berpotensi merugikan.

Adapun wujud pelaksanaan komitmen Perusahaan dalam menerapkan praktik-praktik GCG tercermin dari penerapan Whistleblowing System (WBS) atau sistem pelaporan pelanggaran. Dalam penerapannya, WBS tidak hanya menjadi sarana pelaporan bagi pemangku kepentingan, namun memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi pelapor agar terhindar dari ancaman atau perlakuan yang tidak diharapkan lainnya. Hingga kini Perusahaan senantiasa berupaya untuk menjalankan WBS secara baik sehingga pada tahun 2022 tercatat tidak ada pelaporan WBS yang ditujukan kepada Perusahaan.

Di samping itu, Perusahaan berupaya untuk melakukan pengembangan maupun pembaruan terhadap soft structure GCG. Hal itu dilakukan untuk menciptakan praktik GCG yang sistematis, efisien, dan efektif. Perusahaan meyakini, dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara optimal, Perusahaan dapat mewujudkan bisnis yang berkelanjutan.

TINJAUAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

PT Arkora Hydro berprinsip untuk memberikan nilai positif kepada pemangku kepentingan terutama masyarakat dan lingkungan. Untuk itu, Perusahaan senantiasa memegang komitmennya dalam mengutamakan pelaksanaan pemberian nilai tambah melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan atau *Corporate Social and Environmental Responsibility* secara berkala.

Program TJSL Perseroan di tahun 2022 berfokus pada pengembangan infrastruktur dan sosial, yang diwujudkan melalui kegiatan berikut:

1. Melakukan renovasi pembangunan dinding pagar pembatas SDN 2 Panawa, Garut, Jawa Barat.
2. Memberikan bantuan hewan kurban sebanyak 11 ekor kambing.

The Company understands that with the change in the status of the Company to be a public company, Arkora Hydro has the responsibility to carry out Good Corporate Governance (GCG) practices. Through the implementation of GCG principles as a whole, the Company can avoid potentially harmful risks.

The Company's commitment manifestation to implementing GCG practices is reflected in the implementation of the Whistleblowing System (WBS) or the violation reporting system. In its practice, the WBS is not only a means of reporting for stakeholders, but also provides guarantees of protection and security for reporters to avoid threats or other unexpected treatment. As of today, the Company always strives to run the WBS properly so that in 2022 there were no WBS reports addressed to the Company.

Additionally, the Company strives to develop and upgrade the GCG soft structure, namely.... This is conducted to create systematic, efficient, and effective GCG practices. The Company believes that in implementing the GCG principles optimally, the Company can realize a sustainable business.

REVIEW ON SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION

PT Arkora Hydro holds a principle in giving positive value for stakeholders, particularly to society and environment. For that purpose, the Company always holds its commitment to prioritizing additional value through Corporate Social and Environmental Responsibility periodically.

The Company's TJSL Program in 2022 focused on infrastructure development and social, which is implemented in the following activities:

1. Renovating and building the walls and fences of SDN 2 Panawa in Garut, West Java.
2. Donating 11 goats for Qurban.

Perusahaan juga melakukan upaya menjaga pelestarian lingkungan hidup dengan melakukan penanaman kembali ... pohon di lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTA). Perusahaan telah menjalankan seluruh kegiatan TJSL dengan baik di tahun 2022, dan telah memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan.

PROSPEK USAHA DI TAHUN 2023

Salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang dalam transisi menuju ekonomi hijau adalah pembangunan yang menggunakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Transisi menuju ekonomi hijau salah satunya melalui pembangunan EBT. Untuk itu Indonesia berkomitmen untuk mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat dari itu.

Perusahaan memandang bahwa program Indonesia untuk mencapai *Net Zero Emission* di tahun 2060 mendatangkan keuntungan bagi Arkora Hydro, karena sektor usaha Perusahaan yang bergerak di bidang pembangkitan listrik tenaga air. Prospek usaha Perusahaan semakin menjanjikan dengan kinerja dukungan anak perusahaan. Saat ini anak perusahaan tidak langsung milik Arkora Hydro, PT Akora Hydro Sulawesi sedang membangun proyek Yaentu di Poso, Sulawesi Tengah, dengan kapasitas 10 (2x5) MW, dan rencananya akan memasuki tahapan COD pada triwulan I 2023. Di samping itu, Perusahaan juga sedang melakukan persiapan tahap konstruksi Proyek Kukusan-2 di Lampung, Sumatera dengan kapasitas 5,4 MW. Proyek PLTA tersebut ditargetkan beroperasi pada triwulan IV 2024. Pembangunan proyek-proyek PLTA yang dilakukan oleh Perusahaan maupun anak perusahaan secara otomatis dapat memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan Perseroan.

Untuk memperkuat bisnisnya, Perusahaan berencana akan terus berupaya menemukan peluang kerja sama dan aktif mencari proyek hidro berpotensi besar di atas 25MW. Perusahaan menilai bahwa sektor bisnis EBT di tahun 2023 masih memiliki potensi besar di Indonesia karena menurut data Kementerian Energi Sumber Daya Energi dan Mineral (ESDM) pemanfaatan potensi EBT di Indonesia saat ini masih jauh di bawah 10% sehingga Perusahaan memiliki peluang besar untuk dapat meraih pertumbuhan bisnis yang berkualitas.

Additionally, the Company through its Subsidiary PT Arkora Hydro Sulawesi also makes efforts in conserving the environment through Rehabilitation of watersheds (DAS) by planting of 48,279 pine trees in an area of 57 hectares

BUSINESS PROSPECTS IN 2023

One of Indonesia's economic growth pillars in the future while transitioning to green economy is the development that uses New and Renewable Energy (NRE). The transition toward the green economy can be achieved through NRE development. Thus, Indonesia is committed to achieving Net Zero Emission in 2060 or even sooner.

The Company views that Indonesia's Net Zero Emission program in 2060 will generate profits for Arkora Hydro as the Company's business sector engages in hydroelectric power generation. The Company's business prospects gradually become promising with the support from the Company's subsidiary. Currently, Arkora Hydro's indirect subsidiary, PT Arkora Hydro Sulawesi, is building the Yaentu project in Poso, Central Sulawesi, with a capacity of 10 (2x5) MW, and plans to enter the COD stage in the first quarter of 2023. In addition, the company is also carrying out preparations for the construction phase of the Kukusan-2 Project in Lampung, Sumatra with a capacity of 5.4 MW. The hydropower project is targeted to operate in the fourth quarter of 2024. The development of hydropower projects carried out by the Company and its subsidiaries can automatically have a positive impact on the Company's financial performance.

To strengthen its business, the Company plans to continuously seek cooperation opportunities and actively seek large potential hydro projects above 25MW. The Company considers that the NRE business sector in 2023 still has great potentials in Indonesia, because according to data from the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), the utilization of NRE potential in Indonesia is currently far below 10%. Therefore, the Company has a great opportunity to achieve quality business growth.



PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Selama tahun 2022, terdapat perubahan komposisi Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 22 September 2022 Berikut komposisi Direksi Perusahaan hingga akhir tahun buku 2022:

THE BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

There were changes in the Company's Board of Directors' composition in 2022, in accordance with the based on the General Meeting of Shareholders Resolutions dated September 22, 2022, The Board of Directors' composition as of the end of the 2022 fiscal year is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan / Term of Office
Aldo Henry Artoko	Direktur Utama / President Director	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 /	5 tahun / 5 years
Ricky Hartono	Direktur / Director	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020	5 tahun / 5 years
Ismu Nugroho	Direktur / Director	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020	5 tahun / 5 years
Boy Gemino Kaluserang	Direktur / Director	Akta No. 84 tanggal 22 September 2022 /	5 tahun / 5 years

APRESIASI

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham, mitra kerja, konsumen, dan pemangku kepentingan yang telah memberikan kepercayaan dan dukungannya kepada PT Arkora Hydro Tbk. Apresiasi yang tulus juga kami berikan kepada seluruh karyawan Perseroan atas kerja keras serta dedikasi yang tinggi di sepanjang 2022. Kami percaya kolaborasi dan sinergi yang telah berjalan antar karyawan dapat meningkatkan pertumbuhan Perusahaan. Kami berharap budaya kerja sama ini dapat terus terjalin dan ditingkatkan di masa mendatang.

APPRECIATION

We would like to extend our deepest gratitude for the shareholders, partners, customers, and stakeholders who have given their trust and support PT Arkora Hydro Tbk. Our sincerest appreciation also goes to all employees of the Company, for all the hard work and high dedication throughout 2022. We believe that the ongoing collaboration and synergies between employees will help the Company to grow. We hope the collaboration culture may continue to be maintained and improved in the future.

Jakarta, 13 Maret 2023 / Jakarta, March 13 2023

Atas Nama Jajaran Direksi PT Arkora Hydro Tbk /

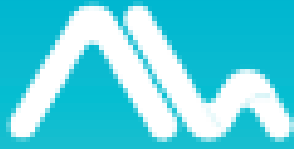
On behalf of the Board of Directors of PT Arkora Hydro Tbk

Aldo Henry Artoko

Direktur Utama / President Director

Halaman Ini Sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

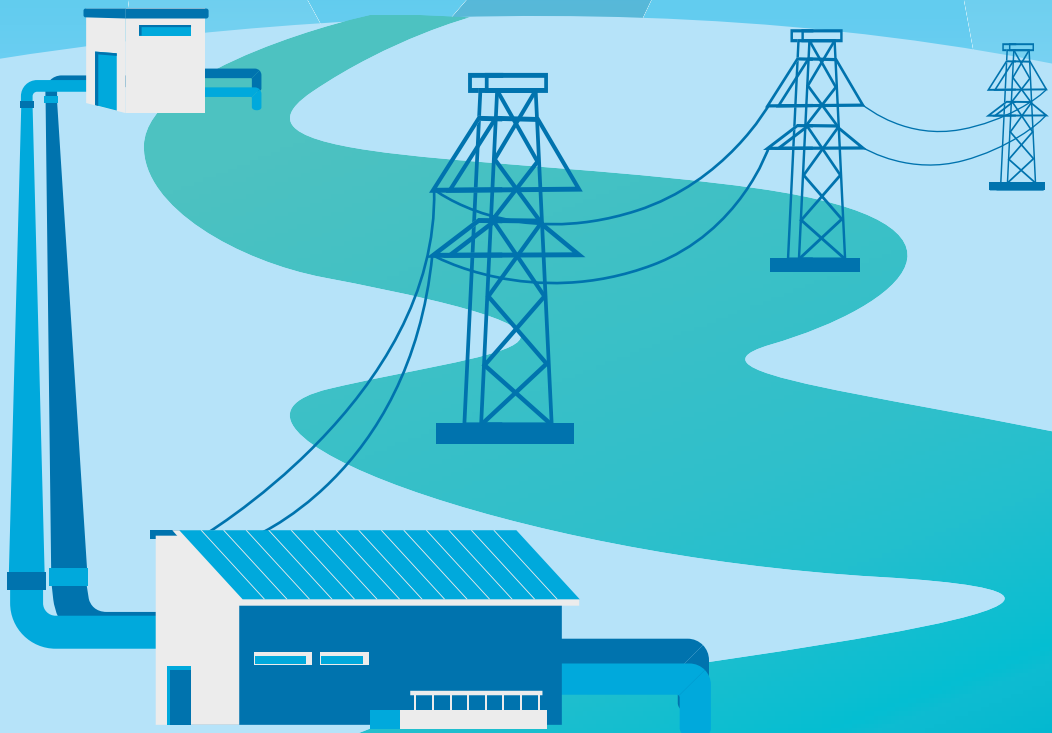


ARKORA HYDRO

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

03



IDENTITAS PERUSAHAAN

Corporate Identity

Nama Perusahaan Company Name	PT Arkora Hydro
Modal Dasar Authorized Capital	Rp231.960.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Subscribed and Paid-up Capital	Rp57.990.000.000,-
Bidang Usaha Line of Business	Pembangkitan tenaga listrik. Power plant
Tanggal Pendirian Date of Establishment	5 Agustus 2010 August 5, 2010
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	<p>Akta Pendirian No. 15, tanggal 5 Agustus 2010 dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menkumham No. 40544.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 18 Agustus 2010.</p> <p>Deed of Establishment No. 15, dated August 5, 2010 drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E. which has been approved by the Minister of Law and Human Rights (Menkumham) of the Republic of Indonesia in accordance with the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. 40544.AH.01.01. of 2010, dated August 18, 2010.</p>
Kepemilikan Saham Share Ownership	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Arkora Bakti Indonesia (60%) 2. ACEI Singapore Holdings Private Ltd. (40%)
Jumlah Karyawan Total Employees	70 karyawan. 70 employees
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Office 8 Building, Lantai 21 Unit C & D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 28 SCBD Jakarta 12190, Indonesia.
Telepon Phone	021 29333 288, 021 29333 299
Faksimili Facsimile	021 29333 298
Surat Elektronik E-mail	corporate.secretary@arkora.com
Situs Web Perusahaan Website	www.arkora-hydro.com



SEKILAS TENTANG ARKORA HYDRO



PT Arkora Hydro merupakan perusahaan yang beroperasi dalam pembangkitan tenaga listrik yang didirikan dan berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 5 Agustus 2010. Akta tersebut kemudian telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. 40544.AH.01.01 Tahun 2010, tanggal 18 Agustus 2010. Hingga laporan ini dipublikasikan, Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, dengan perubahan terakhir dinyatakan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 4 Maret 2022 (Akta Perseroan No. 12/2022).

PT Arkora Hydro is a company engaged in power generation which was established and domiciled in Jakarta based on the Deed of Establishment No. 15 dated August 5, 2010. The deed has then been approved by the Menkumham based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. 40544.AH.01.01. of 2010, dated August 18, 2010. Until this report was published, the Company has undergone several amendments to the Articles of Association, with the latest amendments being restated based on the Deed of Statement of Circular Decisions of the Shareholders No. 12 dated March 4, 2022 (Company Deed No.12/2022).

Melalui dasar pendirian tersebut, Perseroan beroperasi dan secara terus-menerus berkontribusi dengan berdasar pada dedikasi yang kuat dalam pengembangan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Indonesia. Perseroan beroperasi dengan tujuan untuk mempercepat perkembangan energi terbarukan di Indonesia melalui pembangunan PLTA aliran sungai langsung (run-of-river), terutama pada daerah-daerah terpencil dengan permintaan yang stabil tetapi memiliki pasokan energi listrik yang tidak mencukupi. Perseroan bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk membangun masa depan yang berkelanjutan bagi kita, masyarakat Indonesia..

Manajemen Arkora Hydro terdiri dari tim insinyur ahli dengan pengalaman luas dalam bidang PLTA serta memiliki pemahaman penuh dalam mencapai kesuksesan tujuan-tujuan proyek, di samping telah menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan bisnis baik secara organik maupun anorganik. Perseroan telah mewujudkan target untuk mempunyai pembangkit listrik yang beroperasi sebesar 17,4 MW per akhir tahun 2021, dan hingga kini telah memiliki sebesar 15,4 MW meliputi sejumlah proyek pembangkit yang telah dalam tahap pembangunan. Selain itu Perseroan juga memiliki pipeline projects dengan total kapasitas sebesar 107,7 MW.

Dengan fokus yang kuat pada pembangunan pembangkit dan peningkatan keunggulan operasional yang dimiliki, Perseroan terus mengupayakan terwujudnya keberlanjutan dalam seluruh aspek bisnis, yaitu melalui energi yang dihasilkan, kontribusi kepada masyarakat lokal, serta penyaluran nilai ekonomi melalui pendapatan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

Hingga tahun 2022, Perseroan tidak melakukan perubahan nama perusahaan.

Through this establishment, the Company operates and continuously contributes based on a strong dedication to the development and operation of Hydro Power Plants in Indonesia. The Company operates with the aim of accelerating the development of renewable energy in Indonesia through the construction of run-of-river hydropower plants, especially in remote areas with stable demand but insufficient supply of electrical energy. The Company works closely with local communities to build a sustainable future for us, the people of Indonesia.

Arkora Hydro's management consists of a team of expert engineers with extensive experience in HPP and full understanding of achieving project objectives successfully, as well as having demonstrated the ability to grow the business both organically and inorganically. The Company has realized its target to have a power plant operating at 17.4 MW by the end of 2021, and to date has 15.4 MW, including a number of other power plant projects that are under construction. In addition, the Company also has pipeline projects with a total capacity of 107.7 MW.

With a strong focus on power plant development and increasing operational excellence, the Company always strives for sustainability in all aspects of the business, namely through the produced energy, contributions to local communities, and the distribution of economic value through income to shareholders and stakeholders.

INFORMATION ON COMPANY NAME CHANGE

As of 2022, the Company did not carry out any changes on its name



JEJAK LANGKAH

Milestone

Perseroan didirikan dengan nama PT Arkora Hydro.

The Company was established under the name PT Arkora Hydro.

2010

Memperoleh Power Purchase Agreement (PPA) pertama kali untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cikopo (7,4 MW) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN).

Obtained the first Power Purchase Agreement (PPA) for the Cikopo Hydro Power Plant (HPP) (7.4 MW) with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN).

2012

Dimulainya konstruksi PLTA Cikopo.

Commencement of the Cikopo HPP construction

2013

Kontrak PPA ditandatangani untuk PLTA Tomasa (10 MW) dengan PLN.

The PPA contract was signed for the Tomasa HPP (10 MW) with PLN.

2014

Dimulainya konstruksi PLTA Tomasa. /

Commencement of the Tomasa HPP construction

2016



PLTA Cikopo mencapai tanggal operasi komersial.

The Cikopo PLTA reached its commercial operation date.



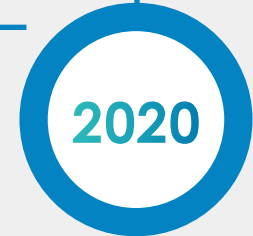
2017

PLTA Tomasa mencapai tanggal operasi komersial.

The Tomasa HPP reached its commercial operating date.

Kontrak PPA ditandatangani untuk PLTA Yaentu (10 MW) dengan PLN.

The signing of PPA contract for HPP Yaentu (10 MW) with PLN.



2020

PLTA Cikopo dan PLTA Tomasa mendapatkan pembiayaan dari PT Indonesia Infrastructure Finance.

Cikopo HPP and Tomasa HPP received financing from PT Indonesia Infrastructure Finance.



2019

Dimulainya konstruksi PLTA Yaentu
Commencement of the Yaentu HPP construction

PLTA Yaentu mendapatkan pembiayaan proyek dari PT Indonesia
Yaentu HPP received project financing from PT Indonesia.



2021

PT Arkora Hydro Tbk secara resmi mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BE/IDX) dengan kode saham ARKO.
Dimulainya pembangunan konstruksi PLTA Kukusan 1, di Lampung, Sumatera Selatan.

PT Arkora Hydro TBK officially listed the shares in the Indonesian Stock Exchange (IDX) with the ticker code ARKO
Commencement of Kukusan 1 HPP construction in Lampung, South Sumatera



2022

BIDANG USAHA

Corporate Identity

Sesuai Anggaran Dasar, Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk beroperasi pada bidang pembangkitan tenaga listrik. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan utama yaitu pembangkitan tenaga listrik, dengan kegiatan-kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik.
2. Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
3. Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya.
4. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya

In accordance with the Articles of Association, the Company was established with the aim and purpose to operate in the field of operating generation. To achieve these aims and objectives, the Company carries out its main activity, namely electricity generation, with supporting business activities as follows:

1. Operation of electricity supply installations.
2. Operation of electric power utilization installations.
3. Other electric power support activities.
4. Other management consulting activities.

MENGAPA PLTA ALIRAN SUNGAI LANGSUNG (RUN-OF-RIVER) ?

Why Run-of-River Hydropower Plant



INFORMASI PRODUK DAN JASA

Tenaga air telah dipergunakan secara luas oleh masyarakat antara lain dalam pertanian, yaitu untuk menggiling gandum hingga menggerakkan mesin sederhana. Dengan latar belakang tersebut, generator listrik tenaga air kemudian mulai dikembangkan melalui pemanfaatan energi yang dihasilkan oleh pergerakan air untuk dikonversi menjadi listrik.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) memiliki mekanisme kerja yang sederhana, yaitu air yang mengalir melalui bendungan digunakan untuk memutar turbin dan mendorong generator penghasil listrik. Meski demikian, dalam perkembangan mutakhir, diketahui bahwa terdapat kelemahan penggunaan waduk-waduk besar sebagai PLTA berupa gangguan pada arus sungai alami, gangguan pada keanekaragaman hayati, hingga pengaruh terhadap perubahan pola cuaca.

INFORMATION ON PRODUCT AND SERVICE

Hydropower has been widely used by the community, including in agriculture to grind wheat and drive simple machinery. With this background, hydroelectric generators then began to be developed by harnessing the energy generated by flowing water to be converted into electricity.

Hydro Power Plant (HPP) works on a stunningly simple mechanism; water flowing through a dam is used to turn a turbine and drive a generator that produces electricity. However, in recent developments, it is known that there are downsides in the use of large reservoirs as hydropower plants – upsetting the natural river flows, disorders in biodiversity, and changing weather patterns.



Sebagai solusi atas persoalan tersebut, PLTA aliran sungai langsung (run-of-river) mempergunakan kurva alami sungai berupa air yang terus mengalir dari ketinggian menuju turbin untuk menghasilkan tenaga listrik sebelum kembali ke arus awal. Pada mekanisme tersebut, aliran alami sungai tetap terjaga dengan dampak minimal terhadap lingkungan serta emisi karbon nol.

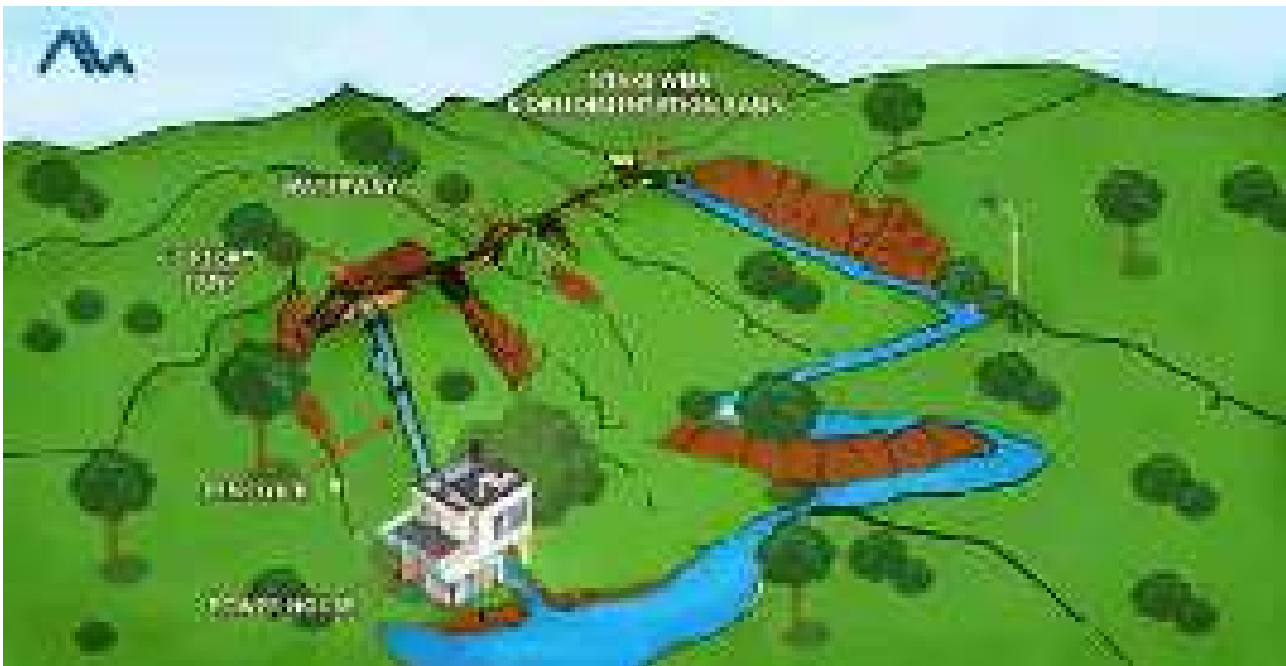
Arkora Hydro hadir untuk mengajak masyarakat bekerja sama untuk masuk ke sejumlah lokasi alam di Indonesia yang berpotensi bagi pengembangan proyek PLTA run-of-river. Perseroan menciptakan manfaat bersama bagi masyarakat yakni melalui penyaluran nilai ekonomi berupa pemberdayaan sosial dan lingkungan, serta penyediaan lapangan pekerjaan.

Dengan berpegang pada keyakinan akan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian penting dari visi dan misi perusahaan, Arkora Hydro berharap dapat berkontribusi secara luas dalam upaya pengembangan pembangkit listrik tenaga air sebagai sumber energi terdepan di Indonesia.

As a solution to this problem, the run-of-river hydropower plant uses the natural curve of the river in the form of water that flows from a height to the turbine to generate electricity before reentering the initial stream. In this mechanism, the natural flow of the river stays intact with minimal impact on the environment and zero carbon emissions.

Arkora Hydro is present to invite the community to work together to tap into a number of natural locations in Indonesia that have the potential for the development of run-of-river hydropower projects. The Company creates mutual benefits for the community, namely through the distribution of economic value in the form of social and environmental empowerment, as well as providing employment opportunities.

By adhering to the belief in environmental sustainability as an important part of the Company's vision and mission, Arkora Hydro hopes to contribute widely in the development of hydroelectric power plants as the leading energy source in Indonesia.



VISI DAN MISI

Vision And Mission

VISI

Vision

“Memperluas portfolio proyek energi terbarukan kami dan menjadi pemimpin pasar pembangkit listrik dari energi terbarukan secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.”

“To expand our portfolio of renewable energy projects and become the market leader of renewable energy power generation while being environmentally and socially responsible.”



MISI

“Mengembangkan potensi energi terbarukan di Indonesia yang akan mengurangi emisi karbon dan membangun masa depan yang berkelanjutan.”

“To develop renewable energy potentials in Indonesia in which will reduce carbon emission and build a more sustainable future.”

INFORMASI PERSETUJUAN MANAJEMEN PERSEROAN

Manajemen telah melakukan peninjauan dan persetujuan atas visi dan misi Perseroan dalam rangka mengoptimalkan kinerja Perusahaan.

INFORMATION ON MANAGEMENT APPROVAL

The Management has reviewed and approved the vision and mission of the Company.



NILAI-NILAI BUDAYA PERUSAHAAN

Corporate Culture

Arkora Hydro menerapkan budaya perusahaan sesuai nilai-nilai yang berlaku bagi Grup Arkora, sebagai berikut:

Arkora Hydro implements its corporate culture in accordance with the prevailing values for Arkora Group as follows:



KAMI MENGEDEPANKAN PENTINGNYA KUALITAS DAN KEBERLANJUTAN PROYEK We Highlight The Importance Of Project Quality And Sustainability

Kami bercita-cita memberikan solusi nilai tambah terkemuka secara proaktif, menyeluruh, dan andal, serta memberikan layanan terbaik secara profesional, hemat, dan tepat waktu.

We aspire to provide the most advanced value-added solutions that are proactive, fundamental and reliable, delivering top-notch services in the most professional, cost-effective and time-oriented manner.



INTEGRITAS Integrity

Kami selalu bertindak dengan integritas dan mematuhi standar etika dan moral tertinggi dalam segala hal yang kami lakukan. Kami menunjukkan kejujuran dan keterbukaan kepada orang lain dan diri kami sendiri dengan menegakkan transparansi, keadilan, dan kepedulian mutlak untuk kesejahteraan planet ini dan berjuang untuk kesejahteraan karyawan kami, klien kami, dan masyarakat. Kami menjalankan semua bisnis kami secara sadar dan bertanggung jawab.

We act with integrity at all times and adhere to the highest ethical and moral standards in everything we do. We demonstrate honesty and candor to others and to ourselves by enforcing transparency, fairness and absolute care for the well-being of this planet and striving for the welfare of our employees, our clients and the community. We conduct all of our business consciously and responsibly.



SINERGI Synergy

Kami bekerja dalam kesatuan, percaya akan keragaman, dan beranggapan bahwa membangun masyarakat lokal adalah kunci kesuksesan. Dengan bekerja sama dengan kelompok dan masyarakat lokal, kami saling mengembangkan satu sama lain untuk menjadi individu yang lebih baik dan sebagai pemain tim di seluruh fase proyek kami. Kerja sama timlah yang membuat impian menjadi kenyataan.

We work in unity, believe in diversity, and regard building local communities as key to success. By working together with local groups and communities, we develop one another to be better individuals and as team players throughout our entire project phases. It is the teamwork that makes the dream work.



DEDIKASI Dedication

Kami berdedikasi untuk negara kami, perusahaan kami, dan lingkungan kami. Kami percaya keberhasilan perusahaan ini akan menjadi kontribusi kami bagi pertumbuhan bangsa kita. Kami berkomitmen penuh dan mendedikasikan diri kami melalui integritas dan sinergi untuk tujuan yang lebih besar dari diri kami sendiri.

We are dedicated to our country, our corporation and our environment. We believe the success of this company will be our contribution to the growth of our nation. We fully commit and dedicate ourselves through our integrity and synergy for a purpose greater than ourselves.

KEANGGOTAAN ASOSIASI INDUSTRI

Industry Association Membership

Hingga 31 Desember 2022, Arkora Hydro tidak tergabung dalam asosiasi industri apa pun.

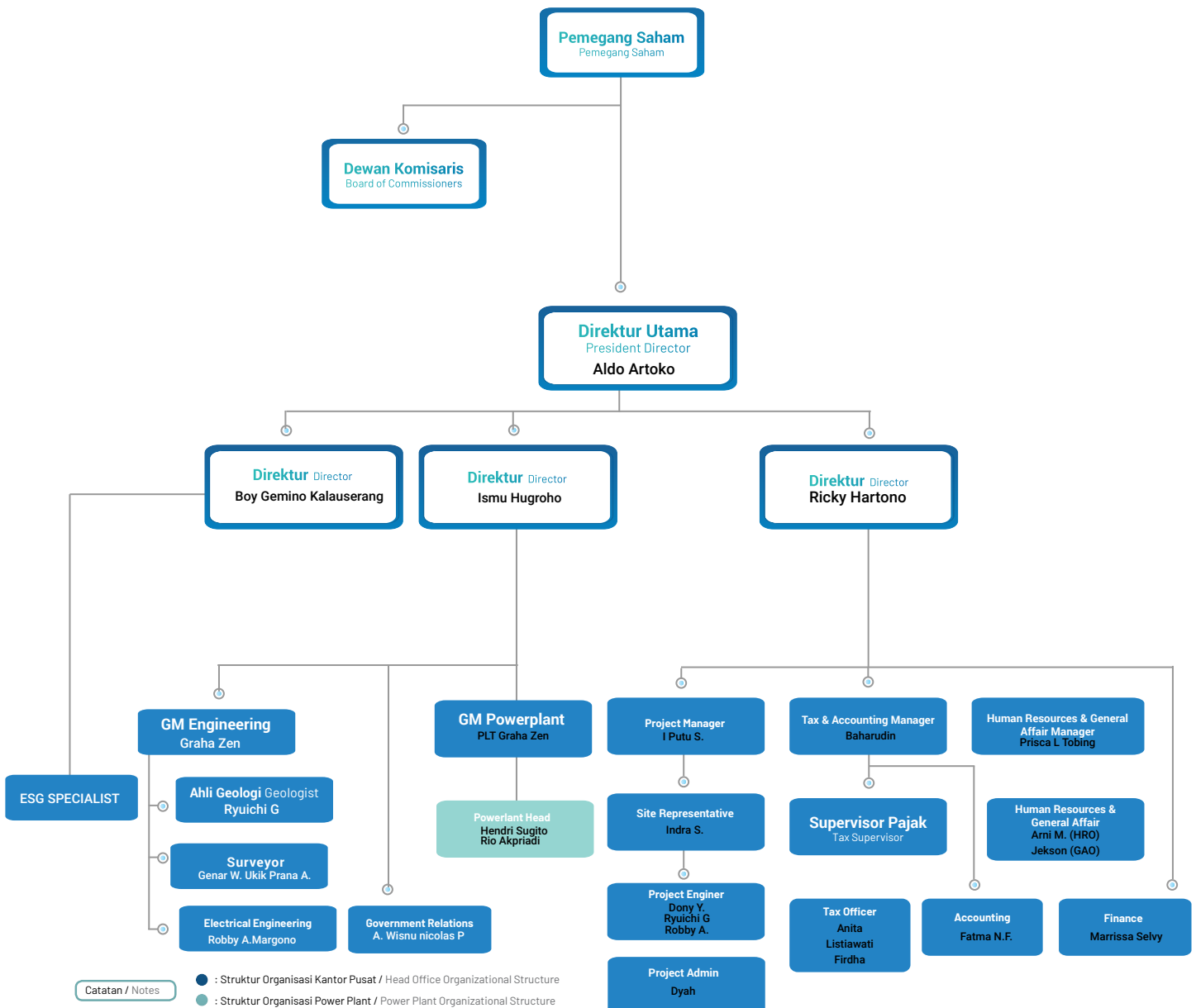
Organizational structure of Arkora Hydro as of December 31, 2022 is as follows:

STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure

Struktur organisasi Arkora Hydro per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Organizational structure of Arkora Hydro as of December 31, 2022 is as follows:





STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

Company Group Structure

Struktur grup Perseroan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The Company's group structure as of December 31, 2022 is as follows:



PROFIL MANAJEMEN

Management Profil



ARYA PRADANA SETIADHARMA
Komisaris Utama / President Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Profile

Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Usia / Age	39 tahun / years old
Domisili / Domicile	Jakarta Pusat / Central Jakarta
Dasar Hukum Penunjukkan / Legal Basis of Appointment	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020

Riwayat Pendidikan / Educational Background

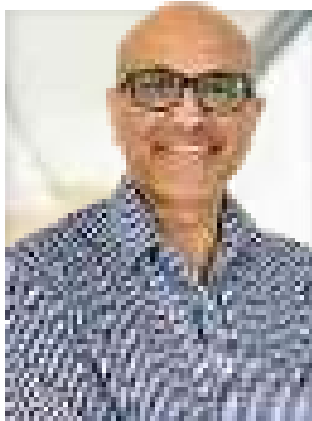
2007	Master Industrial Engineering, Purdue University. / Master's Degree in Industrial Engineering, Purdue University.
2006	Sarjana Industrial Engineering, Purdue University. / Bachelor's Degree in Industrial Engineering, Purdue University.

Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan / Employment History and Concurrent Positions

2017-sekarang / 2017-present	Direktur, PT Awan Integrasi Sandidata. / Director, PT Awan Integrasi Sandidata.
2016-sekarang / 2016-present	Komisaris Utama, PT Nodeflux Teknologi Indonesia. / President Commissioner, PT Nodeflux Teknologi Indonesia.
2016-sekarang / 2016-present	Direktur, PT Qlue Performa Indonesia. / Director, PT Qlue Performa Indonesia.
2010-sekarang / 2010-present	Direktur, PT Verdanco Engineering. / Director, PT Verdanco Engineering.

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Profile



**ABHAY
NARAYAN PANDE**
Komisaris / Commissioner

2008 - sekarang / 2008-present
Direktur Utama, PT Prasetya Dwidharma. / President Director, PT Prasetya Dwidharma.

Hubungan Afiliasi / Affiliation

Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham PT Arkora Bakti Indonesia, perusahaan induk Perseroan. / Affiliated with the shareholders of PT Arkora Bakti Indonesia, the parent company of the Company.

Kewarganegaraan / Citizenship	India
Usia / Age	55 tahun
Domisili / Domicile	New Jersey
Dasar Hukum Penunjukkan / Legal Basis of Appointment	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020

Riwayat Pendidikan / Educational Background

1993	Master of Business Administration, University of Chicago Business.
1989	Sarjana Seni, Dartmouth College. / Bachelor of Arts, Dartmouth College.

Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan / Employment History and Concurrent Positions

2016-sekarang	Chief Investment Officer, Linnean Capital Management.
2013-2016	Managing Director, American Capital LP.
1998-2013	Managing Director, Salmon Smith Barney.
1993-1998	Principal, A.T. Kearney.
1989-1991	Analyst Consultant, Lewin Group Inc.

Hubungan Afiliasi / Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi apa pun, baik dengan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan. / Not affiliated with members of the Board of Commissioners or Board of Directors of the Company.



**IWAN
HADIAN TORO**
Komisaris / Commissioner

Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Usia / Age	54 tahun / 54 years old
Domisili / Domicile	
Dasar Hukum Penunjukkan / Legal Basis of Appointment	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Arkora Hydro Tbk No. 84 tanggal 22 September 2022 / Deed of Annual General Meeting of Shareholders Resolutions of PT Arkora Hydro Tbk No. 84 dated September 22, 2022

Riwayat Pendidikan / Educational Background

1995	Sarjana Ekonomi (Manajemen Keuangan) dari Universitas Indonesia / Bachelor's Degree in Economics (Financial Management) from Universitas Indonesia
------	--

Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan / Employment History and Concurrent Positions

1998 - 2010	CFO GE Capital / CFO in GE Capital
2010 - 2015	Chief Group Treasury & Investor Relations, PT Astra International Tbk
2015 - sekarang / present	CFO PT United Tractors Tbk / CFO in PT United Tractors Tbk
2019 - sekarang / present	Presiden Komisaris PT Unitra Nusantara Persada / President Commissioner of PT Unitra Nusantara Persada



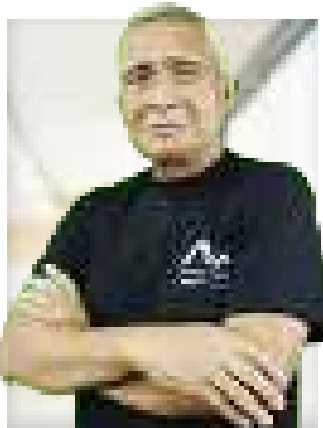
PROFIL DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners Profile

2017-sekarang / present	Komisaris PT Pamapersada Nusantara
2018-sekarang / present	Komisaris PT Acset Indonusa Tbk / Komisaris PT Acset Indonusa Tbk / Commissioner of PT Acset Indonusa Tbk
2018-sekarang / present	PT Agincourt Resources
2019-sekarang / present	Komisaris PT Buah Turangga Agung / Commissioner of PT Buah Turangga Agung
23 Desember 2016-sekarang / December 23, 2016 - present	Komisaris PT Bhumi Jati Power / Commissioner of PT Bhumi Jati Power
2021-sekarang / present	Komisaris PT Bina Pertiwi / Commissioner of PT Bina Pertiwi
2016-sekarang / present	Direktur Unitra Power Pte, Ltd / Director of Unitra Power Pte, Ltd
2019-sekarang / present	Direktur PT Unitra Persada Energia / Director of PT Unitra Persada Energia
2020-sekarang / present	Direktur PT Karya Supra Perkasa, PT Unitra Persada Energia, dan Unitra Power Pte, Ltd / Director of PT Karya Supra Perkasa, PT Unitra Persada Energia, dan Unitra Power Pte, Ltd



Hubungan Afiliasi / Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi apa pun, baik dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan / Not affiliated with members of the Board of Commissioners or Board of Directors of the Company



INDARTO

Komisaris Independent /
Independent Commissioner

Kewarganegaraan /Citizenship	Indonesia
Usia / Age	72 tahun / 72 years old
Domisili / Domicile	Bogor
Dasar Hukum Penunjukkan / Legal Basis of Appointment	Akta No. 11 Tanggal 4 Spetember 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020



Riwayat Pendidikan / Educational Background

1995	Sarjana Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya. / Bachelor's Degree in Law, Universitas Bhayangkara Surabaya.
------	--



Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan / Employment History and Concurrent Positions

2006-2008	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), Kalimantan Timur. / Head of National Police for the region of East Kalimantan.
2004-2006	Direktur Pidana Korupsi, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri). / Director of National Police Criminal Investigation Agency for Corruption.
2002-2004	Karo Analisis, Bareskrim Polri. / Bureau Head of Analysis in Criminal Investigation Agency.
2001-2002	Kapolda, Sulawesi Tenggara. / Head of National Police for the Region of South East Sulawesi.
1999-2001	Wakil Direktur Pidana Korupsi, Komando Reserse (Koserse) Polri. / Vice Director of National Police Criminal Investigation Agency for Corruption
1998-1999	Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) Purwakata, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Jawa Barat / Chief of City Police for Purwakarta Regency in West Java.



Hubungan Afiliasi / Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi apa pun, baik dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan. /

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Profile



NICKO WIDAJA

Komisaris / Commissioner

Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
Usia / Age	49 tahun / 49 years old
Domisili / Domicile	Jakarta Selatan
Dasar Hukum Penunjukkan / Legal Basis of Appointment	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Arkora Hydro Tbk No. 84 tanggal 22 September 2022 / Deed of Annual General Meeting of Shareholders Resolutions of PT Arkora Hydro Tbk No. 84 dated September 22, 2022

Riwayat Pendidikan / Educational Background

Dominican University of California

Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan / Employment History and Concurrent Positions

Sekarang	Founding CEO, BRI Usaha.
Sekarang	Ketua Komite Tetap Investasi dan Kemitraan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). / Chair of the Permanent Committee for Investment and Partnership at the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN)
Sekarang	Dosen Ajun, Institut Teknologi Bandung. / Adjunct Lecturer, Institut Teknologi Bandung
Sekarang	Anggota Dewan, LinkAja. / Board Member, LinkAja
Sekarang	Dewan Kehormatan, AMVESINDO. / Honorary Board, AMVESINDO
2015-2019	CEO Pendiri, MDI Ventures. / Founding CEO, MDI Ventures.
2018-2019	Advisory Digital Initiatives, PT Pegadaian (Persero).
2018-2019	Direksi, Anchanto. / Board of Directors, Anchanto.
2017-2019	Board Observer, Red Dot Payment.
2017-2019	Direksi, Wavcell. / Board of Directors, Wavcell
2014-2019	Advisory, Indigo Incubator.
2018-2019	Board Observer, Whispir.
2011-2015	Adjunct Professor, Universitas Pelita Harapan.
2011-2014	Founder CEO, Systec Group.
	Managing Director, Mindcode.
2004	CEO Office, PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Hubungan Afiliasi / Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi apa pun, baik dengan , baik dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan. / Not affiliated with members of the Board of Commissioners or Board of Directors of the Company



PROFIL MANAJEMEN

MANAGEMENT PROFIL

PROFIL DIREKSI

Board of Commissioners Profile



ALDO HENRY ARTOKO
Direktur Utama / President
Director

Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Usia / Age	38 tahun / 38 years old
Domisili / Domicile	Jakarta Selatan / South Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan / Legal Basis of Appointment	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020

Riwayat Pendidikan / Educational Background

1995	Sarjana Manufacturing Engineering and Management, University of New South Wales. / Bachelor's Degree in Manufacturing Engineering and Management, University of New South Wales.
------	---

Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan / Employment History and Concurrent Positions

2010-sekarang / 2010-present	Komisaris, PT Verdanco Engineering. / Commissioner, PT Verdanco Engineering.
2010-sekarang / 2010-present	Direktur, PT Arkora Indonesia. / Director, PT Arkora Indonesia.
2008-2010	Konsultan Manajemen Proyek, PT Parsons Brinckerhoff Australia. / Project Management Consultant, PT Parsons Brinckerhoff Australia.
2007	Penilaian, Perbaikan Mesin dan Proses Produksi, Rheem Australia. / Appraisal, Machinery and Production Process Improvement, Rheem Australia.

Hubungan Afiliasi / Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi apa pun baik dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan. / Does not have any affiliation with either the shareholders, members of the Board of Commissioners or the Board of Directors of the Company.



RICKY HARTONO
Direktur / Director

Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Usia / Age	38 tahun / 38 years old
Domisili / Domicile	Jakarta Barat / West Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan / Legal Basis of Appointment	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020

Riwayat Pendidikan / Educational Background

2007	Sarjana Chemical Engineering, University of Minnesota. / Bachelor's Degree in Chemical Engineering, University of Minnesota.
------	---

Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan / Employment History and Concurrent Positions

2021-sekarang / 2021-present	Direktur, PT Arkora Tenaga Matahari. / Director, PT Arkora Tenaga Matahari.
2020-sekarang / 2020-present	Direktur, PT Arkora Energi Baru. / Director, PT Arkora Energi Baru.
2018-sekarang / 2018-present	Direktur, PT Arkora Hydro Sulawesi. / Director, PT Arkora Hydro Sulawesi.

PROFIL DIREKSI

Board of Commissioners Profile



ISMU NUGROHO
Direktur Operasional /
Operational Director

2010-2017	Business Development Manager, di PT Nugraha Siti Kumala. / Business Development Manager, PT Nugraha Siti Kumala.
2009-2011	Product Manager, PT Dexa Medica.

Hubungan Afiliasi / Affiliation

Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham PT Arkora Bakti Indonesia, perusahaan induk Perseroan. / Affiliated with the shareholders of PT Arkora Bakti Indonesia, the parent company of the Company.

Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Usia / Age	68 tahun / 68 years old
Domisili / Domicile	Depok
Dasar Hukum Penunjukan / Legal Basis of Appointment	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020

Riwayat Pendidikan / Educational Background

1985	Master Teknik Jalan Raya, Institut Teknologi Bandung / Master's Degree in Highway Engineering, Institut Teknologi Bandung
1983	Sarjana Teknik Sipil, Universitas Diponegoro. / Bachelor's Degree in Civil Engineering, Universitas Diponegoro.

Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan / Employment History and Concurrent Positions

2007-2010	Deputy Manager Engineering Hydro dan Diesel Generation, PT Arkora Hydro.
1993-2007	Project Site, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
1982-1984	Project Site Engineer, PT Sapto Renggo.
1981-1982	Civil Construction Superintendent, PT Sapto Renggo.

Hubungan Afiliasi / Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi apa pun baik dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan. / Does not have any affiliation with either the shareholders, members of the Board of Commissioners or the Board of Directors of the Company.



BOY GEMINO KALAUERANG
Direktur / Director

Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Usia / Age	50 tahun / 50 years old
Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan / Legal Basis of Appointment	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Arkora Hydro Tbk No. 84 tanggal 22 September 2022 / Deed of Annual General Meeting of Shareholders Resolutions of PT Arkora Hydro Tbk No. 84 dated September 22, 2022

Riwayat Pendidikan / Educational Background

1996	Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. / Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
1983	Licensed Advocate, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). / Licensed Advocate, Indonesian Advocates Association

Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan / Employment History and Concurrent Positions

1996	Joined Astra through United Tractors group
------	--



PROFIL DIREKSI Board of Commissioners Profile

2004-2020	Chief Legal Counsel, Pamapersada Nusantara Group.
2020- Sekarang / 2016-Present	Group Legal Advisor, Pamapersada Nusantara Group.
28 Feb 2014 -Sekarang / 18 June 2021 - Present	Direktur, PT Energia Prima Nusantara.
23 December 2016- Sekarang / 18 June 2021 - Present	Direktur, PT Bhumi Jati Power.
02 May 2018- Sekarang / 18 June 2021 - Present	Presiden Direktur, PT Unitra Nusantara Persada.
18 June 2021- Sekarang / 27 June 2021	Komisaris, PT Uway Energi Perdana.
18 June 2021-Sekarang / 28 February 2014 - Present	Komisaris, PT Redelong Hydro Energy
18 June 2021-Sekarang / 23 December 2016 - Present	Komisaris, PT Iltabhi Energia Tenagahidro.
27 June 2021- Sekarang /	Direktur PT Unitra Persada Energia
2016-Sekarang / 02 May 2018 - Present	<i>Public Policy and Regulatory Head</i> , Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO).

Hubungan Afiliasi / Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi apa pun baik dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan. / Does not have any affiliation with either the shareholders, members of the Board of Commissioners or the Board of Directors of the Company.
--	--

INFORMASI PERUBAHAN KOMPOSISI MANAJEMEN Information On Changes In Management

Selama tahun 2022, terdapat perubahan komposisi anggota manajemen Perseroan. Berikut susunan anggota manajemen Perseroan hingga akhir tahun buku:

In 2022, there were changes in the Company's management members. The Company's management member structure as of the end of the fiscal year is as follows:

No	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis Of Appointment	Periode Jabatan / Term Of Office
1.	Arya Pradana Setiadharna	Komisaris Utama / President Commissioner	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years
2.	Abhay Narayan Pande	Komisaris / Commissioner	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years
3.	Nicko Widjaja	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Arkora Hydro Tbk No. 84 tanggal 22 September 2022 / Deed of Annual General Meeting of Shareholders Resolutions of PT Arkora Hydro Tbk No. 84 dated September 22, 2022	5 tahun / 5 years
4.	Iwan Hadiangoro	Komisaris / Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Arkora Hydro Tbk No. 84 tanggal 22 September 2022 / Deed of Annual General Meeting of Shareholders Resolutions of PT Arkora Hydro Tbk No. 84 dated September 22, 2022	5 tahun / 5 years
5.	Drs. Indarto S.H	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Komposisi pemegang saham Perseroan per 31 Desember 2022 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per lembar saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	9.278.400.000,00	231.960.000.000,00	
Pemegang Saham			
PT Arkora Bakti Indonesia	1.391.760.000,00	34.794.000.000,00	47,52
ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	295.038.107,00	7.375.952.675,00	10,07
PT Energi Prima Nusantara	777.487.893,00	19.437.197.325,00	26,55
Masyarakat	464.209.000,00	11.605.225.000,00	15,85
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.928.495.000,00	73.212.375.000,00	100,00
Saham dalam Portepel	6.349.905.000,00	158.747.625,00	

SHAREHOLDER COMPOSITION

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2022 is as follows:

PEMEGANG SAHAM YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH PER 31 DESEMBER 2022

SHAREHOLDERS WITH 5% SHARES OR MORE AS OF DECEMBER 31, 2022

Nama / Name	Total Saham / Total Shares	Persentase Kepemilikan (%) / Ownership Percentage (%)
PT Arkora Bakti Indonesia	1.391.760.000	47.52
ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	295.038.107	10.07
PT Energi Prima Nusantara	777.487.893	26.55
Jumlah / Total		

KEPEMILIKAN SAHAM KURANG DARI 5% OLEH KELOMPOK MASYARAKAT

Hingga 31 Desember 2022, tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat dengan persentase kurang dari 5%.

SHARE OWNERSHIP OF LESS THAN 5% BY THE COMMUNITY

As of December 31, 2022, there were no Company shares owned by the community with a percentage of less than 5%.

KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PER 31 DESEMBER 2022

Hingga 31 Desember 2022, tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki secara langsung baik oleh anggota Dewan Komisaris maupun Direksi. Kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dijelaskan sebagai berikut:

SHARE OWNERSHIP BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS AS OF DECEMBER 31, 2022

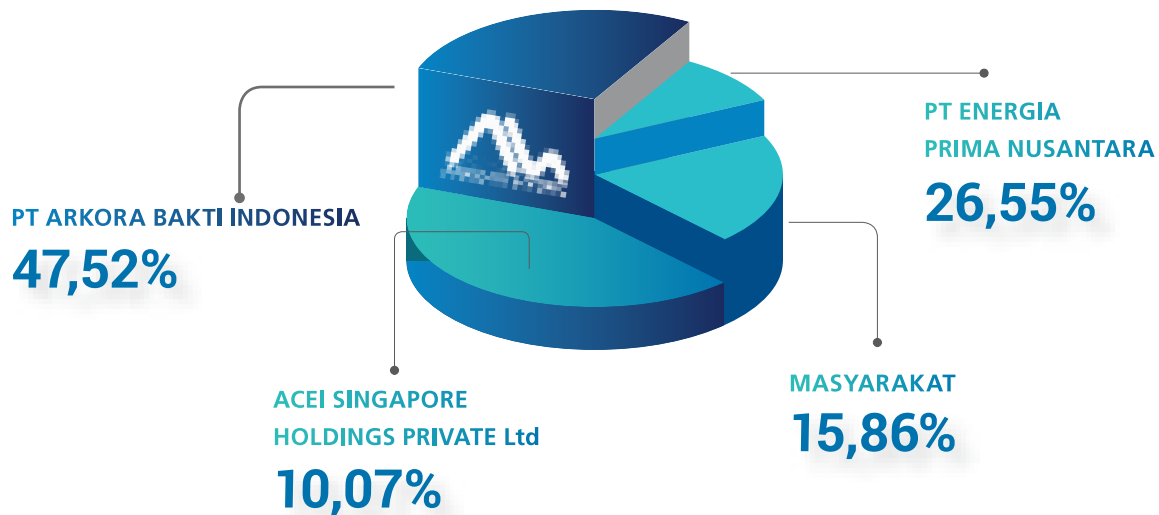
As of December 31, 2022, there were no shares of the Company which are directly owned by either the members of the Board of Commissioners or the Board of Directors. The share ownership of the Company by members of the Board of Commissioners and Board of Directors is explained as follows:



Nama / Name	Jabatan / Position	Kepemilikan Saham / Share Ownership			
		Pribadi pada Perusahaan / Individual in the Company		Bersifat Tidak Langsung pada Perusahaan / Indirect in the Company	
		Jumlah Lembar Saham / Total Shares	Persentase Kepemilikan (%) / Ownership Percentage (%)	Jumlah Lembar Saham / Total Shares	Persentase Kepemilikan (%) / Ownership Percentage (%)
Dewan Komisaris / Board of Commissioners					
Arya Pradana Setiadharna	Komisaris Utama / President Commissioner	-	-	11.869	17,06%
Abhay Narayan Pande	Komisaris / Commissioner	-	-	-	-
Indarto	Komisaris Independen / Independent Commissioner	-	-	-	-
Direksi / Board of Directors					
Aldo Henry Artoko	Direktur Utama / President Director	3.000.000	0.10%	-	-
Ricky Hartono	Direktur / Director	-	-	-	-
Ismu Nugroho	Direktur Operasional / Operation Director	-	-	5.699	8,19%

INFORMASI PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN

INFORMATION ON COMPANY SHAREHOLDER



Hingga 31 Desember 2022, pemegang saham Perseroan terdiri dari PT Arkora Bakti Indonesia dengan kepemilikan saham 47,52%, ACEI Singapore Holdings Private Ltd. dengan persentase kepemilikan saham 10,07%, PT Energia Prima Nusantara dengan persentase kepemilikan saham 26,55%, dan masyarakat dengan persentase kepemilikan saham sebesar 15,86%. Dengan kepemilikan saham tersebut, PT Arkora Bakti Indonesia merupakan pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. (mohon konfirmasi bila terdapat perubahan)

As of December 31, 2022, the Company's shareholders consisted of PT Arkora Bakti Indonesia with 47.52% share ownership, ACEI Singapore Holdings Private Ltd. with 10.07% share ownership, the public with 26.55% ownership, and the community with 15.86% ownership. With this share ownership, PT Arkora Bakti Indonesia is the major and controlling shareholder of the Company.

INFORMASI SINGKAT MENGENAI KEDUA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

BRIEF INFORMATION ON THE TWO SHAREHOLDERS OF THE COMPANY IS AS FOLLOWS:

PT ARKORA BAKTI INDONESIA

PT Arkora Bakti Indonesia merupakan perusahaan yang beroperasi pada bidang usaha Aktivitas Perusahaan Holding. Pemegang saham PT Arkora Bakti Indonesia adalah PT Arkora Indonesia dengan persentase kepemilikan 37,5%, Arya Pradana Setiadharna dengan kepemilikan 17,06%, Ardi Dwinanta Setiadharna dengan kepemilikan 17,06%, Ismu Nugroho dengan kepemilikan 8,19%, Graha Sasra Aditya Zen dengan kepemilikan 4,31%, dan Josephine Kongoasa dengan kepemilikan 15,88%. PT Arkora Bakti Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat pada alamat Gedung Office 8 Lt 21 Unit C-D Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53. Lot 28 SCBD Jakarta Selatan. PT Arkora Bakti Indonesia didirikan pada tahun 2014 berdasarkan dasar hukum Akta Pendirian No. 35 Tanggal 12 Desember 2014.

PT Arkora Bakti Indonesia is a company that operates in the Holding Company activities. The shareholders of PT Arkora Bakti Indonesia are PT Arkora Indonesia with 37.5% ownership, Arya Pradana Setiadharna with 17.06% ownership, Ardi Dwinanta Setiadharna with 17.06% ownership, Ismu Nugroho with 8.19% ownership, Graha Sasra Aditya Zen with 4.31% ownership, and Josephine Kongoasa with 15.88% ownership. PT Arkora Bakti Indonesia is domiciled in South Jakarta and has its head office at Gedung Office 8 Lt 21 Unit C-D Jl. General Sudirman Kav. 52-53. Lot 28 SCBD South Jakarta. PT Arkora Bakti Indonesia was established in 2014 based on the legal basis of the Deed of Establishment No. 35 dated

ACEI SINGAPORE HOLDINGS PRIVATE LTD

ACEI Singapore Holdings Private Ltd. merupakan perusahaan yang beroperasi pada bidang usaha investasi. Pemegang saham ACEI Singapore Holdings Private Ltd. adalah Ironmont Hydro Pte. Ltd dengan persentase kepemilikan 40%. ACEI Singapore Holdings Private Ltd. berkedudukan di Singapura dan berkantor pusat pada alamat 50 Raffles Place #37-00 Singapore Land Tower Singapore. ACEI Singapore Holding Private Ltd. didirikan pada tahun 2015 berdasarkan dasar hukum pendirian Accounting and Corporate Regulator Authority.

ACEI Singapore Holdings Private Ltd. is a company that operates in the investment business sector. Shareholders of ACEI Singapore Holdings Private Ltd. include Ironmont Hydro Pte. Ltd with 40% ownership. ACEI Singapore Holdings Private Ltd. domiciled in Singapore and headquartered at 50 Raffles Place #37-00 Singapore Land Tower Singapore. ACEI Singapore Holding Private Ltd. was established in 2015 based on the legal basis of the establishment of the Accounting and Corporate Regulator Authority.



INFORMASI ENTITAS ANAK, PERUSAHAAN ASOSIASI, ATAU VENTURE BERAMA

INFORMATION ON SUBSIDIARIES ASSOCIATES, OR JOINT VENTURES

ENTITAS ANAK LANGSUNG DIRECT SUBSIDIARIES

PT Arkora Sulawesi Selatan	
Tahun Pendirian / Year of Establishment	2011
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation	2011
Kegiatan Usaha / Line of Business	Pembangkitan tenaga listrik / Power plant
Total Aset / Total Assets	Rp375.865.571.444,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	99%
Status	Beroperasi / Operating
Alamat / Address	Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
PT Arkora Hidro Tenggara	
Tahun Pendirian / Year of Establishment	2012
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation	2012
Kegiatan Usaha / Line of Business	Pembangkitan tenaga listrik / Power plant
Total Aset / Total Assets	Rp1.994.209.386,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	99%
Status	Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address	Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
PT Arjuna Hidro	
Tahun Pendirian / Year of Establishment	2012
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation	2012
Kegiatan Usaha / Line of Business	Pembangkitan tenaga listrik / Power plant
Total Aset / Total Assets	Rp1.914.920.620,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	99%
Status	Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address	Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
PT Arkora Hidro Pasifik	
Tahun Pendirian / Year of Establishment	2011
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation	2011
Kegiatan Usaha / Line of Business	Pembangkitan tenaga listrik. / Power plant.

	Total Aset / Total Assets	Rp1.995.634.767,-
	Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	99%
	Status	Belum beroperasi / Not operating yet
	Alamat / Address	Gedung Office 8 Lt 21 Unit C-D, SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT Tirta Energi Lestari

	Tahun Pendirian / Year of Establishment	2013
	Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation	2015
	Kegiatan Usaha / Line of Business	Pembangkitan tenaga listrik. / Power plant.
	Total Aset / Total Assets	Rp576.923.162,-
	Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	99%
	Status	Belum beroperasi / Not operating yet
	Alamat / Address	Office 8 at Senopati Building Lt. 21 Unit C-D, Jl. Senopati Raya No. 8 B, Lot 28 SCBD, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT Arkora Guna Energi

	Tahun Pendirian / Year of Establishment	2012
	Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation	2012
	Kegiatan Usaha / Line of Business	Pembangkitan tenaga listrik / Power plant.
	Total Aset / Total Assets	Rp.31.485.185.321,-
	Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	99%
	Status	Belum beroperasi / Not operating yet
	Alamat / Address	Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT Hydra Sulawesi

	Tahun Pendirian / Year of Establishment	2011
	Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation	2011
	Kegiatan Usaha / Line of Business	Pembangkitan tenaga listrik. / Power plant.
	Total Aset / Total Assets	Rp1.511.250.261,-
	Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	99%
	Status	Belum beroperasi / Not operating yet
	Alamat / Address	Gedung Office 8 Lt 21 Unit C-D, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 SCBD Lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT Sulawesi Hidro Mandiri

	Tahun Pendirian / Year of Establishment	2012
	Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation	2012
	Kegiatan Usaha / Line of Business	Pembangkitan tenaga listrik / Power plant
	Total Aset / Total Assets	Rp.59.338.002.583,-



Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	99%
Status	Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address	Gedung Office 8 Lt 21 Unit C-D, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 SCBD Lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT Arkora Luwu Timur Mandiri

Tahun Pendirian / Year of Establishment	2011
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation	2011
Kegiatan Usaha / Line of Business	Pembangkitan tenaga listrik.
Total Aset / Total Assets	Rp1.917.397.510,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	99%
Status /	Belum beroperasi
Alamat / Address	Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D, Jl. Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT Arkora Sulawesi Tengah

Tahun Pendirian / Year of Establishment	2012
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation	2012
Kegiatan Usaha / Line of Business	Pembangkitan tenaga listrik / Power plant
Total Aset / Total Assets	Rp1.996.817.129,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	99%
Status	Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address	Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D, Jl. Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT Arkora Tomoni Hydro

Tahun Pendirian / Year of Establishment	2011
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation	2011
Kegiatan Usaha / Line of Business	Pembangkitan tenaga listrik / Power plant
Total Aset / Total Assets	Rp1.997.817.129,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	99%
Status	Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address	Gedung Office 8 Lt 21 Unit C-D, Jl. Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT Nosu Hydro

Tahun Pendirian / Year of Establishment	2011
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation	2011
Kegiatan Usaha / Line of Business	Pembangkitan tenaga listrik. / Power plant.
Total Aset / Total Assets	Rp1.857.298.491,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	99%

PT Nosu Hydro

Status	Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address	Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D, Jl. Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Kel. Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT Arkora Tenaga Matahari

Tahun Pendirian / Year of Establishment	2021
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation	2021
Kegiatan Usaha / Line of Business	(i) Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya; (ii) perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya; (iii) aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya; (iv) aktivitas konsultasi manajemen lainnya; (v) instalasi listrik; (vi) pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik, (vii) konstruksi bangunan sipil elektrikal. / (i) Leasing and operating lease for mining and energy machinery and equipment; (ii) wholesale of machinery, equipment and other equipment; (iii) other electric power support activities; (iv) other management consulting activities; (v) electrical installations; (vi) operation of electrical power utilization installations, (vii) construction of electrical civil buildings.
Total Aset / Total Assets	Rp19.297.031.147,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	99%
Status	Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address	Jakarta Selatan / South Jakarta

ENTITAS ANAK TIDAK LANGSUNG INDIRECT SUBSIDIARIES

PT Arkora Hydro Sulawesi

Tahun Pendirian / Year of Establishment	2011
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation	2011
Kegiatan Usaha / Line of Business	Pembangkitan tenaga listrik. / Power plant.
Total Aset / Total Assets	Rp357.962.317.493,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	99%
Status	Belum
Alamat / Address	Gedung Office 8 Lt 21 Unit C-D, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 SCBD Lot 28, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT Arkora Energi Baru

Tahun Pendirian / Year of Establishment	2012
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation	2012
Kegiatan Usaha / Line of Business	Pembangkitan tenaga listrik. / Power plant.
Total Aset / Total Assets	Rp39.245.276.960,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	99%
Status	Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address	Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D, Jl. Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.



PT Arkora Atlantik	
Tahun Pendirian / Year of Establishment	2012
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation	2012
Kegiatan Usaha / Line of Business	Pembangkitan tenaga listrik. / Power plant.
Total Aset / Total Assets	Rp1.883.531.097,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	99%
Status	Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address	Office 8 at Senopati Building Lt. 21 Unit C-D, Jl. Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT Arkora Hidronesia	
Tahun Pendirian / Year of Establishment	2012
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation	2012
Kegiatan Usaha / Line of Business	Pembangkitan tenaga listrik. / Power plant.
Total Aset / Total Assets	Rp1.511.250.261,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	99%
Status	Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address	Office 8 at Senopati Building Lt. 21 Unit C-D, Jl. Senopati Raya No. 8 B, Lot 28 SCBD, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT Arkora Sulawesi Tenggara	
Tahun Pendirian / Year of Establishment	2012
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation	2012
Kegiatan Usaha / Line of Business	Pembangkitan tenaga listrik. / Power plant.
Total Aset / Total Assets	Rp1.892.023.497,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	99%
Status	Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address	Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT Tenggara Hidro	
Tahun Pendirian / Year of Establishment	2012
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation	2012
Kegiatan Usaha / Line of Business	Pembangkitan tenaga listrik. / Power plant.
Total Aset / Total Assets	Rp1.915.891.810,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	99%
Status	Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address	Gedung Office 8 Lt 21 Unit C-D, Jl. Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Granif Konsultan		
	Tahun Pendirian / Year of Establishment	2011
	Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation	2012
	Kegiatan Usaha / Line of Business	1. Aktiftas keinsiyuran dan konsultasi teknis YBDI. / YBDI engineering and technical consultation activities 2. Aktiftas konsultasi manajemen lainnya. / Other management consultation activities
	Total Aset / Total Assets	Rp371.354.562,--
	Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	75%
	Status	Beroperasi / Operating
	Alamat / Address	Gedung Office 8 Lt 21 Unit C-D, Jl. Senopati Raya No. 8 B, Lot 28 SCBD, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Arkora Hydro Malili		
	Tahun Pendirian / Year of Establishment	2022
	Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation	2022
	Kegiatan Usaha / Line of Business	Pembangkitan Tenaga Listrik
	Total Aset / Total Assets	5.008.567.100
	Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	1. PT Arkona Tomoni Hydro : 99,98% 2. PT Arjuna Hidro : 0,02%
	Status	PMDN / Domestic Investment
	Alamat / Address	Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Lot 28 SCBD, Jakarta Selatan

PT Arkora Energi Tanggamus		
	Tahun Pendirian / Year of Establishment	2022
	Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation	2022
	Kegiatan Usaha / Line of Business	Pembangkitan Tenaga Listrik
	Total Aset / Total Assets	5.002.870.000
	Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	1. PT Arkona Guna Nergi : 99,98% 2. PT Arjuna Hidro : 0,02%
	Status	PMDN / Domestic Investment
	Alamat / Address	Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Lot 28 SCBD, Jakarta Selatan

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Capital Market Supporting Supporting Professionals And Insitutions

Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm	
KAP Imelda dan Rekan	
Nama Akuntan / Accountant Name	Muhammad Irfan
Alamat KAP / KAP Address	The Plaza Office Tower, 32 nd Floor, Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350
Nomor STTD / STTD Number	STTD.AP-08/PM.22/2018
Keanggotaan Asosiasi / Association Membership	AP.1208



Tugas Pokok / Main Duty	Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. / Carry out audits based on auditing standards set by IAPI.
Periode Penugasan / Assignment Period	Tahun buku 2022 / 2022 Fiscal Year
Biaya Audit / Audit Fee	Rp520.000.000 (termasuk entitas anak / including Subsidiaries)
Jasa Lain yang Diberikan / Other Services	-

Konsultan Hukum / Legal Consultant

Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners

Nama Partner / Partner Name	Wemmy Muharamsyah, S.H., S.E., LL.M., M.L.E.
Alamat Kantor / Office Address	Generali Tower Penthouse floor Grand Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940.
Nomor STTD / STTD Number	STTD.KH-155/PM.2/2018
Tanggal STTD / STTD Date	18 Mei 2018 / May 18, 2018
No. Anggota HKHPPM / HKHPPM Member Number	201520

Pedoman Kerja / Work Guideline	Keputusan HKHPPM No. Kep. 02/HKHPPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPPM No. KEP.03/HKHPPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021, Surat Edaran HKHPPM No. Ref. 191/DS-HKHPPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPPM 2018 dan Surat Edaran HKHPPM No. Ref. 01/DSHKHPPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPPM 2018. / HKHPPM Decree No. Kep. 02/HKHPPM/VIII/2018 dated August 8, 2018 on the Professional Standards of the Capital Market Legal Consultants Association as amended by HKHPPM Decree No. KEP.03/HKHPPM/XI/2021, dated November 10, 2019, HKHPPM Circular No. Ref. 191/DS-HKHPPM/1218 dated December 11, 2018 on the Interpretation of the 2018 HKHPPM Professional Standards and HKHPPM Circular Letter No. 191/DS-HKHPPM/1218. Ref. 01/DSHKHPPM/0119 dated January 7, 2019 on the Interpretation of the 2018 HKHPPM Professional Standards.
--------------------------------	--

Tugas Pokok / Main Duty	Dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. / In the Public Offering, to conduct an independent legal examination in accordance with the norms or Professional Standards and the code of conduct for legal consultants and provide a legal examination report on the existing facts regarding the Company which is submitted by the Company to the Legal Consultant.
Periode Penugasan / Assignment Period	Tahun 2022 / Year of 2022
Jasa Lain yang Diberikan / Other Services	-

Notaris / Notary

Sugih Haryati, S.H., M.Kn.

Alamat Kantor / Office Address	Jl. RC. Veteran Raya No.11A, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12320.
Nomor STTD / STTD Number	STTD.N-135/PM.2/2018 tertanggal 7 Agustus 2018 / STTD.N-135/PM.2/2018 dated August 7, 2018
No. Asosiasi / Association No.	Ikatan Notaris Indonesia Nomor 0429319840712 / Indonesian Notaries Association No. 0429319840712
Pedoman Kerja / Work Guideline	Undang-Undang (UU) RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris / Law (UU) of the Republic of Indonesia No. 2 of 2014 on Amendments to Law No. 30 of 2004 on Notary Positions and Notary Code of Conduct.

Tugas Pokok / Main Duty	Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek. /The scope of duties of a Notary as a supporting professional in a Public Offering includes, among others, preparing and making deeds in connection with the Public Offering, including amendments to the entire Articles of Association of the Company, the Underwriting Agreement and the Securities Administration Management Agreement.
Periode Penugasan /Assignment Period	Tahun 2022 / Year of 2022
Jasa Lain yang Diberikan / Other Services	-

Biro Administrasi Efek (BAE) / Share Registrar

PT Adimitra Jasa Korpora

Alamat Kantor / Office Address	Kirana Boutique Office. RVGW+P2R, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jakarta 14240.
Nomor STTD / STTD Number	No Kep-41/D.04/2014 tertanggal 19 September 2014
Asosiasi / Association	Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) / Member of Indonesian Share Registrar Association (ABI)
Pedoman Kerja / Work Guideline	Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia / Capital Market Regulations from OJK and the Indonesian BAE Association
Tugas Pokok / Main Duty	Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan. / Coordinate with the Managing Underwriter and the Allotment Manager regarding data on share subscriptions, reports in the Initial Public Offering in accordance with applicable regulations. Coordinate with the Allotment Manager and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia regarding allotted shares to be distributed to Sub Securities Accounts of the Subscriber, carry out the distribution of allotted shares and prepare a List of Shareholders resulting from the Initial Public Offering. The BAE is also responsible for issuing Collective Shares Certificate (SKS), if necessary.
Periode Penugasan / Assignment Period	Tahun 2022 / Year of 2022
Jasa Lain yang Diberikan / Other Services	-



WILAYAH OPERASIONAL

OPERATIONAL AREA





ALAMAT PLTA PLTA ADDRESS

No.	PLTA	Alamat / Address
1	PLTA CIKOPO 2 / CIKOPO HPP 2	Desa Panawa, Pamulihan, Garut, Jawa Barat / Panawa Village, Pamulihan, Garut, West Java
2	PLTA TOMASA / TOMASA HPP	Desa Kuku, Pamona Utara, Poso, Sulawesi Tengah / Kuku Village, Northern Pamona, Poso, Central Sulawesi
3	PLTA YAENTU / YAENTU HPP	Desa Kamba, Pamona Timur, Poso, Sulawesi Tengah / Kamba Village, East Pamona, Poso, Central Sulawesi
4	PLTA KUKUSAN 2 / KUKUSAN HPP 2	Desa Way Panas, Wonosobo, Tanggamus, Lampung / Way Panas Village, Wonosobo, Tanggamus, Lampung / Way Panas Village, Wonosobo, Tanggamus, Lampung

SITUS WEB PERUSAHAWAN

Company Website

Sebagai perusahaan terbuka, PT Arkora Hydro Tbk memahami perannya untuk menyediakan sarana media informasi melalui situs web yang beralamat di www.arkora-hydro.com. Situs resmi Perusahaan tersebut dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Sebagai bentuk penerapan keterbukaan informasi, Perusahaan selalu memperbaharui informasi di dalam situs web tersebut sesuai dengan perkembangan yang terjadi di Perusahaan.

Situs resmi Perusahaan memuat berbagai informasi yang terdiri dari menu:

Tentang Kami, berisi tentang berbagai informasi mengenai Perusahaan dengan sub menu:

- Overview/Gambaran, memuat tentang profil Perusahaan.
- Visi dan Misi, menyampaikan informasi mengenai visi dan misi Perusahaan.
- Manajemen, berisi tentang informasi profil Dewan Komisaris dan Direksi.
- SCR/TJSL, menyampaikan informasi mengenai prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dijalankan oleh Perusahaan.

Pembangkit Listrik Tenaga Air, memuat tentang operasional bisnis Perusahaan di bidang PLTA.

- Overview/Gambaran, berisi tentang informasi mengenai kegiatan bisnis Perusahaan.
- Sustainability, menyampaikan prinsip pembangunan keberlanjutan Perusahaan.

Investor

- Investasi Energi Hijau
- Informasi Pemegang Saham, mengenai informasi pemegang saham.
- Ikhtisar Data Keuangan, berisi tentang kondisi keuangan Perusahaan.
- Laporan Tahunan, informasi terkait Laporan Tahunan Perusahaan.
- Tata Kelola Perusahaan, memuat tentang regulasi dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Proyek, mengulas kegiatan operasional Perusahaan.

Berita, menyampaikan informasi mengenai perkembangan terbaru Perusahaan.

Karier, memuat informasi tentang lowongan kerja yang ada di PT Arkora Hydro Tbk.

As a public company, PT Arkora Hydro Tbk acknowledges its roles in providing information media through the web site www.arkora-hydro.com. The Company's official web site is accessible by anyone, anywhere, and anytime. As a form of information disclosure implementation, the Company always updates the information displayed in the web site according to the latest development of the Company.

The Company's web site presents several information on their menu, which consist of:

About Us, containing various information about the Company with the sub-menu:

- Overview, containing Company Profile
- Vision and Mission, conveying information on the Company's vision and mission.
- Management, consisting of the Board of Commissioners and the Board of Directors profiles.
- Social Corporate Responsibility, presenting information regarding the CSR principles implementation

Hydro Powerplant, containing the Company's HPP business operations.

- Overview, containing information on the Company's business activities
- Sustainability, conveying the Company's sustainable development principles

Investor

- Investing In Green Energy
- Shareholder Information, regarding information about shareholders
- Financial Highlight, containing the Company's financial condition.
- Annual Report, information relating to the Company's Annual Report.
- Good Corporate Governance, containing regulations and Good Corporate Governance.

Project, reviewing the Company's operational activities.

News, presenting information concerning the latest update in the Company.

Career, containing information about job vacancies in PT Arkora Hydro Tbk.



SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran yang sangat signifikan dalam kemajuan operasional bisnis Perusahaan. SDM yang memiliki kompetensi unggul dapat membawa Perseroan meraih pertumbuhan berkualitas yang berkelanjutan. Berangkat dari pemahaman tersebut, PT Arkora Hydro Tbk bertekad kuat untuk menerapkan pengelolaan dan pengembangan usaha dengan praktik pengembangan SDM secara optimal, seiring pemenuhan hak karyawan secara menyeluruh sesuai peraturan perundang-undangan dan standar terbaik yang berlaku.

Human Resources (HR) holds an important role in the progress of the Company's business operations. Human resources with excellent competence can lead the Company in achieving sustainable quality growth. With this understanding, PT Arkora Hydro Tbk is strongly committed to carrying out business management and development with strong HR development practices, in line with the comprehensive fulfillment of employee rights in accordance with the prevailing laws and regulations and the best standards.

KOMPOSISI KARYAWAN

Per 31 Desember 2022, Perseroan memiliki sejumlah 76 karyawan. Komposisi karyawan berdasarkan status karyawan, jenjang jabatan, jenjang usia, serta jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

EMPLOYEE COMPOSITION

As of December 31, 2022, the Company had ... employees. The composition of employees by employment status, position, age, and education level is as follows:

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Status Karyawan / Employment	2022	2021	2020
Laki-laki / Male	68	5	6
Wanita / Female	8	65	65
Jumlah / Total	76	70	71

EMPLOYEE COMPOSITION BY GENDER

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KARYAWAN

Status Karyawan / Employment Status	2022	2021	2020
Tetap / Permanent	60	61	62
Tidak tetap / Non-Permanent	16	9	9
Jumlah / Total	76	70	71

EMPLOYEE COMPOSITION BY EMPLOYMENT STATUS

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN JENJANG JABATAN

Jenjang Jabatan / Position	2022	2021	2020
General Manager	1	1	1
Manajer / Manager	2	2	2
Supervisor	4	4	3
Staf Senior / Senior Staff	2	2	2
Staf / Staff	43	39	33
Non-Staf / Non-Staff	24	22	21
Jumlah / Total	76	70	71

EMPLOYEE COMPOSITION BY POSITION

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN JENJANG USIA

Jenjang Usia / Age Range	2022	2021	2020
> 55 tahun / >55 years old	14	3	2
46-55 tahun / 46-55 years old	38	15	14
31-45 tahun / 31-45 years old	21	35	38
≤30 tahun / ≤30 years old	0	17	17
<21 tahun / <21 years old	0	0	-
Jumlah / Total	76	70	71

EMPLOYEE COMPOSITION BY AGE RANGE

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

Jenjang Pendidikan / Education Level	2022	2021	2020
≥S1 / ≥ Bachelor's Degree	17	13	12
Diploma / Associate Degree	7	7	7
SMA atau sederajat / Senior High School or Equivalent	24	22	24
<SMA / <Senior High School	28	28	28
Jumlah / Total	76	70	71

EMPLOYEE COMPOSITION BY EDUCATION LEVEL

PROGRAM PELATIHAN KARYAWAN

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM, Perseroan melaksanakan program pengembangan SDM secara berkelanjutan dengan berfokus pada individu-individu karyawan yang andal dan memiliki daya saing yang baik. Hal tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan karyawan dalam program-program pengembangan kompetensi, baik yang diadakan secara internal maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Informasi mengenai program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh karyawan Perseroan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

EMPLOYEE TRAINING PROGRAM

As a measure of improving HR competence, the Company carries out HR development program on an ongoing basis with an orientation towards creating reliable and highly competitive individual employees. This is realized through employee participation in competency development programs, both held internally and through collaboration with third parties.

Information regarding the competency development program participated by the Company's employees in 2022 is as follows:

No.	Tanggal Pelatihan / Training Date	Nama/Topik Pelatihan / Name/Topic of Training	Penyelenggara / Organizer	Peserta / Participants
1	17-18 Maret 2022 / March 17-18, 2022	Pelatihan Corporate Secretary / Corporate Secretary Training	Value Consult	Prisca Lumban Tobing

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan telah mengeluarkan biaya pengembangan kompetensi karyawan sebesar Rp 4.557.000

Throughout 2022, the Company has spent a total of Rp4,557,000 for the employee competency development program..



KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Employee Welfare

PT Arkora Hydro Tbk memahami bahwa kesejahteraan karyawan merupakan aspek penting yang mempengaruhi produktivitas para karyawan. Untuk itu, Perusahaan senantiasa berupaya menjalankan pemenuhan atas kesejahteraan karyawan sebagai bagian penting dalam praktik pengelolaan SDM berkelanjutan, dengan memastikan remunerasi diberikan dengan secara menyeluruh berkesesuaian terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Pemberian remunerasi dilakukan melalui Unit SDM berdasarkan struktur jabatan dalam organisasi Perseroan, yang telah diatur melalui kebijakan internal. Dalam hal besarnya remunerasi, Perseroan melaksanakan penyaluran upah bagi karyawan kontrak dengan memperhatikan ketentuan minimum yang ditetapkan Pemerintah, di antaranya melalui standar Upah Minimum Regional (UMR).

Perusahaan juga memberikan remunerasi jenis lainnya kepada para karyawan, antara lain tunjangan dan fasilitas meliputi Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan pajak penghasilan, tunjangan shift, tunjangan operasional, tunjangan telekomunikasi, serta tunjangan transportasi sesuai level jabatan karyawan.

PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

PT Arkora Hydro menyadari pentingnya berkontribusi dalam hal masa pensiun karyawan. Oleh karena itu, Perseroan memberikan fasilitas bagi karyawan tetap untuk dapat mempersiapkan masa pensiun melalui kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, meliputi jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi karyawan. Dengan memiliki dana pensiun, para karyawan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di saat pensiun.

Selain memberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan, Perusahaan juga melindungi kesehatan para karyawan melalui keikutsertaan dalam program BPJS Kesehatan yang melibatkan kontribusi oleh pemberi kerja maupun tiap-tiap karyawan yang dihitung berdasarkan persentase gaji pokok karyawan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT Arkora Hydro Tbk is aware that employee welfare is a crucial aspect for employee productivity. Therefore, the Company always strives to fulfill employee welfare as an important part of sustainable HR management practices, by ensuring that remuneration is provided in a comprehensive manner and in accordance with applicable labor regulations. Provision of remuneration is carried out through the HR Unit based on the position structure within the Company's organization, which has been regulated through internal policies. The amount of remuneration for the wage payment of contract employees is determined by paying attention to the Regional Minimum Wages (UMR) set by the Government.

The Company also provides other types of remuneration to employees, including allowances and facilities including Religious Holiday Allowance (THR), income tax allowances, shift allowances, operational allowances, telecommunications allowances, and transportation allowances according to the employee's position level.

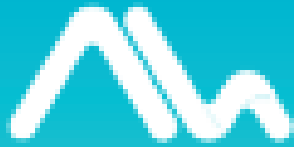
PENSION PROGRAM AND LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS

PT Arkora Hydro realizes the importance of providing appropriate contribution for employee retirement. Thus, permanent employees are provided with facilities of retirement preparation through participation in the BPJS Employment program, including pension plan and pension benefits for employees. This pension fund shall provide the necessary means for employees during their retirement.

In addition to BPJS Employment, the Company also provides health insurance for its employees through the BPJS Health program which involves contributions from employers and each employee based on a calculation from the percentage of the employee's basic salary in accordance with applicable laws and regulations.

Halaman Ini Sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

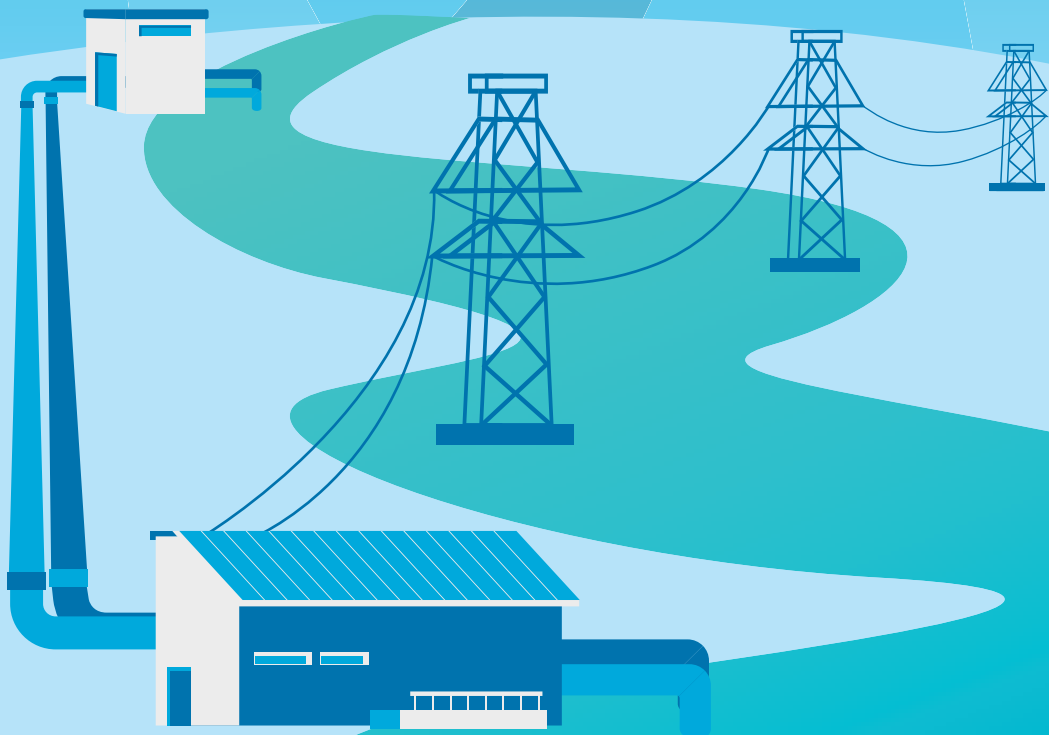


ARKORA HYDRO

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

04



TINJAUAN EKONOMI MAKRO

Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya usai, kondisi perekonomian masih terombang-ambing di atas ketidakstabilan. Berdasarkan keterangan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan global melambat dari 6,0% di tahun 2021 menjadi 3,2% pada tahun 2022. Hal senada juga disampaikan dalam laporan IMF (*International Monetary Fund*) yang mencatatkan laju proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang mengalami penurunan dari 6,0% menjadi 3,2%. Kemudian laju proyeksi inflasi global menunjukkan angka peningkatan sejak kuartal 1 sebesar 7,0% menjadi 8,3% di kuartal 4 tahun 2022. Hal ini dikarenakan oleh risiko terkait perkembangan Covid-19 yang dikhawatirkan akan terus menyebar dan memunculkan varian baru, walaupun sudah banyak vaksinasi yang tersedia di berbagai negara di Dunia. Ditambah dengan kondisi gejolak dan ketegangan geopolitik negara-negara besar di dunia, seperti Amerika Serikat dengan Cina, dan Rusia dengan Ukraina. Hal ini menyebabkan kenaikan harga-harga komoditas yang akan mendorong terjadinya inflasi tinggi diseluruh dunia.

Di lain sisi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan dan peningkatan. Pada tahun 2022 kuartal 1 pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sebesar 5,02%, hingga pada kuartal 3 meningkat menjadi 5,72% (*year on year/yoy*). Kemudian terlihat adanya peningkatan terhadap neraca dagang Indonesia yang surplus sebesar Rp14,92 miliar pada triwulan 3 tahun 2022. Nilai ekspor dan impor Indonesia mengalami pertumbuhan didukung dengan komoditas unggul yang dimiliki, hal inilah yang membuat neraca perdagangan Indonesia memperlihatkan pertumbuhan.

TINJAUAN INDUSTRI

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2020-2024, konsumsi listrik per kapita tahun 2022 ditargetkan dapat mencapai 1.268 kWh/kapita. Hingga September 2022 angka konsumsi listrik masih sebesar 1.169 kWh/kapita.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan energi listrik, Pemerintah mengandalkan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT). Keberadaan pembangkit EBT ini guna mendorong terwujudnya transisi energi melalui *Green Energy* atau energi ramah lingkungan. Pada Juni 2022 capaian bauran EBT Indonesia telah mencapai 12,8% di mana sebelumnya ditargetkan mencapai 15,7% dari bauran energi nasional dalam Prioritas Nasional (PN) Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Meskipun masih kecil, sumbangan Pembangkit Listrik

MACROECONOMICS OVERVIEW

The Covid-19 pandemic has not met its end, resulting to uncertainties and instabilities in the economics conditions. Based on Indonesia Statistics' (BPS) statement, the global growth slowed down from 6.0% in 2021 to 3.2% in 2022. The International Monetary Fund (IMF) reported a similar statement, recording the slowing global economic projection which decreased from 6.0% to 3.2%. The global inflation projection showed a rising trend since the 1st quarter, from 7.0% to 8.3% in the 4th quarter of 2022. The increase was due to the risks of the developing Covid-19, which was concerned to spread and generate new variants despite the widely available vaccinations in countries worldwide. Additionally, the geopolitical tension and turmoil of the world powers such as the United States of America and China, as well as Russia and Ukraine. These conflicts cause an increase in commodity prices, which will lead to global-scale high inflation.

On the other hand, Indonesia's economic growth in 2022 saw growth and increment. In the 1st quarter of 2022, Indonesia's economic growth climbed to 5.02%, and by the 3rd quarter it rose to 5.72% (*year on year/yoy*). There was an increase in Indonesia's balance of trade, which was a surplus of Rp4.92 billion in the 3rd quarter of 2022. Indonesia's export and import value experience growth supported by the excellent commodities, which promotes the growth in Indonesia's balance of trade.

INDUSTRY OVERVIEW

Referring to Ministry of Energy and Mineral Resources's 2020-2024 Strategic Plan, electric consumption per capita in 2022 is targeted to reach 1,268 kWh/capita. As of September 2022, the electricity consumption remained at 1,169 kWh/capita.

To be able to meet the demand for electrical energy, the Government relies on New Renewable Energy (NRE) generators. The existence of this NRE generator aims to encourage the realization of an energy transition through Green Energy or environmentally friendly energy. In June 2022, Indonesia's NRE mix reached 12.8% where previously it was targeted to reach 15.7% of the national energy mix in the National Priority (PN) Government Work Plan (RKP). Even though it is still small, the contribution of the Hydropower



Tenaga Air (PLTA) terhadap total kapasitas pembangkit EBT tergolong besar. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, secara nasional porsi penambahan pembangkit EBT sebesar 51,6% lebih besar dibandingkan penambahan pembangkit fosil sebesar 48,4 persen.

Sebagai bentuk kontribusi terhadap program Pemerintah terkait percepatan pengembangan EBT melalui PLTA, PT Arkora Hydro Tbk saat ini telah mengoperasikan 2 (dua) PLTA sebesar 17,4 MW di Jawa Barat dan Sulawesi Tengah. Arkora Hydro juga sedang melakukan pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 10 MW di Sulawesi Tengah dengan target *commissioning date* pada kuartal I-2023 dan pembangkit 5,4 MW di Lampung, Sumatera, dengan target *commissioning date* pada kuartal IV-2024.

TINJAUAN OPERASIONAL

Perseroan mengembangkan dan memiliki fasilitas berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) bertenaga aliran sungai langsung (*run-of-river*). PLTA aliran sungai langsung merupakan jenis pembangkit listrik yang hanya memerlukan sedikit atau tanpa penyimpanan air. Hingga tahun 2022, Perseroan memiliki 2 (dua) PLTA dan telah mengoperasikan pembangkit dengan kapasitas 17,4 MW. Perseroan juga memiliki *pipeline projects* dengan total kapasitas sebesar 107,7 MW.

PT Arkora Hydro terus berupaya fokus pada pengembangan dan pengoperasian PLTA. Didukung oleh tim insinyur yang ahli dan berpengalaman, Arkora Hydro siap untuk terlibat dalam percepatan perkembangan energi terbarukan di Indonesia melalui pembangunan PLTA aliran sungai langsung (*run-of-river*).

Kapasitas Produksi

Perseroan dengan 2 (dua) PLTA yang dimilikinya yaitu PLTA 7,4 MW Cikopo, dan PLTA 10 MW Tomasa mampu menghasilkan listrik dengan mencatatkan total produksi listrik mencapai 114.407 MW. Di samping itu, Perseroan memiliki LPTA Yaentu sebagai sumber pendapatan non-operasional. Hingga tahun 2022, Perseroan berhasil memenuhi target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dengan persentase sebesar 2,64%. Berikut rincian kapasitas produksi PLTA di tahun 2022:

Plant (PLTA) to the total NRE generating capacity is quite large. In the 2021-2030 Electricity Supply Business Plan (RUPTL), nationally the portion of adding EBT generators is 51.6%, which is greater than the addition of fossil power plants, which amounts to 48.4%.

As a contribution to the Government's program in NRE development acceleration through HPP, PT Arkora Hydro Tbk currently operates 2 (two) 17.4 MW HPP in West Java and Central Sulawesi. Arkora Hydro has also planned a construction of power plant with 10 MW capacity in Central Sulawesi with commissioning date target in the 1st quarter of 2023 and power plant with 5.4 MW capacity in Lampung, Sumatera, with commissioning date target in the 4th quarter of 2024.

OPERATIONAL REVIEW

The Company develops and owns Hydropower Plants fueled by run-of-river. Direct run-of-river HPP is a type of power plant that only requires little to no water storage. As of 2022, the Company has 2 (two) HPP and has operated power plants with 17.4 MW capacity. The Company also has pipeline projects with a total capacity of 107.7 MW.

PT Arkora Hydro strives to focus in HPP development and operation. Supported by a team of experienced expert engineers, Arkora Hydro is prepared to be involved in the renewable energy acceleration in Indonesia through the run-of-river HPP construction.

Production Capacity

The Company utilizes 2 (two) HPP, a 7.4 MW HPP in Cikopo and a 10 MW HPP in Tomasa, which can produce a total of 114,404 MW electricity. In addition, the Company has Yaentu HPP as the main source of non-operational income. As of 2022, the Company successfully achieved the RKAP target with the percentage of 111.82% The following is a detail of HPP production capacity in 2022:

Uraian / Description	Satuan / Unit	Realisasi 2022 / 2022 Realization		Realisasi 2021 / 2021 Realization	RKAP 2021 / 2021 RKAP	
		Nominal / Nominal	Persentase Perubahan (%) / Change Percentage (%)		Nominal / Nominal	Persentase Perubahan (%) / Change Percentage (%)
Segmen Operasi / Operating Segment						
PLTA 7,4 MW Cikopo	kWh	53.679.408	24,50%	43.115.392	45.376.800	105,25%
PLTA 10 MW Tomasa	kWh	60.727.872	15,40%	52.623.032	56.940.500	108,20%
Jumlah / Total		114.404.667	119,50%	95.738.424	102.317.300	106,87%

TINJAUAN PER SEGMENT OPERASI

Segmen Operasi PLTA 7,4 MW Cikopo

Segmen operasi ini mengacu pada aktivitas produksi yang berlangsung pada PLTA Cikopo. PLTA Cikopo merupakan jenis PLTA aliran sungai langsung yang terletak di Garut, Jawa Barat, sekitar 220 km dari Jakarta. PLTA Cikopo telah beroperasi secara penuh pada Maret 2017 dengan kapasitas produksi sebesar 7,4 MW dan perkiraan output energi tahunan sebesar 52.000 MWh.

Sebagian besar wilayah tangkapan air PLTA Cikopo terletak di dalam area hutan lindung, sehingga memungkinkan terjadinya debit air yang lebih stabil sepanjang tahun. Debit yang telah ditentukan adalah 3,2 m³ /detik dengan 264 m Net head.

OVERVIEW PER OPERATING SEGMENT

7.4 MW Cikopo HPP Operation Segment

This operating segment refers to the production activities that take place at the Cikopo HPP. Cikopo HPP is a run-of-river HPP plant located in Garut, West Java, about 220 km from Jakarta. The Cikopo HPP was fully operational in March 2017 with a production capacity of 7.4 MW and an estimated annual energy output of 52,000 MWh.

Most of the water catchment areas of the Cikopo HPP are located within a protected forest area, thus allowing for a more stable water discharge throughout the year. The predetermined discharge is 3.2 m³/s with 264 m Net head

Lokasi / Location	Jawa Barat / West Java
Kapasitas / Capacity	7,4 MW
Net Head / Net Head	264 meter
Jenis Turbin / Turbine Type	Vertical Pelton Turbine
Manufaktur Turbin / Turbine Manufacture	Wasserkraft Volk AG

PROFITABILITAS SEGMENT OPERASI / PROFITABILITY OF OPERATING SEGMENT

(dalam Rupiah / in Rupiah)

Uraian / Description	2022	2021	Perubahan / Change	
			Nominal / Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Pendapatan / Revenues	59.047.348.800	47.428.726.400	11.618.622.400	24,50%
Beban Pokok Pendapatan / Cost of Revenues	13.896.858.532	12.919.778.956	977.079.576	7,56%
Laba Kotor / Gross Profit	45.150.490.268	34.508.947.444	10.641.542.824	30,84%
Beban Usaha / Tax Expenses	20.707.200.690	11.989.667.975	8.717.532.715	72,71%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Net Profit (Loss) for the Year	(24.664.341.712)	(10.110.411.632)	(14.553.930.080)	(143,95%)

Di tahun 2022 Perusahaan memperoleh pendapatan pada segmen operasi PLTA Cikopo sejumlah Rp59,05 miliar, meningkat dengan persentase 24,50% dibanding

In 2022, the Company gained Rp59.05 billion profits from the operational segment of Cikopo Mini Power Plant, a 24.50% increase compared to the previous year's (2021)



pendapatan di tahun 2021 yang sejumlah Rp47,43 miliar. Dengan pencapaian pendapatan tersebut, Perseroan mencatatkan perolehan laba kotor dari PLTA Cikopo di tahun 2022 sejumlah Rp45,15 Miliar atau meningkat dibanding tahun 2021 yang sejumlah Rp34,5 miliar, serta mencatatkan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp24,52 miliar atau meningkat dibanding rugi bersih tahun berjalan di tahun 2021 yang sejumlah Rp10,11 miliar.

Segmen Operasi PLTA 10 MW Tomasa

Segmen operasi ini mengacu pada aktivitas produksi yang berlangsung pada PLTA Perseroan, yaitu PLTA Tomasa. PLTA Tomasa merupakan PLTA aliran sungai langsung yang berada di Poso, Sulawesi Tengah. PLTA Tomasa memulai tahap pembangunan pada tahun 2016 dan mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2020. Kapasitas pembangkit adalah sebesar 10,0 MW dengan perkiraan *output* energi tahunan sebesar 63.072 MWh.

Debit yang telah ditentukan adalah 4,5 m³/detik dengan 258 Net Head. Ketinggian bendungan adalah 590 meter di atas permukaan laut, yang memungkinkan air dialihkan ke dalam pipa menuju cekungan sedimen, untuk disalurkan melalui saluran air terbuka sebelum memasuki *penstock*.

profits, Rp47.43 billion. With this achievement of profit, the Company records gross profit earnings in 2022 amounting to Rp45.15 billion, an increase compared to the amount in 2021, Rp34.5 billion, and recorded a net loss for the year amounting to Rp24.52 billion, a decrease/increase compared to the Rp10.11 billion net loss for the year in 2021.

10 MW Tomasa MPP Operation Segment

This operating segment refers to the production activity in the Company's Mini Power Plant, MPP Tomasa. MPP Tomasa is a run-of-river HPP located in Poso, Central Sulawesi. MPP Tomasa began its construction in 2016 and started operating commercially in March 2020. The power plant's capacity is 10.0 MW with the annual output estimation of 63,072 MWh.

The predetermined debit is 4.5 m³/second with 258 Net Head. The dam's height is 590 meter above the sea level, which allows water to be diverted into the pipe to the sediment basin, to be distributed through open water channels before entering the *penstock*.

Lokasi / Location	Sulawesi Tengah / Central Sulawesi
Kapasitas / Capacity	10 MW
Net Head / Net Head	258 meter
Jenis Turbin / Turbine Type	Horizontal Pelton Turbine
Manufaktur Turbin / Turbine Manufacture	Voith

Profitabilitas Segmen Operasi / Profitability of Operating Segment

(dalam ribuan rupiah / in thousands Rupiah)

Uraian / Description	2022	2021	Perubahan / Change	
			Nominal / Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Pendapatan / Revenues	7.849.286.964	7.111.387.119	737.899.845	10,38%
Beban Pokok Pendapatan / Cost of Revenues	6.929.511.583	6.916.215.667	13.295.916	(0,19%)
Laba Kotor / Gross Profit	919.775.381	195.171.452	724.603.929	371,27%
Beban Usaha / Tax Expenses	3.297.135.541	1.405.804.578	1.891.330.963	134,54%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Net Profit (Loss) for the Year	13.350.466.592	9.248.495.898	4.101.970.694	44,35%

Di tahun 2022, Perseroan memperoleh pendapatan pada segmen operasi PLTA Tomasa sebesar Rp7,85 miliar, meningkat dengan persentase 10,38% dibanding pendapatan di tahun 2021 yang sejumlah Rp7,11 miliar. Atas pendapatan tersebut, Perseroan mencatatkan perolehan laba kotor dari PLTA Tomasa di tahun 2022 sejumlah Rp919,78 juta atau

In 2022, the Company gained Rp7.85 billion from the Tomasa MPP Operation Segment, a decrease of 10.38% compared to the revenue in 2021, which amounted to Rp7.11 billion. From this revenue, the Company recorded a gross profit of Rp919.78 million from the Tomasa MPP, or a decrease from Rp195.17 million in 2021. The MPP also generated a net

meningkat dibanding tahun 2021 yang sejumlah Rp195,17 juta, serta mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp13,35 miliar atau mengalami perubahan dibanding laba bersih tahun berjalan di tahun 2021 yang sejumlah Rp9,25 miliar.

Segmen Operasi PLTA 10 MW Yaentu

Segmen operasi ini mengacu pada aktivitas produksi yang berlangsung pada PLTA Yaentu. PLTA Yaentu merupakan PLTA aliran sungai langsung yang berlokasi di Poso, Sulawesi Tengah. Pembangunan PLTA Yaentu dimulai pada Desember 2020 dan per Februari 2021 Perseroan telah menyelesaikan jalan akses proyek. PLTA Yaentu mulai beroperasi pada tahun 2021.

PLTA Yaentu memiliki kapasitas produksi pembangkit sebesar 10 MW dengan perkiraan *output* energi tahunan sebesar 66.450 MWh.

profit for the year of Rp... billion, a turnback from Rp9.25 billion net loss for the year of 2021.

10 MW Yaentu MPP Operation Segment

The operation segment refers to the production activities in the Yaentu MPP. Yaentu MPP is a run-of-river HPP located in Poso, Central Sulawesi. The construction of Yaentu MPP began in December 2020. As of February 2021, the Company had finished the access route to the project site. By the end of 2021, Yaentu MPP had started operating.

The Yaentu MPP has a power generation capacity of 10 MW, with the annual energy output of 66,450 MWh.

Lokasi / Location	Sulawesi Tengah / Central Sulawesi
Kapasitas / Capacity	10 MW
Net Head / Net Head	165 meter
Jenis Turbin / Turbine Type	Horizontal Francis Turbine
Manufaktur Turbin / Turbine Manufacture	Voith

PROFITABILITAS SEGMENT OPERASI / PROFITABILITY OF OPERATING SEGMENT

(dalam ribuan rupiah / in thousands of Rupiah)

Uraian / Description	2022	2021	Perubahan / Change	
			Nominal / Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Pendapatan / Revenues	179.952.676.480	142.514.403.770	37.438.272.710	26,27%
Beban Pokok Pendapatan / Cost of Revenues	99.938.682.776	69.440.251.975	30.498.430.801	43,92%
Laba Kotor / Gross Profit	80.013.993.704	73.074.151.795	6.939.841.909	9,5%
Beban Usaha / Tax Expenses	4.291.394.020	3.009.507.955	1.281.886.065	42,59%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Net Profit (Loss) for the Year	65.436.459.401	50.996.317.606	14.440.141.795	28,32%

Perseroan memperoleh pendapatan pada segmen operasi PLTA Yaentu di tahun 2022 sejumlah Rp179,95 miliar, atau mengalami perubahan dibanding pendapatan dari PLTA Yaentu di tahun 2021 sebesar Rp142,51 miliar. Dengan pendapatan tersebut, Perseroan mencatatkan perolehan laba kotor dari PLTA Yaentu sejumlah Rp80,01 miliar serta mencatatkan laba bersih tahun berjalan sejumlah Rp 65,44 miliar.

The Company gained Rp179.95 billion profits from the MPP Yaentu operation segment in 2022, a rise/fall from the profit earned in 2021, Rp145.51 billion. From this revenue, the Company recorded a gross profit of Rp80.01 million from the Yaentu MPP. The MPP also generated a net profit for the year of Rp65,44 billion.



PROFITABILITAS SEGMENT OPERASI / PROFITABILITY OF OPERATING SEGMENT

(Dalam ribuan rupiah / in thousands of Rupiah)

Uraian / Description	2022	2021	Perubahan / Change	
			Nominal / Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Pendapatan / Description	1.035.180.630	1.338.903.000	(303.722.370)	(22,68%)
Beban Pokok Pendapatan /	-	-	-	-
Pendapatan / Revenues	1.035.180.630	1.338.903.000	(303.722.370)	(22,68%)
Beban Pokok Pendapatan / Cost of Revenues	2.778.936.605	1.604.790.227	(1.174.146.378)	(73,17%)
Laba Kotor / Gross Profit	(1.415.738.617)	(404.058.562)	(1.011.680.055)	(250,38%)

Perseroan memperoleh pendapatan pada segmen operasi lainnya di tahun 2022 sejumlah Rp1,04 miliar, atau mengalami perubahan dibanding pendapatan di tahun 2021 yang sebesar Rp1,34 miliar. Dengan pendapatan tersebut, Perseroan mencatatkan perolehan laba kotor dari segmen operasi lainnya sejumlah Rp Rp1,04 miliar, serta mencatatkan rugi bersih tahun berjalan sejumlah Rp1,42 miliar atau menurun dibanding rugi bersih tahun berjalan di tahun 2021 yang sejumlah Rp404,06 miliar.

The Company gained profit from other operations segment in 2022 amounted to Rp Rp1.04 billion, a decrease from Rp1.34 billion from the previous year. From the profit, the Company recorded Rp1,03 billion gross profit, as well as Rp1.42 million net loss for the year, decreasing from 2021 net loss for the year, which amounted to Rp404.06 billion.

TINJAUAN KEUANGAN / FINANCIAL REVIEW

Laporan Posisi Keuangan / Financial Position Statement

(Dalam ribuan rupiah / in thousands of Rupiah)

Uraian / Description	2022	2021	2020	Perubahan / Changes	
				Nominal / Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Aset Lancar / Current Assets	182.777.803	53.834.676	49.791.152	128.943.127	239,52%
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	765.165.431	634.779.071	510.797.090	130.386.360	20,54%
Jumlah Aset / Total Assets	947.943.234	688.613.747	560.588.242	259.329.487	37,66%
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	160.822.461	167.047.861	18.123.235	(6.225.400)	(3,73%)
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	387.109.581	350.540.265	421.750.185	36.569.316	10,43%
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	547.932.042	517.588.126	439.873.420	30.343.916	5,86%
Ekuitas / Equities	400.011.192	171.025.620	120.714.822	228.985.572	133,89%

Aset

Per 31 Desember 2022, Perseroan telah mencatatkan perolehan nilai aset sejumlah Rp947,94 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar 37,66%. Sebelumnya, aset Perseroan di tahun 2021 sejumlah Rp688,61 miliar. Jumlah aset Perseroan dipengaruhi oleh kenaikan pada aset lancar pada akun cash/bank dan kenaikan pada finansial aset.

Assets

As of December 31, 2022, the Company recorded asset value acquisition of Rp947.94 billion or increasing by 37.66%. The Company's assets in 2021 previously amounted to Rp688.61 billion. The total assets of the Company was influenced by an increase in the cash/bank account of the current assets and an increase in financial assets.

Aset Lancar

Per 31 Desember 2022, Perseroan mencatatkan perolehan aset lancar sebesar Rp182,78 miliar. Sebelumnya aset lancar di 2021 sejumlah Rp53,83 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan Cash/Bank sebesar Rp76,55 miliar, dengan presentasi peningkatan sebesar 473%

Aset Tidak Lancar

Per 31 Desember 2022, Perseroan mencatatkan perolehan aset tidak lancar sebesar Rp765 miliar, dengan peningkatan sebesar 20,54%. Sebelumnya aset tidak lancar di tahun 2021 sejumlah Rp643,78 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan nilai Finansial Aset dan Intangible Aset.

Liabilitas

Per 31 Desember 2022, Perseroan mencatatkan nilai liabilitas sejumlah Rp547,9 miliar, dengan peningkatan sebesar 5,86%. Sebelumnya jumlah liabilitas di tahun 2021 sebesar Rp517,59 miliar. Peningkatan liabilitas dipengaruhi oleh adanya tambahan loan pembiayaan *project* Yaentu.

Liabilitas Jangka Pendek

Per 31 Desember 2022, liabilitas jangka pendek Perseroan sebesar Rp160,8 miliar, dengan penurunan sebesar 3,73%. Sebelumnya Perseroan mencatatkan liabilitas jangka pendek di tahun 2021 sebesar Rp167,05 miliar. Pengurangan tersebut disebabkan oleh adanya pembayaran hutang pada pihak berelasi.

Liabilitas Jangka Panjang

Per 31 Desember 2022, liabilitas jangka panjang Perseroan sebesar Rp387,1 miliar, dengan peningkatan sebesar 10,43%. Sebelumnya Perseroan mencatatkan liabilitas jangka panjang di tahun 2021 sebesar Rp350,54 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya tambahan loan untuk pembiayaan *project* Yaentu.

Ekuitas

Per 31 Desember 2022, Perseroan mencatatkan nilai ekuitas sejumlah Rp400 miliar, dengan peningkatan sebesar 133,89%. Sebelumnya jumlah ekuitas di tahun 2021 sebesar Rp171,03 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya tambahan modal dari hasil proses IPO.

Current Assets

As of December 31, 2022, the Company's current assets amounted to Rp182.78 billion. The current assets from the year prior amounted to Rp53.83 billion. Such increase was due to the increase in cash/bank at Rp76.55 billion, or an increase of 473%.

Non-Current Assets

As of December 31, 2022, the Company recorded Rp765 billion non-current assets, a 20.54% increase from Rp643,78 billion in 2021. Such increase was due to the increasing value of Financial Assets and Intangible Assets.

Liabilities

As of December 31, 2022, the Company amounted Rp547.9 billion liabilities value, with a 5.86% increase. The Company's liabilities in 2021 was Rp517.59 billion. Such increase of the liabilities was due to additional loan for the Yaentu project.

Current Liabilities

As of December 31, 2022, the Company's current liabilities amounted to Rp160.8 billion, with a 3.73% increase. The Company's current liabilities in the previous year were Rp167.05 billion. The decrease was due to debt payment to related parties.

Non-Current Liabilities

As of December 31, 2022, The Company's non-current liabilities amounted to Rp387.1 billion, or increased by 10.43% compared to the 2021 at Rp350.54 billion. Such increase/decrease was due to the additional loan for the Yaentu project.

Equities

As of December 31, 2022, the Company's equity amounted to Rp400 billion, a 133.89% increase compared to the previous year, which amounted to Rp171.03 billion. Such increase was influenced by additional capital from the IPO.

LAPORAN LABA-RUGI / STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

(Dalam ribuan rupiah / in thousands of Rupiah)

Uraian / Description	2022	2021	2020	Perubahan / Change	
				Nominal / Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Pendapatan / Revenues	247.884.493	198.393.420	52.094.112	49.491.073	24,95%



Uraian / Description	2022	2021	2020	Perubahan / Change	
				Nominal / Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Beban Pokok Pendapatan / Cost of Revenues	(120.765.053)	(89.276.247)	(22.944.234)	31.488.806	35,27%
Laba Kotor / Gross Profit	127.119.440	109.117.174	29.149.878	18.002.266	16,50%
Laba (rugi) sebelum pajak / Tax Benefit (Expenses)	79.795.263	75.470.963	(25.834.511)	4.324.300	5,73%
Manfaat (Beban) Pajak / Profit (Loss) for the Year	(27.088.417)	(25.740.620)	2.872.939	1.347.797	5,24%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Profit (Loss) for the Year	52.706.846	49.730.343	(22.961.572)	2.976.503	5,99%
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Income (Loss) for the Year	52.739.990	50.310.798	(21.020.822)	2.429.192	4,83%
Laba (Rugi) Per Saham / Earnings (Loss) per Share	20	19	(8)	1	5,26%

Pendapatan

Per 31 Desember 2022, Perseroan mencatatkan perolehan pendapatan sejumlah Rp247,9 miliar, dengan peningkatan sebesar 24,95%. Sebelumnya pendapatan di tahun 2021 sebesar Rp 198,39 miliar. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh tercapainya output di PLTA Cikopo yang mampu melebihi target dan juga progres *project* yaentu yang sudah mencapai lebih dari 70%.

Beban Pokok Pendapatan

Per 31 Desember 2022, Perseroan mencatatkan beban pokok pendapatan sejumlah Rp120,8 miliar, dengan peningkatan sebesar 35,27%. Sebelumnya beban pokok pendapatan di tahun 2021 sebesar Rp89,276 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban terkait peningkatan pencapaian progres *project* Yaentu.

Laba Kotor

Per 31 Desember 2022, Perseroan mencatatkan perolehan laba kotor sejumlah Rp127 miliar, dengan peningkatan sebesar 16,50%. Sebelumnya laba kotor Perseroan di tahun 2021 sebesar Rp109,12 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan dari sisi pendapatan selama tahun 2022.

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

Per 31 Desember 2022, Perseroan mencatatkan perolehan Laba bersih tahun berjalan sejumlah Rp52,7 miliar, meningkat sebesar 5,99% dibandingkan di tahun 2021 sebesar Rp49,73 miliar. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan dari sisi pendapatan selama tahun 2022.

Revenues

As of December 31, 2022, the Company gained revenues which amounted to Rp247.9 billion, an increase of 24.95% compared to the previous year at Rp198.39 billion. The increase was due to the achieved target from the Cikopo Mini HPP output and the Yaentu project progressing to 70% completion.

Cost of Revenues

As of December 31, 2022, the Company's cost of revenues amounted to Rp120.8 billion or a 35.27% increase from the previous year at Rp89.276 billion. Such increase was due to the Yaentu project progress to completion.

Gross Profit

As of December 31, 2022, the Company's gross profit amounted to Rp127 billion or an increase of 16.50% compared to the previous year at Rp109.12 billion. Such increase was due to the increasing revenue in 2022.

Net Income (Loss) for the Year

As of December 31, 2022, the Company's net income for the year amounted to Rp52.7 billion, an increase from the net loss for the year in the previous year at Rp49.73 billion. Such increase was influenced by the increasing revenues throughout.

LAPORAN ARUS KAS / CASH FLOW STATEMENTS

(Dalam ribuan Rupiah / In thousands of Rupiah)

Uraian / Description	2022	2021	2020	Perubahan / Change	
				Nominal / Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi / Cash from Operating Activities	(41.121.599)	25.676.784	10.927.192	(66.798.383)	(260,1%)
Kas yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi / Cash Used in Investing Activities	(14.761.144)	(3.777.242)	(9.751.614)	(10.983.902)	(290,8%)
Kas (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan / Cash (Used in) from Financing Activities	132.430.966	(31.046.535)	10.221.126	163.477.501	526,6%
Kas dan Bank Akhir Tahun / Cash and Cash Equivalents at End of Year	92.716.717	16.168.494	25.315.488	76.548.222	473,4%

Per 31 Desember 2022, Perseroan memiliki saldo kas dan bank akhir sejumlah Rp92,72 miliar, mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 473,4%. Sebelumnya jumlah saldo kas dan bank akhir tahun Perseroan di tahun 2021 sebesar Rp16,17 miliar. Uraian lebih lanjut mengenai laporan arus kas Perseroan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kas dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2022, Perseroan mencatatkan perolehan kas bersih dari aktivitas operasi sejumlah Rp(41,12) miliar, dengan penurunan sebesar 260,1%. Sebelumnya kas bersih dari aktivitas operasi Perseroan di tahun 2021 sebesar Rp25,68 miliar, tahun 2020 sebesar Rp10,92 miliar. Pengurangan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan beban biaya untuk proses mendapatkan kenaikan pendapatan.

Kas dari Aktivitas Investasi

Per 31 Desember 2022, Perseroan mencatatkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sejumlah Rp.(14,76) miliar, dengan penurunan sebesar 290,8% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3,78 miliar. Pengurangan tersebut dipengaruhi oleh adanya pembayaran uang muka project baru di Kukusan.

Kas dari Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2022, Kas bersih yang digunakan Perseroan untuk aktivitas pendanaan sejumlah Rp132,43 miliar, dengan peningkatan sebesar 526,6% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp31,05 miliar. Perubahan tersebut disebabkan oleh tambahan dari dana IPO dan juga tambahan dana untuk *project* Yaentu yang sedang berjalan.

As of December 31, 2022, the Company's cash and cash equivalents at amounted to Rp92.72 billion or increased compared to the previous year by 473.4%. In the previous year, the Company's cash and cash equivalents amounted to Rp16.17 trillion. Further description of the Company's cash flow statement for 2021 is as follows:

Cash from Operating Activities

As of December 31, 2022, the Company's net cash obtained from operating activities amounted to Rp(41.12) billion or a 260.1% decrease. In the prior years, the net cash from Company's operations amounted to Rp25.68 billion in 2021 and Rp10.92 trillion in 2020. The decrease was influenced by increased expenses to raise more revenues.

Cash from Investing Activities

As of December 31, 2022, the Company's net cash for investing activities amounted to Rp(14.76) billion or a 290.8% decrease compared to the year prior at Rp3.78 trillion. The decrease was influenced by advance payment for the new Project in Kukusan.

Cash from Financing Activities

As of December 31, 2022, the Company's net cash for financing activities amounted to Rp132.43 billion, a 526.6% increase from Rp31.05 trillion in the year prior. The change was due to additional capital gain from IPO and additional funds for the on-going Yaentu project.



KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTABILITAS PIUTANG

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan Perseroan dalam membayar utang-utang yang dimiliki diukur dengan menghitung rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, sedangkan rasio solvabilitas merupakan perhitungan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Uraian mengenai perhitungan kedua rasio tersebut adalah sebagai berikut:

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas mengacu pada rasio lancar, Perseroan melakukan penghitungan dengan membandingkan nilai aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Per 31 Desember 2022, rasio likuiditas dari hasil rasio lancar Perseroan sebesar 113,7%. Dimana sebelumnya rasio likuiditas Perseroan di tahun 2021 sebesar 32,23%, mengalami peningkatan yang disebabkan nilai cash & bank yang semakin membaik disertai penurunan nilai hutang yang akan jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Perseroan memiliki kemampuan yang terjaga untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimiliki.

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas diukur dengan menghitung rasio perbandingan antara liabilitas dan ekuitas (Debt to Equity Ratio/DER) serta perbandingan antara liabilitas dan aset (Debt to Asset Ratio/DAR). Per 31 Desember 2022, Perseroan mencatatkan DER sebesar 1,37x dan DAR sebesar 0,58x, mengalami peningkatan. Dimana sebelumnya Perseroan mencatatkan DER di tahun 2021 sebesar 3,03x, dan DAR sebesar 0,75x. Perubahan tersebut diakibatkan oleh kenaikan nilai ekuitas dan aset di tahun 2022. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Perseroan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka panjang tiap tahunnya.

Tingkat Kolektabilitas Piutang

Tingkat kolektabilitas piutang mengacu pada durasi pengumpulan piutang oleh Perseroan dalam 1 (satu) periode tertentu. Per 31 Desember 2022, pengumpulan piutang Perseroan adalah 20 hari, sama seperti tahun sebelumnya. Hal tersebut sekaligus memperlihatkan kemampuan Perseroan yang terjaga dalam mempertahankan tingkat kolektabilitas piutang yang dimiliki.

SOLVENCY AND COLLECTABILITY RATE

Solvency

The Company's ability to pay its debts is measured by calculating the liquidity ratio and solvency ratio. The liquidity ratio is a calculation used to measure the ability to meet short-term obligations, while the solvency ratio is a calculation to measure the ability to meet long-term obligations. The description of the calculation of the two ratios is as follows:

Liquidity Ratio

The liquidity ratio refers to the current ratio, calculated by comparing the value of current assets with the current liabilities of the Company. As of December 31, 2022, the Company's current ratio was 113.7%, whereas the Company's liquidity ratio in 2021 was 32.23%, an increase due to improvement in cash & bank value as well as the decreasing payables which will mature in 1 (one) year. This shows that the Company maintains the ability to fulfil its long-term obligations.

Solvency Rate

The solvency ratio is measured by calculating the ratio between liabilities and equity (Debt to Equity Ratio/DER) and the ratio between liabilities and assets (Debt to Asset Ratio/DAR). As of December 31, 2022, the Company's DER and DAR was 1.37x and 0.58x respectively, whereas the DER and DAR from the previous year was 3.03x and 0.75x respectively. These changes were due to the rise of the equities and assets value in 2022. This shows that the Company maintains the ability to fulfil its long-term obligations every year.

Collectability Rate

Collectability rate refers to the duration of collection of receivables by the Company in a certain period. The collection of the Company's receivables in 2022 was 20 days or the same as collection period in the previous year. This duration shows the Company's ability to maintain the collectability of its receivables.

RASIO-RASIO KEUANGAN PERUSAHAAN

Rasio-rasio keuangan Perseroan untuk tahun 2022 beserta perbandingannya selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Uraian / Description	2022	2021	2020
Rasio Usaha / Business Ratio			
Gross Profit Margin	51,28%	55,00%	55,96%
Return on Asset	5,56%	7,22%	(4,10%)
Return on Equity	13,18%	29,08%	(19,02%)
Rasio Likuiditas / Liquidity Ratio			
Rasio Lancar	113,7%	32,23%	274,74%
Rasio Solvabilitas / Solvability Ratio			
Liabilitas terhadap Aset	0,58x	0,75x	0,78x
Liabilitas terhadap Ekuitas	1,37x	3,03x	3,64x

COMPANY FINANCIAL RATIOS

The Company's financial ratios for 2022 and their comparisons for the last 3 (three) years are as follows:

STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN / CAPITAL STRUCTURE

(Dalam ribuan rupiah / In thousands of Rupiah)

Uraian	2022		2021	
	Nominal / Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)	Nominal / Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Liabilitas / Liabilities	547.932.042	57,80	517.588.126	75,16
Ekuitas / Equities	400.011.192	42,20	171.025.620	24,84
Aset / Assets	947.943.234	100	688.613.746	100

Struktur modal Perseroan merujuk pada perbandingan antara nilai liabilitas dan ekuitas pada periode tertentu. Perubahan struktur modal dari satu periode menuju periode berikutnya dapat menyebabkan pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan operasional serta hasil pendapatan usaha Perseroan. Hal ini akan berdampak terhadap nilai manfaat yang diberikan kepada pemegang saham ataupun pemangku kepentingan.

Perseroan senantiasa menjalankan pengelolaan terhadap struktur modal yang dimiliki. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan dukungan yang kuat dan optimal bagi keberlangsungan usaha serta penyaluran nilai manfaat untuk pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Per 31 Desember 2022, struktur modal Perseroan memiliki aset sejumlah Rp947,94 miliar, yang terdiri atas nilai liabilitas sebesar Rp517,59 miliar dan ekuitas sebesar Rp.400,01 miliar dengan persentase masing-masing sebesar 57,80% dan 42,20% terhadap nilai aset.

Struktur tersebut memperlihatkan adanya perubahan dengan struktur pada tahun sebelumnya, dengan nilai liabilitas sebesar Rp517,59 miliar, dan nilai ekuitas sebesar Rp171,03 miliar, dengan presentase masing-masing sebesar 75,16%

The Company's capital structure refers to the ratio between the value of liabilities and equity in a certain period. Changes in the capital structure from one period to the next period can have an impact on the sustainability and results of the Company's operations, which in turn has an impact on the value of benefits provided to shareholders or stakeholders.

The Company always manages its capital structure with the aim of creating strong and optimal support for business continuity and distribution of value benefits for shareholders and stakeholders.

The Company's capital structure as of December 31, 2022, consisted of Rp547.93 Billion liabilities and Rp400.01 billion equities, with the total assets of Rp517,59 billion, or 57.80% liabilities and 42.20% equity of asset value in percentage.

This structure shows a change compared to the structure in the previous year, with liabilities value of Rp517.59 billion, and equities value of Rp171.03 billion, or 75.16% and 24.84% of Rp688.61 billion asset value in percentage respectively.



dan 24,84% terhadap aset Perseroan dengan jumlah Rp688. Rp688,61 miliar. Secara umum, persentase liabilitas dan ekuitas yang dimiliki Perseroan di tahun 2022 menunjukkan bahwa Perseroan tetap memiliki struktur modal yang kuat.

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Manajemen menjalankan pengelolaan terhadap struktur modal dengan memastikan Perseroan dapat mempertahankan keberlangsungan usaha serta memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham melalui optimalisasi saldo liabilitas dan ekuitas. Manajemen secara berkala juga melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap struktur modal Perseroan. Dalam prosesnya, Manajemen selalu meninjau dan mempertimbangkan terkait biaya permodalan dan risiko yang berhubungan terhadap aktivitas Perseroan.

Pada tahun 2022, Manajemen menetapkan rasio utang terhadap ekuitas (Debt to Equity/DER) Perseroan. Perseroan telah memenuhi penetapan tersebut secara baik dengan DER di tahun 2022 terealisasi sebesar 1,37x.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG DAN MODAL

Di tahun 2022, Perseroan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal. Sehingga informasi terkait ikatan material untuk investasi barang dan modal tidak disajikan dalam laporan ini.

REALISASI INVESTASI BARANG DAN MODAL

Pada tahun 2022, Perseroan melakukan aktivitas investasi barang modal pada aset tetap, yang tercatat menjadi nilai biaya perolehan dan akumulasi penyusutan. Nilai biaya perolehan aset Perseroan tetap di tahun 2022 sejumlah Rp155,26 juta, mengalami peningkatan sebesar 415,72% dibanding tahun 2021 sebesar Rp30,10 juta. Sedangkan nilai akumulasi penyusutan di tahun 2022 sejumlah Rp9,77 miliar, mengalami peningkatan sebesar 16,43% dibanding tahun 2021 sebesar Rp8,39 miliar.

Perincian realisasi investasi barang modal oleh Perseroan di tahun 2022 beserta perbandingannya dengan realisasi di tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

In general, the percentage of the Company's liabilities and equity in 2022 shows that the Company still has a strong capital structure.

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

The management manages its capital structure by ensuring that the Company can maintain business continuity and maximize returns to shareholders through optimization of debt and equity balance. In addition, the management periodically reviews and evaluates the Company's capital structure. As part of that review process, management considers the cost of capital and associated risks.

In 2022, the Management has determined the Company's Debt to Equity Ratio (DER). The Company has fulfilled this determination well with the DER in 2022 realized at 1.37x.

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL AND GOODS INVESTMENT

In 2022, the Company has no material commitments for new capital goods investments. Henceforth, this report does not disclose any information regarding capital goods investments.

REALIZATION OF GOODS AND CAPITAL INVESTMENT

In 2022, the Company carried out investment activities in capital goods in fixed assets which are divided into acquisition cost and accumulated depreciation. The Company's acquisition cost of fixed assets in 2022 amounted to Rp155.26 billion or an increase of 415.72% compared to 2021, which amounted to Rp30.10 billion. On the other hand, the accumulated depreciation value in 2022 amounted to Rp9.77 billion, or an increase of 16.43% compared to that of 2021, which amounted to Rp8.39 billion.

The details of the realization of capital goods investment by the Company in 2022 and its comparison with the realization in 2021 can be seen in the table below:

Uraian	2022	2021	Perubahan (%) / Change (%)
Biaya Perolehan / Description			
Pemilikan langsung / Direct acquisitions			
Peralatan / Equipment	155.262.965	30.106.270	415,72%
Kendaraan / Vehicles	733.325.920	71.450.000	926,35%
Turbin / Turbines	0	3.855.257.001	(100,00%)
Pekerjaan dalam penyelesaian / Construction in progress			
Bangunan / Building	1.208.900.000	(951.678.000)	(227,03%)
Jumlah / Total	2.097.488.885	3.005.135.271	(30,20%)
Akumulasi penyusutan / Accumulated depreciation			
Pemilikan Langsung / Direct acquisitions			
Peralatan / Equipment	51.617.923	149.299.296	(65,43%)
Kendaraan / Vehicles	156.345.563	178.478.973	(12,40%)
Jaringan tengah menengah / Medium voltage transmission	1.814.512.554	1.090.430.429	66,40%
Bangunan proyek / Project building	4.162.147.189	3.788.839.411	9,85%
Turbin / Turbine	3.587.495.524	3.185.906.254	12,61%
Aset sewa pembiayaan / Finance leased asset			
Kendaraan / Vehicles	0	-	-
Jumlah / Total	9.772.118.753	8.392.954.363	16,43%

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Terdapat sejumlah hal material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan tahun buku 2022, dengan uraian sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Januari 2023, Perusahaan dan AGN (entitas anak) telah mendirikan anak Perusahaan baru dengan nama PT Arkora Hydro Pamulihan ("AHP"). Pendirian AHP tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Pendirian No.80 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0007536.AH.01.01 tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023. Dalam anggaran dasar Perusahaan disebutkan bahwa kegiatan usaha dari AHP adalah pembangkitan tenaga listrik melalui sumber energi baru terbarukan yang berasal dari aliran air (PLTA). Susunan pemegang saham dari AHP terdiri dari PT Arkora Guna Nergi dan PT Arjuna Hidro dengan persentase kepemilikan masing-masing sebesar 99,96% dan 0,04% dengan jumlah saham sebanyak 2.500 lembar dan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000.
- Pada tanggal 15 Februari 2023, AHP (entitas anak) dan Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat ("PPJB") dengan PT Global Metal Raya (GMR) untuk pembelian saham senilai Rp 250.000.000. Lebih lanjut, AHP dan Perusahaan melakukan pelunasan dan

MATERIAL FACTS AND INFORMATION SUBSEQUENT TO ACCOUNTANT REPORT DATE

There was material information subsequent to the accountant report date for 2022 fiscal year, described as follows:

- On January 31, 2023, the Company and AGN (subsidiary) established a new subsidiary with the name PT Arkora Hydro Pamulihan ("AHP"). The establishment of AHP had been stated in the Deed of Establishment No.80 dated January 31, 2023, prepared before Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notary in Jakarta and has been approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0007536.AH.01.01 of 2023 on January 31, 2023. The Company's Articles of Association mentions that AHP's business activities includes electricity power generation through new renewable energy sourced from run-of-the-river (HPP). AHP shareholders are composed of PT Arkora Guna Nergi and PT Arjuna Hidro with ownership percentage of 99.96% and 0.04% respectively, amounting to 2,500 shares and share value of Rp1,000,000 per share.
- On February 15, 2023, AHP (subsidiary) and the Company undersigned Conditional Shareholder Purchase Agreement ("PPJB") with PT Global Metal Raya (GMR) to purchase shares with value of Rp250,000,000. Furthermore, AHP and the Company make payment and settlement of the previous shareholder debt amounting



penyelesaian atas utang pemegang saham sebelumnya sebesar Rp 18.630.000.000. Tujuan dilakukan transaksi ini adalah sehubungan dengan rencana Grup pengambil alihan saham beserta aset GMR berupa unit kantor yang berlokasi di Jakarta Selatan.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan melaksanakan kebijakan pembagian dividen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun buku, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh ditambah cadangan wajib Perseroan.

Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun buku, yaitu ketika terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara bersama-sama untuk pengembalian yang dimaksud, jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) untuk masa yang akan datang, mulai tahun 2023 berdasarkan dari laba bersih 2022, dan apabila Perseroan telah memiliki saldo laba positif.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan RUPS Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- Laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan

to Rp 18,630,000,000. The purpose of this transaction is in connection with the Group's plan to take over GMR's shares and assets in the form of an office unit located in South Jakarta.

DIVIDEND POLICY

The Company implements a dividend distribution policy in accordance with applicable laws and regulations, namely based on the decisions of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) or Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM). Prior to the end of the fiscal year, interim dividends can be distributed provided it is permitted under the Company's Articles of Association and the distribution of interim dividends does not cause the Company's net assets to be less than the issued and fully paid capital plus the Company's mandatory reserves.

The distribution of the interim dividend is determined based on the decision of the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners. If after the end of the fiscal year when the interim dividend distribution occurs, the Company suffers a loss, then the interim dividend that has been distributed must be returned by the shareholders to the Company. The Board of Commissioners and the Board of Directors will be jointly responsible for the return in question, if the interim dividend is not returned by the shareholders.

After the Initial Public Offering, the Company intends to pay cash dividends (Rupiah) of a maximum of 30% (thirty percent) for the future, starting in 2023 based on 2022 net income, and if the Company has positive retained earnings.

With due regard to the approval of the Company's GMS, the Company's Board of Directors may, from time to time, change the Company's dividend distribution policy. In its policy, the Board of Directors of the Company may reduce the number of dividends to be paid or not pay dividends at all.

Future dividend payments will depend on various factors, including:

- Retained earnings, operational and financial performance, financial condition, liquidity condition, future business prospects, cash needs, business opportunities; and

- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau akan membayar dividen atau keduanya di masa yang akan datang.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Hingga 31 Desember 2022, Perseroan belum melakukan pembayaran dividen.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Per 31 Desember 2022, tidak terdapat transaksi material dengan benturan kepentingan yang dilakukan oleh Perseroan.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sifat Hubungan dan Transaksi

Per 31 Desember 2022, tidak terdapat transaksi dengan pihak lainnya yang dilakukan oleh Perseroan.

Sifat Hubungan dan Transaksi

Informasi mengenai sifat relasi dan jenis transaksi pada transaksi dengan pihak afiliasi yang dilakukan Perseroan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Relasi / Relation Nature	Transaksi / Transaction
PT Arkora Bakti Indonesia (ABI)	Entitas induk terakhir dan pemegang saham Perusahaan / Ultimate parent entity and shareholder of the Company	Pemberi pinjaman / Lender
ACEI Singapore Holdings Private Ltd (ACEI)	Pemegang saham Perusahaan / Shareholder of the Company	Pemberi pinjaman / Lender
PT Arkora Indonesia	Pemegang saham PT Arkora Bakti Indonesia / Shareholder of PT Arkora Bakti Indonesia	Kontraktor pembangkit listrik tenaga mini hydro di AHS dan ASS, entitas anak. / Contractor of mini hydro power plant in AHS and ASS, subsidiaries.
Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan	Manajemen kunci Perusahaan	-

- Compliance with applicable laws and regulations. There is no guarantee that the Company will be able to pay dividends or will pay dividends or both in the future.

Dividends will be paid in Rupiah. Shareholders on the recording date will have the right to dividends in full amount and are subject to income tax applicable in the taxation provisions in Indonesia. Dividends received by shareholders from outside Indonesia will be subject to income tax in accordance with tax provisions in Indonesia.

The new shareholders from the Public Offering will have the same and equal rights as the existed shareholders of the Company, including the right to receive dividends.

As of December 31, 2022, the Company has not paid dividends.

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

Transactions Containing Conflict of Interest

As of December 31, 2022, the Company did not carry out any material transactions with conflicts of interests.

Transactions with Related Parties

As of December 31, 2022, the Company did not carry out any transactions with related parties.

Transaction and Relation Nature

Information regarding the nature of the relation and the type of transactions with affiliates in 2022 are as follows:



Nilai Transaksi

Nilai transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan Perseroan di tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Transaction Value

The value of transaction with the related parties in 2022 can be viewed in the following table:

Pihak Berelasi	2022	2021
Piutang lain-lain		
Aldo Henry Artoko	-	181.000.000
Arya Pradana Setiadharna	-	80.000.000
Ardi Dwinanta Setiadharna	-	80.000.000
Lainnya	102.671.988	2.671.988
Jumlah	102.671.988	343.671.988
Pinjaman dari pihak berelasi		
Pokok pinjaman		
ACEI	62.924.000.000	114.152.000.000
ABI	-	7.000.000.000
Akrual bunga		
ACEI	65.187.426.088	90.062.086.060
ABI	-	118.333.333
Jumlah	128.111.426.088	211.332.419.393

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI

Di tahun 2022 tidak terdapat informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, dan restrukturisasi pada Perseroan maupun entitas anak.

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION AND RESTRUCTURING

In 2022 there was no material information regarding investment, expansion, divestment, acquisition and restructuring of the Company and its subsidiaries.

PROSPEK USAHA

Pada tahun 2022, sektor bisnis pengadaan listrik dan air mengalami pertumbuhan sebesar 8,05% (YoY) dengan nilai distribusi meningkat sebesar 1,02%. Hal tersebut terlihat dari dampak konsumsi rumah tangga yang meningkat, dan menjadi salah satu penyumbang utama dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), dan akan terus meningkat tiap tahunnya.

BUSINESS PROSPECT

In 2022, the electricity and water procurement business sector grew by 8.05% (YoY) with distribution value increasing by 1.02%. This can be seen from the impact of increased household consumption and is one of the main contributors to Gross Domestic Product (GDP) and will continue to increase every year.

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, pertumbuhan listrik Indonesia diproyeksi terealisasi sebesar 4,9% per tahun, dengan mempertimbangkan adanya penurunan *demand* karena pengaruh situasi pandemi Covid-19. Menyikapi hal itu, Pemerintah akan terus mengupayakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan energi terbarukan untuk pembangkit listrik. Hal ini menjadi bagian dari rencana strategis Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dalam pengembangan pembangkit listrik *Net Zero Emission* (NZE). Diperkirakan hingga 2025, pencapaian EBT

Based on PLN's 2021-2030 Electricity Supply Business Plan (RUPTL), Indonesia's electricity growth is projected to be realized at 4.9% per year, taking into account the declining demand due to Covid-19 pandemic. As a response, the Government strives to further optimize the use of renewable resources and energy for power generation. This is part of the New Renewable Energy and Energy Conservation (EBTKE) strategic plan in the development of the Net Zero Emission (NZE) power plant. It is estimated that until 2025, the achievement of EBT in Indonesia will be 23%, where Indonesia targets to be able to achieve net zero emissions in

di Indonesia sebesar 23%, di mana Indonesia menargetkan pada tahun 2060 mampu mencapai *net zero emission*. EBTKE juga memperkirakan di tahun 2035 akan didominasi oleh *Variable Renewable Energi* (VRE) dengan mengembangkan PLTS yang ada di seluruh Indonesia.

Dengan memperhatikan proyeksi ekonomi tersebut, manajemen optimistis Perseroan memiliki prospek usaha yang kuat untuk tahun 2023. Manajemen melalui fungsi-fungsi terkait memastikan bahwa Perseroan memiliki sumber daya yang memadai untuk dapat menghadapi tantangan dan peluang yang ada di tahun 2023 dengan pencapaian yang optimal. Perseroan memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik nasional. Hal tersebut yang akan direalisasikan dan ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET TAHUN 2022 DAN PROYEKSI TAHUN 2023

Perseroan telah menetapkan target-target kinerja dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), RKAP tahun 2022 maupun 2023. Perbandingan realisasi kinerja Perseroan di tahun 2022 serta target yang ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

2060. EBTKE also estimates that in 2035 it will be dominated by Variable Renewable Energy (VRE) by developing PLTS throughout Indonesia.

By considering these economic projections, the management is optimistic about the strong business prospects for the Company in 2023. Through related functions, the management ensures the Company has adequate resources in facing the challenges and opportunities with optimal achievements in 2023. The Company has great potential to contribute to meeting the national electricity demand. This will be realized and stipulated in the 2023 Work Plan and Corporate Budget (RKAP).

COMPARISON BETWEEN REALIZED PERFORMANCE WITH 2022 TARGETS AND 2023 PROJECTIONS

The Company has set performance targets in the preparation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP), both 2022 and 2023 RKAP. Comparison of the Company's performance realization in 2022 with targets for 2021 and targets set for 2023 are as follows:

(dalam ribuan Rupiah / in thousands of Rupiah)

Uraian / Description	Target dalam RKAP 2022 / 2022 RKAP Target	Realisasi 2022 / 2022 Realization		Target dalam RKAP 2023 / 2023 RKAP Target
		Nominal / Nominal	Pemenuhan (%) / Fulfilment (%)	
Pendapatan / Revenues	245.880.000	247.884.493	100,8%	259.105.800
Beban Pokok Pendapatan / Cost of Revenues	(129.000.000)	(120.765.053)	100%	133.849.412
Laba Kotor / Gross Profit	116.880.000	127.119.440	100,87%	125.256.388
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Net Profit (Loss) for the Year	56.552.400	52.706.846	93,20%	60.112.972
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Income (Loss) for the Year	54.093.600	52.739.990	97,49%	60.125.255

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN

Pada tahun 2022, tidak terdapat sejumlah perubahan peraturan perundang-undangan dengan pengaruh yang signifikan terhadap Perseroan.

CHANGES IN THE LAWS AND REGULATIONS WITH SIGNIFICANT EFFECT

Throughout 2022, there were no/a number of changes to laws and regulations with a significant impact on the Company.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN

a. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pengatribusian imbalan pada periode jasa

CHANGES IN ACCOUNTING POLICY WITH SIGNIFICANT IMPACT TO THE COMPANY

a. Accounting Policy Changes

Compensation attribution in the period of service In



Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) menerbitkan siaran pers dan mengklarifikasi pengatribusian imbalan pada periode jasa untuk program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaan (UU Ketenagakerjaan).

Grup telah menerapkan panduan dalam siaran pers dan menerapkan perubahan yang diperlukan atas kebijakan akuntansi. Grup menentukan bahwa dampak atas perubahan tersebut tidak material terhadap laporan keuangan periode berjalan dan periode sebelumnya.

b. Amandemen/Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam periode berjalan, Grup telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/penyesuaian baru PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Penerapan atas PSAK baru/ revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

PSAK 57 (amendemen) Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi – Kontrak Merugi – Biaya Memenuhi Kontrak

Grup telah menerapkan amendemen PSAK 37 untuk pertama kali di tahun berjalan. Amendemen ini menjelaskan bahwa 'biaya untuk memenuhi' kontrak terdiri dari 'biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak'. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut (misalnya tenaga kerja langsung atau material) dan alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak (misalnya alokasi biaya penyusutan atas aset tetap yang digunakan dalam memenuhi kontrak tersebut).

Penyesuaian tahunan 2020 atas PSAK – Amendemen PSAK 71 Instrumen Keuangan dan PSAK 73 Sewa

Grup telah menerapkan amendemen Penyesuaian tahunan 2020 atas PSAK untuk pertama kali di tahun berjalan. Penyesuaian tahunan ini termasuk amendemen atas dua (2) standar berikut:

PSAK 71 Instrumen Keuangan

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa dalam menerapkan

April 2022, the Financial Accounting Standards Board of Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI) published a press release that clarifies compensation attribution in the period of service for pension program based on the Manpower Law or Job Creations Bill as well as the implementing regulations (Manpower Law).

The Group has determined the guidelines and implemented necessary changes upon the accounting policy. The Group determined that the impact of these changes was immaterial toward the the current financial statements and the financial statements from the previous period.

b. Amendment/Standard Adjustment Effective for the Current Year

In the current period, the Group has implemented standard and several amendments/PSAK recent adjustments relevant to the operations and effective for the accounting period beginning on or after January 1, 2022. The implementation of the recent/revised PSAK will not invoke any changes to the Group's accounting policies not will it cause any material impact to the sum reported in the financial statements.

PSAK 57 (amendemen) Provision, Contingency Liabilities, and Contingency Assets – Losing Contracts – The Cost of Fulfilling the Contract

The Group has implemented the PSAK 37 amendment for the first time in the current year. This amendment clarifies that the 'cost to fulfill' in the contract consists of 'costs directly related to the contract'. Costs directly related to the contract consists of incremental costs to fulfil the aforementioned contract (e.g., direct manpower or material) or other allocation of depreciation costs on fixed assets used in fulfilling the contract.

2020 Yearly Adjustment upon PSAK – PSAK 71 Financial Instruments and PSAK 73 Lease Amendments

The Group has implemented amendment for the 2020 Yearly Adjustment upon PSAK for the first time in the current year. This yearly adjustment includes the two (2) standard amendments:

PSAK 71 Financial Instruments

This amendment clarifies that in applying the 'ten percent'

uji 'sepuluh persen' untuk menilai apakah liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya, entitas hanya memasukkan imbalan yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk imbalan yang dibayar atau diterima baik peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

PSAK 73 Sewa

Amandemen ini menghilangkan ilustrasi penggantian perbaikan sewa.

ASPEK PEMASARAN

Strategi Pemasaran

Perseroan melakukan pengelolaan terhadap aspek pemasaran secara berkala dan juga melakukan penyesuaian terhadap perkembangan dan kondisi pasar. Perseroan menentukan strategi-strategi pemasaran melalui proses analisis dan penelaahan terhadap faktor-faktor yang relevan, serta melakukan evaluasi secara berkala dengan tujuan untuk melakukan pengembangan strategi di masa mendatang.

Pada tahun 2022, Perseroan telah menjalankan sejumlah strategi pemasaran meliputi upaya dalam menjaga tingkat pemenuhan energi, serta juga menjaga tingkat kepuasan pelanggan utama Perseroan, yaitu PT PLN (Persero).

Pangsa Pasar

Perseroan melakukan penghitungan terhadap besaran kontribusi pasokan listrik kepada PT PLN (Persero). Hingga tahun 2022, total produksi listrik Perseroan sebesar 353.051 Mwh. Pendapatan Perseroan terdiri dari penjualan jasa konstruksi dan energi listrik kepada PT PLN (Persero). Perseroan mampu memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan energi listrik PT PLN (Persero) dari sumber Energi Baru Terbarukan (EBT).

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

PT Arkora Hydro Tbk senantiasa memastikan keberlangsungan bisnis Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan secara berkala telah melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kemampuan Perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian dan evaluasi tersebut, kesehatan Perusahaan dalam kondisi yang baik. Perusahaan juga memiliki sumber daya yang dapat menunjang keberlanjutan usahanya. Mengacu pada hal itu, Perusahaan tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan dalam melanjutkan bisnisnya.

test to assess whether a financial liability is derecognized, the entity includes only the compensation paid or received between the borrower and the lender, including the compensation paid or received by either the borrower or the lender on behalf of the other party.

PSAK 73 Lease

This amendment eradicates the illustration of a lease repair replacement.

MARKETING ASPECT

Marketing Strategy

The Company understands that marketing is one aspect that is fundamentally important and has a significant effect on the success of business management and development. The Company determines marketing strategies through a process of analysis and review of relevant factors, as well as periodically conducting evaluations as the basis for developing future strategies.

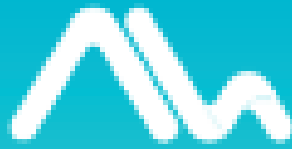
In 2022, the Company has implemented several marketing strategies including efforts to maintain compliance levels based on annual work contracts and other efforts to maintain the satisfaction level of the Company's main customer, namely PT PLN (Persero).

Market Share

The Company measures its market share by calculating the contribution of the Company's electricity supply to PT PLN (Persero), compared to the overall electricity supply from HPP As of 2022, the total electricity produced was 353,051 MWh. The Company was able to contribute to meeting the electricity needs of PT PLN (Persero) from New Renewable Energy (NRE) sources.

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

PT Arkora Hydro Tbk always ensures the continuity of its business. Thus, the Company periodically assesses and evaluates the Company's ability in achieving the determined targets. Based on the conducted assessment and evaluation, the Company is in a healthy state. The Company also has resources that can support the sustainability of its business. Referring to this matter, the Company does not see any material uncertainty that may cast significant doubt on the Company's ability to continue its business.

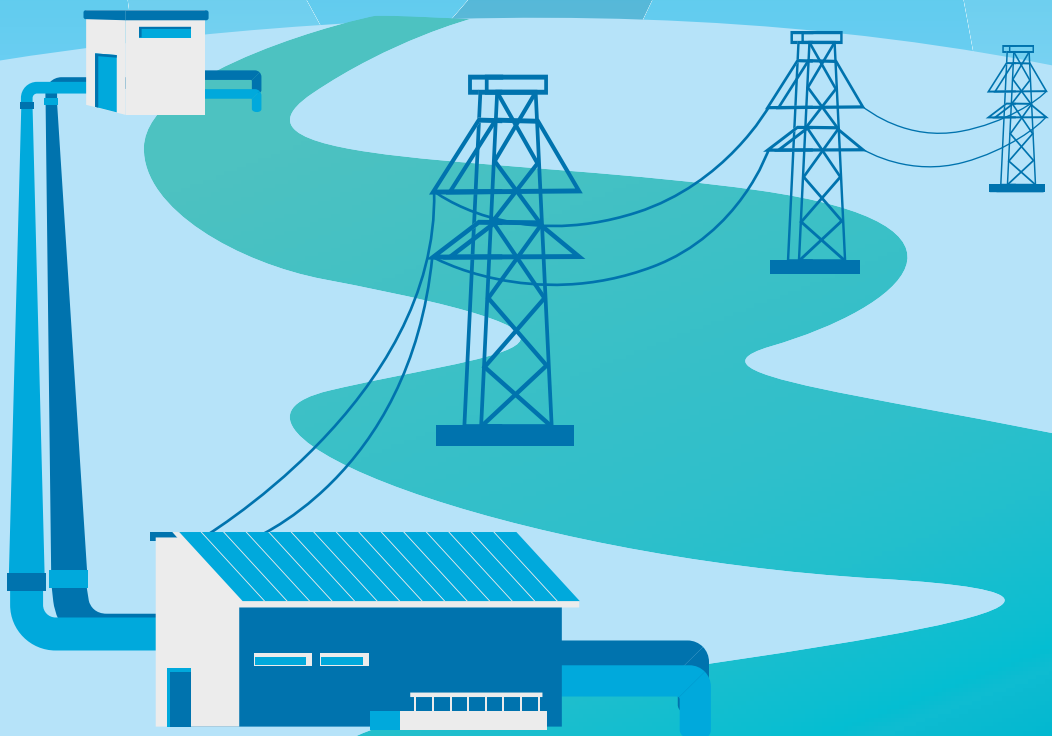


ARKORA HYDRO

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

06



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance



Dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan sekaligus membangun ketangguhan bisnis dalam menghadapi dinamika iklim bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis, Perusahaan wajib menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Berangkat dari pemahaman tersebut, PT Arkora Hydro Tbk berkomitmen kuat melaksanakan penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, komprehensif, dan berkelanjutan.

Perusahaan menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG bukan hanya menjadi suatu bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun lebih dari itu, penerapan GCG telah menjadi pondasi utama

To improve the Company's performance as well as establish business resilience in facing the increasingly dynamic and competitive business climate, the Company is required to implement Good Corporate Governance (GCG). From this apprehension, PT Arkora Hydro Tbk is strongly committed to carrying the implementation of GCG principles consistently, comprehensively, and sustainably

The Company acknowledges that the implementation of GCG principles is not merely a form of compliance with the prevailing laws and regulations, but to a greater extent, the GCG implementation has become the main foundation



dalam menjalankan operasional bisnis Perusahaan. Dengan menerapkan GCG secara optimal, Perusahaan dapat terhindar dari ketidakpastian dan risiko bisnis di masa mendatang, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal Perusahaan. Pada pelaksanaannya, semua keputusan strategis yang dilakukan oleh Dewan Komisaris maupun Direksi senantiasa mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG, yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Perusahaan senantiasa memastikan bahwa penerapan prinsip GCG dapat berjalan optimal. Untuk itu, Perusahaan mendorong seluruh insan PT Arkora Hydro wajib menerapkan prinsip-prinsip GCG di dalam setiap kegiatan operasional Perusahaan secara konsisten, sistematis, dan komprehensif, sehingga Perusahaan dapat bertumbuh kuat dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perusahaan juga memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan Perusahaan dengan pemangku kepentingan karena pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip GCG mendukung pengelolaan Perusahaan menjadi lebih transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, Perusahaan senantiasa berupaya melakukan peningkatan kualitas penerapan praktik terbaik GCG secara terus-menerus dengan melakukan pemutakhiran berbagai kebijakan, standar, pedoman, prosedur yang disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keadaan lingkungan bisnis, serta perkembangan usaha, dan kinerja Perusahaan

PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA DI PERUSAHAAN

Komitmen teguh PT Arkora Hydro dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan diwujudkan dengan pemenuhan perangkat kebijakan yang dapat mendukung secara sistematis penerapan dan penegakan Tata Kelola Perusahaan. Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, Perseroan berpedoman pada 5 (lima) prinsip dasar GCG, sebagai berikut:

1. Transparansi

Perseroan menjamin keterbukaan dalam mengenai pengambilan keputusan, kinerja Perusahaan, kondisi keuangan, dan informasi lain secara memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan dan tepat waktu serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tanpa mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia Perseroan

in running the Company's business operation. By optimally implementing GCG, the Company avoids uncertainty and business risks in the future, both caused by internal and external factors of the Company. In its practice, all strategic decisions made by the Board of Commissioners and the Board of Directors always takes into account the principles of GCG, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

The Company consistently ensures the GCG principles are optimally implemented. Therefore, the Company encourages all personnel of PT Arkora Hydro to participate in implementing GCG principles in every operational activity of the Company consistently, systematically, and comprehensively, in order for the Company to flourish strongly and sustainably.

Implementing the GCG principles in the Company's work environment also aligns with its purpose to create a balance between the interest of the Company and the interest of stakeholders as GCG principles support a more transparent, professional, and responsible corporate governance. Subsequently, the Company continuously strives to improve the best quality of GCG implementation by updating various policies, standards, guidelines, and procedures adapted to changes in applicable laws and regulations, business environment conditions, as well as business development, and Company performance.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

PT Arkora Hydro's strong commitment to implementing Good Corporate Governance consistently, systematically and sustainably is realized by the fulfillment of policy instruments that can systematically support the implementation and enforcement of Good Corporate Governance. In implementing the principles of GCG, the Company refers to the 5 (five) basic principles of GCG, as follows:

1. Transparency

The Company ensures transparency in decision making, Company performance, financial condition, and other information that is adequate, clear, accurate, comparable and timely and easily accessible to stakeholders, without reducing the obligation to protect the Company's confidential information in accordance with the Company's policies and

yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan Perusahaan secara tepat waktu, akurat dan dapat diakses oleh publik.

2. Akuntabilitas

Perusahaan bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan yang diambil dan memastikan pengelolaannya berjalan dengan baik, adil dan terukur sesuai dengan kepentingan Perseroan, Pemegang Saham, dan Pemangku Kepentingan.

3. Tanggung Jawab

Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertindak secara bertanggung jawab terkait seluruh kegiatan operasionalnya terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan.

4. Kemandirian

Perusahaan dikelola secara profesional dan bebas dari benturan kepentingan serta tanpa tekanan atau intervensi dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan serta prinsip korporasi yang sehat.

5. Keadilan

Perusahaan memastikan perlakuan yang setara dan adil dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR HUKUM PENERAPAN TATA KELOLA DI PERUSAHAAN

Penerapan GCG Perusahaan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* lainnya yang sesuai dan relevan dengan bidang usaha yang dijalankan.

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

regulations in a timely, accurate and accessible manner to the public.

2. Accountability

The Company is responsible for all decisions and actions taken and ensures that their management runs properly, fairly, and measurably in accordance with the interests of the Company, Shareholders, and Stakeholders.

3. Responsibility

The Company carries out its business activities based on sound corporate principles, fulfillment of obligations to the Government in accordance with applicable laws and regulations, and act responsibly in relation to all of its operational activities towards society and the environment, so that the business can develop in a sustainable manner.

4. Independence

The Company is managed professionally and free from conflicts of interest and without pressure or intervention from any party that is not in accordance with the Company's Articles of Association, laws and regulations, and sound corporate principles.

5. Fairness

The Company ensures equal and fair treatment in fulfilling the rights of Stakeholders in accordance with the prevailing laws and regulations.

LEGAL BASIS FOR CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The implementation of the Company's GCG refers to several applicable laws and regulations as well as other best practices that are appropriate and relevant to the line of business being carried out.

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 on Disclosure of Public Information;
3. Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition;
4. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering;
5. Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 on Amendments to Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption;



6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 7. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 9. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 10. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
 11. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik;
 12. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
 13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 14. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Kerja Komite Audit;
 15. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
 16. POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
 17. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 18. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
 19. POJK No. 41/POJK.04/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik;
 20. SEOJK No. 16/ SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik;
 21. Anggaran Dasar Perseroan.
6. Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition;
 7. Law No. 8 of 1995 on the Capital Market;
 8. Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company;
 9. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
 10. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
 11. OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies;
 12. OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 on Implementation of Public Company Governance Guidelines;
 13. OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 on Additional Capital of Public Company by Granting Pre-emptive Rights;
 14. OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Charter of the Audit Committee Work Committee;
 15. OJK Regulation No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter;
 16. OJK Regulation No. 29/POJK.04/2016 on the Annual Report of Issuers or Public Companies;
 17. OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company;
 18. OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies;
 19. OJK Regulation No. 41/POJK.04/20210 on the Implementation of Electronic Public Offering of Equity Securities, Debt Securities and/or Sukuk;
 20. Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies;
 21. Company's Articles of Association.

STRUKTUR TATA KELOLA

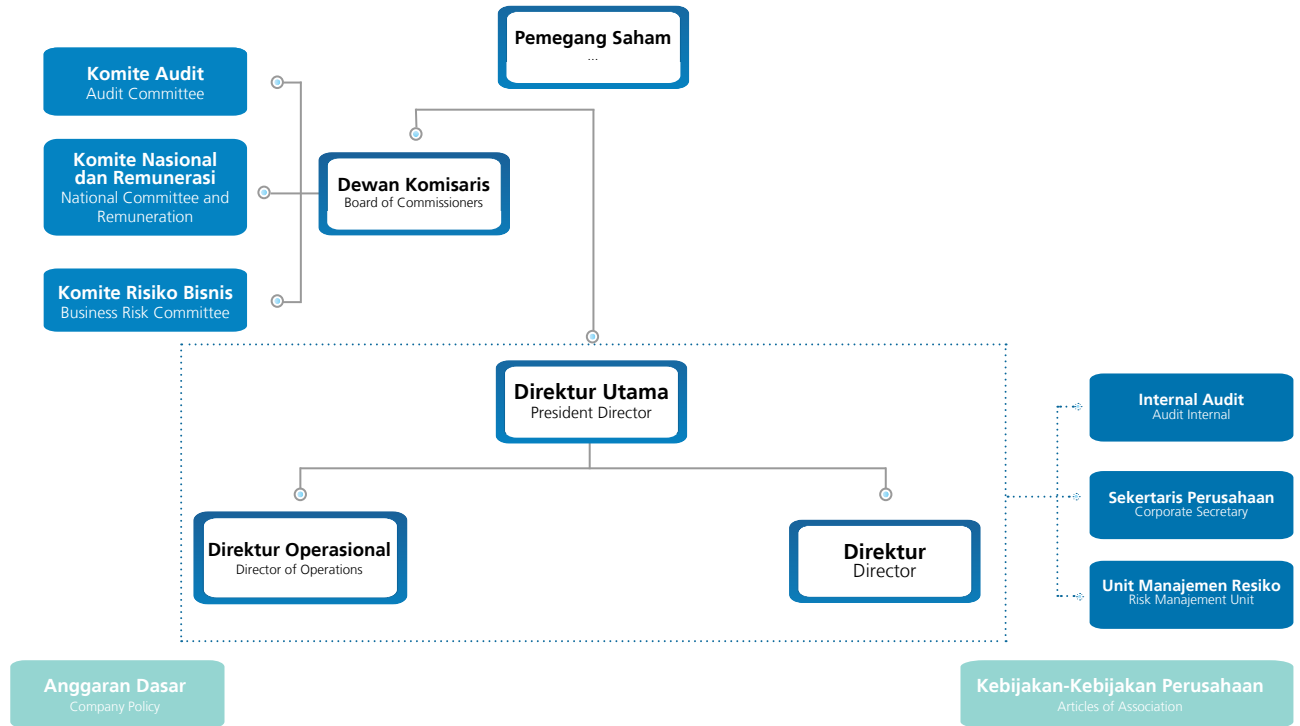
Struktur Tata Kelola Perusahaan PT Arkora Hydro Tbk mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. Struktur umum Tata Kelola Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi yang berkedudukan sebagai organ utama dalam melakukan tugas-tugas

GOVERNANCE STRUCTURE

The Corporate Governance structure of PT Arkora Hydro Tbk refers to the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. The general structure of Corporate Governance consists of the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors which are the main organs in carrying out the

pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha. Keseluruhan organ utama tersebut berperan dalam melaksanakan proses *check and balances* kegiatan usaha dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan secara adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

tasks of controlling and supervising business activities. All of these main organs play a role in carrying out the check and balances process for business activities that can be managed and accounted for fairly in accordance with applicable regulations.



PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PT Akora Hydro Tbk menyadari bahwa penerapan praktik GCG harus selalu disempurnakan secara terus-menerus, sehingga Perusahaan dapat tumbuh kuat secara berkelanjutan. Untuk itu, Perusahaan melakukan penilaian penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan dengan penilaian sendiri (*self-assesement*) dan secara prosedural dengan mengacu kepada kaidah-kaidah tata kelola perusahaan serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas penerapan GCG. (mohon data apakah di tahun 2022 Perusahaan telah memiliki penilaian GCG?)

ASSESSMENT ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

PT Akora Hydro Tbk acknowledges that the practice of GCG implementation needs to be consistently polished, in order for the Company to grow sturdily and sustainably. Therefore, the Company conducts assessment on GCG implementation practices through self-assessment and procedural that refers to the corporate governance principles and compliance to with applicable laws and regulations. Hereafter, the assessment results is used in evaluation for improvements, so the Company can increase the quality of GCG implementation.

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI GCG

Untuk dapat memberikan pemahaman tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PT Arkora Hydro telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan internalisasi GCG

GCG SOCIALIZATION DISSEMINATION AND INTERNALIZATION

For a better comprehension in implementing Good Corporate Governance, PT Arkora Hydro held several GCG dissemination and internalization activities throughout 2022, namely the



selama tahun 2022, antara lain melalui kegiatan sosialisasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan pada website Perusahaan yang dapat diakses oleh publik.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam struktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memegang peranan sebagai organ tertinggi Perseroan yang menjadi sarana bagi para pemegang saham untuk menentukan keputusan penting yang dapat berdampak besar terhadap pengelolaan operasional Perseroan. RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mendapatkan hak yang dimilikinya dalam memperoleh keterangan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan operasional Perusahaan sepanjang berhubungan dengan agenda acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

Di tahun 2022 Perusahaan telah menyelenggarakan RUPS sebagai langkah awal penerapan GCG. PT Arkora Hydro Tbk telah melaksanakan 2 (dua) kali RUPS Tahunan, yaitu pada tanggal 7 Januari 2022 dan 22 September 2022, dan tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. Namun Perusahaan menyelenggarakan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa pada tanggal 4 Maret 2022. Di dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan, Perusahaan menjalankan prosedur terbuka dengan mengambil keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Pada pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun 2022 maupun Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa, Perusahaan menggunakan pihak independen, yaitu Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn.

RUPS TAHUNAN

Penyelenggaraan RUPS Tahunan (RUPST) Tanggal 7 Januari 2022

Mekanisme Penyelenggaraan RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 di Jakarta. Pada pelaksanaan RUPS Tahunan, rapat dipimpin oleh Komisaris Perusahaan, lalu Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan pada setiap bahasan acara Rapat. Pimpinan Rapat atau Komisaris Utama menjawab atau menanggapi pertanyaan/catatan Pemegang Saham yang hadir. Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi selanjutnya dilakukan pemungutan suara dan

dissemination of Good Corporate Governance Guidelines in the Company's website, which can be publicly accessed.

GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS

In the GCG structure, the General Meeting of the Shareholders (GMS) serves as the highest organ of the Company which serves as the instrument for shareholders to make an important decision that highly impacts the Company's operational management. GMS is a platform for shareholders to gain their rights in obtaining information regarding the Company's business and operational activities related to meeting agendas and not contradicting with the Company's interests as well as considering the Company's Articles of Association and the regulations.

In 2022, the Company held GMS as the early step of GCG implementation. PT Arkora Hydro Tbk had held 2 (two) Annual GMS, namely on January 7, 2022, and September 22, 2022, and did not hold Extraordinary GMS. The Company held a Circular Meeting of the Shareholders in lieu of the Extraordinary GMS on March 4, 2022. During the Annual GMS, the Company performed the open procedure by drawing meeting decision based on consensus between Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors. During both the 2022 Annual GMS and the Circular Meeting of the Shareholders in lieu of Extraordinary GMS, the Company uses Notary Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. as an independent party..

ANNUAL GMS

Implementation Annual GMS (AGMS) on January 7, 2022

Annual GMS Implementation Mechanism

The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) was held on Friday, January 7, 2022, in Jakarta. At the implementation of the Annual GMS, the meeting was chaired by the Company's Commissioner, then the Chairperson of the Meeting provided an opportunity for the Shareholders and/or their proxies to ask questions or respond to each discussion on the Meeting agenda. Chairperson or President Commissioner then answered or responded to questions/ notes from attending Shareholders. After all questions had been answered and responded to, a voting session was held

hanya Pemegang Saham dan atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

and only Shareholders and/or their lawful proxies have the right to cast a vote.

Agenda dan Realisasi RUPS Tahunan

RUPS Tahunan untuk mengesahkan beberapa agenda yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2022 di Jakarta.

Agenda and Realization of Annual GMS

The Annual GMS to validate several agendas was held on January 7, 2022, in Jakarta.

Tabel Agenda dan Keputusan RUPS Tahunan Tanggal 7 Januari 2022 /

Table of Agenda and Decision of Annual GMS on January 7, 2022

Tanggal / Date	Kehadiran / Attendance	Agenda dan Keputusan / Agenda and Decisions	Status /Status
7 Januari 2022 / January 7, 2022	Komisaris Utama / President Commissioner Arya Pradana Setiadharma Komisaris / Commissioner Abhay Narayan Pande Komisaris Independen / Independent Commissioner Drs. Indarto S.H Direktur Utama / President Director Aldo Henry Artoko Direktur / Director Ricky Hartono Direktur / Director Ismu Nugroho	1. Menyetujui pengesahan atas neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan serta laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang masing-masing berakhir pada 31 Desember 2018, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2020. / Approved and validated the Company's balance sheet and profit and loss statement for the fiscal year ending on December 31, 2018, December 31, 2019, and December 31, 2020. 2. Menyetujui laporan tahunan Perseroan terkait dengan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk tahun buku yang masing-masing berakhir pada: 31 Desember 2018, 31 Desember 2019, 31 Desember 2020. / Approved the Company's annual report regarding the Company's management for the fiscal year ending on December 31, 2018, December 31, 2019, and December 31, 2020. 3. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diterima pada tahun buku 2018, 2019, dan 2020. / Approved determination of the Company's usage of net profit received in the 2018, 2019 and 2020 fiscal years. 4. Menyetujui pemberian dispensasi kepada Direksi Perseroan atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2018 sampai dengan tahun 2020. / Approved the granting of dispensation to the Company's Board of Directors for the late organization of the Annual GMS for the fiscal year 2018 until 2020. 5. Memberikan kuasa kepada masing-masing dan/atau setiap anggota Direksi Perseroan atau kuasanya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dengan hak substitusi untuk, apabila diperlukan, untuk menghadap di hadapan Notaris publik dengan maksud menuangkan sebagian atau seluruh keputusan sirkuler ini dan dokumen lain yang terkait dalam bentuk akta notaris sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta menandatangani surat perjanjian atau dokumen serupa lainnya sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dimana syarat dan ketentuan dari dokumen tersebut dianggap dipenuhi oleh Direksi Perseroan, dan untuk melakukan apapun yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan sebagaimana disebutkan di atas. / Granted authorization to each member of the Company's Board of Directors or their proxies, individually or collectively, and with substitution rights if needed, to present the Circular Decision and other related documents before a Public Notary in the form of notarial deed in accordance with the prevailing laws and regulations, and to sign an agreement or other similar documents related to the aforementioned matters where the Board of Directors considers the conditions and the provisions fulfilled, and to achieve the objectives through any needed means.	Telah terealisasi / Realized



PENYELENGGARAN RUPS TAHUNAN (RUPST) TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022

Mekanisme Penyelenggaraan RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 di Function Room Residence 8, Lantai 7 SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52 – 53, Jakarta. RUPST diselenggarakan secara fisik dan elektronik untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pelaksanaan RUPST telah sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Merujuk pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Pimpinan Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum diatur dalam Tata Tertib ini. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan pada setiap bahasan acara Rapat. Pimpinan Rapat atau Komisaris Utama menjawab atau menanggapi pertanyaan/catatan Pemegang Saham yang hadir. Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi, selanjutnya dilakukan pemungutan suara dan hanya Pemegang Saham dan atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

Agenda dan Realisasi RUPS Tahunan

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Aryo Pradana Setiadharna

Komisaris Independen: Indarto

Direksi:

Direktur Utama: Aldo Henry Artoko

Direktur: Ismu Nugroho

IMPLEMENTATION OF ANNUAL GMS (AGMS) ON SEPTEMBER 22, 2022

Annual GMS Implementation Mechanism

The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) was held on Thursday, September 22, 2022, in Function Room Residence 8, 7th floor SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52 – 53, Jakarta. AGMS was implemented physically and electronically to prevent the spread of Covid-19. The implementation of AGMS was done according with the regulations, including POJK No.16/POJK.04/2020 dated April 20, 2020, regarding the Electronic GMS of Public Companies.

Referring to the regulation in Article 22 Paragraph (1) of the Articles of Association of the Company, the meeting was led by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. The Meeting Chairperson had the right to decide on the Meeting procedure, which was unarranged or unarranged in this Guidelines. Chairperson grants opportunities to Shareholders and/or their legal proxies to submit a question or respond to questions/notes of the attending Shareholder. After all questions had been answered and responded to, a voting session was held and only Shareholders and/or their lawful proxies have the right to cast a vote.

Agenda and Realization of Annual GMS

The meeting was attended by the Board of Commissioners and Board of Directors, as detailed below:

Board of Commissioners:

President Commissioner: Aryo Pradana Setiadharna

Independent Commissioner: Indarto

Board of Directors:

President Director: Aldo Henry Artoko

Director: Ismu Nugroho

Tabel Agenda dan Keputusan RUPS Tahunan Tanggal 22 September 2022 **Table of Agenda and Decision of Annual GMS on September 22, 2022**
AGENDA PERTAMA / FIRST AGENDA

Persetujuan Laporan Tahunan 2021, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021. / Approval of the 2021 Annual Report, including the Company's Board of Commissioners Supervisory Duty Report and the Company's Consolidated Financial Statements for the 2021 Fiscal Year

Hasil Keputusan / Resolutions

- Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tanggal 15 Juli 2022, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. / Approved and accepted the Company's Annual Report for the 2021 Fiscal Year, including the Company's Board of Commissioners Supervisory Duties Report, and ratified the Company and its Subsidiaries' Consolidated Financial Statements for the 2021 Fiscal Year, which was audited by Public Accounting Office Imelda & Rekan, as presented in the report dated July 15, 2022, with fair and just material.
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2021. / With the approval of the Company's Annual Report for the 2021 Fiscal Year and the ratification of Board of Commissioners' Supervisory Duties Report as well as the Company and its Subsidiaries' Consolidated Financial Statements, granted full release and discharge (*acquitt et decharge*) to all Board of Directors member from all managerial actions in the 2021 Fiscal Year, so as long the actions were reflected in the Annual Report

Hasil Pemungutan Suara / Voting Results

Setuju / Agree	Tidak Setuju / Disagree	Abstain / Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain) / Total Agree (Majority Vote + Abstain)
2.169.491.593 suara / 99,9838%	0 suara / 0%	351.000 suara / 0,0162%	2.169.842.593 suara / 100%
2,169,491,593 votes / 99.9838%	0 votes / 0%	351,000 votes / 0,0162%	2,169,842,593 votes / 100%

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat / Submission of Questions and/or Opinions

Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Tindak Lanjut / Follow-Up

Telah terealisasi. / This agenda has been realized.

AGENDA KEDUA / SECOND AGENDA

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021. / Determination of the Company's Net Profit Usage for the 2021 Fiscal Year

Hasil Keputusan

- Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham Perseroan. / Approved to not distributing dividends to the Company's Shareholders
- Menyetujui penggunaan seluruh laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp49.730.343.309,- digunakan sebagai laba ditahan untuk tujuan berkelanjutan dan ekspansi Perusahaan. / Approved all Company's Consolidated Net Profit Usage for the fiscal year ending on December 31, 2021, amounted to Rp Rp49,730,343,309.00, as a retained profit for sustainability purposes and Corporate expansion

Hasil Pemungutan Suara / Voting Results

Setuju / Agree	Tidak Setuju / Disagree	Abstain / Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain) / Total Agree (Majority Vote + Abstain)
2.169.482.993 suara / 99,9834%	0 suara / 0%	359.600 suara / 0,0166%	2.169.842.593 suara / 100%
2,169,482,993 votes / 99.9834%	0 votes / 0%	359,600 votes / 0.0166%	2.169.842.593 votes / 100%

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat / Submission of Questions and/or Opinions

Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. / Shareholders or their proxies were given the opportunity to submit questions and/or opinions in the Meeting, but there were no shareholders or their proxies who submitted questions and/or opinions.

Tindak Lanjut / Follow-Up

Telah terealisasi. / This agenda has been realized.



AGENDA KETIGA / THIRD AGENDA

Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. / Composition changes in the Company's Board of Directors and Board of Commissioners

Hasil Keputusan / Resolutions

- Mengangkat Bapak Iwan Hadiangoro sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Nicko Widjaja sebagai Komisaris Independen Perseroan. / Appointed Mr. Iwan Hadiangoro as the Company's Commissioner and Mr. Nicko Widjaja as the Company's Independent Commissioner
- Mengangkat Bapak Boy Gemino Kalauserang sebagai Direktur Perseroan. Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027 menjadi sebagai berikut: / Appointed Mr. Boy Gemino Kalauserang as the Company's Director. Thus, the Company's Board of Commissioner and Board of Directors composition as of the closing of the 2027 Annual General Meeting of the Shareholders is as follows:

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS

Komisaris Utama / President Commissioner: Arya Pradana Setiadharna

Komisaris / Commissioner: Abhay Narayan Pande

Komisaris / Commissioner: Iwan Hadiangoro

Komisaris Independen / Commissioner: Drs. Indarto S.H.

Komisaris Independen / Independent Commissioner: Nicko Widjaja

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS

Direktur Utama / President Director: Aldo Henry Artoko

Direktur / Director: Ricky Hartono

Direktur / Director: Boy Gemino Kalauserang

Direktur / Director: Ismu Nugroho

- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) menyatakan sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (ii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (iv) melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas. / Granted the authorities to substitution right for the Company's Board of Directors to: (i) state some of the Meeting's decisions related to this agenda item in a notarial deed and notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia; (ii) sign letters, deeds or other documents; (iii) appear before a Notary and/or authorized official; and (iv) take all necessary actions to achieve the aforementioned purposes.

Hasil Pemungutan Suara / Voting Results

Setuju / Agree	Tidak Setuju / Disagree	Abstain / Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain) / Total Agree (Majority Vote + Abstain)
2.169.476.793 suara / 99,9831%	0 suara / 0%	365.800 suara / 0,0169%	2.169.842.593 suara / 100%
2,169,476,793 votes / 99.9831%	0 votes / 0%	365,800 votes / 0.0169%	2,169,842,593 votes / 100%

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat / Submission of Questions and/or Opinions

Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. / Shareholders or their proxies were given the opportunity to submit questions and/or opinions in the Meeting, but there were no shareholders or their proxies who submitted questions and/or opinions.

Tindak Lanjut / Follow-Up

Telah terealisasi. / This agenda has been realized.

AGENDA KEEMPAT / FOURTH AGENDA

Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2022-2023. / Determination of the Salary and Allowances for the Company's Board of Directors and the Salary or Honorarium and Allowances for the Company's Board of Commissioners in 2022-2023 Term of Office.

Hasil Keputusan / Resolutions

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2022-2023, dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. / Granted the Company's Board of Directors authorities to arrange, determine, and implement a salary and allowance system for the Company's Directors, as well as salaries or honorarium and allowances for the Company's Board of Commissioners for the 2022-2023 term, with due observance of recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee.

Hasil Pemungutan Suara / Voting Results

Setuju / Agree	Tidak Setuju / Disagree	Abstain / Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain) / Total Agree (Majority Vote + Abstain)
2.169.479.993 suara / 99,9833%	350.000 suara / 0,0161%	12.600 suara / 0,0006%	2.169.492.593 suara / 99,9839%
2,169,479,993 votes / 99.9833%	350,000 votes / 0.0161%	12,600 votes / 0.0006%	2.169.492.593 suara / 99,9839%

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat / Submission of Questions and/or Opinions

Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. / Shareholders or their proxies were given the opportunity to submit questions and/or opinions in the Meeting, but there were no shareholders or their proxies who submitted questions and/or opinions.

Tindak Lanjut / Follow-Up

Telah terealisasi. / This agenda has been realized.

AGENDA KELIMA / FIFTH AGENDA

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022. / Appointment of Public Accounting Office to Audit the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year

Hasil Keputusan / Resolution

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2022; dan / Appointed Public Accounting Office Imelda & Rekan, who is registered in the Financial Services Authorities, to conduct audit to the Company and Subsidiaries' Consolidated Financial Statements for the 2022 Fiscal Year; and
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. / Granted rights and authorities to the Company's Board of Directors to determine the honorarium amount and other requirements related to the public accounting office appointment in accordance with the prevailing laws and regulations

Hasil Pemungutan Suara / Voting Results

Setuju / Agree	Tidak Setuju / Disagree	Abstain / Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain) / Total Agree (Majority Vote + Abstain)
2.169.489.693 suara / 99,9837%	0 suara / 0%	352.900 suara / 0,0163%	2.169.842.593 suara / 100%
2,169,489,693 votes / 99.9837%	0 votes / 0%	352,900 votes / 0.0163%	2,169,842,593 votes / 100%

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat Submission of Questions and/or Opinions

Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. / Shareholders or their proxies were given the opportunity to submit questions and/or opinions in the Meeting, but there were no shareholders or their proxies who submitted questions and/or opinions.

Tindak Lanjut / Follow-Up

Telah terealisasi. / This agenda has been realized.

AGENDA KEENAM / SIXTH AGENDA

Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. / Accountability for Realization of the Public Offering Proceeds Usage

Hasil Keputusan / Resolution

Menyetujui dan menerima baik Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebesar Rp182.668.500.000,- / Approved and accepted well the Accountability for Realization of the Public Offering Proceeds Usage amounting to Rp182,668,500,000.00

Hasil Pemungutan Suara / Voting Results

Setuju / Agree	Tidak Setuju / Disagree	Abstain / Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain) / Total Agree (Majority Vote + Abstain)
2.169.489.693 suara / 99,9837%	0 suara / 0%	352.900 suara / 0,0163%	2.169.842.593 suara / 100%
2,169,489,693 votes / 99.9837%	0 votes / 0%	352,900 votes / 0.0163%	2,169,842,593 votes / 100%

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat / Submission of Questions and/or Opinions

Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. / Shareholders or their proxies were given the opportunity to submit questions and/or opinions in the Meeting, but there were no shareholders or their proxies who submitted questions and/or opinions.

Tindak Lanjut / Follow-Up

Telah terealisasi. / This agenda has been realized.



RUPS LUAR BIASA

Di tahun 2022 Perusahaan tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa, namun Perusahaan mengadakan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2022, dengan keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pelepasan dan pembebasan penuh kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris (acquitt et decharge) sepanjang tindakan-tindakan yang dilakukannya atas nama Perseroan termuat dalam laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan serta telah sesuai dengan: (i) kewenangannya masing-masing, (ii) ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan (iii) peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini.
2. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Sirkuler ini sampai penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) berikutnya dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan para anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karenanya, susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagaimana yang nama- namanya disebutkan di bawah ini:

Direksi

Direktur Utama: Tuan ALDO HENRY ARTOKO

Direktur: Tuan Ir. ISMU NUGROHO

Direktur: Tuan RICKY HARTONO

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Tuan ARYA PRADANA SETIADHARMA

Komisaris: Tuan ABHAY NARAYAN PANDE

Komisaris Independen: Tuan Drs. INDARTO, S.H

3. Menyetujui pemecahan nilai saham (stock split) dari sebelumnya sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

EXTRAORDINARY GMS

The Company did not hold any Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022. However, the Company held a Circular Meeting of the Shareholders in lieu of the Extraordinary GMS on March 4, 2022, with the following resolutions:

1. Approved the resignation of all Company's Board of Directors and Board of Commissioners members and granted full release and discharge to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners members from actions taken in their capacity as Board of Directors and Board of Commissioners members (acquitt et decharge) in so far as the actions taken on behalf of the Company is contained in the financial statements and annual reports of the Company and is in compliance with: (i) their respective authorities, (ii) provisions in the Company's Articles of Association, and (iii) applicable laws and regulations, as of the date of this Circular Resolution.
2. Approved the appointment of the Company's new members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as of the effective date of this Circular Resolution until the closing of the next 5th (fifth) Annual GMS without prejudice to the right of the GMS to dismiss members of the Board of Directors and/or members at any time The Board of Commissioners before their term of office ends in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. Therefore, the composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company will be as the names are stated below:

Board of Directors

President Director: Mr. ALDO HENRY ARTOKO

Director: Mr. Ir. ISMU NUGROHO

Director: Mr. RICKY HARTONO

Board of Commissioners

President Commissioner: Mr. ARYA PRADANA SETIADHARMA

Commissioner: Mr. ABHAY PANDE NARAYAN PANDE

Independent Commissioner: Mr. Drs. INDARTO, S.H

3. Approved a stock split from previously Rp50 (fifty Rupiah) per share to Rp25 (twenty five Rupiah) per share.

4. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perseroan serta menyesuaikan kegiatan usaha utama dengan penunjang Perseroan sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia beserta lampirannya. (selanjutnya disebut "KBLI" menjadi sebagai berikut

I. Kegiatan Usaha Pertama

- a. Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35111)
 Mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi.

II. Kegiatan Usaha Penunjang

- a. Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35121)
 Mencakup usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik.
- b. Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (KBLI 35129)
 Mencakup usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- c. Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya (KBLI 70209)
 Mencakup usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122.
- d. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)
 Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan Sumber Daya Manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.
5. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada PT Bursa Efek Indonesia (Company Listing) ("BEI"), meyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, khususnya peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia, serta mencatatkan saham-saham tersebut dalam daftar

4. Approved changes to the aims and objectives of the Company and adjusted the main business activities to support the Company in accordance with the regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics No. 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields and their attachments (hereinafter referred to as "KBLI") as follows:

I. Primary Business Activities

- a. Electric Power Generation (KBLI 35111)
 Covers the business of producing electricity through power generation that uses various types of energy sources.

III. Supporting Business Activities

- a. Operation of Electric Power Supply Installation (KBLI 35121)
 Covers the operating business carried out by other parties on generating facilities that produce electricity, facilities for electric power transmission systems and electric power distribution systems.
- b. Operation of Electric Power Utilization Installation (KBLI 35129)
 Covers the operational business carried out by other parties on the installation facilities for the utilization of electric power, including the installation of utilization of medium voltage electricity, and the installation of utilization of low voltage electricity.
- c. Other Electric Power Support Activities (KBLI 70209)
 Covers other service businesses that are directly related to the supply and utilization of electricity but are not included in group 35121 to. 35122.
- d. Other Management Consulting Activities (KBLI 70209)
 Includes provision of advice, guidance and business operational assistance and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; decisions related to finance; marketing objectives and policies; Human Resources planning, practices and policies; scheduling planning and production control.
5. Approved the Company's plan to conduct an Initial Public Offering and listed the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange (Company Listing) ("IDX"), approved to register the Company's shares in Collective Custody which is carried out in accordance with the laws and regulations applies in the Indonesian Capital Market sector, specifically the Indonesian Central Securities Depository regulations, as well as registering these shares in the register of the



pemegang saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan.

6. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana :

- a. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT ARKORA HYDRO Tbk;
- b. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan paling banyak 773.200.000 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu) saham baru atau 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan ("Saham Baru") melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dengan harga dan jumlah saham yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan suara bulat Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan :
 - Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal; dan
 - Perusahaan Bursa Efek yang berlaku di empat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyatakan mengesampingkan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana tersebut.
- c. Pencatatan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada BEI, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal Indonesia, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- d. Penyesuaian Ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sirkuler ini agar sesuai dengan, antara lain, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, termasuk (i) Peraturan Bapepam dan LK No. 179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan (iii) POJK no. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Company's shareholders at the Company's Securities Administration Bureau.

6. Approved for the Initial Public Offering:

- a. The Company's status change from a private company to a public company and name change to PT ARKORA HYDRO Tbk;
- b. Issuance of shares in the Company's portfolio with the maximum of 773,200,000 (seven hundred seventy three million two hundred thousand) new shares or 25% (twenty five percent) of the entire issued and paid-up capital of the Company ("New Shares") through an Initial Public Offering to the public with the price and number of shares to be determined by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners' unanimous vote, taking into account:
 - Applicable laws and regulations including Capital Market regulations; and
 - Stock exchange companies that are valid in the four places where the Company's shares are listed;In relation to this decision, the Company's Shareholders hereby declare to waive their rights to accept the offer to buy the newly issued shares to be sold in the IPO.
- c. Listing of all of the Company's shares on the IDX after the Initial Public Offering of shares offered and sold to the public through the capital market, as well as shares owned by Shareholders (other than public shareholders) of the Company, and agreeing to register shares The Company is in Collective Custody which is carried out in accordance with the applicable laws and regulations in the field of the Indonesian Capital Market, specifically the Indonesian Central Securities Depository Regulations.
- d. Adjustment of the provisions of the Company's Articles of Association in the form and content as contained in the Appendix to this Circular Resolution to comply with, among other things, laws and regulations in the capital market sector, including (i) Bapepam and LK Regulation No. 179/BL/2008 concerning Main Articles of Association of Companies Conducting Public Offerings of Equity-Type Securities and Public Companies, (ii) Financial Services Authority Regulation ("POJK") No.33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company, and (iii) POJK no. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

- e. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana;
 - f. Penawaran atau penjualan Saham Baru yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana, termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tentu untuk penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Perdana sesuai ketentuan dan sebagaimana disyaratkan dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK 41/2020") jo. Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK 15/2020"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, peraturan BEI, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di tempat di mana Saham Baru, Perseroan akan dicatatkan dan/atau ditawarkan;
7. Menyetujui persyaratan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan : (i) perubahan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dari Keputusan Sirkuler ini; dan (ii) penyesuaian ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan menjadi anggaran dasar perusahaan terbuka dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan, sebagaimana dimaksud angka 6 poin (d) dari Keputusan Sirkuler ini;
 8. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini memberi kuasa dan/atau wewenang dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan yang relevan setelah diakukannya Penawaran Umum Perdana dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris tersendiri, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan dan tujuan tersebut.
 9. Medelegasikan dan memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris
- e. Changes in the capital structure and composition of shareholders in the Company in accordance with the results of the Initial Public Offering and the listing of the Company's shares on the IDX in the context of the Initial Public Offering;
 - f. The offering or sale of New Shares to be issued through an Initial Public Offering, including in the context of fulfilling the obligation to allocate a certain number of shares for a centralized allotment in the context of an Initial Public Offering in accordance with the provisions and as required in POJK Number 41/POJK.04/2020 of 2020 concerning Implementation Electronic Public Offering of Equity Securities, Debt Securities, and/or Sukuk ("POJK 41/2020") jo. OJK Circular Letter Number 15/SEOJK.04/2020 Year 2020 concerning Provision of Funding Orders, Verification of Availability of Funds, Allocation of Securities for Centralized Allotments, and Completion of Orders of Equity-Type Securities in the Form of Shares Electronically ("SEOJK 15/2020"), taking into account the regulations applicable laws and regulations including capital market regulations, IDX regulations, and other regulations that apply at the place where the Company's New Shares will be listed and/or offered;
7. Approved the terms of returning all of the Company's Articles of Association in relation to: (i) changes to the aims and objectives of the Company as referred to in point 4 of this Circular Resolution; and (ii) adjustment of the Company's Articles of Association provisions to become the articles of association of a public company for the Company's Initial Public Offering, as referred to in point 6 point (d) of this Circular Resolution;
 8. In relation to the aforementioned matter, hereby granted authorities and/or rights through substitution rights, to the Company's relevant Board of Directors after the Initial Public Offering was carried out and for this purpose states in a separate deed drawn up before a separate Notary, notifies, or requests approval from authorized agency, the Ministry of Law and as well as making, conveying, procuring and/or preparing all deeds, forms, applications, applications, letters, statements and/or other documents needed or required for such purposes and purposes.
 9. Delegated and granted authority and rights through the substitution rights, either in part or in whole to the Company's Board of Directors and/or the Board of



- Perseroan untuk melaksanakan keputusan Para Pemegang Saham, termasuk untuk:
- (a) Menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana dalam jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham;
 - (b) Menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan, termasuk menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan sehubungan dengan program Kepemilikan Saham Karyawan (Employee Stock Ownership) ESA paling banyak 77.320.000 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu) saham atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari total jumlah Saham Baru;
 - (c) Menetapkan dan/atau menyesuaikan alokasi efek untuk penjatahan terpusat baik yang bersumber pada (i) efek dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, (ii) efek baru yang diterbitkan Perseroan, (iii) efek milik Para Pemegang Saham Perseroan, dan/atau (iv) efek hasil pembelian kembali (buyback) oleh Perseroan, sesuai ketentuan POJK 41/2020, SEOJK 15/2020, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; dan
 - (d) Mencatatkan saham-saham tersebut pada BEI dalam daftar pemegang saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
10. Menyetujui penyisihan laba bersih untuk cadangan Perseroan, senilai Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) atau setara dengan 3,45% (tiga koma empat lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
11. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan, dokumen lainnya dan/atau perjanjian-perjanjian terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.
12. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substansi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan
- Commissioners to implement the Shareholders' decisions, including to:
- (a) Determine the number of shares to be offered in the Initial Public Offering in the amount decided by the Shareholders;
 - (b) Declare the realization or implementation of the issuance or execution of the issuance or issuance of shares in the context of the Company's Initial Public Offering, including stating the realization of the number of shares issued in connection with the ESA Employee Stock Ownership program at most 77,320,000 (seventy seven million three hundred two tens of thousands) shares or equivalent to 10% (ten percent) of the total number of New Shares;
 - (c) Determine and/or adjust the allocation of securities for centralized allotments, whether originating from (i) securities allocated for the Fixed Allotment portion, (ii) new securities issued by the Company, (iii) securities belonging to the Company's Shareholders, and/or (iv) securities the results of the buyback by the Company, in accordance with the provisions of POJK 41/2020, SEOJK 15/2020, and other applicable laws and regulations; And
 - (d) Listing these shares on the IDX in the register of the Company's shareholders at the Share Registrar appointed by the Company.
10. Approved the provision for net profit for the Company's reserves, amounting to Rp2,000,000,000 (two billion Rupiah) or equivalent to 3.45% (three point four five percent) of the total issued and paid-up capital of the Company;
11. Granted authority and right to the Company's Board of Directors and/or the Board of Commissioners through substitution rights in the event that the Initial Public Offering cannot be carried out for any reason, to take all actions and sign all deeds, requests, applications, statements and/or other documents required for the Company's Articles of Association readjustments as well as all permits, approvals, other documents and/or agreements related to or owned by the Company so that they are readjusted to the conditions of the Company prior to the Initial Public Offering.
12. Granted authorities and rights to Company's Board of Directors with substance rights to carry out all necessary actions for the effective, legal and/or implementation of

dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan Sirkuler ini, termasuk namun tidak terbatas pada:

- (a) Untuk menetapkan harga penawaran dan jumlah saham atau saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- (b) Menentukan tujuan penggunaan data hasil Penawaran Umum Perdana;
- (c) Membuat, menandatangani dan mengajukan pernyataan pendaftaran dan permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya untuk diajukan kepada OJK, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan BEI;
- (d) Mencatat seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham;
- (e) Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum Saham Perdana dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
- (f) Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- (g) Mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana maupun Pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- (h) Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
- (i) Membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan KSEI;
- (j) Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif di KSEI sesuai dengan peraturan KSEI;
- (k) Menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan (sebagaimana relevan);
- (l) Memohon Persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau mendaftarkan matters decided and/or approved given in this Circular Resolution, including but not limited to:
 - (a) Determine the offering price and the number of shares or shares to be offered in an Initial Public Offering after obtaining approval from the Board of Commissioners
 - (b) Determine the purpose of using the data from the Initial Public Offering;
 - (c) Prepare, sign and submit registration statements and applications for registration of securities and/or other related documents to be submitted to OJK, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") and IDX;
 - (d) Record all of the Company's shares that have been issued and fully paid up on the IDX and sold to the public through the capital market and the shares owned by the Shareholders;
 - (e) Negotiate and sign other agreements related to the Initial Public Offering with terms and conditions considered good for the Company by the Board of Directors of the Company;
 - (f) Prepare, sign, print and/or issue a summary prospectus, amendments and/or additions to the summary prospectus, initial prospectus, prospectus and/or other documents in connection with or in the framework of the Initial Public Offering and listing of the Company's shares on the IDX;
 - (g) Announce in newspapers, Short Prospectus, Amendments and/or Supplements to the Short Prospectus and/or other documents in connection with and/or in the framework of the Initial Public Offering or Listing of the Company's shares on the IDX;
 - (h) Draw up and sign the Underwriting Agreement and Share Administration Management Agreement;
 - (i) Create and sign the Equity-Type Securities Registration Agreement with KSEI;
 - (j) Deposit the Company's shares in collective custody at KSEI in accordance with KSEI regulations;
 - (k) Declare in a separate notarial deed regarding the increase in the issued and paid-up capital of the Company, after the Initial Public Offering is completed, in the event of an oversubscription (as relevant);
 - (l) Request approval and/or notify changes to the Articles of Association and/or registering or causing it to be



atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam keputusan Pemegang Saham

- (m) Menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- (n) Menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
- (o) Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
- (p) Memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- (q) Menetapkan penjatahan terhadap Saham Baru yang dijual kepada masyarakat dalam suatu surat keputusan Direksi berdasarkan hasil konsultasi dengan profesi penunjang lainnya;
- (r) Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
- (s) Menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan Sirkuler ini dalam satu atau lebih akta Notaris, termasuk namun tidak terbatas pada mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perseroan, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut setelah Penawaran Umum Perseroan selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada BEI dan pemegang saham hasil Penawaran Umum Perseroan telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham;
- (t) Membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;

registered with the relevant competent authorities regarding one or more resolutions contained in Shareholder resolutions

- (m) Negotiate, determine and/or approve the terms and conditions as stated in every deed, agreement and/or other documents to be drawn up, held signed and/or announced by the Company in the framework of the Initial Public Offering and the listing of shares the Company's shares on the IDX;
- (n) Appoint supporting professions and capital market supporting institutions (including but not limited to Legal Consultants, Notaries, Securities Administration Agencies, Underwriters) and determine the terms of appointment and fees for supporting professions and supporting institutions;
- (o) Prepare, sign and submit Registration Statements, applications for registration of securities and/or other related documents to the Financial Services Authority and IDX;
- (p) Provide all necessary information and/or data related to the Initial Public Offering and the listing of the Company's shares on the IDX;
- (q) Determine the allotment of New Shares sold to the public in a Board of Directors decision based on the results of consultation with other supporting professionals;
- (r) Prepare, request to be made and/or sign statements, letters, deeds, agreements and/or other documents;
- (s) Affirm and confirm regarding one or more decisions listed in this Circular Decree in one or more Notary deeds, including but not limited to the certainty regarding the number of shares issued and paid up in the context of implementing the Company's Public Offering, including stating the composition the shareholders of the Company in the deed after the Public Offering of the Company has been completed and recorded on the IDX and the shareholders resulting from the Public Offering of the Company have been registered in the Register of Shareholders;
- (t) Prepare, compose, correct, amend and/or modify (including by adding and/or subtracting) the sentences and/or words used in the notarial deed concerned, and signing the deed;

- (u) Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hak dan Hak Asasi Manusia; dan
- (v) Melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.
13. Memberikan instruksi kepada Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan (sebagaimana relevan sesuai kewenangan masing-masing) untuk membentuk Unit Audit Internal, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretaris Perusahaan dan komite-komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang pasar modal dan mengangkat anggota-anggota komite tersebut.
14. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, termasuk menyatakan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan.
15. Menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap Direktur Perseroan, dengan hak substitusi, untuk (i) mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan pemerintah terkait untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler atas, termasuk, namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Pengolahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission, (ii) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler ini dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (iii) mengurus agar Keputusan Sirkuler ini atau akta pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintah terkait di mana Perseroan berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan, dan (iv) untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani permohonan, surat-surat dan dokumen-dokumen dan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyampaian pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi pemerintah.
- (u) Request approval from related parties and authorized agencies, including but not limited to submitting all letters, requests, notifications and other documents to the Ministry of Rights and Human Rights; And
- (v) Perform all actions required by law and statutory provisions.
13. Provided instructions to the Company's Board of Commissioners or Board of Directors (in accordance with their respective authorities) to form an Internal Audit Unit, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Corporate Secretary and other committees as stipulated by the applicable laws and regulations in particular in the capital market sector and appoint the members of the committee.
14. Granted authority and power to the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners, to state in a separate deed made before a Notary, regarding the certainty of the number of shares issued and paid up in carrying out the Initial Public Offering, including stating the increase in the issued and paid-up capital of the Company and the Company's shareholders composition in the deed, after the Initial Public Offering was completed.
15. Appointed and authorized each member of the Board of Directors with the substitution right to (i) prepare, sign and submit applications or other documents to the relevant government bodies for any procedures required in connection with the Circular Decision on, including, but not limited to to the Ministry of Law and Human Rights and the Integrated Electronic or Online Single Submission Business Licensing Management Institution, (ii) appear before the Notary and other authorized officials and make each and/or all of these Circular Resolutions restated in a deed of restatement at before a Notary, (iii) arrange for this Circular Resolution or the restatement deed to be submitted, reported or notified to, or registered at, the relevant government institution where the Company is domiciled, including but not limited to the Ministry of Justice and Human Rights and the Ministry of Trade, dan (iv) to carry out all actions, including but not limited to signing applications, letters and documents and changes required for submission of reports, notifications and registration of these resolutions or deed of restatement to agencies government.



RUPS SATU TAHUN SEBELUMNYA

Sepanjang tahun 2021 Perusahaan belum menyelenggarakan RUPS. Pelaksanaan RUPS dilakukan pertama kali di tahun 2022.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang memiliki tugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perusahaan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris yang diangkat merupakan orang yang memenuhi kriteria:

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Memiliki integritas dan dedikasi, memahami manajemen Perusahaan, memiliki pengetahuan di bidang usaha Perusahaan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme dan proses pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pengangkatan keanggotaan Dewan Komisaris dilakukan melalui mekanisme RUPS yang telah diatur sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020.

GMS IN THE PREVIOUS YEAR

Throughout 2021, the Company did not hold GMS. The implementation of GMS was done for the first time in 2022.

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is the Company's instruments who bears duties in supervising generally and/or specifically according to the Articles of Association, advising the Board of Directors, as well as ensuring the implementation of GCG principles in the Company. The Board of Commissioners holds responsibility to Shareholders in terms of supervising the Board of Directors' Company policies on operation in general that refers to the business plan approved by the Board of Commissioners and Shareholders, and ensuring compliance to with all prevailing law and regulations.

THE BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERSHIP CRITERIA

As stated in the Company's Articles of Association, the appointed members of Board of Commissioners have fulfilled the following criteria:

1. The Board of Commissioners consists at minimum 2 (two) members, in which one of the two is appointed as the President Commissioner. When necessary, a Vice President Commissioner may be appointed, and the remaining members will be appointed as a commissioner. The Company is required to have Independent Commissioners in compliance with the laws and regulations and applied regulations in Capital Market.
2. Members of Boards of Commissioners must be an Indonesian citizen and/or foreign citizen of Indonesia who meets the requirements in compliance with the prevailing laws and regulations in Capital Market sector.
3. Members of Boards of Commissioners must have integrity and dedication, comprehension of the Company's business line, and can provide sufficient time to carry out their duties and other requirements based on the applicable laws and regulations.

The mechanism and process for the appointment of the Board of Commissioners is carried out by complying with the following provisions:

1. The appointment of the membership member of the Board of Commissioners is carried out through the GMS mechanism which has been regulated in accordance with the Company's Articles of Association, Deed No. 11 dated September 4, 2020.

2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

2. The appointment of members of the Board of Commissioners does not coincide with the appointment of members of the Board of Directors.

MEKANISME PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Pemberhentian keanggotaan Dewan Komisaris dilakukan melalui mekanisme RUPS yang telah diatur sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020.

MECHANISM OF DISMISSAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The termination of the membership of the Board of Commissioners is carried out through the GMS mechanism which has been regulated in accordance with the Company's Articles of Association, Deed No. 11 dated September 4, 2020.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris PT Arkora Hydro Tbk per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

The composition of the Board of Commissioners of PT Arkora Hydro Tbk as of December 31, 2021 based on Deed No. 11 dated September 4, 2020 is as follows:

No	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis Of Appointment	Periode Jabatan / Tunure
1.	Arya Pradana Setiadharna	Komisaris Utama / President Commissioner	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years
2.	Abhay Narayan Pande	Komisaris / Commissioner	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years
3.	Nicko Widjaja	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Akta No. 84 tanggal 22 September 2022 / Deed No. 84 dated September 22, 2022	5 tahun / 5 years
4.	Drs. Indarto S.H	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years
5.	Iwan Hadiangoro	Komisaris / Independent	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is in charge of supervising the management policies, the course of management in general, both regarding the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors, as well as providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company's Long-Term Plan, Work Plan and Company Budget, the provisions of the Articles of Association and he resolutions of the GMS, as well as the prevailing laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

Sedangkan tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas pokok Dewan Komisaris dapat diuraikan sebagai berikut:

Meanwhile, the responsibilities and authorities of the Board of Commissioners are regulated in the Company's Articles of Association and in accordance with the prevailing laws and regulations. The main duties of the Board of Commissioners are as follows:



1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
 2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
 3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite-Komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
 5. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
 6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut.
 7. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana
1. The Board of Commissioners is in charge of supervising and responsible for supervising management policies, the general course of management, both regarding the Company and the Company's business, and providing advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners is required to carry out its duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and prudence.
 2. To support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities in the supervision, the Board of Commissioners is required to establish or determine the composition of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and other committees as determined by the prevailing laws and regulations in the Capital Market, and is obliged to evaluate the performance of these committees at the end of each fiscal year of the Company. In the event that a Nomination and Remuneration Committee is not established, the nomination and remuneration functions as regulated in OJK regulations must be carried out by the Board of Commissioners.
 3. Evaluate the performance of the Committees that assist the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
 4. The Board of Commissioners has the right at any time to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors from their position, if the member of the Board of Directors is deemed to have acted contrary to this Articles of Association and the prevailing laws and regulations or neglects his/her obligations or there is an urgent reason for the Company.
 5. The temporary dismissal shall be notified in written to the concerned person, accompanied by the reasons for the action.
 6. Within a period of no later than 90 (ninety) days after the date of temporary dismissal, the Board of Commissioners shall hold a GMS to revoke or strengthen the temporary dismissal, while members of the Board of Directors who are temporarily dismissed are given the opportunity to attend the GMS to defend themselves in the GMS.
 7. The GMS is chaired by the President Commissioner and in the event that the President Commissioner is absent or unable to attend for any reason, which does not need to be proven to a third party, the GMS will be chaired by another member of the Board of Commissioners, and in the event that all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend for any reason whatsoever,

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.

8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
9. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris berpedoman pada Anggaran Dasar Perusahaan dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Untuk mendukung kinerja Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan, maka Perusahaan menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (bulan) dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pada rapat Dewan Komisaris akan menghasilkan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan tidak mencapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang menentukan keputusan.

which does not need to be proven to a third party, the GMS shall be chaired by a person elected by and from among the shareholders and/or the proxies of the shareholders present at the relevant GMS. If the GMS as referred to in paragraph 6 of this Article is not held within 90 (ninety) days after the date of the temporary dismissal, then the temporary dismissal is null and void and the concerned person is entitled to re-occupy his/her position.

8. If all members of the Board of Directors are temporarily dismissed and the Company does not have a member of the Board of Directors, then the Board of Commissioners shall manage the Company, in that case temporary power to one or more of them is at their joint responsibility.
9. Provisions regarding the duties and authorities of the Board of Commissioners that have not been regulated in the Company's Articles of Association refer to the prevailing laws and regulations and the regulations in force in the Capital Market.

GUIDELINES AND WORK RULES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out their duties, the Board of Commissioners is guided by the Company's Article of Association that refers to Financial Services Authorities Regulations (POJK) No. 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines.

MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

To support the Board of Commissioners performance in decision-making, the Company holds internal meetings of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners are required to periodically organize Board of Commissioners' Meetings, at least 1 (once) in 2 (two) months and periodically holds joint meetings with the Board of Directors at least 1 (once) in 4 (four) months, by considering the prevailing rules and regulations within the Capital Market.

The decisions from the Board of Commissioners' meetings are made based on consensus deliberation. If a decision cannot be reached through consensus deliberation, then the decision is made through voting, consisting of more than ½ (one per two) of the eligible agreeing votes casted in the meeting. If the agreeing and disagreeing votes tie, then the Chairman of Board of Commissioners' Meeting will determine the outcome of the decision.



Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris Perusahaan telah menyelenggarakan 1 (satu) kali rapat dengan rincian frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran masing-masing anggota adalah sebagai berikut:

Throughout 2022, the Company's Board of Commissioner has held 1 (one) meeting with the frequency details and each member's level of attendance as follows:

Tabel Rapat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Meeting

Nama / Name	Rapat Internal Dewan Komisaris / Internal Meeting of Board of Commissioners			Rapat Gabungan dengan Direksi / Joint Meeting With Board of Directors			
	Jumlah Rapat / Total Meeting	Jumlah Rapat / Total Attendance	%	Jumlah Rapat / Total Meeting	Jumlah Rapat / Total Attendance	%	
Arya Pradana Setiadharma	Komisaris Utama / President Commissioner	1	1	100	1	1	1
Abhay Narayan Pande	Komisaris / Commissioner	1	1	100	1	1	100
Nicko Widjaja	Komisaris Independen/ Independent Commissioner	1	1	100	1	1	100
Iwan Hadiangoro	Komisaris / Commissioner	1	1	100	1	1	100
Drs. Indarto S.H	Komisaris Independen / Independent Commissioner	1	1	100	1	1	100

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2022 / Board of Commissioners Meeting Agenda in 2022

NO.	TANGGAL / DATE	AGENDA RAPAT / MEETING AGENDA
1	9 Desember 2022 / December 9, 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Company updates / Company updates : <ol style="list-style-type: none"> a. Operating assets performance / b. Construction assets progress c. Project under development / Project under development d. Perkembangan proses akuisisi PT AKEH / PT AKEH Acquisition development 2. Pembiayaan / Financing: <ol style="list-style-type: none"> a. Kemajuan proses perjanjian pembiayaan antara PT Arkora Hydro dan PT Arkora Hydro Sulawesi dengan Indonesia Infrastructure Finance (IFF) sebesar Rp35 triliun / Progress of financing agreement between PT Arkora Hydro and PT Arkora Hydro Sulawesi with Indonesia Infrastructure Finance (IIF) amounting to Rp35 Billion b. Perjanjian pembiayaan Proyek Kukusan 2 – PT Arkora Energi Baru dengan Indonesia Infrastructure Finance (IIF) / Financing agreement Kukusan 2 Project - PT Arkora Energi Baru with Indonesia Infrastructure Finance (IIF) c. Pelunasan Pemegang Saham ACEI / ACEI Shareholder Repayment 3. Rencana Pembangunan Arkora Tenaga Matahari di masa yang akan datang / Arkora Tenaga Matahari future development plans 4. Jadwal / Schedule <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris di tahun 2023 / Board of Directors and Board of Commissioners Meeting in 2023 b. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Meeting c. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2023 / Annual General Meeting of Shareholders (Yearly Shareholders Meeting) 2023 5. Membutuhkan persetujuan dari Dewan Komisaris / Needs the approval from Board of Commissioners: <ol style="list-style-type: none"> a. Perjanjian pembiayaan Proyek Kukusan 2 / Financing agreement for Kukusan 2 Project 6. Prospek Perusahaan di tahun 2023 / 2023 Company Outlook

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Kriteria evaluasi yang digunakan dalam penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan

Assessment on the Board of Commissioners Performance

The assessment on the Board of Commissioners performance is carried out by the GMS. The evaluation criteria used in assessing the Board of Commissioners performance is the implementation of the functions and responsibilities of the

dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait dengan perkembangan Perusahaan.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris terhadap Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Kinerja masing-masing komite dievaluasi berdasarkan pelaksanaan tugas, termasuk pelaksanaan tugas yang terkait dengan fungsi Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2022 Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Komisaris Independen

Komisaris Independen Perseroan merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota, Komisaris lainnya, Direksi atau Pemegang Saham lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dengan adanya Komisari Independen diharapkan dapat tercipta iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran di antara berbagai kepentingan terutama pada kepentingan pemegang saham.

Penetapan Komisaris Independen mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, mengatur bahwa Perseroan minimal menempatkan 1 (satu) orang Komisaris Independen atau sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Saat ini Perseroan memiliki 1 (satu) orang Komisaris Independen atau 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Di tahun 2022, jabatan Komisaris Independen Perseroan diemban oleh Bapak Drs. Indarto S.H dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2027.

DIREKSI

Direksi merupakan organ tata kelola Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Komposisi Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dengan ketentuan paling sedikit dua orang anggota Direksi, salah satu di antaranya menjabat sebagai Direktur Utama.

Board of Commissioners in supervising and providing advice to the Board of Directors related to the development of the Company.

Performance Assessment of the Board of Commissioners on the Committees under the Board of Commissioners

In fulfilling their duties, the Board of Commissioners is assisted by Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee. Each of the committee's performance is evaluated based on execution of duties, including of tasks related to the functions of the Board of Commissioners. Throughout 2022, the Board of Commissioners considers that the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee have carried out their duties properly.

Independent Commissioner

The Company's Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have financial, managerial, share ownership and/or familial relationships with other members, Commissioners, Directors or Shareholders that may affect their ability to act independently. The existence of an Independent Commissioner is intended to create a more objective working climate and environment and put fairness among various interests, especially the interests of shareholders.

The appointment of Independent Commissioner refers to Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies and Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. The regulations stipulate that the Company has at least 1 (one) Independent Commissioner or at least 30% of the total members of Board of Commissioners. Currently, the Company has 1 (one) Independent Commissioner or 30% of the total members of the Board of Commissioners which is held by Mr. Drs. Indarto S.H with a term of office until 2027.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is a corporate governance organ who holds authorization and full responsibility on the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the Company's purposes and objectives as well as acts as the representation of the Company, both inside and outside the court in accordance with provisions of the Articles of Association. The composition of the Board of Directors is adjusted to the Company's needs with provision that at least two members of the Board of Directors, one of whom serves as the President Director.



Pengangkatan Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Anggota Direksi yang diangkat merupakan orang yang memenuhi kriteria, yaitu memiliki keahlian, pengalaman, dan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh RUPS dengan masa jabatan ditetapkan selama 5 (lima) tahun. Sesudah masa jabatan tersebut, anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pemberhentian Direksi

Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS atau keputusan sirkuler dengan menyebutkan alasannya.

Komposisi Direksi

Susunan Direksi yang dimiliki Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama. Komposisi Direksi disesuaikan dengan kebutuhan dan prinsip efisiensi berdasarkan pertimbangan terhadap kompleksitas Perusahaan dengan memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan. Berikut adalah komposisi Direksi Perusahaan hingga 31 Desember 2022:

Appointment of the Board of Directors

As stated in the Company's Articles of Association, appointed members of the Board of Directors are individuals who meet the following criteria, namely having expertise, experience, and other requirements as stipulated in laws and regulations. The appointment of the Board of Directors members is carried out by the GMS with a term of office set for 5 (five) years. After said term of office, members of the Board of Directors may be reappointed for 1 (one) term of office.

Dismissal of the Board of Directors

Members of the Board of Directors may be dismissed at any time based on the resolution of the GMS or circular resolutions by stating the reasons.

Composition of the Board of Directors

The composition of the Board of Directors owned by the Company consists of 3 (three) members, one of whom is appointed as the President Director. The composition of the Board of Directors is adjusted to the needs and efficiency based on consideration regarding the Company's complexity while paying attention to the effectiveness of decision-making. Below is the Company's Board of Directors composition ending on December 31, 2022:

No	NAMA / NAME	JABATAN / POSITION	DASAR PENGANGKATAN / BASIS OF APPOINTMENT	PERIODE JABATAN / TERM OF OFFICE
1.	Aldo Henry Artoko	Direktur Utama / President Director	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years
2.	Ricky Hartono	Direktur / Director	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years
3.	Ismu Nugroho	Direktur / Director	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years
4	Boy Gemino Kalauserang	Direktur / Director	Akta No. 84 tanggal 22 September 2022	5 tahun / 5 years

Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Based on OJK Regulation No. 33/2014, the duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

1. Run and be responsible for the management of the Issuer or Public Company for the benefit of the Issuer or Public Company in accordance with the aims and objectives of the Issuer or Public Company stipulated in the Articles of Association.
2. Organize the annual GMS and other GMS as stipulated in the laws and regulations and articles of association.
3. Evaluate the performance of the committee at the end of each fiscal year.

Adapun ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
2. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan;
3. Memastikan jalannya aktivitas dan kebijakan Perseroan sudah mengacu dan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku;
4. Merencanakan, melakukan, mengadakan, atau mengakhiri segala hubungan kemitraan strategis yang dapat berupa antara lain, usaha patungan atau perjanjian investasi, aliansi bisnis oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan;
5. Bertanggung jawab secara tanggung renteng kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan dan kesinambungan pencapaian sasaran Perusahaan pada masa mendatang yang lebih sistematis efisien dan efektif, PT Arkora Hydro telah menetapkan kebijakan pembagian tugas masing-masing Direksi. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, yakni sebagai berikut:

The scope of duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

1. Lead and manage the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company and always strive to improve the efficiency and effectiveness of the Company;
2. Control, maintain, and manage the Company's assets for the benefit of the Company;
3. Ensure that the Company's activities and policies have referred to and are in accordance with applicable laws;
4. Plan, conduct, enter into, or terminate all strategic partnership which can be in the form of, among others, joint ventures or investment agreements, business alliances by the Company and/or the Company's Subsidiaries;
5. Be jointly and severally responsible for the Company's losses caused by errors or by the Board of Directors in carrying out their duties. Members of the Board of Directors cannot be held responsible for the Company's losses if they can prove that:
 - a. The loss is not due to his/her fault or negligence;
 - b. They have carried out management in good faith, full of responsibility, and prudence for the Company's interests and purposes and objectives;
 - c. They do not have a conflict of interest, either directly or indirectly, over management actions that result in losses; and
 - d. They have taken action to prevent the occurrence or continuation of the loss.

PT Arkora Hydro has established a policy on the division of tasks for each Board of Directors. This is done to ensure the implementation and continuity of achieving the Company's targets in the future that are more systematic, efficient, and effective. The scope of duties and responsibilities of each Board of Directors are as follows:

JABATAN / POSITION	TUGAS DAN WEWENANG / DUTIES AND AUTHORITIES
Direktur Utama / President Director	Menjadi pimpinan Perseroan serta bertanggung jawab merumuskan kebijakan strategi-strategi Perseroan, keputusan bisnis Perseroan, menentukan target-target jangka panjang Perseroan dengan berkoordinasi bersama direksi lain. / Be the leader of the Company and responsible for formulating the Company's strategic policies, the Company's business decisions, determining the Company's long-term targets in coordination with other directors.



JABATAN / POSITION

TUGAS DAN WEWENANG / DUTIES AND AUTHORITIES

Direktur / Director

1. Membawahi bidang akuntansi dan keuangan serta bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan keputusan atas aspek keuangan dan pendanaan untuk operasional Perseroan. / Oversees the accounting and finance division and be responsible of making financial and financing policies and decisions for the Company's operations
2. Bertanggung jawab dalam operasional Perseroan untuk Pembangkit Listrik yang telah beroperasi, dan yang sedang dalam tahap pembangunan agar mencapai standar-standar yang telah ditetapkan oleh Perseroan. / Be responsible of the Company's operations of the operating Power Plant and those in constructions to meet the required standards set forth by the Company.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, anggota Direksi berpedoman pada Anggaran Dasar Perusahaan dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

RAPAT DIREKSI

Mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi secara rutin wajib menggelar rapat gabungan guna membahas evaluasi kinerja Perusahaan dengan fungsi terkait. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala untuk membahas strategi-strategi, permasalahan, risiko dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan operasional Perusahaan. Rapat Direksi juga dapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan/atau Komite, untuk memberikan masukan atau menyampaikan nasihat mengenai permasalahan yang sedang dihadapi Perusahaan.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

Pada periode tahun 2022, Direksi telah mengadakan rapat Direksi sebanyak 2 (dua) kali rapat. Berikut uraian kegiatan rapat Direksi yang dilakukan sepanjang tahun 2022:

Board Manual for the Board of Directors

In performing their duty, members of the Board of Directors refer to the Company's Articles of Association that refers to the Financial Services Authority Regulations (POJK) No. 21/POJK.04/2015 regarding Implementation of Governance Code of Public Company.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

Based on the Company's Articles of Association, the Board of Directors shall regularly hold joint meetings to discuss the evaluation of the Company's performance with related functions. The Board of Directors shall hold a Board of Directors Meeting periodically at least once in every month and hold a Board of Directors meeting with the Board of Commissioners periodically at least once in 4 (four) months. Meetings of the Board of Directors are held periodically to discuss strategies, issues, risks, and other important matters related to the Company's operations. Meetings of the Board of Directors may also be attended by the Board of Commissioners and/or the Committee, to provide input or provide advice regarding the problems being faced by the Company.

Meetings of the Board of Directors are valid and have the right to make binding decisions if attended and/or represented by more than 1/2 (half) of the total members of the Board of Directors. Decisions of the Board of Directors Meeting must be taken based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, then the decision is taken by voting based on the affirmative vote of more than 1/2 (half) of the number of valid votes that were legally issued in the meeting. If the votes that agree and disagree are the same, then the Chairperson of the Board of Directors Meeting will decide.

In the period of 2022, the Board of Directors held 2 (two) meetings. The description of the activities of the Board of Directors meetings held throughout 2022 is as follows:

Tabel Rapat Direksi / Board of Directors Meeting

Nama / Name	Jabatan / Position	Rapat Internal Direksi / Board of Directors Internal Meeting		
		Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	%
Aldo Henry Artoko	Direktur Utama / President Director	5	5	100
Ricky Hartono	Direktur / Director	5	5	100
Ismu Nugroho	Direktur / Director	5	5	100
Boy Gemino Kalauserang	Direktur / Director	4	4	100

Agenda Rapat Direksi / Board of Directors Meeting Agenda

NO.	TANGGAL / DATE	AGENDA RAPAT / MEETING AGENDA
1	11 Agustus 2022 / August 11, 2022	<ul style="list-style-type: none"> Rencana pengembangan Arkora Tenaga Matahari di masa yang akan datang / Arkora Tenaga Matahari future development plan Kesepakatan pembiayaan untuk proyek-proyek di masa yang akan datang / Financing agreement for upcoming projects
2	14 September 2022 / September 14, 2022	<ul style="list-style-type: none"> Rencana akuisi / Acquisition plan Rencana pengajuan kerjasama kredit / Credit Cooperation Plan
3	16 November 2022 / November 16, 2022	<ul style="list-style-type: none"> Restrukturisasi PT Arkora Kalimantan Energi Hijau / Restructuration of PT Arkora Kalimantan Energi Hijau Progress akuisisi / Acquisition progress Perjanjian kerjasama kredit / Credit Cooperation Agreement
4	19 Oktober 2022 / October 19, 2022	<ul style="list-style-type: none"> Pembaruan dan perkembangan Perusahaan / Company updates Pembaruan dan perkembangan pembiayaan / Financing progress
5	7 Desember 2022 / December 7, 2022	<ul style="list-style-type: none"> Pembaruan dan perkembangan Perusahaan / Company updates Pembaruan dan perkembangan pembiayaan / Financing progress RKAP 2023 / 2023 Work Plan and Budget

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014 bahwa rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam waktu 2 (dua) bulan. Di tahun 2022 Perusahaan telah menyelenggarakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 1 (satu) kali. Berikut rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2022:

Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Based on POJK No. 33/2014, a joint meeting between the Board of Directors and the Board of Commissioners is held at least once within 4 (four) months. In 2022 the Company held 2 (two) joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The description of the activities of the joint meetings held throughout 2022 is as follows:

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi /

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting Table

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Attendance	%
Arya Pradana Setiadharna	Komisaris Utama / President Commissioner	2	2	100
Abhay Narayan Pande	Komisaris / Commissioner	2	2	100
Nicko Widjaja	Komisaris Independen/ Independent Commissioner	2	2	100
Iwan Hadiangoro	Komisaris / Commissioner	2	2	100
Drs. Indarto S.H	Komisaris Independen / Independent Commissioner	2	2	100
Aldo Henry Artoko	Direktur Utama / President Director	2	2	100
Ricky Hartono	Direktur / Director	2	2	100
Ismu Nugroho	Direktur / Director	2	2	100
Boy Gemino Kalauserang	Direktur / Director	2	2	100



Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 2022 /
Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2022

NO.	TANGGAL / DATE	AGENDA RAPAT / MEETING AGENDA
1	19 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Company updates • Financing progress
2	7 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Company updates • Financing progress • RKAP 2023

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Di tahun 2022 Direksi belum melakukan pelatihan pengembangan kompetensi.

Penilaian Kerja Direksi

Untuk mengoptimalkan kinerja Direksi, Perusahaan melakukan penilaian kinerja Direksi. Metode penilaiannya dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Komite yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Direksi

Hingga tahun 2022 Direksi memiliki komite. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, dan Unit Manajemen Risiko. Untuk menciptakan kinerja yang optimal, Direksi secara berkala melakukan peninjauan dan penilaian terhadap kinerja Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, dan Unit Manajemen Risiko yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan pencapaian target kinerja setiap unit.

1. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, khususnya terkait mengikuti perkembangan pasar modal, memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, serta menjadi penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Unit Audit Internal

Direksi menilai bahwa Unit Audit Internal telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan efektif, terutama dalam hal membantu dalam pengawasan keuangan maupun operasional Perseroan, menyusun laporan hasil audit laporan dan memberikan laporan tersebut secara tepat waktu, serta mengevaluasi sistem pengendalian internal.

Board of Directors Members Training and/or Competency Development

The Board of Directors did not hold any training or competency development.

Assessment on the Board of Directors Performance

To optimize the Board of Directors' performance, the Company carried out assessment on the Board of Directors by the Board of Commissioners.

Assessment of the Board of Directors' Supporting Committee Performance

As of 2022, the Board of Directors has and oversees committees under it. The Board of Directors is assisted by the Corporate Secretary, Internal Audit Unit, and Risk Management Unit in carrying out its duties. To create the optimum performance, the Board of Directors periodically evaluates and assesses the performance of Corporate Secretary, the Internal Audit Unit, and the Risk Management Unit which support the Board of Directors' duties implementation. The assessment was carried out based on each unit's performance target achievement.

1. Corporate Secretary

The Corporate Secretary has carried out her duties and responsibilities well, particularly relating to following the capital market development, providing suggestions to the Board of Directors and the Board of Commissioners in GCG implementation, as well as acting as the liaison to the Company's shareholders, the Financial Services Authorities, and other stakeholders.

2. Internal Audit Unit

The Board of Directors considers that the Internal Audit Unit has carried out their duties and responsibilities well and effectively, particularly in assisting the financial and operational supervision of the Company, preparing the audit results report and submitting said reports in timely manner, as well as evaluating the internal control system.

3. Unit Manajemen Risiko

Unit Manajemen Risiko telah menunjukkan kinerja yang baik, di antaranya telah menjalankan manajemen risiko sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan oleh kebijakan Perusahaan.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang. Selanjutnya, menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang akan disampaikan kepada RUPS Perseroan. Lalu, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Besarnya nominal remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada aturan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah ditetapkan melalui mekanisme keputusan RUPS. Kewenangan tersebut diserahkan kepada Dewan Komisaris dengan tetap mengikuti formula dasar yang telah disetujui oleh para Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan mencakup beberapa komponen, antara lain:

1. Honorarium
2. Tunjangan
3. Fasilitas
4. Insentif
5. Kinerja

Mengacu pada ketentuan tersebut, remunerasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris di tahun 2022 sebesar Rp255 juta. Sementara remunerasi yang diberikan kepada anggota Direksi di tahun 2022 sebesar Rp3,2 miliar.

3. Risk Management Unit

The Risk Management Unit has performed well in implementing the risk management in accordance with the directions stipulated by the Company's regulations.

REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

In the procedure for determining and the amount of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, namely the Nomination and Remuneration Committee evaluates the remuneration policy based on performance, risk, fairness with the peer group, the Company's long-term goals and strategies, fulfillment of reserves as regulated in laws and regulations and the Company's potential future income. After that, submit the evaluation results and recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners to be submitted to the Company's GMS. Then, the Board of Commissioners hold a meeting of the Board of Commissioners attended by the majority of the members of the Board of Commissioners and one of the members of the Board of Commissioners is an Independent Commissioner. The results of the meeting of the Board of Commissioners regarding the remuneration are stated in the minutes of the meeting and documented by the Company.

The remuneration nominal of the Board of Commissioners and the Board of Directors remuneration refers to the Articles of Association that have been determined through the GMS decision mechanism. The authority is delegated to the Board of Commissioners while still following the basic formula that has been approved by the Shareholders and considering recommendations from the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

The established remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors includes several the following components:

1. Honorarium
2. Allowance
3. Facilities
4. Incentive
5. Performance

Based on the provision above, the remuneration given to the Board of Commissioners members in 2022 is amounted to Rp Rp255 while the remuneration given to the Board of Directors members in 2022 is amounted to Rp3,2 bilion



PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI

Hubungan Afiliasi antara Anggota Direksi, Anggota Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

DISCLOSURE OF AFFILIATION

Affiliation between Members of Board of Directors, Members of Board of Commissioners, and Shareholders

Affiliation between Members of Board of Directors, Members of Board of Commissioners, and Shareholders are as follows:

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris / Affiliation of the Board of Commissioners

Nama / Name	Jabatan / Position	Hubungan Afiliasi Dengan / Family Relations					
		Anggota Direksi / Member of Board of Directors		Anggota Dewan Komisaris / Member of Board of Commissioners		Pemegang Saham / Shareholder	
		Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
Arya Pradana Setiadharma	Komisaris Utama / President Commissioner	-	√	-	√	√	√
Abhay Narayan Pande	Komisaris / Commissioner	-	√	-	√	-	√
Nicko Widjaja	Komisaris Independen / Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√
Iwan Hadiangoro	Komisaris / Commissioner	-	√	-	√	-	√
Drs. Indarto S.H	Komisaris Independen / Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√

Hubungan Afiliasi Direksi / Affiliation of the Board of Directors

Nama / Name	Jabatan / Position	Hubungan Keluarga / Family Relations					
		Anggota Direksi / Member of Board of Directors		Anggota Dewan Komisaris / Member of Board of Commissioner		Pemegang Saham / Shareholder	
		Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
Aldo Henry Artoko	Direktur Utama / President Director	-	√	-	√	-	√
Ricky Hartono	Direktur / Director	-	√	-	√	√	√
Ismu Nugroho	Direktur / Director	-	√	-	√	-	√
Boy Gemino Kaluserang	Direktur / Director	-	√	-	√	-	√

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Keberagaman Direksi dalam menentukan komposisi anggota Direksi, Perseroan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Perseroan, dalam hal kualifikasi akademik, keahlian, pengalaman, usia dan jenis kelamin tanpa adanya diskriminasi.

Diversity In the Board of Commissioners and the Board of Directors

Diversity in determining the composition of the Board of Directors, through the Nomination and Remuneration Committee, the Company considers its needs and condition, in terms of academic qualification, expertise, experience, age, and gender with no intent of discrimination.

Nama / Name	Kewarganegaraan / Nationality	Jenis Kelamin / Gender	Usia / Age	Pendidikan Terakhir / Education (Most Recent)	Pengalaman Kerja / Professional Experience
Dewan Komisaris / Board of Commissioners					
Arya Pradana Setiadharma	Komisaris Utama / President Commissioner	Laki-laki / Male	39	Master <i>Industrial Engineering</i> , Purdue University / Master of Industrial Engineering, Purdue University	Anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat atau Senior Eksekutif. / Member of Board of Commissioners, Board of Directors, as well as the Executive.
Abhay Narayan Pande	Komisaris / Commissioner	Laki-laki / Male	55	Master of <i>Business Administration</i> , University of Chicago Busines.	Anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat atau Senior Eksekutif / Member of Board of Commissioners, Board of Directors, as well as the Executive Officers and Senior Executives.

Nama / Name	Kewarganegaraan / Nationality	Jenis Kelamin / Gender	Usia / Age	Pendidikan Terakhir / Education (Most Recent)	Pengalaman Kerja / Professional Experience
Nicko Widjaja	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Laki-laki / Male	48	Master of Business Administration, Dominican University of California	Anggota Direksi maupun Pejabat atau Senior Eksekutif pada institusi / Member of Board of Directors and Executive Officers and Senior Executives in financial and non-financial institutions,
Iwan Hadiangoro	Komisaris / Commissioner	Laki-laki / Male	54	Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia / Bachelor's in Economy, Universitas Indonesia	Anggota Direksi maupun Pejabat atau Senior Eksekutif / Member of Board of Directors or Executive Officer and Senior Executive
Drs. Indarto S.H	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Laki-laki / Male	72	Sarjana Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya / Bachelor's in Law, Universitas Bhayangkara Surabaya	Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) Purwakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Jawa Barat / Regional Police Chief (Kapolwil) of Purwakarta, The Region State Police of the Republic of Indonesia (Polda) in West Java
Direksi / Board of Directors					
Aldo Henry Artoko	Direktur Utama / President Director	Laki-laki / Male	38	Sarjana Manufacturing Engineering and Management, University of New South Wales / Bachelor's degree in Manufacturing Engineering and Management, University of New South Wales	Anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat atau Senior Eksekutif / Member of Board of Commissioners, Board of Directors, or the Executive Officer and Senior Executive
Ricky Hartono	Direktur / Director	Laki-laki / Male	38	Sarjana Chemical Engineering, University of Minnesota / Bachelor's degree in Chemical Engineering, University of Minnesota	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun Pejabat atau Senior Eksekutif / Member of Board of Commissioners and Board of Directors
Ismu Nugroho	Direktur / Director	Laki-laki / Male	68	Master Teknik Jalan Raya, Institut Teknologi Bandung / Master's degree in Highway Engineering, Institut Teknologi Bandung	Anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat atau Senior Eksekutif / Member of Board of Commissioners, Board of Directors, or the Executive Officer and Senior Executive
Boy Gemino Kaluserang	Direktur / Director	Laki-laki / Male		Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta / Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Anggota Direksi maupun Pejabat atau Senior Eksekutif / Member of Board of Directors and Executive

KOMITE AUDIT

PT Arkora Hydro Tbk telah membentuk Komite Audit pada tanggal 4 Maret 2022, yang mengacu pada POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Anggaran Dasar Perseroan. Keberadaan Komite Audit untuk membantu tugas Dewan Komisaris guna mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian, dan objektivitas akuntan publik.

Komposisi Komite Audit

Berikut komposisi Komite Audit hingga akhir tahun 2022:

AUDIT COMMITTEE

PT Arkora Hydro Tbk established an Audit Committee on March 4, 2022, in accordance with POJK No. 55/POJK.04/2015 regarding Establishment and Charter for the Audit Committee and the Company's Article of Association. The presence of the Audit Committee assists the Board of Commissioners' duties in order to support Good Corporate Governance implementation, to form an adequate internal controlling structure, to enhance openness and financial reporting quality, as well as to examine the scope, accuracy, independence, and objectivity of public accountants.

Audit Committee Composition

The composition of the Audit Committee up to the end of 2022 is as follows:



Drs. Indarto, S.H – Ketua Komite Audit (2022 - 2025)

Rincian Profil disampaikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Bab “Profil Perusahaan” pada Laporan Tahunan ini.

Drs. Indarto, S.H – Head of the Audit Committee (2022 - 2025)

The profile is presented in the “Board of Commissioners Profile” in the “Company Profile” chapter of this Annual Report.

Anindita Wijaya Putri – Anggota Komite Audit (2022 - 2025) / Member of Audit Committee (2022 - 2025)

Usia / Age	35 tahun / 35 years old
Kewarganegaraan / Nationality	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Warga Negara Indonesia / Indonesian
Riwayat Pendidikan / Educational Background	S1 Bidang Akuntansi dari Macquarie University, Australia (2007) / Bachelor’s degree in Accounting from Macquarie University, Australia (2007)
Riwayat Jabatan / Career Experience	<ul style="list-style-type: none"> • 2020– 2022: Internal Control Manager PT Suntory Garuda Beverage (SGB) / Internal Control Manager at PT Suntory Garuda Beverage (SGB) • 2016– 2020: Internal Control & Audit Section Head PT Taisho Pharmaceutical Indonesia / Internal Control & Audit Section Head at PT Taisho Pharmaceutical Indonesia • 2013–2016: Senior Consultant EY – PT Ernst & Young / Senior Consultant at EY – PT Ernst & Young
Periode dan Masa Jabatan / Term of Office	2022-2025

Dwithya Putri Citrarhasmi SE., AK., CA – Anggota Komite Audit (2022 - 2025) / Member of Audit Committee (2022 - 2025)

Usia / Age	36 tahun / 36 years old
Kewarganegaraan / Nationality	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Warga Negara Indonesia / Indonesian
Riwayat Pendidikan / Educational Background	S1 Ekonomi Universitas Indonesia (2004) / Bachelor’s degree in Economic from Universitas Indonesia (2004)
Riwayat Jabatan / Career Experience	<ul style="list-style-type: none"> • 2012–2016: Head of Finance Bank of America, N.A. Jakarta Branch • 2004 – 2012: Senior Auditor Ernest & Young – Purwantono, Suherman & Surja • 2003 – 2004: Auditor KAP Husni, Mucharam & Rasidi
Periode dan Masa Jabatan / Term of Office	2022-2025

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya yang secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan eksternal atas jasa yang diberikannya;

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The main duty of the Audit Committee is to assist the Board of Commissioners in performing their duties in supervising, which can be broadly described as follows:

1. Review the financial information that will be issued by the Company to the public and/or authorities, including financial statements, projections and other reports related to the Company’s financial information, including compliance with accounting standards and policies in the process of its preparation;
2. Review compliance with the laws and regulations relating to the Company’s activities;
3. Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and an external accountant on the services provided;

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa; 5. Mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan Perusahaan dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal perusahaan dan implementasinya; 6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; 7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi; 8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan; 9. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik; 10. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik; 11. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi; 12. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit; 13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; 14. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan 15. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an accountant based on independence, scope of assignment and remuneration for services; 5. Encourage the establishment of an adequate internal control system in the management of the Company by evaluating and providing recommendations regarding the improvement of the Company's internal control system and its implementation; 6. Review the implementation of the audit by the internal auditors and supervise the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of the internal auditors; 7. Review the risk management implementation activities carried out by the Board of Directors; 8. Review complaints related to the accounting and financial reporting processes of the Company; 9. Review the independence and objectivity of public accountants; 10. Review the adequacy of the audits conducted by public accountants; 11. Conduct examinations on allegations of errors in the decisions of the Board of Directors meeting or irregularities in the implementation of the results of the Board of Directors meeting decisions; 12. Submit a report on the results of the review to all Members of the Board of Commissioners of the Company after the completion of the report on the results of the review conducted by the Audit Committee; 13. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in the Company; 14. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information; and 15. Carry out other duties of the Board of Commissioners related to the roles and responsibilities of the Board of Commissioners. |
|---|---|

Piagam Komite Audit

Komite Audit telah memiliki Piagam Komite Audit yang berlaku sejak tanggal 4 Maret 2022, yang memuat:

1. Definisi.
2. Visi dan Misi.
3. Tujuan Penyusunan Piagam Komite Audit.
4. Tugas dan Tanggung Jawab.
5. Wewenang.
6. Struktur, Komposisi, dan Keanggotaan.
7. Persyaratan Keanggotaan.
8. Tata Cara dan Prosedur Kerja.

Audit Committee's Charter

The Audit Committee owns an Audit Committee Charter which is valid as of March 4, 2022, containing:

1. Definition
2. Vision and Mission
3. Objectives of Audit Committee Charter
4. Duties and Responsibilities
5. Authorities
6. Structure, Composition, and Membership
7. Membership Requirements
8. Work Procedures



- 9 Rapat Anggota.
- 10 Kode Etik.
- 11 Remunerasi
- 12 Pelaporan.
- 13 Penanganan Pengaduan Pihak Ketiga
- 14 Evaluasi Kinerja

9. Meetings
10. Code of Conduct
11. Remuneration
12. Reporting
13. Handling of Third Party Complaints
14. Performance Evaluation

Independensi Komite Audit

Untuk mewujudkan kinerja yang transparansi, independensi menjadi syarat mutlak bagi Komite Audit. Seorang anggota Komite Audit harus independen, objektif, dan profesional. Independensi Komite Audit dijamin dengan adanya Komisaris Independen Perseroan sebagai Ketua. Sedangkan 2 (dua) anggota lainnya adalah Pihak Independen, sehingga Komite Audit dapat melaksanakan fungsinya secara objektif dan independen.

The Independence of the Audit Committee

To realize a transparent performance, independence becomes the absolute requirement to the Audit Committee. A member of the Audit Committee must be independent, objective, and professional. The Audit Committee's independence is guaranteed with the Company's Independent Commissioner as the committee's chairperson, so that the Audit Committee may serves its function objectively and independently.

Rapat Komite Audit

Mengacu pada Piagam Komite Audit dan POJK No. 55/2015, Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Sepanjang tahun 2022 Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

Audit Committee's Meeting

Referring to the Audit Committee's Charter and POJK No. 55/2015, the Audit Committee is obligated to hold at least 1 (one) meeting in every 3 (three) months. The Audit Committee's meetings can be held if attended by more than 1/2 (half) of the total committee members. During 2022, the Audit Committee has held as many meetings as 1 (one) times, with the attendance details as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) / Attendance Level (%)
Indarto	Ketua / Chairman	1	1	100%
Anindita Wijaya Putri	Anggota / Member	1	1	100%
Dwithya Putri Citrarhasmi	Anggota / Member	1	1	100%

Agenda Rapat Komite Audit / Audit Committee Meeting Agenda

Tanggal / Date	Agenda / Agenda
Desember 2022 / December 2022	Membahas progress kerja internal audit / Discussing the internal audit work progress

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit di tahun 2022, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

Implementation of Fiscal Year Tasks

Implementation of duties and responsibilities of the Audit Committee in 2022 is as follows:

1. Reviewed the financial information that will be released by the Company to the public and/or authorities, including financial reports, projections and other reports related to the Company's financial information, including compliance with accounting standards and policies in the preparation process;
2. Reviewed the Company's compliance with laws and regulations concerning the Company's activities;

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan eksternal atas jasa yang diberikannya; 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa; 5. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal perusahaan dan implementasinya; 6. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; 7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi; 8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan; 9. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik; 10. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik; 11. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi; 12. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit; 13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; 14. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan 15. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Expressed independent opinion when there is opinion disparity between the management and the external accounting for the services provided; 4. Provided recommendation to the Board of Commissioners regarding the appointment of accountant based on the independency, scope of work and service compensation; 5. Evaluated and provided recommendation regarding the company's internal control system and its implementation; 6. Reviewed the inspections implemented by the internal auditors and supervised the follow-up implementation by the Board of Directors on the findings from the internal auditors; 7. Reviewed the risk management implementation activities by the Board of Directors; 8. Reviewed complaints relating to the Company's accounting process and financial reporting; 9. Reviewed the public accountant's independency and objectivity; 10. Reviewed the adequacy of the public accountant's inspection on the Company; 11. Conducted inspections into the error allegations in the decision of the Board of Directors meeting or irregularities in the implementation of decision of Board of Directors meeting; 12. Submitted the report of the review results on all members of the Company's Board of Commissioners subsequent to the report of the review results by the Audit Committee; 13. Reviewed and provided suggestions to the Board of Commissioners regarding the Company's conflict of interests; 14. Preserved the confidentiality of the Company's documents, data and information; and 15. Implemented other duties delegated by the Board of Commissioners regarding the Board of Commissioners' roles and duties. |
|---|---|

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Komite Audit pada tahun buku 2022 belum mengadakan pelatihan pengembangan kompetensi.

Competency Improvement for the Audit Committee

The Audit Committee has not organized any training or competency development in the 2022 fiscal year.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perusahaan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi karena fungsi tersebut dijalankan langsung oleh Dewan Komisaris pada tanggal 4 Maret 2022, yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Company has established a Nomination and Remuneration Committee since this function was carried out directly by the Board of Commissioners on March 4, 2022, by referring to the Financial Services Authority Regulation



POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Keberadaan Komite Nominasi dan Remunerasi guna mendukung Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terkait kebijakan nominasi dan remunerasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dengan merujuk pada POJK Nomor 55/POJK.04/2014.

No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies. The Nomination and Remuneration Committee aims to assist and support the Board of Commissioners in carrying out its supervisory functions related to nomination and remuneration policies in accordance with GCG principles by referring to POJK No. 55/POJK.04/2014.

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

Berikut komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk pada tahun 2022:

Nomination and Remuneration Committee Composition

Composition of the Nomination and Remuneration Committee which was established in 2022 is as follows:

01

Drs. Indarto, S.H – Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (2022 - 2025) /

Drs. Indarto, S.H. – Head of the Nomination and Remuneration Committee (2022 - 2025)

Rincian Profil Drs. Indarto, S.H telah diuraikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Bab “Profil Perusahaan” pada Laporan Tahunan ini. / Detailed profile of Drs. Indarto, S.H. has been described in the “Board of Commissioners Profile” in the “Company Profile” chapter of this Annual Report.

02

Arya Pradana Setiadharna – Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (2022 - 2025) /

Member of the Nomination and Remuneration Committee (2022-2025)

Rincian Profil Arya Pradana Setiadharna telah diuraikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Bab “Profil Perusahaan” pada Laporan Tahunan ini. / Details of Arya Pradana Setiadharna’s Profile is elaborated in the “Board of Commissioners Profile” in the “Company Profile” section of this Annual Report.

03

Abhay Narayan Pandhe – Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (2022 - 2025) /

Member of the Nomination and Remuneration Committee (2022-2025)

Rincian Profil Abhay Narayan Pandhe telah diuraikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Bab “Profil Perusahaan” pada Laporan Tahunan ini. / Details of Abhay Narayan Pandhe’s Profile is elaborated in the “Board of Commissioners Profile” in the “Company Profile” section of this Annual Report.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi & Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

A. Terkait fungsi Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi Jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

In accordance with POJK No. 34/POJK.04/2014, the duties, responsibilities, authorities of the Nomination and Remuneration Committee are as follows:

A. Relating to the Nomination Function

1. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a. The positional composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners members;
 - b. The policies and criteria required for the Nomination process; and
 - c. The performance evaluation policy for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners members.
2. Assisting the Board of Commissioners in conducting performance assessment of the Board of Directors

berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat minimal sebagaimana ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
6. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit atau Komite lainnya kepada Dewan Komisaris

B. Terkait fungsi Remunerasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - b. Kebijakan Remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
3. Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. Besaran Remunerasi;
6. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

and/or the Board of Commissioners based on the benchmarks that have been prepared as evaluation material.

3. Providing the Board of Directors and/or the Board of Commissioners competency development programs recommendations to the Board of Commissioners.
4. Arranging and providing recommendations regarding the election and/or replacement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners members to the Board of Commissioners.
5. Naming candidacy suggestions that fit the minimum requirements to become the Board of Directors and/or the Board of Commissioners members for the Board of Commissioners to be announced in the GMS, as stipulated by the Financial Services Authorities.
6. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the independent party who will become members of Audit Committee or other Committees.

B. Relating to the Remuneration Function

1. Evaluating the Remuneration policy based on the performance, risk, fairness with the peer group, the Company's long-term goals and strategies, fulfilment of reserves as stipulated in the laws and regulations and the Company's future income potential.
2. Submitting the evaluation results and recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a. Remuneration Policy for the Board of Commissioners and the Board of Commissioners to be submitted to the GMS; and
 - b. Remuneration Policy for all employees to be submitted to the GMS.
3. Ensuring the Remuneration Policy is in accordance with the applicable provisions.
4. Conducting periodical evaluation on the Remuneration Policy implementation.
5. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a. Remuneration Structure;
 - b. Remuneration Policy; dan
 - c. Remuneration Amount;
6. Assisting the Board of Commissioners in evaluating the performance appraisal according to the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.



Piagam Komite Nominasi & Remunerasi

Sebagai langkah penyempurnaan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perusahaan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang berlaku sejak tanggal 4 Maret 2022, yang memuat:

1. Definisi.
2. Visi dan Misi.
3. Tujuan Penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Tugas dan Tanggung Jawab.
5. Wewenang dan Kewajiban.
6. Komposisi dan Struktur Keanggotaan.
7. Tata Cara dan Prosedur Kerja.
8. Rapat Anggota.
9. Kode Etik.
10. Pelaporan.
11. Evaluasi Kinerja
12. Pemberlakuan dan Penyempurnaan

Rapat Komite Nominasi & Remunerasi

Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan POJK No. 34/POJK.04/2014, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan. Di tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan 1 (satu) rapat.

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) / Attendance Level (%)
Indarto	Ketua / Chairman	1	1	100
Anindita Wijaya Putri	Anggota / Member	1	1	100
Dwitya Putri Citrarhasmi	Anggota / Member	1	1	100

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda

Tanggal / Date	Agenda / Agenda
November 2022 / November 2022	Penetapan besaran remunerasi / Determination of remuneration amount

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi di tahun 2022, antara lain:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan

The Nomination and Remuneration Committee Charter

As a step to improve the practice of Good Corporate Governance, the Company has a Nomination and Remuneration Committee Charter which has been effective since March 4, 2022, which contains:

1. Definition
2. Vision and Mission
3. Objectives of Audit Committee Charter
4. Duties and Responsibilities
5. Authorities
6. Structure, Composition, and Membership
7. Membership Requirements Work Procedures
8. Meetings
9. Code of Conduct
10. Remuneration
11. Pelaporan
12. Penanganan Pengaduan Pihak Ketiga Performance Evaluation

The Nomination and Remuneration Committee Meetings

Referring to OJK Regulation No. 34/2014, the Nomination and Remuneration Committee holds regular meetings at least once in 4 (four) months. In 2022, has Nomination and Remuneration Committee held ... (...) meetings.

Implementation of the Duties of the Nomination and Remuneration Committee

Implementation of duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee in 2022 is as follows:

1. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a. Composition of the Board of Directors position and/or Board of Commissioners members;
 - b. Policies and criteria needed in the nomination process; And

- | | |
|--|---|
| <p>c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.</p> <p>2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;</p> <p>3. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p> <p>4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris;</p> <p>5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat minimal sebagaimana ditentukan oleh OJK sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;</p> <p>6. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit atau Komite lainnya kepada Dewan Komisaris;</p> <p>7. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang;</p> <p>8. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:</p> <p>a. Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan</p> <p>b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;</p> <p>9. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>10. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;</p> <p>11. Memberikan rekomendasi mengenai:</p> <p>a. Struktur remunerasi;</p> <p>b. Kebijakan atas remunerasi; dan</p> <p>c. Besaran atas remunerasi.</p> <p>12. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.</p> | <p>c. Performance evaluation policy for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.</p> <p>2. Assist the Board of Commissioners in evaluating the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on benchmarks that have been prepared as evaluation material;</p> <p>3. Provide recommendations regarding capacity building programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;</p> <p>4. Prepare and provide recommendations regarding the system and procedure for selecting and/or replacing Board of Directors and/or Board of Commissioners members to the Board of Commissioners;</p> <p>5. Provide candidacy nominations for Board of Directors and/or Board of Commissioners members with the minimum requirements as stipulated by OJK to be submitted to the GMS;</p> <p>6. Provide recommendations regarding independent parties who will become members of the Audit Committee or other Committees under the Board of Commissioners;</p> <p>7. Evaluate the remuneration policy based on performance, risk, fairness with the peer group, the Company's long-term goals and strategies, fulfillment of reserves as stipulated in laws and regulations and the Company's potential income;</p> <p>8. Submit evaluation results and recommendations to the Board of Commissioners regarding:</p> <p>a. Remuneration policy for the Board of Directors and Board of Commissioners to be submitted to the GMS; and</p> <p>b. Remuneration policy for employees as a whole to be submitted to the Board of Directors;</p> <p>9. Ensure the remuneration policy is in compliance with the applicable regulations;</p> <p>10. Conduct periodical evaluation of the remuneration policy implementation</p> <p>11. Provide recommendations regarding:</p> <p>a. Remuneration structure;</p> <p>b. Policy of remuneration; and</p> <p>c. Amount of remuneration.</p> <p>12. Assist the Board of Commissioners in conduction performance evaluation according to the suitability of the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.</p> |
|--|---|



Piagam Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Di tahun 2022 Komite Nominasi dan Remunerasi belum melakukan pelatihan pengembangan kompetensi

KOMITE RISIKO BISNIS

Perusahaan belum membentuk Komite Risiko Bisnis yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terkait kebijakan risiko bisnis. Oleh karena itu, fungsi Komite Risiko Bisnis dijalankan oleh Direktur

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, PT Arkora Hydro sebagai perusahaan terbuka telah memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.02/SK-DIR/AH/III/2022. Sekretaris Perusahaan merupakan penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan, diangkat dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung Perusahaan dengan pihak luar seperti para investor, pelaku pasar modal, regulator dan juga para pengamat. Di samping itu, Sekretaris Perusahaan juga berperan memfasilitasi komunikasi yang efektif dan memastikan tersedianya informasi yang memadai dan valid untuk berbagai pihak. Mengacu pada fungsinya tersebut, maka Sekretaris Perusahaan wajib memahami informasi mengenai perkembangan regulasi yang relevan dan mempunyai dampak terhadap kegiatan Perseroan, di antaranya informasi yang terkait dengan industri, korporasi, pasar modal, isu tenaga kerja, isu hukum, dan isu lainnya yang terkait dengan Perusahaan.

Secara umum tugas utama Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;

Nomination and Remuneration Committee Competency Improvement

In 2022, the Nomination and Remuneration Committee has not organized any competency development training.

BUSINESS RISK COMMITTEE

The Company has not established Business Risk Committee to assist the Board of Commissioners in carrying out supervisory functions on the business risk policies. Henceforth, the Business Risk Committee functions is carried out by the Board of Directors.

CORPORATE SECRETARY

Public Companies are required to have a Corporate Secretary function in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies. Understanding this, PT Arkora Hydro as a public company has the function of Corporate Secretary based on the Decree of the Board of Directors No.02/SK-DIR/AH/III/2022. The Corporate Secretary is the person in charge of the work unit that carries out the functions of the Corporate Secretary. The Corporate Secretary is appointed and is responsible to the President Director. The Corporate Secretary acts as a liaison between the Company and external parties such as investors, capital market players, regulators and observers. The Corporate Secretary also plays a role in facilitating effective communication and ensuring the availability of adequate and valid information for various parties. Referring to its function, the Corporate Secretary shall understand information regarding relevant regulatory developments and have an impact on the Company's activities, including information related to industry, corporations, capital markets, labor issues, legal issues, and other issues related to the Company.

In general, the main duties of the Corporate Secretary are as follows:

1. Monitor the development of the capital market, especially the prevailing laws and regulations in the capital market sector;
2. Provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to comply with the provisions of the laws and regulations in the capital market sector;
3. Assist the Board of Directors and the Board of Commissioners in the implementation of corporate governance which includes:
 - a. Information disclosure to the public, including the availability of information on the Company's website;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu; c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham; d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris. <p>4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.</p> | <ul style="list-style-type: none"> b. Timely submission of reports to the Financial Services Authority; c. Organizing and documenting the General Meeting of Shareholders d. Organizing and documenting meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners; and e. Implementation of company orientation program for the Board of Directors and/or Board of Commissioners. <p>4. Act as a liaison officer between the Company and the Company's shareholders, the Financial Services Authority, and other stakeholders.</p> |
|---|---|

PROFIL SEKERTARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary Profile

Prisca Lumban Tobing

Usia / Age	42 tahun / 42 years old
Kewarganegaraan / Nationality	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Indonesia
Riwayat Pendidikan / Educational Background	S1 Bidang Manajemen Keuangan dari Institut Bisnis Indonesia (2003) / Bachelor's Degree in Financial Management from Institut Bisnis Indonesia (2003)
Riwayat Jabatan / Professional Background	- 2012–sekarang: HRGA Manager / 2012—present: HRGA Manager - 2011–2012: HRD Supervisor PT CJ GLS Indonesia - 2011: HRD Koordinator PT Ketrosden Triasmitra / HRD Coordinator at PT Ketrosden Triasmita
Periode dan Masa Jabatan / Period and Tenure	2022-2027

Tugas Pelaksanaan Sekretaris Perusahaan Sepanjang 2022

Di tahun 2022 Sekretaris Perusahaan telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

1. Membantu Direksi dalam pelaksanaan RUPS Tahunan dan Luar Biasa tahun 2022.
2. Membantu dalam penyusunan Laporan Tahunan 2022.
3. Menyelenggarakan *Public Expose* Tahunan.
4. Mengelola daftar pemegang saham Perseroan.
5. Melakukan keterbukaan informasi laporan keuangan kuartalan, tengah tahunan dan tahunan juga laporan rutin lainnya kepada regulator secara tepat waktu.
6. Mengikuti perkembangan peraturan terkait pasar modal.

Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Perusahaan senantiasa mendorong Sekretaris Perusahaan untuk selalu meningkatkan kompetensi dan wawasan guna mendukung pelaksanaan tugasnya. Untuk itu, Sekretaris Perusahaan wajib mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar yang relevan dengan fungsi dan tugasnya. Selain itu,

Corporate Secretary Implementation Duties Throughout 2022

The Corporate Secretary has carried out his/her duties and responsibilities in accordance with the applicable laws and regulations throughout 2022, including:

1. Assist the Board of Directors in the implementation of the 2022 Annual and Extraordinary GMS.
2. Assist in the preparation of the 2021 Annual Report.
3. Organize the Annual Public Expose.
4. Manage the list of shareholders of the Company.
5. Disclosure of information on quarterly, semi-annual and annual financial reports as well as other routine reports to regulators in a timely manner.
6. Follow the development of regulations related to the capital market.

Corporate Secretary Training

The Company always encourages the Corporate Secretary to always improve their competence and expand their insights to support the implementation of their duties. For that reason, Corporate Secretary shall participate in trainings and seminars relevant to its functions and roles. In addition, the



Perusahaan juga mendorong Sekretaris Perusahaan untuk mengikuti perkembangan pasar modal dan membangun komunikasi dengan para pemegang saham, regulator termasuk Otoritas Jasa Keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga berusaha untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar yang relevan dengan fungsi dan tugasnya di mana memungkinkan.

Company also encourages the Corporate Secretary to follow the capital market development and build communications with shareholders, regulators including the Financial Services Authorities, as well as other stakeholders. Additionally, the Corporate Secretary also participates in seminars and trainings relevant to their duties and functions when possible.

Di sepanjang tahun 2022 Sekretaris Perusahaan telah mengikuti program pelatihan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Throughout 2022, the Corporate Secretary has participated in these following competence development programs:

No.	Tanggal / Date	Pelatihan yang Diikuti / Training Participated	Biaya / Fee
1	17-18 Maret 2022 / March 17-18, 2022	Pelatihan <i>Corporate Secretary / Corporate Secretary Training</i>	Rp4.650.000

UNIT AUDIT INTERNAL

Audit Internal merupakan pelaksana utama pengendalian internal perusahaan. Pembentukan Audit Internal PT Arkora Hydro berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi No.01/SK-DIR/II/2022 yang mengacu pada POJK No. 56/2015. Pada pelaksanaannya, Audit Internal Perseroan dipimpin oleh Kepala Audit Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Unit Audit Internal memberikan keyakinan yang independen dan obyektif atas efektivitas dan integritas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola, dan memberikan konsultasi sesuai kebutuhan departemen dan unit Perusahaan yang dirancang untuk memperkuat kegiatan operasional.

INTERNAL AUDIT UNIT

Internal Audit is the main executor in the Company's internal control system. The establishment of PT Arkora Hydro's Internal Audit Unit was based on the Decree of the Board of Directors No.01/SK-DIR/II/2022 that refers to pada POJK No. 56/2015. In its implementation, the Company's Internal Audit is led by a Head of Internal Audit who is directly responsible to the Board of Directors. The Internal Audit Unit provides independent and objective assurance on the effectiveness and integrity of risk management, control, and governance processes, and provide consultations according to the needs of the Company's departments and units designed to strengthen operational activities.

PROFIL KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL

Head of Internal Audit Unit Profile

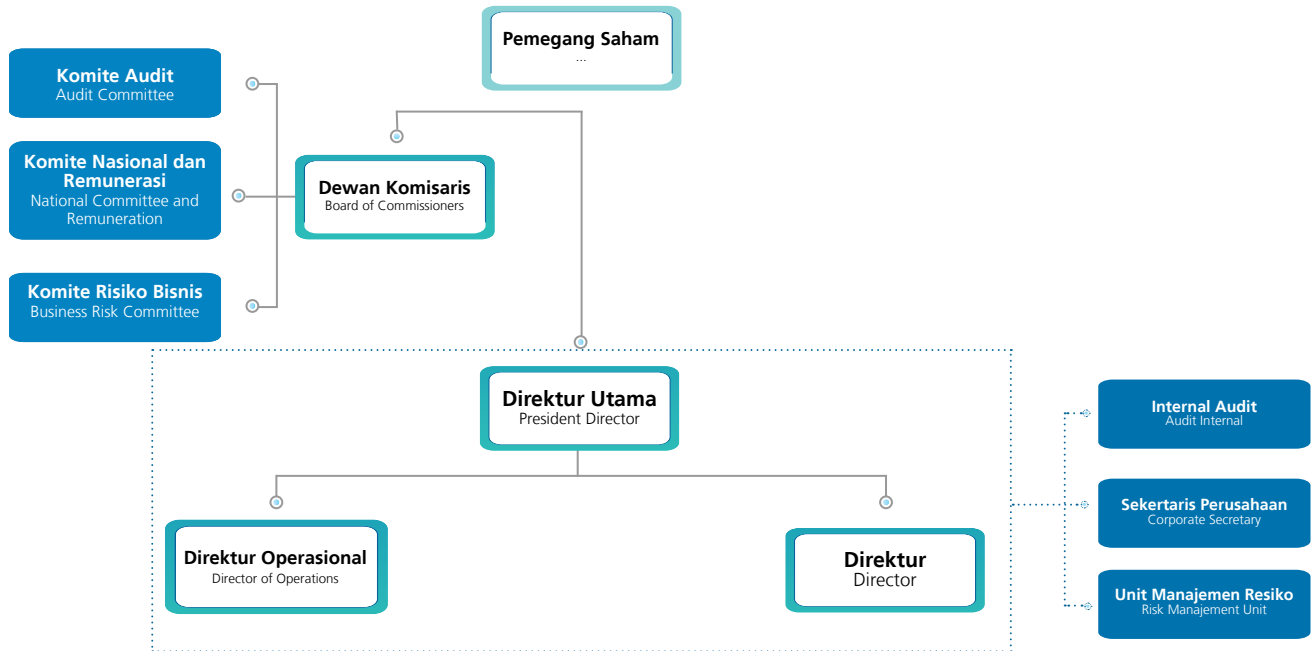
Muhammad Iqbal – Kepala Unit Audit Internal (2022-2025) /

Head of Internal Audit Unit (2022-2025)

Usia / Age	34 tahun / 34 years old
Kewarganegaraan / Nationality	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Indonesia
Riwayat Pendidikan / Educational Background	S1 Bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Gunadarma (2017) / Bachelor's in Financial Management from Universitas Gunadarma
Riwayat Jabatan / Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> • 2018–2022: <i>Corporate Finance</i> PT Markasia Strategic. • 2017– 2018: <i>Finance & Accounting Analyst</i> PT Angkut Teknologi Indonesia
Kualifikasi dan Sertifikasi / Qualification and Certification	-
Profesi Audit Internal / Internal Audit Profession	-
Periode dan Masa Jabatan / Period and Tenure	2022-2025

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL

Structure and Hierarchy of Internal Audit Unit



Tugas Dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal Perusahaan yang disusun berdasarkan POJK No. 56/2015, tugas dan tanggung jawab audit Internal adalah sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, Sumber Daya Manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Duties and Responsibilities of Internal Audit Unit

As stated in the Company's Internal Audit Charter which was prepared based on POJK No. 56/2015, the duties and responsibilities of Internal audit are as follows:

- Develop and implement an annual internal audit plan;
- Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in accordance with the Company's policies;
- Conduct audit and assessments of efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, Human Resources, marketing, information technology, and other activities;
- Provide improvement suggestions and objective information about the activities inspected on all levels of management
- Prepare a report on audit results and submit the report to the President Director and the Board of Commissioners;
- Monitor, analyze, and report on the implementation of follow-up improvements that have been suggested;
- Cooperate with the Audit Committee;
- Develop a program to evaluate the quality of the internal audit activities it carries out; and
- Conduct special audit if needed.



Wewenang Unit Audit Internal

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Pedoman Piagam (*Charter*) Unit Audit Internal

Untuk menunjang pelaksanaan fungsi Unit Internal Audit, Perusahaan memiliki piagam kerja (*charter*) sebagai pedoman yang mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi Internal Audit yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT Arkora Hydro No. 03/SK-KOM/AH/II/2022 tentang Pengangkatan dan/atau Pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal, tanggal 4 Maret 2022.

Keberadaan Piagam Audit Internal/*Internal Audit Charter* memiliki tujuan agar Sistem Pengendalian Internal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai evaluator, katalisator, dan konsultan internal Perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan nilai tambah bagi kelangsungan usaha Perusahaan.

Adapun Piagam Unit Audit Internal Perusahaan memuat:

- Struktur dan Kedudukan.
- Tugas dan Tanggung Jawab.
- Wewenang.
- Kode Etik.
- Persyaratan Auditor Internal.
- Pertanggungjawaban.

Pelaksanaan Tugas Unit Audit Internal Pada Tahun 2022

Di sepanjang tahun 2022, Unit Audit Internal telah menjalankan tugas sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional,

Authorities of the Internal Audit Unit

- Access all relevant information about the Company related to its duties and functions;
- Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee as well as members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee;
- Hold regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee; and
- Coordinate its activities with the activities of external auditors.

Internal Audit Unit Charter

In supporting the implementation of the Internal Audit Unit's function, the Company has established a charter which serves as a guideline that regulates the duties and functions implementation of the Internal Audit which is stipulated through the Decree of the Board of Directors of PT Arkora Hydro No.03/SK-KOM/AH/II/2022 on the Appointment and/or Establishment of the Internal Audit Unit and the Internal Audit Charter, dated March 4, 2022.

The existence of the Internal Audit Charter has the aim that the Internal Control System in carrying out its duties and functions as an evaluator, catalyst, and internal consultant of the Company can run effectively and efficiently and be able to provide added value for the Company's business continuity.

The Company's Internal Audit Charter contains:

- Structure and Position
- Duties and Responsibilities
- Authorities
- Code of Conduct
- Internal Auditor Requirements
- Accountability

Implementation of Internal Audit Unit Duties in 2021

During 2022, the Audit Unit carried out their duties as follows:

- Preparing and carrying out the annual Internal Audit Plan;
- Testing and evaluating the internal control and risk management systems in accordance with the Company's policies;
- Conducting inspections and assessments on the efficiency and effectiveness of the Company's finance, accounting,

- sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
 - e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
 - f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
 - g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
 - h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
 - i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian internal (SPI) yang dijalankan oleh Perusahaan adalah sebuah proses yang dijalankan oleh organisasi (SDM) dengan tindakan pengawasan, pencegahan, dan pengarahan. Seluruh proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Sistem Pengendalian Internal memiliki tujuan untuk menjamin manajemen organisasi atau Perusahaan terhindar dari risiko kegagalan dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran yang telah ditetapkan Perusahaan, termasuk keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, meningkatkan efektivitas operasional, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Evaluasi terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Pada proses evaluasi terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Internal, manajemen akan menindaklanjuti dan memonitor pelaksanaannya guna memastikan Sistem Pengendalian Internal berjalan secara efektif. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama 2022 menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada Perseroan telah memadai.

AKUNTAN PUBLIK

Dalam rangka menerapkan praktik GCG secara optimal, dalam melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2022, Perusahaan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan. KAP Imelda & Rekan tidak memberikan jasa lain bagi Perusahaan selain jasa audit Laporan Keuangan Tahunan. Informasi terkait KAP yang melakukan audit Laporan Keuangan PT Arkora Hydro Tbk selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;
- d. Providing improvement suggestions and objective information regarding the inspected activities on all management levels;
 - e. Preparing audit results report and submitting the report to the President Director and the Board of Commissioners;
 - f. Monitoring, analyzing, and reporting the suggested follow-up improvement actions;
 - g. Cooperating with the Audit Committee;
 - h. Preparing quality control program for the Internal Audit activities; and
 - i. Conducting special inspection as needed.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Internal Control System (SPI) run by the Company is a process carried out by the organization (HR) with supervisory, preventive, and directive actions. The entire process of these activities is carried out in accordance with the existing systems and procedures so as to support the achievement of the goals and objectives set by the Company. The objective of Internal Control System is to ensure that the management of the organization or the Company avoids the risk of failure to achieve the goals and/or targets set by the Company, including the reliability of financial reports, asset security, increasing operational effectiveness, and compliance with applicable laws and regulations.

Evaluation of the Effectiveness of the Internal Control System

In the evaluation process of the effectiveness of the Internal Control System, the management will follow up and monitor its implementation in order to ensure the effectiveness of the Internal Control System. Based on the evaluation conducted in 2022, it shows that the internal control system of the company is sufficient.

PUBLIC ACCOUNTANT

To carry out an audit of the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year, the Company appointed Public Accounting Firm (KAP) Imelda & Rekan. KAP Imelda & Rekan did not provide other services to the Company apart from auditing the Annual Financial Statements. Information related to KAP auditing the Financial Statements of PT Arkora Hydro Tbk for the last 5 years is as follows:



Tahun Buku / Fiscal Year	Akuntan / Accountant	Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm	Biaya Audit / Auditing Fee
2022	Theodorus Bambang	Imelda & Rekan / Imelda & Rekan	Rp1.070.000.000
2021	Theodorus Bambang	Imelda & Rekan / Imelda & Rekan	Rp800.000.000
2020	Theodorus Bambang	Imelda & Rekan / Imelda & Rekan	Rp395.000.000
2019	Theodorus Bambang	Imelda & Rekan / Imelda & Rekan	Rp387.000.000
2018	Henry Arifian	Imelda & Rekan / Imelda & Rekan	Rp385.000.000

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan bisnis pada umumnya tidak terlepas dari berbagai risiko, baik risiko yang berada di bawah kendali maupun risiko yang berada di luar kendali Perusahaan. Memahami hal itu, PT Arkora Hydro Tbk menerapkan pengelolaan risiko secara terintegrasi, optimal dan berkesinambungan. Perseroan senantiasa melaksanakan pengendalian risiko dan pengelolaan kebijakan Perusahaan secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan melakukan manajemen risiko. Melalui penerapan manajemen risiko, Perusahaan melakukan identifikasi terhadap kemungkinan munculnya risiko-risiko baik eksternal maupun internal. Selanjutnya, berdasarkan identifikasi tersebut, Perusahaan akan melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan terjadinya risiko tersebut, misalnya menggunakan asuransi yang relevan dengan transaksi, mengkaji dan/atau negosiasi kontrak sedemikian rupa sehingga kepentingan Perusahaan terlindungi secara hukum. Dengan menjalankan sistem manajemen risiko, PT Arkora Hydro Tbk dapat mewujudkan kegiatan operasi Perusahaan yang sehat dan mampu menghasilkan laba yang optimal.

Kebijakan Manajemen Risiko

Untuk dapat menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh sekaligus menciptakan dan merawat nilai yang dianut, Arkora Hdyro memiliki prinsip yang harus dibudidayakan oleh manajemen Perusahaan, yaitu menjalankan proses manajemen risiko secara terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, disesuaikan, inklusif, dinamis, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, memperhatikan faktor manusia dan budaya, serta dilakukan perbaikan berkelanjutan. Arkora Hdyro menjalankan pembudayaan sadar risiko melalui rangkaian kerangka kerja dan proses manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Direksi Perusahaan untuk dapat diterapkan di seluruh lini dan bagian di dalam lingkungan Perusahaan.

Perusahaan melaksanakan manajemen risiko secara umum dengan mengikuti arahan yang telah ditetapkan oleh kebijakan Perusahaan. Perseroan setiap bulan secara berkala menyusun laporan penerapan manajemen risiko

RISK MANAGEMENT SYSTEM

Every business operation is inseparable from various risks, both risks that are under the control and risks that are beyond the control of the Company. Therefore, PT Arkora Hydro Tbk understands the importance of integrated, optimal, and sustainable risk management. The Company always carries out risk control and management of Company policies in an integrated and sustainable manner by carrying out risk management. Through risk management, the Company identifies the possible emergence of risks, both external and internal. On the basis of that identification, the Company will make the necessary efforts to minimize the occurrence of such risks, for example using insurance relevant to the transaction, reviewing and/or negotiating contracts in such a way that the Company's interests are legally protected. By implementing a risk management system, PT Arkora Hydro Tbk can realize the Company's healthy operations and is able to generate optimal profits

Risk Management Policy

To implement risk management thoroughly, as well as to create and maintain the values embraced by Arkora Hdyro, there are principles that must be cultivated by the Company's management, namely the risk management process that is carried out in an integrated, structured and comprehensive, adapted, inclusive, dynamic, based on the best available information, taking into account human and cultural factors, and making continuous improvements. Arkora Hydro carries out risk awareness culture through a series of risk management frameworks and processes that have been established by the Company's Board of Directors to be implemented in all lines and divisions in the Company.

The Company generally implements risk management by following the directions set by the Company's policies. Every month, the Company compiles a report on the implementation of risk management for evaluation. The Company is

untuk menjadi bahan evaluasi. Perusahaan mempunyai komitmen untuk mengungkapkan secara transparan risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai Perusahaan. Dengan demikian pemangku berkepentingan dapat memperhitungkan risiko-risiko yang relevan apabila melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan.

Pihak Pelaksana Manajemen Risiko di Perusahaan

Pihak yang menjalankan fungsi pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan adalah Divisi terkait yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sehingga Divisi terkait wajib berkoordinasi dengan Direktur Utama. Dalam penerapannya, Divisi terkait secara umum bertanggung jawab untuk menjalankan pengawasan serta memastikan bahwa kegiatan manajemen risiko dapat berjalan dengan baik dan tepat, sehingga dapat menekan risiko-risiko dalam organisasi hingga ke level yang dapat diterima organisasi.

Risiko yang Dihadapi Perusahaan dan Upaya Mitigasi Risiko

Dalam rangka mewujudkan bisnis yang berkelanjutan, Perusahaan senantiasa menjalani sistem manajemen risiko secara efektif. Manajemen risiko menjadi bagian yang amat penting karena peran dan tanggung jawabnya bagi Perusahaan dalam pengendalian internal dan eksternal. Praktik manajemen risiko di Perusahaan selalu diawasi dan di bawah pengendalian ketat untuk melindungi aset para pemangku kepentingan. Untuk itu, secara rutin Perusahaan terus mengidentifikasi risiko yang dapat mengganggu aktivitas usaha serta mengoptimalkan sistem manajemen risikonya guna memitigasi berbagai risiko yang muncul.

committed to transparently disclosing the risks that can significantly affect the value of the Company. Therefore, stakeholders can take into account the relevant risks when conducting business transactions with the Company.

Risk Manager in the Company

The party that carries out the function of implementing risk management in the Company is the Related Division which is directly responsible to the President Director. In carrying out its duties, the Related Division is obliged to coordinate with the President Director. In its implementation, the Related Division is generally responsible for carrying out supervision and ensuring that risk management activities have been running properly and appropriately, so as to reduce risks in the organization to an acceptable level.

Risks Faced by the Company and Risk Mitigation Efforts

In realizing a sustainable business, the Company always carries out the risk management system effectively. Risk management is a very important part because of the roles and responsibilities for the Company in internal and external control. The practice of risk management in the Company is always monitored and under strict control to protect the assets of the stakeholders. Therefore, the Company periodically identifies risks that may disrupt business activities and optimize its risk management system to mitigate various risks that arise.

Jenis Risiko / Type of Risk	Rencana Mitigasi / Mitigation Plan
Risiko Operasional / Operational Risk	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya peningkatan kualitas Perusahaan. / Memastikan kerja sama sesuai dengan yang di persyaratkan Perusahaan Melakukan komunikasi secara terus menerus dengan supplier untuk mendapatkan harga dan kualitas yang baik.
Risiko Keuangan / Financial Risk	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan pelaksanaan kontrak dengan supplier agar tidak terjadi fluktuasi harga. Memastikan piutang dagang dapat dikendalikan oleh Perusahaan.
Risiko Lingkungan / Environmental Risk	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan setiap kegiatan operasional tidak mencemari lingkungan di sekitar daerah operasional Perusahaan.



Jenis Risiko / Type of Risk	Rencana Mitigasi / Mitigation Plan
<p>Risiko Teknologi / Technological Risk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan semua alat proses produksi tidak mengalami kerusakan. • Melakukan perawatan secara periodik atas alat-alat dan sistem yang tersedia di Perusahaan. • Melakukan kalibrasi terhadap alat-alat produksi sehingga dipastikan keakuratannya. • Memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai penggunaan sistem yang benar dan tepat .

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Perusahaan

Di tahun 2022 sistem manajemen risiko telah berjalan secara efektif sehingga dapat membantu meminimalisir risiko yang dapat terjadi di dalam bisnis Perusahaan.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi sistem manajemen risiko di tahun 2022 dan tahun-tahun yang telah lalu, Direksi PT Arkora Hydro Tbk menyatakan bawah sistem manajemen risiko yang dimiliki oleh Perusahaan telah memadai baik dari aspek pengenalan, mitigasi, hingga pengendalian risiko-risiko yang ada di Perusahaan.

KODE ETIK

Di tahun 2022 Perusahaan telah melakukan penyusunan Kode Etika Perusahaan sebagai langkah penyempurnaan praktik GCG, yang menjunjung tinggi pelaksanaan bisnis dengan menganut norma dan etika. Hal itu diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip GCG yang mengupayakan seluruh aktivitas operasional dijalankan sesuai dengan norma, etika, serta kebijakan-kebijakan yang berlaku. Perusahaan memami bahwa etika bisnis merupakan standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen Perusahaan dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang profesional. Untuk itu, tujuan PT Arkora Hdyro menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dalam penyelenggaraan bisnis Perusahaan.

Dengan adanya kode etik, secara internal semua karyawan terikat dengan standar etis yang sama, sehingga akan mengambil kebijakan/keputusan yang sama terhadap kasus sejenis yang timbul. Kode Etik Perusahaan mengatur beberapa hal antara lain:

1. Visi, Misi, Nilai-nilai Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Asas Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Maksud, Tujuan dan Manfaat Kode Etik;
3. Kode Etik;
4. Penegakan dan Pelaporan.

Overview of the Effectiveness of the Company's Risk Management System

In 2022, the risk management system has been implemented effectively and helped to minimize risks that may occur in the Company's business.

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Risk Management System

Based on the results of the identification and evaluation of the risk management system in 2022 and previous years, the Board of Directors of PT Arkora Hydro Tbk stated that the risk management system owned by the Company was adequate in aspect of recognizing, mitigating, to controlling the risks that exist in the Company.

CODE OF CONDUCT

In 2022, the Company has prepared the Company's Code of Conduct as a part of GCG implementation improvement, which upholds However, in 2022 the Company has prepared the Company's Code of Conduct. It was carried out because PT Arkora Hydro Tbk upholds business practices that adhere to norms and ethics. As a form of concrete commitment to the statement, the Company implements GCG principles, one of which is carried out by making all operational activities carried out in accordance with applicable norms, ethics, and policies. The Company understands that business ethics are standards and guidelines for all employees, including the management of the Company, based on high morals, honesty, transparency, and a professional attitude.

With the code of conduct, all employees are bound by the same ethical standards internally, thus they will take the same policy/decision on similar cases that arise. The Company's Code of Conduct regulates several things, including:

1. Vision, Mission, Corporate Values, Good Corporate Governance, Principles of Good Corporate Governance;
2. Purpose, Objectives and Benefits of the Code of Conduct;
3. Code of Conduct;
4. Enforcement and Reporting.

Untuk mengoptimalkan penerapan pedoman kode etik menjadi budaya di seluruh insan Perusahaan, PT Arkora Hdyro secara rutin melakukan sosialisasi kode etik melalui kegiatan orientasi karyawan atau sejak karyawan baru menandatangani kontrak kerja. Pelanggaran terhadap kode etik dapat dianggap sebagai pelanggaran syarat ketenagakerjaan dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan jenis dan beratnya pelanggaran.

KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG

Kebijakan terkait pemberian insentif jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan karyawan masih dalam tahap pertimbangan Perusahaan.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN

Hingga saat ini Perusahaan memiliki program kepemilikan saham oleh, karyawan dan/atau manajemen senior baik secara langsung maupun tidak langsung, sebesar 1.409.000 lembar saham dengan jumlah nilai Rp422.700.400.

PERKARA PENTING

Sepanjang periode tahun 2022, Perusahaan tidak memiliki perkara penting atau permasalahan hukum yang menyangkut Direksi dan Dewan Komisaris maupun pejabat eksekutif lainnya yang sedang menjabat.

SANKSI ADMINISTRATIF

Pada tahun 2022, tidak terdapat sanksi administratif yang diterima oleh Perusahaan, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris. Untuk itu, Perusahaan tidak menyajikan informasi tentang pokok perkara/gugatan; status penyelesaian perkara/gugatan; dan pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Keterbukaan Informasi Publik

Perusahaan memahami bahwa hak dalam memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu yang senantiasa harus dihormati untuk mendukung terciptanya keteraturan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, Perusahaan berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi publik sekaligus menjadi bentuk kepatuhan terhadap UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan menjalankan komitmen tersebut, Perusahaan ingin memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan

To optimize the of the code of conduct guidelines implementation into a culture throughout the Company's personnel, PT Arkora Hdyro always disseminates the code of conduct through employee orientation activities or since new employees sign a work contract. Violation of the code of conduct can be considered a violation of the terms of employment and can be given sanctions according to the type and severity of the violation.

LONG-TERM COMPENSATION POLICY

Policies regarding the provision of performance-based long-term incentives to management and employees are still under consideration by the Company.

EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN

To date, The Company has not organized direct or indirect employee or senior manager stock option plan.

LEGAL CASES

Throughout 2022, the Company did not face any important cases or legal issues involving the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as other incumbent executive officers.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Throughout 2022, there were no administrative sanctions received by the Company, members of the Board of Directors, and members of the Board of Commissioners. Therefore, there is no information on the subject matter of the case/claim; status of settlement of cases/claims; and its effect on the condition of the Company.

ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

Public Information Disclosure

The Company understands that the right to obtain information is part of the human rights of every individual which must always be respected to support the creation of order and harmony in social life. Therefore, the Company is committed to implementing public information disclosure as a compliance with the Law No. 14 Year 2008 on the Public Information Disclosure. By carrying out this commitment, the Company wants to provide convenience for the public in supervising the implementation of the Company's business



pengawasan terhadap pelaksanaan bisnis Perusahaan sehingga Perusahaan dapat menerapkan prinsip transparansi demi mewujudkan penerapan GCG secara optimal.

Perseroan senantiasa memberikan informasi yang lengkap dan termutakhir terkait pemberian informasi kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan, melalui Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.

Situs Web

Perseroan memiliki situs web sebagai upaya penerapan tata kelola keterbukaan informasi. Informasi pada situs web menyampaikan kegiatan operasional dan kinerja Perusahaan. Situs web ini dapat diakses melalui link www.arkora-hydro.com. Dengan adanya ketersediaan informasi melalui situs web, para pemegang saham dan pemangku kepentingan dapat menemukan berbagai informasi terkini Perusahaan.

Media Sosial

Perusahaan memahami bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengalami perubahan yang begitu cepat. Oleh karenanya, PT Arkora Hydro senantiasa memiliki komitmen untuk selalu menjadi yang terdepan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang terkini dan dapat menjangkau secara luas karena banyak digunakan oleh masyarakat dari seluruh lapisan. Adapun akun media sosial yang telah dimiliki oleh Perusahaan, yaitu:

1. Instagram: @arkorahydro
2. Youtube: Arkora Hydro
3. Linked In: Arkora Hydro, PT

Melalui akun-akun tersebut, Perusahaan menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan Perseroan serta pengembangan usaha dan kegiatan Perusahaan. Selain media situs web dan media sosial, Perseroan juga menyediakan keterbukaan informasi melalui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan setiap tahun.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Dalam rangka mewujudkan bisnis yang berkelanjutan, Perusahaan memprioritaskan penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS). WBS merupakan mekanisme untuk menghindari dan mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran, yang tidak terbatas pada etika bisnis dan etika kerja (kode etik), Anggaran Dasar Perusahaan, Perjanjian Kemitraan, kontrak dengan pihak

so that the Company can implement the principle of transparency to realize the optimal implementation of GCG.

The Company always provides the complete and updated information regarding public information disclosure to the shareholders and stakeholders, through the Tri-Monthly and Annual Management Report to the Board of Commissioners, before submitted to the Shareholders.

Company Website

The Company has a web site as a good corporate governance implementation on public information disclosure. The information displayed on the website presents the Company's operational activities and performance, which can be accessed through www.arkora-hydro.com. The information availability on the website allows shareholders and stakeholders to find the latest information about the Company.

Social Media

The Company understands that the development of information and communication technology is currently undergoing rapid changes. Therefore, PT Arkora Hydro is committed to always being at the forefront of adopting information and communication technology in the form of social media as a means of public communication that is the latest and can reach widely because it is widely used by people from all walks of life. The social media accounts of the Company are as follows:

1. Instagram: @arkorahydro
2. Youtube: Arkora Hydro
3. LinkedIn: Arkora Hydro, PT

Through these accounts, the Company delivers information related to the Company as well as the business development and activities of the Company. In addition to website and social media, the Company also provides information through its Annual and Sustainability Report, which are published every year.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

In realizing a sustainable business, the Company prioritize the implementation of the Whistleblowing System (WBS). WBS is a mechanism to avoid and minimize the possibility of violations, which are not limited to business ethics and work ethics (code of conduct), Company Articles of Association, Partnership Agreements, contracts with external parties,

eksternal, rahasia perusahaan, konflik kepentingan, dan peraturan yang berlaku.

PT Arkora Hydro Tbk menjunjung tinggi penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, Perseroan mengembangkan sistem WBS guna mengelola tindakan pelanggaran yang mungkin terjadi dalam menjalani aktivitas usaha dan ditujukan untuk menjamin segala kegiatan usaha Perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apa pun, baik secara internal maupun eksternal, sehingga dapat tercipta situasi kerja yang bersih, kondusif, dan bertanggung jawab.

Perusahaan menerapkan WBS secara menyeluruh di setiap lini bisnisnya, sehingga Perseroan dapat meningkatkan aspek kepatuhan pada seluruh insan Perusahaan terhadap ketentuan, kebijakan, dan peraturan yang berlaku.

Prosedur Penyampaian Laporan Pelanggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) berjalan optimal, Perusahaan memberikan kemudahan bagi karyawan dengan menyediakan berbagai fasilitas penyampaian laporan, yang terdiri dari kotak saran, formulir isian, serta akses email khusus untuk penyampaian laporan pelanggaran sebagai bagian dari sistem pelaporan pelanggaran Perusahaan.

Pelapor harus menyertakan informasi lengkap sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat, yang mencakup indikasi, fakta pelanggaran, nama terlapor, cara melakukan pelanggaran, serta waktu dan tempat terjadinya pelanggaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan dilakukan dengan iktikad baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perlindungan bagi Pelapor

Perusahaan berkomitmen kuat menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pemberian perlindungan dan rasa aman kepada pelapor terkait dengan ancaman/tindakan yang didapat akibat laporan pelanggaran serta merahasiakan identitas pelapor. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pengelola sistem pelaporan pelanggaran, pihak yang melaksanakan investigasi, maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan tersebut.

company secrets, conflicts of interest, and applicable regulations.

In carrying out each of its business activities, PT Arkora Hydro is required to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG) and comply with the applicable laws and regulations. Therefore, the Company developed a WBS system to manage violations that may occur in carrying out business activities and is intended to ensure that all of the Company's business activities may run smoothly without any obstacles, both internally and externally. In this way, a clean, favorable, and responsible work environment can be created.

The Company implements WBS that covers all elements of the Company so that it is expected to be able to improve the compliance aspect of all Company personnel to the applicable provisions, policies, and regulations.

Procedure for Submission of Violation Reports

To support the optimal implementation of the Whistleblowing System (WBS), the Company provides convenience for employees by providing various report submission facilities, which consist of a suggestion box, a form, as well as access to a special email for submitting a violation report as part of the Whistleblowing System.

The whistleblower shall include complete information as the basis for making the right decision, which includes indications, facts of the violation, the name of the reported party, how the violation was committed, as well as the time and place of the violation. This is done to ensure that reports are carried out in good faith and can be accounted for.

Protection for Whistleblowers

The Company is strongly committed in implementing Good Corporate Governance. This commitment is manifested through providing protection and security to the whistleblower regarding the threats/actions obtained as a result of the violation report and keeping the anonymity of the whistleblower's identity. The protection of the whistleblower also applies to the managers of the whistleblowing system manager, the party conducting the investigation, as well as the parties providing information related to the complaint.



Penanganan Pengaduan dan Pihak yang Mengelola Pengaduan

Dewan Komisaris akan menindaklanjuti setiap pengaduan pelanggaran yang diterima oleh Perusahaan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran.
2. Jika kebenaran dugaan terbukti, Direksi akan menetapkan sanksi kepada pelaku pelanggaran atas masukan dari kelompok pemeriksa yang ditetapkan sesuai ketentuan Perusahaan. Apabila pelanggaran oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris terbukti, melalui mekanisme RUPS, pemegang saham akan memutuskan sanksi.

Media Pelaporan

Perusahaan menyediakan media pelaporan dugaan pelanggaran melalui website, e-mail, telepon, dan desk pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor, yaitu:

Telepon / Phone	(021) 29333288 /
Faksimile / Facsimile	(021) 29333298
Email / Email	hydro@arkora.com
Surat/Post / Letter/Post	hydro@arkora.com Surat/Pos : Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 28 SCBD Jakarta 12190

Hasil dari Penanganan Pengaduan

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan tidak menerima pengaduan laporan dugaan pelanggaran.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN KEBIJAKAN ANTI GRATIFIKASI

Perusahaan memahami bahwa setiap aktivitas bisnis tercipta hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama. Dalam hubungan tersebut memiliki potensi adanya gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya yang tidak dapat dihindarkan. Untuk menjaga kegiatan bisnis yang akuntabilitas dan transparan, PT Arkora Hydro menerapkan kebijakan anti korupsi dan anti gratifikasi dengan mengacu pada pedoman Anggaran Dasar Perusahaan. Dalam rangka menjaga hubungan bisnis dengan para Pemangku Kepentingan, Perusahaan mengatur kebijakan terkait dengan gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya di lingkungan Perseroan, yaitu dengan cara menyediakan layanan penanganan pengaduan gratifikasi.

Complaint Handling and Complaint Management

The Board of Commissioners will follow up on any complaints of violations received by the Company with the following procedures:

1. Conduct inspections to ensure truth.
2. If the truth of the allegation is proven, the Board of Directors will impose sanctions on the perpetrators of violations based on input from the group of examiners determined in accordance with the provisions of the Company. If violations by members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners are proven, through the GMS mechanism, the shareholders will decide on sanctions.

Reporting Media

The Company provides media for reporting alleged violations via website, e-mail, telephone, and complaint desk that can be used by the whistleblower, namely:

Result of Complaint Handling

Throughout 2022, the Company did not receive any reports of alleged violations

ANTI-CORRUPTION POLICY AND ANTI-GRATUITY POLICY

The Company acknowledges that in every business activity, relationships, and interactions in between both internal and external parties are born. The relationship has a potential of gratuity from one party to another, which is inevitable. To maintain accountability and transparent business activities, PT Arkora Hydro implements an anti-corruption and anti-gratuity policy by referring to the Company's articles of association. To maintain business relations with the Stakeholders, it is necessary to regulate matters related to gratuity and the procedures or reporting mechanisms in the Company, namely by providing gratuity complaint handling services.

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi

Sepanjang tahun 2022 Perusahaan belum menyelenggarakan pelatihan/sosialisasi terkait anti korupsi dan anti gratifikasi

Anti-Corruption and Anti-Gratuity Training Dissemination

Throughout 2022, the Company has not yet organized anti-corruption and anti-gratuity training or dissemination.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Pelaksanaan prinsip-prinsip serta rekomendasi dalam penerapan GCG sesuai yang diatur dalam SEOJK No. 32 tahun 2015 telah dijalankan oleh Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE CODE OF PUBLIC COMPANY

The implementation of the principles and recommendations in GCG implementation is in accordance with SEOJK No. 32 year 2015, which has been carried out by the Company, as detailed below:

No.	Aspek/Prinsip/Rekomendasi / Aspect/Principle/Recommendation	Status / Status	Keterangan / Notes
I. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham / Public Company Relations with the Shareholders in Securing the Shareholders' Rights			
1.	a. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>), baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan Pemegang Saham / Public Company has a technical procedure in voting, both in the open or closed voting that prioritizes independence and the interests of the Shareholders	Terpenuhi / Fulfilled	Anggaran Dasar Perseroan mencatumkan aturan mengenai tata cara pemungutan suara (<i>voting</i>), khususnya terkait pengambilan keputusan pada saat RUPS / The Company's Article of Association sets a regulation on voting procedures, especially related to the decision making in the GMS.
	b. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan / All Public Company's members of Board of Commissioners and members of Board of Directors attend the Annual GMS	Terpenuhi / Fulfilled	Pada pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tahun 2022, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak hadir / In the 2022, Annual GMS and Extraordinary GMS implementation, there is no member of Board of Commissioners and Board of Directors not attending the meeting
	c. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun / A summary of the minutes of the GMS is available on the Public Company's website for at least 1 (one) year.	Terpenuhi / Fulfilled	Ringkasan risalah RUPS disampaikan dalam situs web Perseroan pada bagian Investor > Ringkasan Risalah RUPST / A summary of the minutes of the GMS is presented in the Company's web site
2.	Meningkatkan kualitas komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor / Improving Communications Quality Between Public Company and Shareholders or Investors		
	a. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor / Public Company owns a communication policy with the Shareholders or Investors	Terpenuhi / Fulfilled	Kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham/ Investor dapat dilihat pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan Perseroan. Sedangkan pengungkapan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham/investor dimuat dalam web Perseroan / Policies regarding communications with Shareholders/Investors can be viewed in the Company's Corporate Governance Code. The disclosure of information essential to Shareholders/Investors are presented on the Company's web site.
	b. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau investor dalam situs web / Public Company discloses the communication policy with the Shareholders or Investors on the web site	Terpenuhi / Fulfilled	Kebijakan komunikasi Perseroan dengan Pemegang Saham diungkapkan pada Laporan Tahunan yang dimuat dalam situs web Perusahaan / Policies regarding communications with Shareholders are disclosed in the Annual Report, presented on the Company's web site.
II. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris / Roles and Functions of Board of Commissioners			
3.	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris / Solidifying the membership and composition of the Board of Commissioners		
	a. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka / Determination of the number of members of the Board of Commissioners considers the condition of the Public Company.	Terpenuhi / Fulfilled	Penentuan komposisi Dewan Komisaris telah disesuaikan dengan kondisi Perseroan / The determination of Board of Commissioners' composition has been adjusted to the Company's condition.



No.	Aspek/Prinsip/Rekomendasi / Aspect/Principle/Recommendation	Status / Status	Keterangan / Notes
	b. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. / Determination of the composition of members of the Board of Commissioners takes into account the diversity of skills, knowledge and experience required	Terpenuhi / Fulfilled	Anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perusahaan / The currently active members of the Board of Commissioners have the skills, knowledge, experiences needed by the Company.
4.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris / Improving the Quality of Duties and Responsibilities Carried Out by the Board of Commissioners.		
	a. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris / The Board of Commissioners has a self-assessment policy in assessing the Board of Commissioners' performance..	Terpenuhi / Fulfilled	Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham pada saat RUPS. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris masih dalam tahap pertimbangan / Assessment on the Board of Commissioners are conducted by the Shareholders during the GMS. Self-assessment to evaluate the Board of Commissioners are still in consideration.
	b. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka / The self-assessment policy in assessing the Board of Commissioners' performance is disclosed in the Public Company Annual Report	Terpenuhi / Fulfilled	Penilaian kinerja Dewan Komisaris diungkapkan pada bagian Penilaian Kinerja Organ Perseroan dalam Laporan Tahunan ini / The assessment of the Board of Commissioners' performance is included in the Company's Organ Performance Assessment section in this Annual Report
	c. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan / The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.	Terpenuhi / Fulfilled	Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, termasuk apabila terlibat dalam kejahatan keuangan, diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan / Policy regarding the resignation of the members of Board of Commissioners, especially when involved in financial crimes, is regulated in the Company's Article of Association.
	d. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. / Board of Commissioners or Nomination and Remuneration Committee formulate succession in the Board of Directors members nomination policies.	Terpenuhi / Fulfilled	Tata cara dan prosedur fungsi nominasi dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi termasuk membantu Dewan Komisaris dan telah memiliki kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi / Procedure and nomination function procedure are carried out by the Nomination and Remuneration Committee including assisting the Board of Commissioners and owning a succession policy in nominating the Board of Commissioners and Board of Directors members.
III. Fungsi dan Peran Direksi / Roles and Functions of the Board of Directors			
5.	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi / Solidifying the membership and composition of the Board of Directors		
	a. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka, serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. / Determination of number of Board of Directors members considers the Public Company's condition as well as the effectivity of decision making.	Terpenuhi / Fulfilled	Penentuan komposisi Direksi telah disesuaikan dengan kondisi Perseroan / The Board of Directors' composition determination has been adjusted to the Company's condition
	b. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. / Determination of the Board of Directors member composition considers diversity in skills, knowledge, and experience needed by the Company.	Terpenuhi / Fulfilled	Anggota Direksi yang menjabat saat ini memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan Perseroan / Board of Directors members who are currently serving have the capabilities, knowledge, and experience by the Company.
	c. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. / Member of Board of Directors who oversees the accounting or finance division has the ability or knowledge in accounting.	Terpenuhi / Fulfilled	Direktur yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang terkait / The director in charge of accounting and finance has knowledge, expertise and experience in the related field
6.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. / Improving the Quality of Duties and Responsibilities Carried Out by the Board of Commissioners		

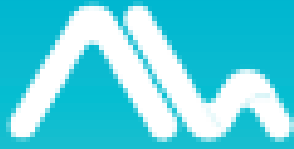
No.	Aspek/Prinsip/Rekomendasi / Aspect/Principle/Recommendation	Status / Status	Keterangan / Notes
	a. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. / The Board of Directors has a self-assessment policy to evaluate the Board of Directors' performance	Penjelasan / Explanation	Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham pada saat RUPS. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi masih dalam tahap pertimbangan / Assessment on the Board of Directors are conducted by the Shareholders during the GMS. Self-assessment to evaluate the Board of Directors are still in consideration.
	b. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. / Self-assessment policies to evaluate the Board of Directors performance is disclosed in the Public Company Annual Report	Penjelasan / Explanation	Penilaian kinerja Direksi diungkapkan pada bagian Penilaian Kinerja Organ Perseroan dalam Laporan Tahunan ini / The assessment of the Board of Commissioners' performance is included in the Company's Organ Performance Assessment section in this Annual Report
	c. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan / The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes	Terpenuhi / Fulfilled	Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi, termasuk apabila terlibat dalam kejahatan keuangan, diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan / Policy regarding the resignation of the members of Board of Commissioners, especially when involved in financial crimes, is regulated in the Company's Article of Association.
IV. Partisipasi Pemangku Kepentingan / Stakeholders Participation			
7.	Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan / Improving the Corporate Governance Aspect through Stakeholders Participation		
	a. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> / Public Company has a policy that prevents insider trading	Terpenuhi / Fulfilled	Perseroan memiliki kebijakan mencegah <i>insider trading</i> sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perusahaan / The Company has a policy that prevents insider trading as regulated by the Company's Article of Association.
	b. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti-fraud</i> / Public Company has an anti-corruption and anti-fraud policy	Terpenuhi / Fulfilled	Kebijakan anti korupsi dan anti-fraud tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan / Anti-corruption and anti-fraud policies are included in the Company's Article of Association
	c. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> / / Public Company has a policy in selecting and upleveling the skills of suppliers or vendors.	Terpenuhi / Fulfilled	Perseroan memiliki Kebijakan tentang Seleksi Pemasok atau <i>vendor</i> / The Company owns a policy in Supplier or Vendor Selection
	d. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur / Public Company has a policy in fulfilling creditors' rights	Terpenuhi / Fulfilled	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur secara tidak langsung diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan keputusan Direksi / Policy on fulfilling creditors' rights indirectly regulated in the Company Article of Association and in accordance with the decree from the Board of Directors.
	e. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> / Public Company has a whistleblowing system policy.	Terpenuhi / Fulfilled	Perseroan memiliki kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan telah dilakukan secara efektif di lingkungan Perusahaan / The Company has a policy in violation reporting system and has been effectively carried out within the Company's environment.
	f. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan / Public Company has a policy in providing long-term incentives to Board of Directors and employees.	Penjelasan / Explanation	Kebijakan terkait pemberian insentif jangka panjang bagi Direksi dan karyawan masih dalam tahap pertimbangan / Policy in providing long-term incentives to the Board of Directors and employees is still in consideration.
V. Keterbukaan Informasi / Public Information Disclosure			
8.	Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. / Improving the Public Information Disclosure Implementation		



No.	Aspek/Prinsip/Rekomendasi / Aspect/Principle/Recommendation	Status / Status	Keterangan / Notes
a.	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi / Public Company utilize information technology usage beyond the official web site on a wider range as public information disclosure media.	Terpenuhi / Fulfilled	Perusahaan menggunakan berbagai <i>platform</i> media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan Youtube sebagai sarana penyampaian informasi bagi para pemangku kepentingan dalam mengakses informasi mengenai Perusahaan / The Company utilizes various social media platforms, such as Facebook, Instagram, and YouTube as an information delivery channel for stakeholders in accessing information regarding the Company.
b.	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui Pemegang Saham Utama dan Pengendali. / The Public Company Annual Report discloses the ultimate beneficial owner in public company share ownership of at least 5%, in addition to disclosure of the ultimate beneficial owner in public company share ownership through Major and Controlling Shareholders.	Terpenuhi / Fulfilled	Informasi terkait pemilik manfaat terakhir Perseroan diungkapkan pada bagian Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini / Information regarding the ultimate beneficial owner of the Company is disclosed in the Major and Controlling Shareholders section of the Company Profile Chapter in this Annual Report

Halaman Ini Sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

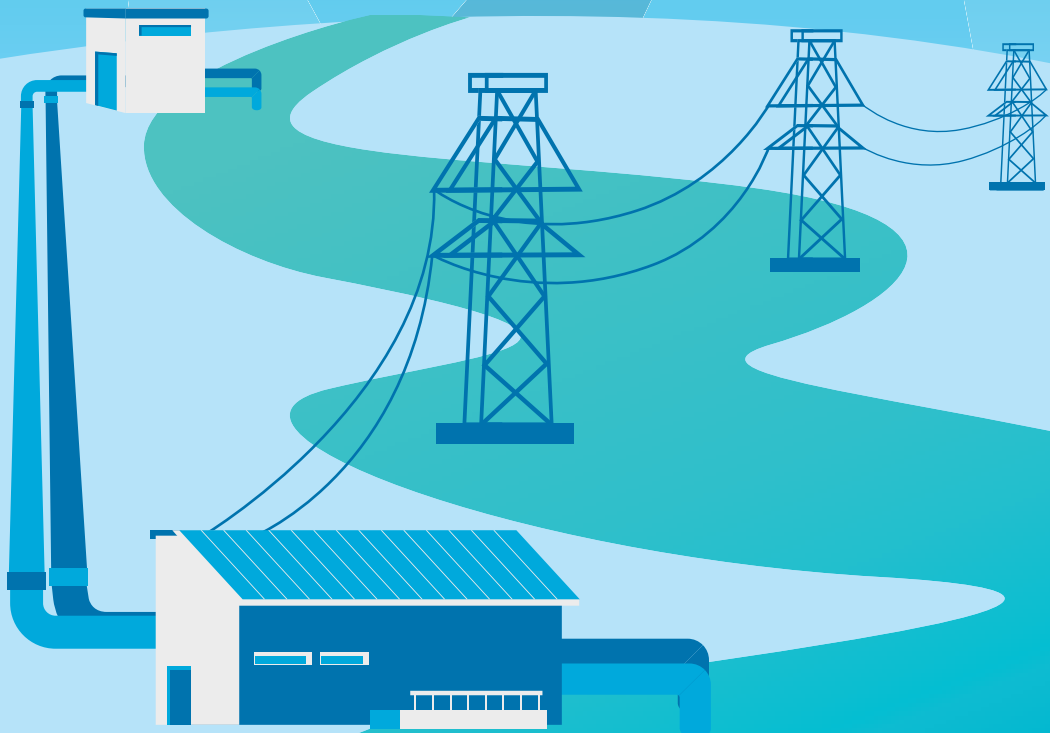


ARKORA HYDRE

LAPORAN KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY REPORT

07



LAPORAN KEBERLANJUTAN

Sustainability Report



STRATEGI KEBERLANJUTAN [POJK A.] PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

PT Arkora Hydro Tbk berkomitmen untuk menyelaraskan kinerja keberlanjutan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam kegiatan operasionalnya. Pelaksanaan kinerja keberlanjutan yang dilakukan melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diwujudkan melalui kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) yang diharapkan dapat memberikan nilai positif dan memelihara hubungan baik antara Perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Perusahaan juga mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan dengan berorientasi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan global (*Sustainable Development Goals – SDGs*).

SUSTAINABILITY STRATEGY [POJK A.1] SUSTAINABILITY STRATEGY EXPLANATION

PT Arkora Hydro Tbk is committed to aligning the sustainability performance, in terms of economic, social, and environmental aspects, in the operational activities. The sustainability performance implemented through the Social and Environmental Responsibility (TJSL) activities is realized in the form of CSR (Corporate Social Responsibility) activities and is expected to provide positive values and maintain good relationships between the Company and all stakeholders.

The Company also implements sustainable developments, which are oriented in the global Sustainable Development Goals (SDGs). The Company creates shared values and



Perusahaan menciptakan berbagai nilai-nilai dan manfaat yang berdampak positif dengan pemangku kepentingan dan terus berupaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan melalui berbagai kebijakan strategis, serta program ataupun kegiatan yang keberlanjutan. Upaya tersebut secara berkala dievaluasi tingkat efektivitasnya, hal ini guna untuk penyempurnaan sistem yang ada dengan kondisi dan lingkungan bisnis Perusahaan disetiap waktunya.

benefits that have positive impact to stakeholders and continues to strive in minimizing the negative impact toward the environment through various strategic policies, as well as sustainability programs or activities. The effectiveness of these efforts is periodically evaluated in its effectiveness to improve the existing system with the Company's condition and business environment at any time.

Dalam pelaksanaan kegiatan kinerja keberlanjutan, Perusahaan berpedoman dan didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

The Company's implementation of sustainability performance activities is based on the prevailing laws and regulations, among which are:

1. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Pelanggan;
3. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas.
7. Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

1. Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety;
2. Law No. 8 of 1999 concerning Customer Protection;
3. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower;
4. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
5. Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management;
6. Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies;
7. Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation.

IKHTISAR KINERJA ASPEK KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY PERFORMANCE ASPECTS OVERVIEW

ASPEK EKONOMI [POJK B.1]

ECONOMIC ASPECTS [POJK B.1]

Perbandingan Target dan Kinerja Produksi / Production Target and Performance Comparison [201-1]

Uraian / Description	Realisasi Kinerja / Performance Realization		
	2022	2021	2020
Pendapatan / Revenue	247.884	198.393	52.094
Pembiayaan TJSL / CSR Financing	42,25	669	251
Produksi (Ton/m/buah) / Production (Ton/m/item)	114.404	95.740	77.641

ASPEK LINGKUNGAN HIDUP [POJK B.2]

ENVIRONMENTAL ASPECT [POJK B.2]

Capaian Kinerja Lingkungan Hidup / Environmental Performance Achievements

Uraian / Description	Satuan / Unit	2022	2021	2020
Energi Listrik / Electricity Usage	Juta Rupiah / Million Rupiah	331,5	83,9	93,2
Energi Air / Water Energy	Juta Rupiah / Million Rupiah	559,5	1.006,8	590,9
Pelestarian Keanekaragaman Hayati* / Biodiversity Conservation	pohon / Trees	48.279	1.065	2.129

*) Dilakukan oleh entitas anak PT Arkora Hydro Sulawesi

*) Performance by Subsidiary PT Arkora Hydro Sulawesi

ASPEK SOSIAL [POJK B.3]

Dana yang dikeluarkan untuk kegiatan kemasyarakatan sebesar Rp42.250.000,-, yang digunakan untuk renovasi pembangunan dinding pagar pembatas SDN 2 Panawa, Garut, Jawa Barat.

SOCIAL ASPECT [POJK B.3]

Funds allocated for community activities were recorded at Rp42,250,000.00 for the renovation and construction of wall and fences in SDN 2 Panawa, Garut, West Java, and donation of Qurban

Skala Usaha / Business Scale

Aspek / Aspect	Satuan / Unit	2022	2021	2020
Jumlah Karyawan / Number of Employees*	Orang / Employees	76	70	71
Penjualan / Sales	Rp miliar / Rp billion	247.884	198.393	52.094
Laba (Rugi) Bersih / Net Profit (Loss)	Rp miliar / Rp billion	52.707	49.730	(22.962)
Jumlah Aset / Total Assets	Rp miliar / Rp billion	947.943	688.614	560.588
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	Rp miliar / Rp billion	547.932	517.588	439.873
Ekuitas / Equity	Rp miliar / Rp billion	400.011	171.026	120.715
Biaya Program TJSL / TJSL Program Cost	Rp juta / Rp million	10,5	669	251

*) hanya entitas induk /

*)parent entity only

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN STRUKTUR TATA KELOLA BERKELANJUTAN

Pelaksanaan tata kelola berkelanjutan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang terdapat didalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. Tata kelola ini menjadi dasar bagi Perusahaan untuk meningkatkan nilai Perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Terbuka, struktur tata kelola Perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Dalam mendukung pelaksanaan kinerja keberlanjutan, Direksi Perusahaan membentuk beberapa unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kinerja keberlanjutan sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing unit kerja.

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [POJK E.1]

Penerapan keberlanjutan dalam Perusahaan dilaksanakan oleh Direktur, hal ini untuk mendukung secara optimal pelaksanaan kinerja keberlanjutan. Direktur mengkoordinir praktik berkelanjutan yang dilaksanakan oleh divisi terkait dan mengelola lalu lintas data serta informasi terkait keberlanjutan terhadap Perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur dibantu oleh Divisi Engineering. Divisi ini memantau dan mengevaluasi program keberlanjutan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan melalui rapat-rapat yang dijalankan setiap sebulan sekali.

SUSTAINABILITY GOVERNANCE SUSTAINABLE GOVERNANCE STRUCTURE

The implementation of corporate governance refers to the laws and regulations in Indonesia, in particular Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This governance serves as the basis for the Company in increasing the value of the Company for all stakeholders. In accordance with the Corporate Law, the corporate governance structure consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. In supporting sustainability performance implementation, the Board of Directors has established work units responsible for implementing sustainability performance in accordance with the duties of each work unit.

PARTY IN CHARGE OF THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE FINANCE [POJK E.1]

The implementation of sustainability in the Company is carried out by the Director to support an optimum sustainability performance implementation. The Director coordinates sustainability practices conducted by relevant division and manages data and information traffic related to sustainability. In carrying this duty, the Engineering Division provides assistance to the Director. This division monitors and evaluates sustainability program established by the Company through the monthly implementation of meetings.



PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEBERLANJUTAN [POJK E.2]

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi keberlanjutan, Perusahaan berupaya untuk melakukan program pengembangan kompetensi dan pelatihan terkait keberlanjutan. Namun di tahun 2022, Perusahaan belum dapat melakukan program tersebut dikarenakan adanya sejumlah kendala akibat pandemi Covid-19.

PENILAIAN RISIKO ATAS PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [POJK E.3]

Perusahaan menjunjung tinggi prinsip nilai transparansi, hal ini sebagai upaya penerapan GCG secara baik untuk keberlanjutan di Perusahaan. Sebagai wujud nyata dari pelaksanaan prinsip transparansi, Perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi dan anti gratifikasi yang sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan. Kebijakan ini kemudian diturunkan menjadi prosedur pelaksana dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas tindak korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan Perusahaan.

Perusahaan menjalankan prosedur pelaksanaan dalam bentuk yakni, Perusahaan membuat Pakta Integritas dan dilampirkan dalam surat Perjanjian Kerja Sama dengan pihak eksternal Perusahaan. Selanjutnya, hasil dari penilaian ini akan dilaporkan kepada Direktur sebagai salah satu bentuk tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakannya sesuai dengan fungsionalnya.

HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN [POJK E.4]

Dalam penerapannya, Perusahaan memahami bahwa pentingnya memiliki dan menjaga hubungan baik yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan telah mengidentifikasi pemangku kepentingan sebagai pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan terhadap Perusahaan serta dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan Perusahaan seperti karyawan, investor/pemegang saham, regulator, mitra bisnis, komunitas/asosiasi, konsumen/pelanggan, masyarakat, dan lain-lain. Adapun pendekatan yang digunakan Perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

SUSTAINABILITY COMPETENCE TRAINING AND DEVELOPMENT [POJK E.2]

In improving the competence and understanding of sustainability, the Company strives to carry out sustainability training and competency development program. However, the Company was not able to carry out these programs due to obstacles from the Covid-19 pandemic in 2022.

RISK ASSESSMENT OF THE SUSTAINABLE FINANCE IMPLEMENTATION [POJK E.3]

The Company upholds the transparency value as an effort to appropriately implement GCG in advocating sustainability practices in the Company. As a tangible manifestation of the transparency principle, the Company has issued anti-corruption and anti-gratuity policy in accordance with the determined terms and procedures. This policy is then derived to implementing procedures in identifying, measuring, monitoring, and controlling risks of corruption that may occur within the Company.

The Company carries out implementation procedures in many forms, namely the drawing up of the Integrity Pact attached to Cooperation Agreement with external parties of the Company. Results of this assessment will be reported to the Director as a form of duties and responsibilities that are carried out in accordance with their functions.

STAKEHOLDER RELATIONS [POJK E.4]

In the implementation, the Company acknowledges the importance of having and maintaining good and harmonious relationship with all stakeholders. The Company has identified stakeholders as parties who are involved with an interest of the Company and the capability to influence and/or be influenced by the achievement of the Company's objectives. The identified stakeholders include employees, investors/shareholders, regulators, business partners, communities/associations, consumers/customers, society, etc. The identification of these stakeholders has been discussed and approved by the management of the Company. Approaches used by the Company to carry out stakeholder engagement are as follows:

Pemangku Kepentingan / Stakeholders	Metode Pendekatan / Approaching Method
Karyawan / Employees	Pelatihan dan Pendidikan, serta promosi jabatan karyawan / Training and education, as well as promotion for employees
Investor/Pemegang Saham / Investors/Shareholders	Rapat Umum Pemegang Saham / General Meeting of Shareholders
Regulator / Regulator	Laporan sesuai dengan ketentuan regulator / Submission of reports in accordance with regulatory provisions
Mitra bisnis / Business Partners	Kontrak dan perjanjian kerja / Work contracts and agreements
Konsumen / Customers	Sarana pengaduan pelanggan / Customer complaint submission facility
Masyarakat / Public	Pelibatan tenaga kerja, sarana pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan / Recruitment of labors, community complaint submission facility, and implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility activities

PERMASALAHAN TERHADAP PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [POJK E.5]

Perusahaan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas produksi, dan melakukan efisiensi biaya operasional, hal ini merupakan bentuk dari implementasi keuangan berkelanjutan pada Perusahaan.

Sepanjang tahun 2022 Perusahaan mengalami sejumlah tantangan, antara lain:

- Ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19.
- Volatilitas nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain.
- Perkembangan infrastruktur transportasi, energi, dan infrastruktur lain.
- Kualitas Sumber Daya Manusia.

KINERJA KEBERLANJUTAN KEGIATAN MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN [POJK F.1]

PT Arkora Hydro Tbk berkomitmen untuk membangun budaya korporasi yang sehat dan berkelanjutan dengan berdasarkan nilai-nilai keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan, kemasyarakatan, K3, hingga pelanggan. Secara berkala, budaya ini diinformasikan kepada seluruh karyawan mulai dari tahap rekrutmen dan secara terus menerus dilaksanakan dalam beragam kegiatan Perusahaan.

Budaya keberlanjutan Perusahaan diwujudkan ke dalam berbagai kebijakan dan kegiatan. Beberapa kegiatan membangun budaya keberlanjutan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022 diantaranya adalah efisiensi energi yang diimplementasikan dengan mematikan lampu dan pendingin ruangan jika sudah tidak digunakan atau sebelum meninggalkan kantor, serta menggunakan air dengan wajar dan secukupnya.

ISSUES ON THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE FINANCE [POJK E.5]

The Company always strives to enhance the production quality and perform operational cost efficiencies, as these are a form of sustainable finance implementation in the Company.

Throughout 2022, the Company faced several challenges, among which are:

- Economic uncertainties due to the Covid-19 pandemic
- Volatility of rupiah exchange rate against other countries' currencies.
- Energy, transportation, and other facilities development
- Human Resources Quality

SUSTAINABILITY PERFORMANCE ACTIVITIES OF BUILDING A SUSTAINABLE CULTURE [POJK F.1]

PT Arkora Hydro Tbk is committed to building a healthy and sustainable corporate culture on the foundation of economic, social, environmental, societal, OHS, to customers sustainability values. Periodically, this culture is introduced to employees starting from the recruitment stage and is continuously implemented in various Company activities.

The Company's sustainability culture is realized in various policies and activities. Several activities of establishing the sustainability culture carried out throughout 2022 include energy efficiency, which is implemented by turning off lights and air conditioning when not using or leaving the office and using water to wash hands as necessary.



KINERJA EKONOMI

ECONOMIC PERFORMANCE

Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi [POJK F.2] / Comparison of Target and Performance of Production, Portfolio, Financing or Investment, Revenues and Profit (Loss) [POJK F.2]

Tahun / Year	Perbandingan Target dan Realisasi Produksi (Juta Rupiah) / Production Target and Realization Comparison (millions of Rupiah)		Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan (juta Rupiah) / Revenue Target and Realization Comparison (millions of Rupiah)		Perbandingan Target dan Realisasi Laba/Rugi (juta Rupiah) / Profit/Loss Target and Realization Comparison (millions of Rupiah)	
	Target	Realisasi / Realization	Target	Realisasi / Realization	Target	Realisasi / Realization
2022	111.458	114.404	245.880	247.884	56.552	52.707
2021	95.000	95.740	175.500	198.393	49.000	49.730
2020	77.000	77.641	51.000	52.094	(22.000)	(22.962)

Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan [POJK F.3] / Comparison of Targets and Performance of Portfolio, Financing Target or Investments in Financial Instruments or Projects of Sustainable Finance [POJK F.3]

Perbandingan Target dan Realisasi Investasi pada Proyek Keuangan Berkelanjutan (Rp juta)		
Tahun	Target	Realisasi
2022	245.880	247.884
2021	175.500	198.393
2020	51.000	52.094

Bisnis Perseroan bergerak di bidang Pembangkitan Tenaga Listrik melalui sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang berasal dari aliran air, sehingga produk yang dihasilkan termasuk ramah lingkungan

The Company's business thrives in the Electricity Energy Generation through new and renewable energy (NRE) sourcing from the run-of-river. Therefore, the generated product is classified as environmentally-friendly

Perbandingan Target dan Kinerja Produksi / Target and Production Performance Comparison [201-1] [POJK B.1]

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain / in millions of Rupiah, unless stated otherwise)

Uraian / Description	Target / Target			Realisasi Kinerja / Performance Realization		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Pendapatan / Revenue	245.880	197.000	51.000	247.884	198.393	52.094
Laba (Rugi) Usaha / Operating Profit (Loss)	56.552	49.000	(22.000)	52.707	49.730	(22.962)
Pembiayaan TJSL / TJSL Financing	300	650	250	42,25	669	251
Produksi (MWH) / Total eco-friendly product	111.458	95.000	77.000	114.404	95.738	77.641
Jumah produk ramah lingkungan / Total eco- friendly product	111.458	95.000	77.000	114.404	95.738	77.641

KINERJA LINGKUNGAN HIDUP

Biaya Lingkungan Hidup [POJK F.4]

PT Arkora Hydro Tbk berkomitmen kuat untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup. Perusahaan mengutamakan pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk meminimalisasi kemungkinan dampak negatif dari aktivitas operasional Perusahaan. Hal ini juga sekaligus

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

Biaya Lingkungan Hidup [POJK F.4]

PT Arkora Hydro Tbk is strongly committed to realizing environmental sustainability. The Company prioritizes environmental conservation, development, and management to minimize the probability of negative impact from the Company's operational activities. This also contributes

memberikan kontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan, dan para pemangku kepentingan. Pada tahun 2022, Perusahaan telah melakukan kegiatan pelestarian lingkungan hidup, di Anak Perusahaan PT Arkora Hydro Sulawesi proyek PLTA Koro Yaentu dengan kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan cara penanaman pohon Pinus sebanyak 57 Ha, dan menghabiskan biaya sebesar Rp280.129.500

Perusahaan melaksanakan kegiatan menjaga dan melestarikan lingkungan dalam rangka mencegah timbulnya kerusakan, seperti terjadinya pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan dan lain sebagainya yang dapat mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan karyawan serta masyarakat. Sejak tahun 2019 Perusahaan telah melakukan program penanaman pohon kembali.

Pada tahun 2021, Perusahaan melakukan kegiatan pelestarian lingkungan hidup, antara lain melakukan penanaman pohon kembali di area seluas 9,7 Ha dengan jumlah tanaman 10.647 pohon, 2.129 pohon, dan 1.065 pohon dengan jenis pohon pinus, puspas, kayu manis, nangka, serta peteuy. Di tahun 2022 program realisasi penanaman pohon belum dapat dijalankan oleh Perseroan, namun dijalankan oleh entitas anak. Rencananya, Perseroan akan kembali merealisasikan program tersebut di tahun 2023.

Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan [POJK F.5]

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan tidak memiliki kebijakan materi yang ramah lingkungan dan berdampak baik bagi kinerja keberlanjutan di bidang lingkungan hidup dikarenakan kinerja operasional Perusahaan tidak memiliki dampak buruk terhadap lingkungan hidup dan bidang usaha Perseroan bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik dengan menggunakan energi baru terbarukan. Kendati demikian, Perusahaan memanfaatkan kertas bekas untuk mencetak dokumen internal. Upaya ini dilakukan sebagai langkah pelestarian lingkungan hidup.

Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan [302-2, 302-3] [POJK F.6]

Pemakaian Energi / Energy Usag

Energi / Energy	(Dalam Rp Jutaan / in Millions Rupiah)		
	2022	2021	2020
BBM (Bensin) /	145	105,9	106,1
Listrik	331,5	590,9	93,3

Pada tahun 2022, pengeluaran biaya untuk konsumsi listrik Perusahaan sebesar Rp331,5 juta, meningkat dibandingkan

positively to environmental conservation and to the stakeholders. In 2022, the Company carried out biodiversity and environment conservation through Subsidiary PT Arkora Hydro Sulawesi, namely the Koro Yaentu HPP project. The project includes watershed rehabilitation by planting pine tree in 57 Hectare area, which costed Rp280,129,500.

The Company carries out environmental protection and conservation activities to prevent environmental damage, such as water pollution, air pollution, noise, and other things that may disrupt the employees and local community's health, comfort, and safety. The Company has been organizing tree replanting programs since 2019.

In 2022, the Company has conducted several environmental conservation activities, such as reforestation covering an area of 9.7 Ha with a total of 10,647 trees, 2,129 trees, and 1,065 trees consisting of pine, needlewood, cinnamon, jackfruit, and bitter bean. This activity has been carried out by the Company since 2019. In 2022, the tree-planting program has not been realized yet. However, the program is planned to be carried out in 2023.

Eco-Friendly Materials Usage [POJK F.5]

Throughout 2022, the Company has no policy on the use of materials that are eco-friendly and positively impact the environmental sustainability due to the low negative impact in the Company's business operations and its business line in new renewable energy power plant. Nevertheless, the Company utilizes scrap paper to print internal documents. This effort is carried out as a measure to preserve the environment.

Amount and Intensity of Energy Usage [302-2, 302-3] [POJK F.6]

In 2022, the Company's expenses for electricity amounted to Rp331.5 million, an increase compared to 2021 at Rp271.5



dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp66,3 juta. Sementara pada pemakaian energi BBM, Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp145 juta, meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp66,3 juta. Hal ini dikarenakan adanya kinerja operasional yang meningkat.

Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya Emisi [305] [POJK F.11]

Emisi yang dihasilkan oleh Perusahaan berasal dari jumlah emisi yang dihasilkan dari penggunaan energi untuk menunjang pelaksanaan aktivitas operasional Perusahaan, yaitu energi listrik dan BBM. Hingga tahun 2022 Perusahaan belum melakukan pengukuran emisi dari kegiatan bisnis Perusahaan dikarenakan bisnis utama Perusahaan bergerak di bidang PLTA yang memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT), yakni air sungai. Namun di tahun 2022, Perusahaan sedang dalam tahap perencanaan pembentukan tim untuk melakukan pengukuran emisi, sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan [POJK F.12]

Dalam rangka mencapai pengurangan emisi yang dikonsumsi oleh Perusahaan sekaligus menghasilkan kualitas udara serta lingkungan yang berkelanjutan, Perusahaan melaksanakan beberapa upaya pengendalian emisi, yakni melakukan penanaman kembali pohon di area sekitar lokasi PLTA dan menggunakan kendaraan hemat bahan bakar.

Penggunaan Air [303-1, 303-3, 303-5] [POJK F.8]

PT Arkora Hydro menggunakan sumber air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sementara untuk kebutuhan air di daerah operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Perusahaan menggunakan air sungai. Untuk biaya tagihan air di tahun 2022 sebesar Rp599.480.300, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp590 juta.

Upaya dan Pencapaian Efisiensi dan Penggunaan Energi Terbarukan [301-2, 302-4, 305-5] [POJK F.7]

Sebagai upaya Perusahaan menjaga keberlanjutan sumber energi, Perusahaan menerapkan beberapa langkah untuk melakukan efisiensi energi, antara lain:

1. Mematikan lampu dan pendingin udara sebelum meninggalkan kantor pusat maupun kantor lokasi.
2. Menggunakan air untuk mencuci tangan secara wajar.

million. Meanwhile, the Company's expenses for gasoline amounted to Rp145 million, an increase/decrease compared to 2021 at Rp66.3 million.

Total and Intensity of Emission Generated Based on Emission Type [305] [POJK F.11]

The emission generated by the Company comes from the total emission generated by energy usage to support the implementation of the Company's operational activities, namely electricity and fuel. As of 2022, the Company has not measured emissions from the Company's core business engaging in hydro power plant (HPP) that utilizes new and renewable energy (NRE), namely the river. However, in 2022, the Company is in the planning stage of forming a team for emission measurement as a concern towards the environment.

Efforts and Achievement of Emission Reduction [POJK F.12]

In reducing the Company's consumption of emission while simultaneously generating better air quality along with sustainable environment, the Company carried out emission control attempts such as reforestation in the HPP area and using fuel-efficient vehicles.

Water Usage [303-1, 303-3, 303-5] [POJK F.8]

PT Arkora Hydro sources its water from Regional Drinking Water Company (PDAM). Meanwhile, the water necessary for the HPP operations sources water from the local river. The amount of water usage in 2022 was Rp599,480,300, an increase compared to the 2021 with the amount of Rp590 million.

Efforts and Achievements of Efficiency and Use of Renewable Energy [301-2, 302-4, 305-5] [POJK F.7]

As part of the Company's efforts in maintaining energy sources sustainability, the Company implements several energy efficiency measures, such as:

1. Turning off lights and air conditioners before leaving the head office or location office.
2. Using water to wash hands in an appropriate manner.

3. Menggunakan kertas bekas untuk keperluan kantor, seperti drafting. Perusahaan menerapkan kebijakan penggunaan kertas bekas atau print bolak-balik.
4. Menggunakan kendaraan hemat bahan bakar.
5. Menggunakan instalasi listrik hemat energi.

3. Utilizing used paper for the Company's use, such as drafting. The Company implements policy of using used paper and print on both sides of the paper.
4. Using fuel-efficient vehicles.
5. Using energy-efficient electrical installations.

Perusahaan bersinergi dengan seluruh insan Perusahaan dan para pemangku kepentingan untuk melakukan gerakan penghematan energi, hal ini merupakan bentuk komitmen dari penerapan keberlanjutan di lingkungan Perusahaan.

The Company synergizes with every employee and stakeholder to save energy as a form of the Company's commitment to implementing sustainable practices in the Company's environment.

Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati [304-2] [POJK F.9]

Impact of Operational Areas Located in Biodiverse Areas or in/near Conservation Areas [304-2] [POJK F.9]

Kegiatan bisnis serta wilayah operasional Perusahaan tidak berada di daerah konservasi ataupun memiliki keanekaragaman hayati.

The Company's business activities and operational areas are not located in conservation areas or those having biodiversity.

Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati [POJK F.10]

Biodiversity Conservation Efforts [POJK F.10]

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan tidak melakukan usaha konservasi keanekaragaman hayati, hal ini disebabkan oleh wilayah Perusahaan tidak berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati. Di lain sisi, Perusahaan memiliki program pelestarian dengan melakukan penanaman beberapa jenis pohon di lokasi pembangkit listrik yang dikelola oleh Perusahaan.

Throughout 2022, the Company did not carry out biodiversity conservation efforts due to the Company's operational area not being located in biodiverse area or in/near conservation areas. On the other hand, the Company has conservation programs by planting various types of trees in the power plant areas managed by the Company.

Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis [306-] [POJK F.13]

Total Amount of Waste and Effluent Generated by Type [306-] [POJK F.13]

PT Arkora Hydro Tbk berupaya untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang menggunakan sumber energi baru dan terbarukan yang berasal dari aliran air. Perusahaan dalam operasionalnya mengimplementasikan kinerja keberlanjutan serta ramah lingkungan. Berikut jenis limbah dan efluen yang dihasilkan dari operasional bisnis Perusahaan di tahun 2022:

PT Arkora Hydro Tbk strives to be the new and renewable energy power plant who derived energy sources from water resources. The Company implements sustainable and eco-friendly performance in the operations. The types of waste and effluents generated from the Company's business operation in 2022 are as follows:

Jenis Limbah / Type of Waste	Satuan / Measurement Unit	2022
Limbah B3 / Toxic and Hazardous Waste		
Oli Bekas / Used oil	Pcs / buah	200
Limbah Non-B3 / Non-Toxic and Hazardous Waste		
Ban Motor Bekas / Used Motor Vehicle Tire		0
Ban Mobil Bekas / Used Car Tire		0
Lampu PJU Bekas / Used PJU Lamp		25
Lampu TL Bekas / Used TL Lamp	Pcs / buah	13
Kemasan Bekas B3 / B3 Used Packaging		0
Limbah Elektronik (Keyboard) / Electronic Waste (Keyboard)		0
Limbah Elektronik (UPS) / Electronic Waste (UPS)		0

Hingga akhir tahun 2022, Perusahaan tidak menghasilkan limbah cair dari kegiatan bisnisnya sehingga tidak terdapat data jumlah limbah efluen yang dihasilkan pada kategori jenis limbah cair.

As of 2022, the Company did not generate liquid waste from its business activities. Consequently, there is no data on the total amount of effluent waste generated in the liquid category.



Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen [306-2]
[POJK F.14]

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan melakukan pengolahan limbah dan efluen dengan mekanisme sebagai berikut:

Jenis Limbah / Type of Waste	Pengelolaan Limbah / Waste Management
Limbah B3 / Toxic and Hazardous Waste	Limbah yang terkumpul kemudian diserahkan dan dikelola oleh pihak ketiga / Waste is collected to be handled and managed by a third party
Limbah Non-B3 / Non-Toxic and Hazardous Waste	Menyediakan tempat sampah untuk limbah Non-B3 kemudian limbah yang terkumpul diserahkan dan dikelola oleh pihak ketiga / Provide a trash can for Non-B3 waste then the collected waste is handed over and managed by a third party.

Tumpahan yang Terjadi [POJK F.15]

PT Arkora Hydro Tbk selalu menjaga kualitas mekanisme pembuangan limbah yang dihasilkan dari operasional Perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan sepanjang tahun 2022, tidak terdapat tumpahan yang terjadi pada proses pembuangan limbah operasional Perusahaan. Sebagai bagian dari mitigasi, Perusahaan senantiasa melatih karyawan untuk mengantisipasi kondisi darurat.

Kepatuhan Lingkungan [307]

Perusahaan senantiasa menjunjung tinggi komitmennya dalam aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan selama menjalankan kegiatan operasional. Perusahaan berupaya untuk selalu menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan lingkungan hidup. Dengan hal ini, pada tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran terhadap kepatuhan lingkungan akibat dari operasional yang dilakukan Perusahaan.

Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan [POJK F.16]

Hingga 31 Desember 2022, Perusahaan tidak menerima adanya pengaduan lingkungan hidup yang disebabkan oleh adanya aktivitas bisnis di Perusahaan.

ASPEK SOSIAL

Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen [POJK F.17]

PT Arkora Hydro Tbk selalu memprioritaskan pengembangan program sosial terkait tanggung jawabnya terhadap pelanggan. Pelanggan merupakan salah satu aspek penting penunjang keberhasilan Perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam bentuk memberikan layanan serta jasa yang setara kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen ini sesuai dengan prinsip Perusahaan

Waste and Effluent Management Mechanism [306-2]
[POJK F.14]

Throughout 2021, the Company carried out waste and effluent management with the following mechanism:

Waste Spillage [POJK F.15]

PT Arkora Hydro Tbk always maintains the quality of the waste disposal mechanism generated from the Company's operations. This is evidenced by the fact that throughout 2021, there were no spills that occurred in the Company's operational waste disposal process. As part of mitigation, the Company continuously trains employees to anticipate emergency conditions.

Environmental Compliance [3-7]

The Company always upholds its commitment on aspects of environmental sustainability and safety in carrying out operational activities. The Company strives to always maintain compliance with the prevailing laws and regulations related to environmental management. With this in mind, in 2022 there were no violations of environmental compliance as a result of the operations carried out by the Company.

Number and Materials of Environmental Complaints Received and Resolved [POJK F.16]

As of December 31, 2022, the Company has not received any environmental complaints caused by the Company's business activities.

SOCIAL ASPECT

Commitment to Providing Equal Products and/or Services to Consumers [POJK F.17]

PT Arkora Hydro Tbk always prioritizes social program developments relating to the responsibilities to the customers. Customers are one of the most important aspects supporting the Company's success. The implementation of these responsibilities is realized in the form of providing equal services and services to all stakeholders. This commitment aligns with the Company's principle to always act justly and

untuk senantiasa bersikap adil serta memberikan pelayanan dan dampak yang sebaik-baiknya bagi seluruh Pemangku Kepentingan Perusahaan.

provide the best services and impacts for all stakeholders of the Company.

ASPEK KETENAGAKERJAAN

Kesetaraan Kesempatan Bekerja [POJK F.18]

PT Arkora Hydro Tbk memberikan kesempatan bekerja secara adil kepada seluruh karyawan sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas karyawan tanpa membedakan gender, suku, ras, agama, orientasi seksual, maupun hal lainnya yang tidak berkaitan dengan kadar profesionalisme seseorang.

MANPOWER ASPECT

Equal Employment Opportunity [POJK F.18]

PT Arkora Hydro Tbk provides fair employment opportunities to all employees in accordance with the competencies and capabilities of employees without any discrimination against gender, ethnicity, race, religion, sexual orientation, or other matters that are not relevant to one's professionalism.

Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa [408-1, 409-1] [POJK F.19]

Dalam menjalankan bisnisnya, PT Arkora Hydro senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang terkait dengan ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh karena itu, Perusahaan tidak memiliki tenaga kerja yang berada di bawah umur maupun yang diperkerjakan secara paksa.

Child Labor and Forced Labor [408-1, 409-1] [POJK F.19]

In running its business, PT Arkora Hydro always complies with applicable laws and regulations, including those related to employment in Indonesia. Therefore, the Company is committed to not recruiting workers who are underage or who are forced to work.

Upah Minimum Regional [401-2 401-3] [POJK F.20]

PT Arkora Hydro Tbk selalu memperhatikan pemberian upah yang layak kepada karyawan Perusahaan. Setiap karyawan yang bekerja di Perusahaan mendapatkan upah yang sesuai dengan upah minimum regional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Penetapan besaran upah selain mengacu pada ketentuan peraturan Pemerintah Daerah, juga berdasarkan kinerja, kompetensi, pengalaman individu, dan faktor eksternal lainnya. Di samping itu, karyawan juga mendapatkan tunjangan lainnya. Perusahaan juga mengikutsertakan semua karyawan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Regional Minimum Wage [401-2 401-3] [POJK F.20]

PT Arkora Hydro Tbk always pays attention in providing decent wages to the Company's employees. Every employee who works at the Company receives at least the amount of wage in accordance with the regional minimum wage set by the Regional Government. The determination of wage amount is based on the provisions of Regional Government regulations, and additionally based on performance, competence, individual experience, and other external factors. Aside of the basic salary, employees also get other benefits. The Company also includes all employees in the BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan programs.

Berikut ini adalah rincian tunjangan yang diberikan kepada karyawan pada tahun 2022

Details of the benefits provided to employees in 2022 is as follows:

Bentuk Tunjangan / Form of Allowance	Karyawan Tetap / Permanent Employee	Karyawan Kontrak / Contract Employees
Tunjangan Hari Raya / Religious Day Allowance	✓	✓
Tunjangan Makan / Meal Allowance	✓	✓
Tunjangan Transportasi / Transportation Allowance	✓	✓
Tunjangan Telekomunikasi / Communication Allowance	✓	✓
Tunjangan Pajak Penghasilan / Income Tax Allowance	✓	✓
Tunjangan Jabatan / Positional Allowance	✓	✓
Tunjangan Operasional / Operational Allowance	✓	✓
Tunjangan Shift / Shift Allowance	✓	✓
Tunjangan Insentif / Incentive Allowance	✓	✓
Cuti Tahunan / Annual Leave	✓	✓
Cuti Melahirkan (khusus wanita) / Maternal Leave (female only)	✓	✓
BPJS Ketenagakerjaan	✓	✓
BPJS Kesehatan	✓	✓



Program Pensiun [201-3]

Perusahaan memiliki fasilitas program pensiun bagi karyawan tetap yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang meliputi jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Karyawan. Seluruh karyawan tetap Perusahaan juga dilindungi oleh BPJS Kesehatan yang melibatkan kontribusi baik dari pemberi kerja maupun masing-masing karyawan yang dihitung dari persentase gaji pokok karyawan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah di Indonesia. Hal itu dilakukan oleh Perusahaan sebagai bentuk dukungan Perusahaan terhadap kesejahteraan dan apresiasi para karyawan.

Perekrutan dan Pergantian Karyawan [401-1]

Perusahaan memahami pentingnya memiliki SDM yang unggul dan berkompeten. Oleh karenanya Perusahaan berupaya untuk mencari bibit unggul dengan membuka kesempatan seluas-luasnya secara transparan dan adil kepada umum. Selain melakukan rekrutmen secara terbuka dan transparan. Perusahaan juga melakukan proses rekrutmen internal dalam bentuk mutasi dan promosi dalam rangka memberikan kesempatan bagi karyawan internal untuk mengisi posisi yang tersedia. Perusahaan terus menyempurnakan sistem rekrutmen untuk memberikan kemudahan bagi para pencari kerja, tidak terkecuali bagi mahasiswa atau pelajar yang membutuhkan internship.

Dalam rangka memenuhi tenaga kerja baik di kantor pusat maupun kantor lokasi, Perusahaan mengoptimalkan dengan menyerap tenaga kerja lokal yang memenuhi persyaratan dan standar kualifikasi yang dibutuhkan. Pada tahun 2022, Perusahaan merekrut karyawan baru sebanyak 103 orang untuk berbagai posisi yang seluruhnya adalah tenaga kerja lokal.

Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman [403-3] [POJK F.21]

Perusahaan memiliki lingkungan kerja yang layak dan aman kepada seluruh karyawannya. Perusahaan memiliki fasilitas kesehatan dan keamanan di lingkungan Perusahaan. Perusahaan memberikan jaminan kesehatan pada karyawan tetap yang meliputi alat pelindung diri (APD) dan prosedur kerja sesuai dengan HSE. Selain itu, Perusahaan juga bekerja sama dengan klinik setempat untuk memberikan perawatan bagi karyawan yang sedang sakit atau membutuhkan pertolongan pertama saat berada di lingkungan Perusahaan. Seluruh karyawan tetap juga mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang dihitung dari persentase gaji pokok karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pension Program [201-3]

The Company has prepared a pension program facility for permanent employees managed by BPJS Ketenagakerjaan, which include Pension Plan and Employee Pension Insurance. All permanent employees of the Company are also protected by BPJS Kesehatan which involves contributions from both the employer and each employee calculated from the percentage of the employee basic salary as determined by government regulations in The Company. This was carried out by the Company as a form of the Company's support for the welfare and appreciation for the employees

Employee Recruitment and Turnover [401-1]

The Company is aware of the importance of having excellent and competent human resources. Therefore, the Company always strives to find great talents by opening the widest opportunities in a transparent and fair manner. In addition to conducting open/transparent recruitment, the Company also carries out an internal recruitment process in the form of mutations and promotions in order to provide opportunities for internal employees to fill available positions. The Company also keeps improving the recruitment system to be more accessible to jobseekers as well as students for internships

In order to meet the needs of workers both at the head office and location offices, the Company prioritizes prospective employees from the surrounding/local areas, as long as they meet the requirements and qualification standards set by the Company. In 2022, the Company recruited a total of 130 employees for various positions, in which all of whom were local workers.

Decent and Safe Working Environment [403-3] [POJK F.21]

The Company creates a decent and safe work environment for all of its employees. The Company provides health and safety facilities for employees at work, which includes health insurance for permanent employees which includes Personal Protective Equipment (PPE) and HSE-based work procedures. In addition, the Company also partners with the local clinic to provide treatment for employees who are unwell and require first aid at the Company's work environment. In addition, all permanent employees also receive BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan which is calculated from the percentage of the employee's basic salary in accordance with the Manpower Law.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja [403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-7, 403-8, 403-9]

Perusahaan menyadari pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada seluruh karyawan, baik yang berada di kantor pusat maupun kantor lokasi. Perusahaan melakukan internalisasi dan sosialisasi budaya K3 untuk mencegah terjadinya insiden kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Perusahaan secara berkala melakukan perbaikan sistem K3 secara berkelanjutan, hal ini dilakukan untuk mewujudkan pencapaian *zero accident* di lingkungan kerja Perusahaan.

Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai [POJK F.22]

Perusahaan memfasilitasi program pelatihan dan pengembangan kemampuan kepada seluruh pegawai. Perusahaan memahami hal tersebut dapat mendorong setiap karyawan untuk meningkatkan standar kompetensi secara berkelanjutan agar mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai ini dilakukan secara rutin dan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap departemen maupun karyawan, yang secara keseluruhan dirancang oleh Departemen *Human Resource and Development* (HRD).

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Keberlanjutan [POJK E.2]

Perusahaan memfasilitasi program pelatihan dan pengembangan kemampuan kepada seluruh pegawai. Perusahaan memahami hal tersebut dapat mendorong setiap karyawan untuk meningkatkan standar kompetensi secara berkelanjutan agar mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai ini dilakukan secara rutin dan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap departemen maupun karyawan, yang secara keseluruhan dirancang oleh Departemen *Human Resource and Development* (HRD).

Memberdayakan Sumber Daya Manusia

Tahun 2022, Perusahaan melakukan berbagai serangkaian transformasi demi kelancaran usaha dan menjaga performa kinerja keuangan. Perusahaan berhasil meningkatkan kapasitas produksi dan perolehan pendapatan, serta tidak terdapat karyawan yang kehilangan pekerjaan secara terpaksa.

Occupational Health and Safety [403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-7, 403-8, 403-9]

The Company is aware of the importance of Occupational Health and Safety (OHS) for all employees, both at the head office and the location office. The Company carries out OHS culture internalization and dissemination the Company conducts internalization and dissemination of OHS culture to prevent accidents at work. As of today, the Company is always continuously improving the OHS system in order to maintain the achievement of zero accident in the Company's work environment.

Employee Competency Development and Training [POJK F.22]

The Company facilitates training and skill development program for all employees. The Company understands that through the training, each employee is encouraged to continuously improve their competence standard so that they are able to adapt to technological developments and rapid changes in the business environment. The employees' training and competence development are carried out regularly and adjusted to every department or employee's need, which was overall designed by the Human Resource and Development (HRD) Department.

Sustainability Competence Development and Training Program [POJK E.2]

The Company facilitates training and skills development program to all employees. The Company comprehends that this program can encourage each employee to sustainably improve the competency standard, thus enabling the Company and the employees to adapt to technological advancement and fast changes in the business environment. This employee training and competency development is organized routinely as needed by each department or employee, and is overall designed by the Human Resource and Development (HRD) Department.

Human Resource (HR) Development Strategy

In 2022, the Company implemented a series of transformations to support business continuity and maintain the financial performance. The Company successfully increased the production capacity and income and did not have any employee who lost his/her job forcefully.



Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan [407-1]

Perusahaan menerapkan sistem komunikasi dua arah yang bebas terbuka dan bertanggung jawab. Seluruh insan Perusahaan dapat memiliki kesempatan untuk menyampaikan saran dan pendapat mengenai Perusahaan atau hubungan kerja di dalam Perusahaan dengan atasan langsung atau kepada Departemen HR selama jam kerja.

ASPEK KEMASYARAKATAN

Dampak Operasi terhadap Masyarakat Sekitar [413-1] [POJK F.23]

Perusahaan senantiasa mengembangkan program kemasyarakatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, lingkungan hingga pengembangan ekonomi lokal. Di samping itu, Perusahaan juga memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal. Dampak positif dari program yang dilaksanakan oleh Perusahaan menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik di tengah masyarakat, adanya peningkatan kesejahteraan, serta perbaikan tingkat kesehatan masyarakat sekitar.

Pengaduan Masyarakat [POJK F.24]

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan tidak mendapatkan laporan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan di bidang lingkungan hidup.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) [POJK F.25]

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan mengadakan kegiatan tanggung jawab sosial, yaitu melakukan renovasi pembangunan dinding pagar pembatas SDN 2 Panawa, Garut, Jawa Barat, dengan realisasi biaya sebesar Rp10.500.000. Perusahaan juga memberikan bantuan hewan kurban, yakni 11 ekor kambing, senilai Rp31.750.000,-.

Complaint Mechanism on Manpower Issues [407-1]

The Company implements a free, open, and responsible two-way communication system. Every employee in the Company may submit suggestions and opinions regarding the Company or the working relationship within the Company with their direct superiors or to the HR Department during work hours.

COMMUNITY ASPECT

Operations Impact on the Local Communities [413-1] [POJK F.23]

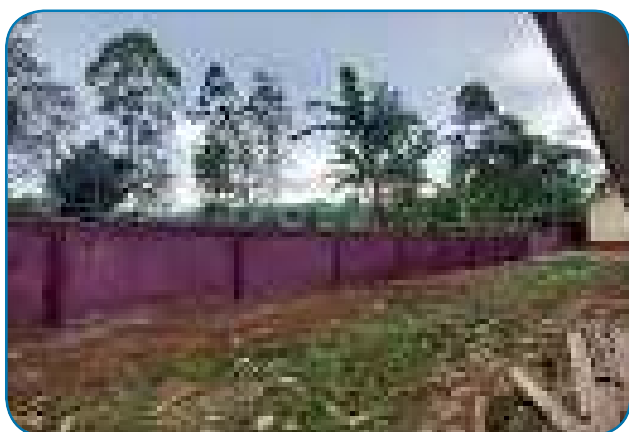
The Company consistently carries out community programs in the educational, health, cultural, environmental, to local economic development sector. In addition, the Company provides work opportunities to the local communities. The positive impact the implemented program brings results in enhancing the quality of good human resources amid the community, improving welfare, as well as improving the health level within the local community.

Community Complaint [POJK F.24]

Throughout 2022, the Company did not receive any reports of public complaints related to violations committed by the Company in the environmental sector.

Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR) Activities [POJK F.25]

Throughout 2022, the Company organized corporate social responsibility activities, namely Renovation and construction of wall and fences in SDN 2 Panawa, Garut, West Java, which cost realization of Rp10,500,000. Donation of Qurban, as many as 11 goats, which value to Rp31,750,000



MELAKUKAN RENOVASI PEMBANGUNAN DINDING PAGAR PEMBATAS SDN 2 PANAWA, GARUT, JAWA BARAT, DENGAN REALISASI BIAYA SEBESAR RP10.500.000,-.



MEMBERIKAN BANTUAN HEWAN KURBAN SEBANYAK 11 EKOR KAMBING, SENILAI RP31.750.000,-.

Keterlibatan Pemasok Lokal [204-1]

Perusahaan senantiasa berupaya untuk menggerakkan perekonomian lokal, salah satunya melalui kerja sama dengan pemasok lokal. Perusahaan memaksimalkan pemasok lokal terkait pasokan produk dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat di sekitar wilayah operasional Perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Arkora Hydro terhadap perekonomian lokal dan nasional.

Local Supplier Involvement [204-1]

The Company consistently strives to drive the local economy, one of which is through cooperation with local suppliers. The company maximizes local suppliers regarding the supply of products and services produced by the community around the Company's operational areas. This was done as a form of Arkora Hydro's support for the local and national economy.

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN PRODUK/JASA BERKELANJUTAN

Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan [POJK F.26]

Selama Tahun Buku 2022, Perusahaan telah melakukan beberapa inovasi baik terkait pengembangan produk, proses produksi, proses distribusi, hingga inovasi-inovasi dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Perusahaan berupaya untuk mewujudkan dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan - TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

RESPONSIBILITY ON SUSTAINABLE PRODUCT/ SERVICE DEVELOPMENT

Innovation and Development of Sustainable Financial Products/Services [POJK F.26]

During the 2022 Fiscal Year, the Company has presented several innovations, be it regarding product development, production process, distribution process, to innovations in the Corporate Social & Environment Responsibility program. The Company strives to realize and support the Sustainable Development Goals (SDGs).

Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan [417-1] [POJK F.27]

Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk menghasilkan dan menawarkan layanan yang aman, dan berkualitas kepada para pelanggannya. Layanan yang ditawarkan Perusahaan dihasilkan dari proses produksi listrik yang dilakukan secara efisien menerapkan aspek keberlanjutan dan ramah lingkungan.

Products/Services Evaluated for Customer's Safety [417-1] [POJK F.27]

The Company is always committed to delivering and offering safe and quality services for the customers. Services provided by the Company are results from efficiently implemented electricity production process which applies the sustainable and eco-friendly aspects.

Dampak Produk/Jasa [POJK F.28]

Perusahaan menilai bahwa layanan yang dihasilkan tidak memiliki dampak atau efek samping yang timbul, namun Perusahaan juga secara konsisten memberikan layanan terbaik serta menindaklanjuti jika ada dampak dari layanan

Impact of Products/Services [POJK F.28]

The Company evaluates the impact of the services did not produce any side effects. However, the Company consistently provides the best services and actions when there is any impact of the provided services and continuously and transparently



yang diberikan serta senantiasa diinformasikan kepada pelanggan secara transparan.

informs the customer.

Jumlah Produk/Layanan yang Ditarik Kembali [POJK F.29]

Pada tahun 2022, tidak terdapat penarikan layanan maupun jasa yang dihasilkan oleh Perusahaan akibat komponen yang bermasalah. Perusahaan senantiasa melakukan antisipasi dan tindakan yang memadai untuk memastikan pelanggan tidak dirugikan. Perusahaan memastikan, bahwa layanan yang diberikan dalam kondisi dan kualitas terbaik.

Number of Recalled Products/Services [POJK F.29]

In 2022, the Company did not recall any provided services due to impaired components. The Company always takes adequate anticipations and actions in ensuring the satisfaction of customers. The Company also ensures that the services provided are brought to the customers in the most prime condition and quality.

Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan [POJK F.30]

Perusahaan tidak melakukan survei tingkat kepuasan pelanggan dikarenakan produksi yang dihasilkan Perusahaan berupa energi listrik dan pelanggan utama Perusahaan hanyalah PT PLN (Persero).

Customer Satisfaction Survey on Sustainable Financial Products and/or Services [POJK F.30]

The Company did not conduct a survey of customer satisfaction level as the Company is engaged in the electricity generation business with the Company's only main customer being the PT PLN (Persero).

INDEKS POJK NO. 51/POJK.03/2017 / POJK INDEX NO. 51/POJK.03/2017 [G. 4]

No. Indeks / Index No.	Pengungkapan / Disclosure	Halaman / Page
STRATEGI KEBERLANJUTAN / SUSTAINABILITY STRATEGY		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan / Sustainability Strategy Explanation	160
IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN / SUSTAINABILITY PERFORMANCE HIGHLIGHTS		
B.1	Aspek Ekonomi / Economic Aspect	161
B.2	Aspek Lingkungan Hidup / Environmental Aspect	161
B.3	Aspek Sosial / Social Aspect	162
PROFIL PERUSAHAAN / COMPANY PROFILE		
C.1	Visi, misi, dan nilai keberlanjutan Perusahaan / Vision, mission, and values of sustainability of the Company	50
C.2	Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, email, dan situs resmi. / Name, address, phone number, fax number, email, and official website	42
C.3	Skala Usaha (total aset atau kapitalisasi aset, total kewajiban, jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan), Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah), Wilayah operasional / Business Scale (total assets or asset capitalization, total liabilities, total employees by gender, position, age, education, and employment status), Share ownership percentage (public and government), Operational area	42
C.4	Penjelasan singkat produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan / Brief description of products, services, and business activities	43,44
C.5	Keanggotaan pada asosiasi / Association membership	52
C.6	Perubahan Perseroan yang bersifat signifikan misal terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan / Significant changes of the company, e.g., matters related to closing or opening of branches and ownership structure	44
PENJELASAN DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS EXPLANATION		
D.1	Penjelasan Direksi / Board of Directors Explanation	30-39
TATA KELOLA KEBERLANJUTAN / SUSTAINABLE GOVERNANCE		
E.1	Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan / Description of duties of the Board of Directors and Board of Commissioners, employees, officials, and/or work unit in charge of sustainable finance implementation	104
E.2	Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan / Explanation of competency development of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, employees, officials, and/or work unit in charge of sustainable finance implementation	162
E.3	Penjelasan mengenai prosedur Perusahaan Publik dalam mengendalikan risiko keberlanjutan / Explanation of procedures of Public Company in controlling sustainability risk	147
E.4	Penjelasan mengenai pemangku kepentingan (keterlibatan pemangku kepentingan dan pendekatan yang dilakukan Perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan baik berupa dialog, survei, seminar, dll) / Explanation of matters regarding stakeholders (stakeholder engagement and Company approach in engaging with stakeholders for Sustainable Finance implementation in the form of dialogues, surveys, seminars, etc.)	163
E.5	Permasalahan terhadap penerapan keuangan berkelanjutan / Issues on Sustainable Finance Implementation	164
KINERJA KEBERLANJUTAN / SUSTAINABILITY PERFORMANCE		

F.1	Kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal Perusahaan Publik / Efforts on building sustainability culture in the Public Company internal	164
KINERJA EKONOMI / ECONOMIC PERFORMANCE		
F.2	Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi / Comparison of target and performance of production, portfolio, payment target, or investment, revenues, and profit (loss)	164,165
F.3	Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan / Comparison of target and performance of production, portfolio, payment target, or investment on financial instruments or projects in line with Sustainable Finance implementation	165
UMUM / GENERAL ASPECT		
F.4	Biaya lingkungan hidup yang dikeluarkan / Environmental costs incurred	165
ASPEK MATERIAL / MATERIAL ASPECT		
F.5	Penggunaan material yang ramah lingkungan / Use of eco-friendly materials	166
ASPEK ENERGI / ENERGY ASPECT		
F.6	Jumlah dan intensitas energi yang digunakan / Total and intensity of energy used	166
F.7	Upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan / Effort and achievement of energy efficiency, including use of renewable energy	167
ASPEK AIR / WATER ASPECT		
F.8	Penggunaan air / Water usage	167
ASPEK KEANEKARAGAMAN HAYATI / BIODIVERSITY ASPECT		
F.9	Dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati / Impact of operational area in or near conservation or biodiverse area	168
F.10	Upaya konservasi keanekaragaman hayati / Biodiversity conservation efforts	168
ASPEK EMISI / EMISSION ASPECT		
F.11	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya / Total and intensity of emission generated by type	167
F.12	Upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan / Efforts and achievement of emission reduction	167
ASPEK LIMBAH DAN EFLUEN / WASTE AND EFFLUENT ASPECT		
F.13	Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenisnya / Total waste and effluent generated by type	168
F.14	Mekanisme pengelolaan limbah dan efluen / Waste and effluent management mechanism	169
F.15	Tumpahan yang terjadi (jika ada) / Spills occurred (if any)	169
ASPEK PENGADUAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP / COMPLAIN ON ENVIRONMENTAL ISSUES ASPECT		
F.16	Jumlah dan materi pengaduan lingkungan hidup yang diterima dan diselesaikan / Total and materials of environmental complaints received and resolved	169
KINERJA SOSIAL / SOCIAL PERFORMANCE		
F.17	Komitmen LJK, emiten, atau perusahaan publik untuk memberikan layanan atas produk dan/ atau jasa yang setara kepada konsumen / Commitment of LJK, issuer, or public company to provide equal products/services to customers	170
ASPEK KETENAGAKERJAAN / LABOR ASPECT		
F.18	Kesetaraan kesempatan bekerja / Equal employment opportunity	170
F.19	Tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa / Child labor and forced labor	170
F.20	Upah Minum Regional / Regional Minium Wage	170
F.21	Lingkungan bekerja yang layak dan aman / Safe and decent work environment	171

F.22	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai / Employee capability training and development	172
ASPEK MASYARAKAT / COMMUNITY ASPECT		
F.23	Dampak operasi terhadap masyarakat sekitar / Operational impact to local communities	173
F.24	Pengaduan masyarakat / Community complaint	173
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) / Social and Environmental Responsibility (TJSL) activities	173
TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN PRODUK/JASA BERKELANJUTAN / RESPONSIBILITY ON SUSTAINABLE PRODUCTS/SERVICES DEVELOPMENT		
F.26	Inovasi dan pengembangan produk/jasa keuangan berkelanjutan / Innovation and development of sustainable finance products/services	174
F.27	Produk/jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan / Products/services evaluated for customer safety	174
F.28	Dampak produk/jasa / Impact of products/services	175
F.29	Jumlah produk yang ditarik kembali / Total recalled products	175
F.30	Survei kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan / Customer satisfaction survey on sustainable finance products/services	175
LAIN-LAIN / OTHERS		
G.1	Verifikasi tertulis dari pihak independen (jika ada) / Written verification from independent party (if any)	N/A
G.2	Lembar umpan balik / Feedback sheet	175
G.3	Tanggapan terhdap umpan balik Laporan Tahun sebelumnya / Response to feedbacks of previous year's Annual Report	175
G.4	Daftar pengungkapan sesuai POJK 51/2017 / List of disclosures in accordance with POJK 51/2017	176

DAFTAR INDEKS GRI KOMPREHENSIF / GRI INDEX COMPREHENSIVE

GRI Standard		Halaman / Page
GRI 2 STANDAR UNIVERSAL: PENGUNGKAPAN UMUM (2021) / UNIVERSAL STANDARDS: GENERAL DISCLOSURES (2021)		
Organisasi dan Praktik Pelaporan / The Organization and its Reporting Practices		
2-1	Informasi mengenai organisasi / Organizational details	42
2-2	Entitas organisasi yang termasuk dalam laporan keberlanjutan / Entities included in the organization's sustainability reporting	42
2-3	Periode pelaporan, frekuensi, dan titik kontak / Reporting period, frequency and contact point	55
2-4	Penyajian kembali informasi / Restatements of information	55
2-5	Assurance oleh pihak eksternal / External assurance	N/A
Kegiatan dan Pekerja / Activities and Workers		
2-6	Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya / Activities, value chain, and other business relationships	50,51
2-7	Karyawan / Employees	75,76
2-8	Pekerja yang bukan merupakan karyawan / Workers who are not employees	N/A
Tata Kelola / Governance		
2-9	Struktur dan komposisi tata kelola / Governance structure and composition	104
2-10	Nominasi dan seleksi badan tata kelola tertinggi / Nomination and selection of the highest governance body	105
2-11	Ketua badan tata kelola tertinggi / Chair of the highest governance body	105
2-12	Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi pengelolaan dampak / Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts	105,119,124
2-13	Pendelegasian wewenang untuk tanggung jawab mengelola dampak / Delegation of responsibility for managing impacts	105,119,124
2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan / Role of the highest governance body in sustainability reporting	171
2-15	Konflik kepentingan / Conflicts of interest	N/A
2-16	Mengomunikasikan hal-hal kritis / Communication of critical concerns	147
2-17	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi / Collective knowledge of the highest governance body	105,119,124
2-18	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi / Evaluation of the performance of the highest governance body	124,129
2-19	Kebijakan remunerasi / Remuneration policies	130,131,170
2-20	Proses untuk menentukan remunerasi / Process to determine remuneration	130,131
2-21	Rasio kompensasi total tahunan / Annual total compensation ratio	N/A

Strategi, kebijakan, dan praktik / Strategy, Policies, and Practices		
2-22	Pernyataan mengenai strategi pembangunan berkelanjutan / Statement on sustainable development strategy	160
2-23	Komitmen kebijakan / Policy commitments	160
2-24	Menanamkan komitmen kebijakan dalam organisasi / Embedding policy commitments	160
2-25	Proses remediasi dampak negatif / Processes to remediate negative impacts	173
2-26	Mekanisme untuk saran dan masalah etika / Mechanisms for seeking advice and raising concerns	151,152,173
2-27	Kepatuhan hukum dan peraturan / Compliance with laws and regulations	169
2-28	Keanggotaan asosiasi / Membership associations	52
Keterlibatan Pemangku Kepentingan / Stakeholder Engagement		
2-29	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan / Approach to stakeholder engagement	163
2-30	Kesepakatan perundingan kolektif / Collective bargaining agreements	N/A
GRI 3 STANDAR UNIVERSAL: TOPIK MATERIAL (2021) / UNIVERSAL STANDARDS: MATERIAL TOPICS (2021)		
3-1	Proses penentuan topik material / Process to determine material topics	N/A
3-2	Daftar topik material / List of material topics	N/A
	Manajemen topik material / Management of material topics	N/A
	Daftar topik material: / List of material topics:	N/A
	Emisi GRK dan Jejak Karbon / GHG Emissions and Carbon Footprint	N/A
	Melindungi Hutan dan Keanekaragaman Hayati / Protecting Forests and Biodiversity	168
3-3	Praktik Rantai Pasokan / Supply Chain Practices	174
	Kondisi Kerja / Working Conditions	N/A
	Hak pekerja / Labor rights	77
	Masyarakat lokal / Local communities	44,51,173,174
	Kemakmuran dan pertumbuhan inklusif / Prosperity and inclusive growth	N/A
GRI 200 PENGUNGKAPAN EKONOMI		
GRI 201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan / Direct economic value generated and distributed	164,165
GRI 204: Praktik Pengadaan 2016 / Procurement Practices 2016		
GRI 204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal / Proportion of spending on local suppliers	N/A
GRI 301: Material 2016 / Materials 2016		
GRI 301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume / Materials used by weight or volume	N/A
GRI 302: Energi 2016 / Energy 2016		

GRI 302-1	Konsumsi energi dalam organisasi / Energy consumption within the organization	66
GRI 305: Emisi 2016 / Emissions 2016		
GRI 305-1	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (Cakupan 1) langsung / Direct (Scope 1) GHG emissions	N/A
GRI 306: Air Limbah (Efluen) dan Limbah 2016 / Effluents and Waste 2016		
GRI 306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan / Water discharge by quality and destination	169
GRI 307: Kepatuhan Lingkungan 2016 / Environmental Compliance 2016		
GRI 307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup / Non-compliance with environmental laws and regulations	N/A
GRI 403: Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2018 / Occupational Health and Safety 2018		
GRI 403-9	Kecelakaan kerja / Work-related injuries	172
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016 / Training and Education 2016		
GRI 404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan / Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	76
GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan / Customer Health Safety 2016		
GRI 416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa / Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services	N/A

LEMBAR UMPAN BALIK

Feedback Form

Terima kasih telah membaca Laporan Keberlanjutan PT Arkora Hydro Tbk tahun 2022. Untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan Perusahaan, kami mohon kesediaan para pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik setelah membaca Laporan Keberlanjutan ini dengan memberikan tanda centang (✓) pada salah satu jawaban dan mengisi titik-titik yang tersedia, kemudian mengirimkannya kepada kami.

Thank you for reading the 2022 Sustainability Report of PT Arkora Hdyro Tbk. To improve the content of the Sustainability Report in the upcoming years, we would like to ask you to fill out this Feedback Form by ticking one of the answers and writing in the available space and return the form to us.

1. Laporan Keberlanjutan ini sudah memberikan informasi yang jelas mengenai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan PT Arkora Hdyro Tbk:

Setuju / Agree

Tidak Setuju / Disagree

Tidak tahu / Not Sure

2. Laporan Keberlanjutan ini sudah memberikan informasi yang jelas mengenai pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Arkora Hdyro Tbk:

Setuju / Agree

Tidak Setuju / Disagree

Tidak tahu / Not Sure

3. Materi dan data dalam Laporan Keberlanjutan ini mudah dimengerti dan dipahami:

Setuju / Agree

Tidak Setuju / Disagree

Tidak tahu / Not Sure

4. Materi dan data di dalam Laporan Keberlanjutan ini lengkap:

Setuju / Agree

Tidak Setuju / Disagree

Tidak tahu / Not Sure

5. Apakah desain, tata letak, grafis dan foto-foto dalam Laporan Keberlanjutan ini sudah bagus?

Setuju / Agree

Tidak Setuju / Disagree

Tidak tahu / Not Sure

1. This Sustainability Report provides clear information on the economic, social, and environmental performance of PT Arkora Hdyro Tbk:

2. This Sustainability Report provides clear information on the fulfillment of social and environmental responsibility of PT Arkora Hdyro Tbk:

3. The material and data in this Sustainability Report are easy to understand:

4. The material and data in this Sustainability Report are complete:

5. Is this Sustainability Report made with good design, layout, graphics, and pictures?



1. Informasi apa yang paling bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini?

1. Which information is the most useful from this Sustainability Report?

2. Informasi apa yang dinilai kurang bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini?

2. Which information is the least useful from this Sustainability Report?

3. Informasi apa yang dinilai masih kurang dari Laporan Keberlanjutan ini dan perlu ditambahkan pada Laporan Keberlanjutan mendatang?

3. Which information is lacking in this Sustainability Report and must be added in the next Sustainability Report?



Identitas Pengirim / Sender Identity

Nama / Name : _____
Email / E-mail : _____
No. Telp / Phone : _____

Identifikasi menurut kategori pemangku kepentingan / Identification of stakeholder category

(pilih salah satu / choose one)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pelanggan / Customer | <input type="checkbox"/> Mitra kerja / Business partner |
| <input type="checkbox"/> Pegawai/Organisasi Pegawai /
Employee/Employee Organization | <input type="checkbox"/> Media massa / Mass media |
| <input type="checkbox"/> Pemegang saham / Shareholder | <input type="checkbox"/> Masyarakat / Public |
| <input type="checkbox"/> Pemerintah, Regulator, Legislatif /
Government, Regulator, Legislative | <input type="checkbox"/> Lain-lain, sebutkan / Others, please describe |
-
-

Mohon lembar umpan balik ini dikirimkan ke:

Please return this feedback form to:

PT Arkora Hdyro Tbk

Office 8 Building Lantai 21 Unit C & D

Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 28 SCBD Jakarta 12190, Indonesia

Telepon / Telephone : (021) 2933 3288, (021) 2933 3299

Faksimile / Facsimile : (021) 2933 3298

Email: corporate.secretary@arkora.com

TANGGAPAN TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA

Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan tahun 2022 merupakan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang kedua kali diterbitkan oleh PT Arkora Hydro Tbk sehingga sepanjang tahun 2022, PT Arkora Hdyro Tbk tidak mendapatkan tanggapan spesifik terkait Laporan Keberlanjutan 2022 untuk perbaikan laporan. Namun demikian, PT Arkora Hydro Tbk telah menyempurnakan laporan ini agar sesuai dengan panduan POJK No.51/POJK.03/2017. Perseroan berharap laporan ini dapat menjadi informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan

RESPONSE TO FEEDBACK ON THE PREVIOUS YEAR REPORT

The 2022 Annual Report and Sustainability Report are the second Annual Report and Sustainability Report to be ever published by the Company, thus, in 2022, PT Arkora Hdyro Tbk did not receive any specific response to the 2021 Sustainability Report for report improvement. Nevertheless, PT Arkora Hydro Tbk has improved this report to comply with POJK No.51/POJK.03/2017. The Company aims to provide useful information for the stakeholders through this report.

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan dan Keberlanjutan 2022 PT Arkora Hydro Tbk

The Board of Commissioners' and The Board of Directors' Statement of Responsibility for the 2022 Annual Report and Sustainability Report of PT Arkora Hydro Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan dan Keberlanjutan PT Arkora Hydro Tbk tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Keberlanjutan perusahaan.

We, the undersigned, hereby certify that all the information presented in the 2022 Annual Report and Sustainability Report of PT Arkora Hydro Tbk has been written comprehensively and that we shall assume full responsibility for the accuracy of this Company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made correctly.

Jakarta, 13 Maret 2023 / Jakarta, March 13 2023

DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners

Arya Pradana Setiadharma
Komisaris Utama
President Commissioner

Abhay Narayan Pande
Komisaris
Commissioner

Iwan Hadiangoro
Komisaris
Commissioner

Drs. Indarto S.H
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Nicko Widjaja
Komisaris Independen
Commissioner

DIREKSI Board of Directors

Aldo Henry Artoko
Direktur Utama
President Director

Ricky Hartono
Direktur
Director

Ismu Nugroho
Direktur
Director

Boy Gemino Kalauserang
Direktur
Director

Halaman Ini Sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

**PT. ARKORA HYDRO Tbk
DAN ENTITAS ANAK/
*AND ITS SUBSIDIARIES***

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021/
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

	<u>Halaman/ Page</u>	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		DIRECTORS' STATEMENT LETTER
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021		CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – For the years ended December 31, 2022 and 2021
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	Consolidated Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	Consolidated Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	Consolidated Statements of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	Notes to Consolidated Financial Statements

**SURAT PERNYATAAN DENDUGI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PT ARKORA HYDRO Tbk DAN ENTITAS ANAK**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEAR ENDED
PT ARKORA HYDRO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama | Aldo Henry Artoke |
| Alamat kantor | Office 8 Building, 21 st Floor Unit 800
Jalan Senopati Raya No-8 Lot 28 SCBD
Jakarta 12180 |
| Nomor Telepon
jabatan | 021-2933188
Executive Director |
| 2. Nama | Ricky Hartono |
| Alamat kantor | Office 8 Building, 21 st Floor Unit 800
Jalan Senopati Raya No-8 Lot 28 SCBD
Jakarta 12180 |
| Nomor Telepon
jabatan | 021-2933188
Director |

Menyatakan bahwa:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Arkora Hydro Tbk dan Entitas Anak;
- Laporan keuangan konsolidasian PT Arkora Hydro Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;
- Seluruh informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Arkora Hydro Tbk dan Entitas Anak telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan konsolidasian PT Arkora Hydro Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi yang kritis material;
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Arkora Hydro Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

On, the undersigned:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Name | Aldo Henry Artoke |
| Office Address | Office 8 Building, 21 st Floor Unit 800
Jalan Senopati Raya No-8 Lot 28 SCBD
Jakarta 12180 |
| Phone Number
Position | 021-2933188
Executive Director |
| 2. Name | Ricky Hartono |
| Office address | Office 8 Building, 21 st Floor Unit 800
Jalan Senopati Raya No-8 Lot 28 SCBD
Jakarta 12180 |
| Phone Number
Position | 021-2933188
Director |

Declare that:

- We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Arkora Hydro Tbk and its Subsidiaries;
- The consolidated financial statements of PT Arkora Hydro Tbk and its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;
- All information in the consolidated financial statements of PT Arkora Hydro Tbk and its Subsidiaries has been completely and correctly disclosed;
 - The consolidated financial statements of PT Arkora Hydro Tbk and its Subsidiaries do not contain misleading material information or facts and do not omit material information or facts;
- We are responsible for the internal control system of PT Arkora Hydro Tbk and its Subsidiaries.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 10 March 2023 / March 31, 2023

  <hr/> Aldo Henry Artoke Executive Director/Executive Director	 <hr/> Ricky Hartono Director/Director
---	--

Laporan Auditor Independen

Independent Auditor's Report

No. 00046/2.1265/AU.1/02/0565-1/1/III/2023

No. 00046/2.1265/AU.1/02/0565-1/1/III/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

The Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT Arkora Hydro Tbk

PT Arkora Hydro Tbk

Opini

Opinion

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Arkora Hydro Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

We have audited the consolidated financial statements of PT Arkora Hydro Tbk and its subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



Imelda & Rekan

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which are separate and independent legal entities, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

Imelda & Rekan

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Pengakuan pendapatan jasa konstruksi dari perjanjian konsesi jasi

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, pendapatan dari jasa konstruksi berjumlah Rp 180 miliar, yang merupakan sekitar 73% dari jumlah pendapatan Grup.

Grup mengakui pendapatan dari jasa konstruksi dari waktu ke waktu sesuai dengan PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dengan mengacu pada persentase kemajuan konstruksi Grup. Persentase kemajuan konstruksi diukur dengan mengacu pada proporsi biaya kontrak yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang dilakukan sampai saat ini secara relatif terhadap estimasi jumlah biaya kontrak.

Pendapatan dari jasa konstruksi dianggap sebagai hal audit utama karena pertimbangan yang signifikan dan asumsi utama yang diterapkan oleh manajemen untuk mengestimasi jumlah biaya kontrak pada saat penyelesaian. Ketidakpastian dan subjektivitas yang digunakan dalam penentuan jumlah biaya kontrak pada saat penyelesaian dapat berdampak signifikan terhadap pendapatan yang diakui selama tahun berjalan.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Revenue recognition of construction services under a service concession arrangement

For the year ended December 31, 2022, revenue from construction services amounted to Rp 180 billion, which accounted for approximately 73% of the Group's total revenues.

The Group recognises revenue from construction service over time in accordance with PSAK 72 Revenue from Contracts with Customers by reference to the Group's percentage of construction progress. The percentage of construction progress is measured by reference to the proportion of contract costs incurred for the work performed to date relative to the estimated total contract costs.

Revenue from construction services is considered as a key audit matter due to significant judgement and key assumptions applied by management to estimate the total contract costs on completion. The uncertainty and subjectivity involved in determining the total contract costs on completion may result in a significant impact to the revenue recognised during the year.

Imelda & Rekan

Pertimbangan akuntansi penting dan sumber utama estimasi ketidakpastian pengakuan atas pendapatan jasa konstruksi telah diungkapkan pada Catatan 4 dan kebijakan akuntansi diungkapkan pada Catatan 3n.

Bagaimana hal ini ditangani dalam audit

Kami telah melakukan prosedur berikut:

- Melakukan pemahaman dan mengevaluasi desain dan implementasi serta menguji efektivitas operasi pengendalian yang relevan sehubungan dengan proses manajemen dalam pengakuan pendapatan;
- Melakukan pengujian substantif rinci secara sampling untuk biaya yang dikeluarkan selama tahun tersebut dan biaya yang dikeluarkan tersebut dicatat dalam periode akuntansi yang benar;
- Memeroleh estimasi jumlah biaya pada saat penyelesaian dan menilai kewajaran estimasi yang digunakan oleh manajemen, termasuk berdasarkan sampling, menyetujui estimasi tersebut dengan dokumen pendukung dan melakukan pengujian retrospektif dengan membandingkan jumlah biaya kontrak aktual yang dikeluarkan saat penyelesaian dengan jumlah estimasi jumlah kontrak biaya, untuk menilai kewajaran estimasi yang digunakan oleh manajemen;
- Diskusi dengan manajemen tentang kemungkinan adanya potensi keterlambatan proyek dan menilai kelebihan biaya;
- Menghitung kembali persentase kemajuan kontrak untuk menguji keakuratan pendapatan yang diakui sepanjang tahun tersebut; dan
- Menilai ketepatan pengungkapan terkait yang diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak mencantumkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

The critical accounting judgements and key source of estimation uncertainty on revenue recognition of construction services is disclosed in Note 4 and the accounting policy is disclosed in Note 3n.

How the matter was addressed in the audit

We have performed the following procedures:

- Obtained an understanding and evaluated the design and implementation and tested the operating effectiveness of the relevant controls in respect of management's processes in revenue recognition;
- Performed substantive tests of details on a sampling basis for the costs incurred during the year and such costs incurred were recorded in the correct accounting period;
- Obtained the estimated total costs on completion and assessed the reasonableness of the estimates used by management, including on a sampling basis, agreed the estimates to supporting documents and performed retrospective review by comparing total actual contract costs incurred at completion against the total estimated total contract costs to assess the reasonableness of the estimates used by the management;
- Discussed with management on any potential project delays and assessed for cost overruns;
- Re-computed the percentage of progress of the contracts to test the accuracy of the revenue recognised during the year; and
- Assessed the appropriateness of the related disclosures made in the consolidated financial statements.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Imelda & Rekan

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak akan menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidak konsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Imelda & Rekan

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

Imelda & Rekan

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Imelda & Rekan

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

IMELDA & REKAN



Muhammad Irfan

Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP. 0565

10 Maret 2023/ *March 10, 2023*



	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	6	92.716.716.610	16.168.494.520	Cash and cash equivalents
Piutang usaha pihak ketiga	7	10.467.345.260	14.456.449.975	Trade accounts receivable third party
Piutang lain-lain				Other accounts receivable
Pihak ketiga		76.299.350	369.001.049	Third parties
Pihak berelasi	25	102.671.988	-	Related party
Biaya dibayar dimuka	8	1.121.026.943	5.125.104.364	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	22	3.857.679.386	2.340.109.832	Prepaid taxes
Aset keuangan dari proyek konsesi - jatuh tempo dalam satu tahun	10	74.436.063.117	15.375.516.256	Financial assets from concession project - current
Jumlah Aset Lancar		182.777.802.654	53.834.675.996	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain pihak berelasi	25	-	343.671.988	Other accounts receivable related parties
Uang muka pembelian aset tetap		5.581.458.400	-	Advances for purchase property, plant and equipment
Aset tetap	9	140.252.485.232	147.927.115.100	Property, plant and equipment
Aset hak guna sewa - bersih		1.252.324.896	1.610.132.016	Right-of-use assets - net
Aset keuangan dari proyek konsesi - jatuh tempo lebih dari satu tahun	10	572.848.797.193	456.447.981.603	Financial assets from concession project - non-current
Aset tak berwujud	11	22.987.990.622	10.155.207.861	Intangible assets
Goodwill		275.000.000	275.000.000	Goodwill
Aset lain-lain	12	21.967.374.620	18.019.962.138	Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		765.165.430.963	634.779.070.706	Total Non-current Assets
JUMLAH ASET		947.943.233.617	688.613.746.702	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha dan lainnya	13			Trade and other accounts payable
Pihak berelasi	25	86.000.000	24.472.527.414	Related parties
Pihak ketiga		3.932.994.770	1.732.804.512	Third parties
Utang pajak	22	677.061.611	621.004.418	Taxes payable
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				Current maturities of long-term liabilities
Pinjaman berjangka	15	17.655.000.000	16.785.000.000	Term loans
Pinjaman dari pihak berelasi	25	128.111.426.088	115.140.470.994	Loan from related parties
Biaya masih harus dibayar	14	3.331.028.762	4.894.661.167	Accrued expenses
Utang retensi	25	7.028.949.528	3.401.392.771	Retention payable
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		160.822.460.759	167.047.861.276	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				Long-term liabilities - net of current maturities
Pinjaman berjangka	15	306.150.799.411	201.425.286.949	Term loans
Pinjaman dari pihak berelasi	25	-	96.191.948.399	Loan from related party
Liabilitas pajak tangguhan	22	75.652.157.718	48.554.392.152	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja	23	5.306.623.810	4.368.637.694	Employee benefits obligations
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		387.109.580.939	350.540.265.194	Total Non-current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		547.932.041.698	517.588.126.470	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 25 per saham pada tanggal 31 Desember 2022 (31 Desember 2021: Rp 50 per saham)				Capital stock - Rp 25 par value per share at December 31, 2022 (December 31, 2021: Rp 50 per share)
Modal dasar - 9.278.400.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 (31 Desember 2021: 4.639.200.000 saham)				Authorized - 9,278,400,000 shares at December 30, 2022 (December 31, 2021: 4,639,200,000 shares)
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.928.495.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 (31 Desember 2021: 1.159.800.000 saham)	16	73.212.375.000	57.990.000.000	Subscribed and paid-up - 2,928,495,000 shares at December 31, 2022 (December 31, 2021: 1,159,800,000 shares)
Tambahan modal disetor	17	253.708.206.359	92.685.000.000	Additional paid - in capital
Penghasilan komprehensif lain	23	3.246.572.940	3.194.772.653	Other comprehensive income
Saldo laba		68.730.181.482	16.069.760.103	Retained earnings
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		398.897.335.781	169.939.532.756	Equity attributable to Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		1.113.856.138	1.086.087.476	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		400.011.191.919	171.025.620.232	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		947.943.233.617	688.613.746.702	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	2022 Rp	2021 Rp	
PENDAPATAN	18	247.884.492.874	198.393.420.289	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	19,25	(120.765.052.891)	(89.276.246.598)	COST OF REVENUES
LABA KOTOR		127.119.439.983	109.117.173.691	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban umum dan administrasi	20	(31.074.666.856)	(18.009.770.736)	General and administrative expenses
Beban keuangan	21,25	(50.865.591.979)	(52.055.281.926)	Finance costs
Penghasilan keuangan	10	48.232.478.243	33.937.739.289	Finance income
Kerugian atas selisih kurs - bersih		(15.474.670.354)	(1.306.948.557)	Loss on foreign exchange - net
Keuntungan lain-lain - bersih		1.858.273.698	3.788.051.133	Other gain - net
LABA SEBELUM PAJAK		79.795.262.735	75.470.962.895	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	22	(27.088.417.070)	(25.740.619.586)	TAX EXPENSES
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		52.706.845.665	49.730.343.309	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK				OTHER COMPREHENSIVE INCOME NET OF TAX
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not reclassified subsequently to profit or loss:
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja pasti	23	42.493.158	718.291.973	Actuarial gain of defined benefit plan
Pajak dari keuntungan (kerugian) aktuarial	22	(9.348.495)	(137.837.191)	Tax of actuarial gain (loss)
Jumlah laba komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak		33.144.663	580.454.782	Total other comprehensive income for the year - net of tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		52.739.990.328	50.310.798.091	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		52.660.421.379	48.959.115.032	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		46.424.286	771.228.277	Non-controlling interest
JUMLAH		52.706.845.665	49.730.343.309	TOTAL
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		52.712.221.666	49.488.546.872	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		27.768.662	822.251.219	Non-controlling interest
JUMLAH		52.739.990.328	50.310.798.091	TOTAL
LABA PER SAHAM	24	20	19	EARNINGS PER SHARE

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidas

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Modal disetor/ <i>Paid-up capital stock</i>	Tambahan modal disetor/ <i>Additional paid-in capital</i>	Penghasilan komprehensif lain/ <i>Other comprehensive income</i>	Saldo laba (Defisit)/ <i>Retained Earnings (Deficit)</i>	Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk/ <i>Total equity attributable to Owners of the Company</i>	Kepentingan nonpengendali/ <i>Non-controlling interests</i>	Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i>	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Saldo per 1 Januari 2021	57.990.000.000	92.685.000.000	2.665.340.813	(32.889.354.929)	120.450.985.884	263.836.257	120.714.822.141	Balance as of January 1, 2021
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	48.959.115.032	48.959.115.032	771.228.277	49.730.343.309	Net profit for the year
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja pasti	-	-	529.431.840	-	529.431.840	51.022.942	580.454.782	Actuarial gains on defined benefit obligation
Saldo per 31 Desember 2021	57.990.000.000	92.685.000.000	3.194.772.653	16.069.760.103	169.939.532.756	1.086.087.476	171.025.620.232	Balance as of December 31, 2021
Penambahan modal melalui Penawaran Umum Saham Perdana	15.222.375.000	161.023.206.359	-	-	176.245.581.359	-	176.245.581.359	Share capital issuance from initial public offering
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	52.660.421.379	52.660.421.379	46.424.286	52.706.845.665	Net profit for the year
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja pasti	-	-	51.800.287	-	51.800.287	(18.655.624)	33.144.663	Actuarial gains on defined benefit obligation
Saldo per 31 Desember 2022	<u>73.212.375.000</u>	<u>253.708.206.359</u>	<u>3.246.572.940</u>	<u>68.730.181.482</u>	<u>398.897.335.781</u>	<u>1.113.856.138</u>	<u>400.011.191.919</u>	Balance as of December 31, 2022

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim.

See accompanying notes to interim consolidated financial statements which are an integral part of the interim consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	2022 Rp	2021 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan		111.230.832.661	82.113.819.067	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada:				Cash paid to:
Pemasok		(125.180.460.039)	(42.377.980.693)	Suppliers
Komisaris, direksi dan karyawan		(26.426.164.129)	(13.561.387.725)	Commissioners, directors, and employees
Kas (yang digunakan) dihasilkan dari operasi		(40.375.791.507)	26.174.450.649	Cash (used in) generated from operations
Pembayaran pajak penghasilan - bersih	22	(745.807.971)	(401.297.747)	Income tax paid - net
Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Operasional		(41.121.599.478)	25.773.152.902	Net Cash (Used for) Provided by Operating Activities
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	9	(2.097.488.885)	(3.005.135.271)	Acquisition of property and equipment
Penerimaan dari pendapatan bunga		581.097.959	164.009.380	Cash received from interest income
Uang muka perolehan aset tetap		(5.581.458.400)	-	Advance for purchase property, plant and equipment
Perolehan aset lainnya		(7.663.294.347)	(1.032.485.732)	Addition of other assets
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(14.761.143.673)	(3.873.611.623)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penambahan modal melalui Penawaran Umum Perdana Saham		182.668.500.000	-	Proceeds from shares issuance through Initial Public Offering
Pembayaran biaya emisi saham (Pembayaran) Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	17	(6.422.918.641)	-	Payment of share issuance costs (Payment) Proceeds loan from related parties
Pembayaran bunga pinjaman dari pihak berelasi	25	(66.920.000.000)	7.000.000.000	Payment of interest loan from related parties
Penerimaan pinjaman berjangka	16	122.380.512.463	-	Proceeds from term loan
Pembayaran pinjaman berjangka	16	(16.784.999.972)	(15.511.078.617)	Payment of term loans
Pembayaran bunga pinjaman berjangka	16	(26.706.519.528)	(20.386.223.632)	Payment of interests term loans
Pembayaran liabilitas sewa		-	(2.149.232.633)	Payments of lease liabilities
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		132.430.965.241	(31.046.534.882)	Net Cash Provided by (Used for) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		76.548.222.090	(9.146.993.603)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	6	16.168.494.520	25.315.488.123	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	6	92.716.716.610	16.168.494.520	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT. Arkora Hydro ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 5 Agustus 2010 dari Darmawan Tjoa, S.H., S.E., notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perusahaan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-40544.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 28601 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 73, tanggal 13 September 2011. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 58 tanggal 16 September 2022 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan melalui Penawaran Umum. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-0184868.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 16 September 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang pembangkit tenaga listrik dan melakukan penyertaan modal pada entitas lain. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2017.

Kantor pusat Perusahaan beralamat di Gedung Office 8 Lantai 21 Unit C-D, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Entitas induk terakhir dan pemegang saham Perusahaan oleh PT Arkora Bakti Indonesia.

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>
<u>Dewan Komisaris</u>	
Komisaris Utama	Arya Pradana Setiadharna
Komisaris	Abhay Narayan Pande Iwan Hadiangoro
Komisaris Independen	Drs. Indarto S.H. Nicko Widjaja
<u>Direksi</u>	
Direktur Utama	Aldo Henry Artoko
Direktur	Ismu Nugroho Ricky Hartono Boy Gemino Kalauserang
<u>Komite Audit</u>	
Ketua	Drs. Indarto S.H.
Anggota	Anindita Wijaya Putri Dwityha Putri Citrarhasmi

Pada tanggal 31 Desember 2022 jumlah karyawan yang dimiliki Perusahaan dan entitas anak adalah 129 karyawan.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT. Arkora Hydro (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 15 dated August 5, 2010 of Darmawan Tjoa, S.H., S.E., notary in Jakarta. The Notarial Deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his Decision Letter No. AHU-40544.AH.01.01.Year 2010 dated August 18, 2010 and was published in State Gazette No. 73, Supplement No. 28601 dated September 13, 2011. The articles of association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 58 dated September 16, 2022 of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notary in Jakarta relates to increase the Company's issued and fully paid capital through Initial Public Offering. This change was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia through Decision Letter No. AHU-0184868.AH.01.11 Tahun 2022 dated September 16, 2022.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the purpose and objective of the Company's activities are in power plant and into capital participation in other entities. The Company started its commercial operations in 2017.

The Company's head office is located at Office 8 Building 21st Floor Unit C-D, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, South Jakarta.

Ultimate shareholder and parent company of the Company is PT Arkora Bakti Indonesia.

The Company's management as of December 31, 2022 and 2021 consists of the following:

	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	
		<u>Board of Commissioners</u>
Arya Pradana Setiadharna	Arya Pradana Setiadharna	President Commissioner
Abhay Narayan Pande	Abhay Narayan Pande	Commissioners
Drs. Indarto S.H.	Drs. Indarto S.H.	
-	-	Independent Commissioners
-	-	
		<u>Directors</u>
Aldo Henry Artoko	Aldo Henry Artoko	President Director
Ismu Nugroho	Ismu Nugroho	Directors
Ricky Hartono	Ricky Hartono	
-	-	
		<u>Audit Committee</u>
-	-	Chairman
-	-	Members
-	-	

As of December 31, 2022, the Company and subsidiaries had 129 employees.

b. Entitas Anak

Rincian entitas anak pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

b. Consolidated Subsidiaries

Details of the subsidiaries at the end of the reporting period are as follows:

Nama Entitas Anak/ Name of Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Nature of business	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Jumlah Aset/Total Assets Sebelum eliminasi/Before elimination	
					31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
					Rp	Rp
PT Granif Konsultan (GK)	Jakarta	Jasa konstruksi/ Construction services	75%	2011	371.354.562	312.576.330
PT Arkora Sulawesi Selatan (ASS)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Maret/March 2020	375.865.571.444	373.507.387.034
PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	357.962.317.493	157.379.821.134
PT Nosu Hydro (NH)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.857.298.491	1.856.633.863
PT Hydra Sulawesi (HS)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.511.250.261	1.996.542.437
PT Arkora Tomoni Hydro (ATH)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.997.817.129	1.997.152.500
PT Arkora Luwu Timur Mandiri (ALTM)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.917.397.510	1.916.732.854
PT Arkora Hidro Pasifik (AHP)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.995.634.767	1.994.970.136
PT Arkora Hidronesia (AH)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.511.250.261	1.510.585.486
PT Arkora Sulawesi Tengah (ASTH)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.996.817.129	1.996.152.500
PT Sulawesi Hidro Mandiri (SHM)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	59.338.002.583	1.928.772.181
PT Arkora Sulawesi Tenggara (AST)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.892.023.497	1.890.758.721
PT Arjuna Hidro (Arjuna)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.914.920.620	1.917.224.680
PT Tenggara Hidro (TH)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.915.891.810	1.915.227.179
PT Arkora Energi Baru (AEB)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	39.245.276.960	1.996.152.500
PT Arkora Atlantik (AA)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.883.531.097	1.882.866.471
PT Arkora Guna Nergi (AGN)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	31.485.185.321	1.996.152.500
PT Arkora Hidro Tenggara (AHT)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.994.209.386	1.993.544.757
PT Tirta Energi Lestari (TEL)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,60%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	576.923.162	576.273.162
PT Arkora Tenaga Matahari (ATM)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	100,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	19.297.031.147	1.250.000.000
PT Arkora Hydro Malili (AHM)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	100,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	5.008.567.100	-
PT Arkora Energi Tanggamus (AET)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	100,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	5.002.870.000	-
PT Arkora Kalimantan Energi Hijau (AKEH)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	100,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	4.237.600.465	-

PT Arkora Hydro Malili (AHM) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 78 tanggal 21 Oktober 2022 dari notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E. di Jakarta. AHM bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik. Perusahaan melalui ATH dan AH (entitas anak) memiliki 10.000 lembar saham dengan nominal Rp 1.000.000 per lembar saham atau setara dengan dengan 100% kepemilikan saham.

PT Arkora Energi Tanggamus (AET) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 79 tanggal 21 Oktober 2022 dari notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E. di Jakarta. AET bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik. Perusahaan melalui AGN dan AH (entitas anak) memiliki 5.000 lembar saham dengan nominal Rp 1.000.000 per lembar saham atau setara dengan dengan 100% kepemilikan saham.

Pada tanggal 30 Desember 2022, PT Arkora Hidro Tenggara (AHT), entitas anak, PT Arkora Bakti Indonesia (ABI), pemegang saham Perusahaan, dan PT Arkora Kalimantan Energi Hijau (AKEH) telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dimana AHT membeli saham AKEH milik ABI sejumlah 2.499 lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 2.499.000.000 atau setara dengan 99.96% kepemilikan saham.

AKEH didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham AHU0034221.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022. AKEI bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik.

c. Penawaran Umum Perdana Saham ("IPO") Perusahaan

Dalam rangka IPO Perusahaan, pada tanggal 30 Juni 2022, Perusahaan memperoleh pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dalam suratnya No. S-117/D.04/2022 untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 608.895.000 saham (20,79% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham) dengan harga penawaran Rp 300 per saham. Pada tanggal 8 Juli 2022, Perusahaan mendapatkan persetujuan pencatatan efek di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dari Direksi BEI.

PT Arkora Hydro Malili (AHM) was established based on Notarial Deed No. 78 dated October 21, 2022 from Darmawan Tjoa, S.H., S.E. notary in Jakarta. AHM is engaged in power plant activities. The Company through ATH and AH (subsidiaries) has 10,000 shares with a nominal value of Rp 1,000,000 per share or equivalent to 100% of share ownership.

PT Arkora Energi Tanggamus (AET) was established based on Notarial Deed No. 79 dated October 21, 2022 from Darmawan Tjoa, S.H., S.E. notary in Jakarta. AET is engaged in power plant activities. The Company through AGN and AH (subsidiaries) has 5,000 shares with a nominal value of Rp 1,000,000 per share or equivalent to 100% of share ownership.

On 30 December 2022, PT Arkora Hidro Tenggara (AHT), a subsidiary, PT Arkora Bakti Indonesia (ABI), the Company's shareholder, and PT Arkora Kalimantan Energi Hijau (AKEH) signed a Conditional Sale and Purchase of Shares Agreement whereby AHT purchased AKEH's shares owned by ABI in the amount of 2,499 shares with a transaction value of Rp 2,499,000,000 or equivalent to 99.96% of share ownership.

AKEH was established based on Deed of Establishment No. 80 dated 25 May 2022, of Darmawan Tjoa, S.H., S.E., notary in Jakarta which has been ratified by Minister by virtue of Decree of Menkumham No. AHU0034221.AH.01.01 Tahun 2022 dated 25 May 2022. AKEI is engaged in power plant activities.

c. The Company's Initial Public Offering of Shares ("IPO")

In relation to the IPO of the Company's shares, on June 30, 2022, the Company received the effective statement from the Board of Commissioners of the Financial Services Authority ("OJK") in its Letter No. S-117/D.04/2022 to conduct an Initial Public Offering of 608,895,000 shares (20,79% of total shares issued and fully paid-up after initial public offering) with exercise price of Rp 300 per share. On July 8, 2022, the Company received approval for the listing of its shares on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") from the Board of Directors of the IDX.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pengatribusian imbalan pada periode jasa

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) menerbitkan siaran pers dan mengklarifikasi pengatribusian imbalan pada periode jasa untuk program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaan (UU Ketenagakerjaan).

Grup telah menerapkan panduan dalam siaran pers dan menerapkan perubahan yang diperlukan atas kebijakan akuntansi. Grup menentukan bahwa dampak atas perubahan tersebut tidak material terhadap laporan keuangan tahun berjalan dan periode sebelumnya.

b. Amandemen/Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam periode berjalan, Grup telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/penyesuaian baru PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Penerapan atas PSAK baru/ revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

PSAK 57 (amendemen) Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi – Kontrak Merugi – Biaya Memenuhi Kontrak

Grup telah menerapkan amendemen PSAK 57 untuk pertama kali di tahun berjalan. Amendemen ini menjelaskan bahwa 'biaya untuk memenuhi' kontrak terdiri dari 'biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak'. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut (misalnya tenaga kerja langsung atau material) dan alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak (misalnya alokasi biaya penyusutan atas aset tetap yang digunakan dalam memenuhi kontrak tersebut).

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATION OF PSAK ("ISAK")

a. Changes in Accounting Policy

Attribution of benefits to periods of services

In April 2022, the Indonesian Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI) has issued a press release and clarified the attribution of benefits to the periods of service for the pension program under the Manpower Act or the Job Creation Law and its implementing regulations (Manpower Act).

The Group has implemented the guidance in the press release and applied the necessary changes to its accounting policies. The Group has determined that the impact is not material to its current and prior year financial statements.

b. Amendments/Improvements to Standards Effective in the Current Year

In the current period, the Group has applied new standards and amendments/improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2022. The adoption of these new/ revised PSAKs does not result in changes to the Group's accounting policies and has no material effect on the amounts reported in these consolidated financial statements.

PSAK 57 (amendment) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts—Cost of Fulfilling a Contract

The Group has adopted the amendments to PSAK 57 for the first time in the current year. The amendments specify that the 'cost of fulfilling' a contract comprises the 'costs that relate directly to the contract'. Costs that relate directly to a contract consist of both the incremental costs of fulfilling that contract (examples would be direct labour or materials) and an allocation of other costs that relate directly to fulfilling contracts (an example would be the allocation of the depreciation charge for an item of property, plant and equipment used in fulfilling the contract).

**Penyesuaian tahunan 2020 atas PSAK –
Amandemen PSAK 71 Instrumen Keuangan
dan PSAK 73 Sewa**

Grup telah menerapkan amandemen Penyesuaian tahunan 2020 atas PSAK untuk pertama kali di tahun berjalan. Penyesuaian tahunan ini termasuk amandemen atas dua (2) standar berikut:

PSAK 71 Instrumen Keuangan

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa dalam menerapkan uji 'sepuluh persen' untuk menilai apakah liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya, entitas hanya memasukkan imbalan yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk imbalan yang dibayar atau diterima baik peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

PSAK 73 Sewa

Amandemen ini menghilangkan ilustrasi penggantian perbaikan sewa.

c. Standar dan Amandemen/Penyesuaian Standar Telah Diterbitkan tapi Belum Diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar, interpretasi dan amandemen atas PSAK yang relevan bagi Grup, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diizinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 1 (amandemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- PSAK 16 (amandemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- PSAK 25 (amandemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi
- PSAK 1 (amandemen) Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- PSAK 46 (amandemen) Pajak Penghasilan: Pajak Tanggungan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal

**2020 Annual Improvements to PSAK –
Amendments to PSAK 71 Financial
Instruments and PSAK 73 Leases.**

The Group has adopted the amendments included in the 2020 Annual Improvements to PSAK for the first time in the current year. The 2020 Annual Improvements to PSAK include amendments to two (2) Standards:

PSAK 71 Financial Instruments

The amendment clarifies that in applying the '10 per cent' test to assess whether to derecognise a financial liability, an entity includes only fees paid or received between the entity (the borrower) and the lender, including fees paid or received by either the entity or the lender on the other's behalf.

PSAK 73 Leases

The amendment removes the illustration of the reimbursement of leasehold improvements.

c. Standard and Amendments/Improvements to Standards Issued not yet Adopted

At the date of authorization of these consolidated financial statements, the following standard, interpretation and amendment to PSAK relevant to the Group were issued but not yet effective:

Effective for periods beginning on or after January 1, 2023

- PSAK 1 (amendment) Presentation of financial statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current.
- PSAK 16 (amendment) Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use
- PSAK 25 (amendment) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates
- Amendments to PSAK 1 (amendment) Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies
- PSAK 46 (amendment) Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

- PSAK 73 (amendemen) *Sewa: Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik*
- PSAK 1 (amendemen) *Penyajian Laporan Keuangan: Penyajian Laporan Keuangan terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan*

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 74 *Kontrak Asuransi*
- PSAK 74 (amendemen) *Kontrak Asuransi: Penerapan awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif*

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan standar dan amendemen/penyesuaian standar tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

Effective for periods beginning on or after January 1, 2024

- PSAK 73 (amendment) *Leases: Lease Liability in a Sale and Leaseback*
- PSAK 1 (amendment) *Presentation of financial statements: Non-current Liabilities with Covenants*

Effective for periods beginning on or after January 1, 2025

- PSAK 74 *Insurance Contracts*
- PSAK 74 (amendment) *Insurance Contracts: Initial application of PSAK 74 and PSAK 71 - Comparative Information*

As of the issuance date of the consolidated financial statements, the effects of adopting of these standards and amendments / improvements to standards on the consolidated financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasi atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, terlepas dari apakah harga tersebut dapat diamati secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengestimasi nilai wajar dari suatu aset atau liabilitas, Grup memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Nilai wajar untuk tujuan pengukuran dan/atau pengungkapan pada laporan keuangan konsolidasian ditentukan atas dasar tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

b. Basis of Preparation

The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments that are measured at revalued amounts or fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Group takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair value for measurement and/or disclosure purposes in these consolidated financial statements is determined on such a basis.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Direksi memiliki, pada saat persetujuan laporan keuangan konsolidasian, suatu ekspektasi yang memadai bahwa Grup memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan keberadaan operasinya untuk di masa yang akan datang. Sehingga, mereka melanjutkan penerapan dasar akuntansi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur).

Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah Perusahaan mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di-*investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola pemilikan suara dalam RUPS sebelumnya.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The directors have, at the time of approving the consolidated financial statements, a reasonable expectation that the Group has adequate resources to continue in operational existence for the foreseeable future. Thus, they continue to adopt the going concern basis of accounting in preparing the consolidated financial statements.

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries.

Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous stockholders' meetings.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra Grup usaha, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.

Kepentingan nonpengendali di entitas anak diidentifikasi secara terpisah dari ekuitas Grup yang ada. Kepentingan pemegang saham nonpengendali yang merupakan kepentingan kepemilikan yang memberikan pemiliknya hak terhadap bagian proporsional aset bersih pada saat likuidasi pada awalnya dapat diukur sebesar nilai wajar atau bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat untuk masing-masing akuisisi. Kepentingan nonpengendali lain awalnya diukur sebesar nilai wajar. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan nonpengendali adalah jumlah kepentingan tersebut pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan nonpengendali dari perubahan selanjutnya di ekuitas.

Laba atau rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali. Jumlah penghasilan komprehensif entitas anak diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately from the Group's equity therein. Those interests of non-controlling stockholders that are present ownership interests entitling their holders to a proportionate share of net assets upon liquidation may initially be measured at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement is made on an acquisition-by-acquisition basis. Other non-controlling interests are initially measured at fair value. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus the non-controlling interests' share of subsequent changes in equity.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interests. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

Changes in the Group's ownership interest in subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laba rugi dihitung sebagai /perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (*retained interest*) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill), dikurangi liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan / diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk perlakuan akuntansi berikutnya dalam PSAK 71, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi.

d. Transaksi dan Saldo Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan individu masing-masing entitas Grup diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari Perusahaan disajikan dalam mata uang Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penyusunan laporan keuangan entitas Grup, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

When the Group loses control of a subsidiary, the gain or loss recognized in profit or loss is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), less liabilities of the subsidiary and any non-controlling interests. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/ permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 71, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate.

d. Foreign Currency Transactions and Translation

The individual financial statements of each entity are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements of the Company are presented in Rupiah (Rp), which is the functional currency of the Company and the presentation currency for the consolidated financial statements.

In preparing the financial statements of Group entity, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Exchange differences on monetary items are recognized in profit or loss in the period in which they arise.

e. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

e. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 1. has control or joint control over the reporting entity;
 2. has significant influence over the reporting entity; or
 3. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).
 - viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

f. Perjanjian Jasa Konsesi

ISAK 16, *Perjanjian Konsesi Jasa*, memberikan panduan atas perjanjian konsesi jasa publik ke swasta jika: (a) pemberi konsesi mengendalikan atau meregulasi jasa apa yang harus diberikan oleh operator dengan infrastruktur, kepada siapa jasa harus diberikan, dan berapa harganya dan (b) pemberi konsesi mengendalikan melalui kepemilikan, hak manfaat, atau bentuk lain atas setiap kepentingan residu signifikan dalam infrastruktur pada akhir masa perjanjian.

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa yang memenuhi kriteria ISAK 16 sebagai model aset keuangan dan aset takberwujud.

Grup mengakui aset keuangan yang timbul dari perjanjian konsesi jasa ketika Grup memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas dari atau atas diskresi pemberi konsesi dan hak untuk menerima kas. Aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajar pada saat pengakuan awal dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Grup mengakui ECL sepanjang umur ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Jika, sebaliknya, risiko kredit pada aset keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan pada bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

f. Service Concession Arrangements

ISAK 16, *Service Concession Arrangement*, applies to public-to-private service concession arrangements if: (a) the grantor controls or regulates what services the operator must provide with the infrastructure, to whom it must provide them, and at what price and (b) the grantor controls through ownership, beneficial entitlement or otherwise any significant residual interest in the infrastructure at the end of the term of the arrangement.

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The Group accounts for its service concession arrangement under the financial asset and intangible asset model.

The Group recognized a financial asset arising from a service concession arrangement when it has unconditional contractual right to receive cash from or at the direction of the grantor for the construction and the right to receive cash. Such financial assets are measured at fair value on initial recognition and classified as financial assets measured at amortized cost.

The Group recognizes lifetime ECL when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If, on the other hand, the credit risk on the financial asset has not increased significantly since initial recognition, the Group measures the loss allowance for that financial asset at an amount equal to 12-month ECL. The assessment of whether lifetime ECL should be recognized is based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition instead of on evidence of a financial asset being credit impaired at the reporting date or an actual default occurring.

Grup mengakui aset takberwujud yang timbul dari perjanjian konsesi jasa ketika Grup memiliki hak untuk membebaskan pengguna jasa atas penggunaan infrastruktur. Aset takberwujud yang diterima sebagai imbalan untuk menyediakan jasa konstruksi dalam perjanjian konsesi jasa diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima pada saat pengakuan awal. Selanjutnya setelah pengakuan awal, aset takberwujud diukur sebesar biaya perolehan, yang meliputi biaya pinjaman modal dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Estimasi masa manfaat aset takberwujud adalah periode sejak Grup dapat menagih pengguna atas penggunaan infrastruktur hingga akhir periode konsesi.

Jika Grup dibayar untuk jasa konstruksi sebagian dengan aset keuangan dan sebagian dengan aset takberwujud, maka setiap komponen imbalan dicatat secara terpisah dan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima.

g. Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika diperlukan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi diakui langsung pada laba rugi.

Aset keuangan

Klasifikasi aset keuangan

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

The Group recognized an intangible asset arising from a service concession arrangement when it has right to charge for the use of the infrastructure. An intangible asset received as consideration for providing construction services in a service concession arrangement is measured at fair value of the benefit received or to be received on initial recognition. Subsequent to initial recognition, the intangible assets is measured at cost, which includes capital borrowing cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. The estimated useful life of the intangible assets is the period from when the Group is able to charge the user for the use of the infrastructure to the end of the concession period.

If the Group is paid for the construction services partly by a financial asset and partly by an intangible asset, then each component of the consideration is accounted for separately and is initially recognized at the fair value of the consideration received or to be received.

g. Financial Instrument

Financial assets and financial liabilities are recognized on the consolidated statement of financial position when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial assets and financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Financial assets

Classification of financial assets

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at amortized cost:

- the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif adalah tingkat suku bunga yang secara tepat mendiskontokan penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) tidak termasuk kerugian kredit ekspektasian, melalui umur ekspektasian dari instrumen utang, atau, jika tepat, periode yang lebih pendek, ke jumlah tercatat bruto instrumen utang pada saat pengakuan awal. Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan, termasuk estimasi kerugian kredit, ke biaya perolehan diamortisasi instrumen utang pada pengakuan awal.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah nilai aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk instrumen utang yang diukur selanjutnya pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk saldo lancar ketika dampak diskonto tidak material.

Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi dan dimasukkan dalam pos "Penghasilan keuangan".

Penurunan nilai aset keuangan

Grup mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas piutang usaha dan piutang lain-lain dan aset kontrak. Nilai kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal masing-masing instrumen keuangan.

Amortized cost and effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period.

For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, the effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) excluding expected credit losses, through the expected life of the debt instrument, or, where appropriate, a shorter period, to the gross carrying amount of the debt instrument on initial recognition. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit adjusted effective interest rate is calculated by discounting the estimated future cash flows, including expected credit losses, to the amortized cost of the debt instrument on initial recognition.

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for any loss allowance. On the other hand, the gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any loss allowance.

Interest is recognized using the effective interest method for debt instruments measured subsequently at amortized cost, except for short-term balances when the effect of discounting is immaterial.

Interest income is recognized in profit or loss and is included in the "Interest income" line item.

Impairment of financial assets

The Group recognizes a loss allowance for expected credit losses ("ECL") on trade and other accounts receivable and contract assets. The amount of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the respective financial instrument.

Grup selalu mengakui ECL sepanjang umurnya untuk piutang usaha. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan diestimasi menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Grup, disesuaikan untuk faktor spesifik debitur, kondisi ekonomi umum serta penilaian atas arah kondisi kini dan perkiraan masa depan pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu atas uang jika tepat.

Untuk semua instrumen keuangan lainnya, Grup mengakui ECL sepanjang umur ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Jika, sebaliknya, risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan pada bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrumen keuangan. Sebaliknya, ECL 12 bulan mewakili porsi ECL sepanjang umur yang timbul dari peristiwa gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan baik informasi kuantitatif maupun kualitatif yang wajar dan mendukung, termasuk pengalaman historis dan informasi bersifat perkiraan masa depan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Informasi masa depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri di mana debitur Grup beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analisis keuangan, badan pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal aktual dan prakiraan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Grup.

The Group always recognizes lifetime ECL for trade accounts receivable. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Group's historical credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of money where appropriate.

For all other financial instruments, the Group recognizes lifetime ECL when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If, on the other hand, the credit risk on the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the Group measures the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month ECL. The assessment of whether lifetime ECL should be recognized is based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition instead of on evidence of a financial asset being credit impaired at the reporting date or an actual default occurring.

Lifetime ECL represents the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial instrument. In contrast, 12-month ECL represents the portion of lifetime ECL that is expected to result from default events on a financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date.

Significant increase in credit risk

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Group considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered includes the future prospects of the industries in which the Group's debtors operate, obtained from economic expert reports, financial analysts, governmental bodies, relevant think-tanks and other similar organizations, as well as consideration of various external sources of actual and forecast economic information that relate to the Group's core operations.

Secara khusus, informasi berikut diperhitungkan ketika menilai apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal:

- penurunan yang signifikan pada peringkat kredit eksternal instrumen keuangan (jika ada) atau peringkat kredit internal, baik secara aktual maupun yang diperkirakan;
- memburuknya kondisi usaha, keuangan atau ekonomi yang terjadi saat ini atau prakiraan yang akan menyebabkan penurunan signifikan atas kemampuan peminjam untuk menyelesaikan kewajiban utangnya;
- terdapat penurunan yang signifikan terhadap hasil operasi peminjam, baik secara aktual atau yang diperkirakan akan terjadi;
- peningkatan risiko kredit secara signifikan pada instrumen keuangan lainnya dari peminjam yang sama;
- perubahan signifikan yang tidak menguntungkan baik secara aktual atau yang diperkirakan dalam lingkungan peraturan, ekonomik, atau lingkungan teknologi peminjam yang mengakibatkan perubahan signifikan atas kemampuan peminjam dalam memenuhi kewajiban utangnya.

Terlepas dari hasil penilaian di atas, Grup membuat praduga risiko kredit aset keuangan telah meningkat signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 60 hari, kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan terdukung yang menunjukkan hal sebaliknya.

Grup mengasumsikan bahwa risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika instrumen keuangan tersebut ditetapkan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Instrumen keuangan memiliki risiko kredit yang rendah jika i) instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah, ii) debitur memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam waktu dekat dan iii) memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka panjang dapat, tetapi tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

Grup menganggap aset keuangan memiliki risiko kredit rendah ketika aset memiliki peringkat kredit eksternal '*investment grade*' sesuai dengan definisi yang dipahami secara global atau jika peringkat eksternal tidak tersedia, aset tersebut memiliki peringkat internal '*performing*'. *Performing* berarti bahwa rekanan memiliki posisi keuangan yang kuat dan tidak ada jumlah yang tertunggak.

In particular, the following information is taken into account when assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition:

- significant deterioration in the financial instrument's external (if available) or internal credit rating;
- existing or forecast adverse changes in business, financial or economic conditions that are expected to cause a significant decrease in the debtor's ability to meet its debt obligations;
- an actual or expected significant deterioration in the operating results of the debtor;
- significant increases in credit risk on other financial instruments of the same debtor;
- an actual or expected significant adverse change in the regulatory, economic, or technological environment of the debtor that results in a significant decrease in the debtor's ability to meet its debt obligations.

Irrespective of the outcome of the above assessment, the Group presumes that the credit risk on a financial asset has increased significantly since initial recognition when contractual payments are more than 60 days past due, unless the Group has reasonable and supportable information that demonstrates otherwise.

The Group assumes that the credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition if the financial instrument is determined to have low credit risk at the reporting date. A financial instrument is determined to have low credit risk if i) the financial instrument has a low risk of default, ii) the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and iii) adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations.

The Group considers a financial asset to have low credit risk when the asset has external credit rating of '*investment grade*' in accordance with the globally understood definition or if an external rating is not available, the asset has an internal rating of '*performing*'. *Performing* means that the counterparty has a strong financial position and there is no past due amounts.

Grup secara teratur memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya jika perlu untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlahnya jatuh tempo.

Definisi gagal bayar

Grup menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 90 hari kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan didukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai termasuk data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- kesulitan keuangan yang signifikan dari penerbit atau peminjam
- pelanggaran kontrak, seperti kejadian gagal bayar atau tunggakan
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- telah memberikan kepada peminjam suatu konsesi yang tidak akan dipertimbangkan oleh pemberi pinjaman
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif untuk aset keuangan itu karena kesulitan keuangan atau
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

The Group regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past due.

Definition of default

The Group considers that default has occurred when a financial asset is more than 90 days past due unless the Group has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

Credit-impaired financial assets

A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of that financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- significant financial difficulty of the issuer or the borrower
- a breach of contract, such as a default or past due event
- the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider;
- having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider
- it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganisation
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties ;or
- the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.

Kebijakan penghapusan

Grup menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihanyang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas paksaan dalam prosedur pemulihan Grup, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Pengukuran dan pengakuan atas kerugian kredit ekspektasian

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian merupakan fungsi dari *probability of default*, *loss given default* (yaitu besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar) dan eksposur pada gagal bayar. Penilaian *probability of default* dan *loss given default* berdasarkan data historis yang disesuaikan dengan informasi masa depan seperti dijelaskan di atas. Adapun eksposur atas gagal bayar, untuk aset keuangan, diwakili oleh nilai tercatat bruto aset pada tanggal pelaporan; untuk kontrak jaminan keuangan, eksposur mencakup jumlah yang ditarik pada tanggal pelaporan, ditambah dengan jumlah yang diperkirakan akan ditarik di masa depan sebelum tanggal gagal bayar yang ditentukan berdasarkan tren historis, pemahaman Grup mengenai kebutuhan pembiayaan masa depan yang spesifik dari debiturnya, dan informasi perkiraan masa depan lainnya yang relevan.

Untuk aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian diestimasi sebagai selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada Grup sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diekspektasi akan diterima oleh Grup, didiskontokan pada suku bunga efektif awal.

Apabila kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur diukur secara kolektif untuk kasus dimana bukti kenaikan signifikan risiko kredit pada level instrumen individual tidak tersedia, instrumen keuangan dikelompokkan dengan dasar sebagai berikut:

- Sifat instrumen keuangan (yaitu piutang usaha, piutang lain-lain, piutang sewa pembiayaan dan jumlah tagihan kepada pelanggan masing-masing dinilai sebagai grup terpisah. Piutang pihak berelasi yang dinilai untuk kerugian kredit ekspektasian atas dasar individual);
- Status jatuh tempo;
- Sifat, besaran dan jenis industri debitur;
- Sifat jaminan untuk piutang sewa pembiayaan; dan
- Peringkat risiko kredit jika tersedia.

Write-off policy

The Group writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Company's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

Measurement and recognition of expected credit losses

The measurement of expected credit losses is a function of the probability of default, loss given default (i.e. the magnitude of the loss if there is a default) and the exposure at default. The assessment of the probability of default and loss given default is based on historical data adjusted by forward-looking information as described above. As for the exposure at default, for financial assets, this is represented by the assets' gross carrying amount at the reporting date; for financial guarantee contracts, the exposure includes the amount drawn down as at the reporting date, together with any additional amounts expected to be drawn down in the future by default date determined based on historical trend, the Group's understanding of the specific future financing needs of the debtors, and other relevant forward-looking information.

For financial assets, the expected credit loss is estimated as the difference between all contractual cash flows that are due to the Group in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at the original effective interest rate.

Where lifetime ECL is measured on a collective basis to cater for cases where evidence of significant increases in credit risk at the individual instrument level may not yet be available, the financial instruments are grouped on the following basis:

- Nature of financial instruments (i.e. The Group's trade and other receivables, finance lease receivables and amounts due from customers are each assessed as a separate group. Loans to related parties are assessed for expected credit losses on an individual basis);
- Past-due status;
- Nature, size and industry of debtors;
- Nature of collaterals for finance lease receivables; and
- External credit ratings where available.

Pengelompokan ditelaah secara teratur oleh manajemen untuk memastikan setiap kelompok mempunyai karakteristik risiko yang sama.

Jika Grup telah mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan pada jumlah yang sama dengan ECL sepanjang umur pada periode pelaporan sebelumnya, tetapi menentukan pada tanggal pelaporan kini bahwa kondisi untuk ECL sepanjang umur tidak lagi terpenuhi, Grup mengukur cadangan kerugian sejumlah ECL 12 bulan pada tanggal pelaporan kini.

Grup mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan menyesuaikan jumlah tercatat melalui akun penyisihan kerugian.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

The grouping is regularly reviewed by management to ensure the constituents of each group continue to share similar credit risk characteristics.

If the Group has measured the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to lifetime ECL in the previous reporting period, but determines at the current reporting date that the conditions for lifetime ECL are no longer met, the Group measures the loss allowance at an amount equal to 12-month ECL at the current reporting date.

The Group recognise an impairment gain or loss in profit or loss for all financial instruments with a corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance.

Derecognition of financial assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Group are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Group after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan 1) imbalan kontinjen dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

h. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Grup tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini dan tidak bersifat kontinjen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dapat dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

i. Kas dan Setara Kas

Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminakan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities that are not 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination, 2) held-for-trading, or 3) designated as at FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

h. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when the Group has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realise the assets and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

i. Cash and cash equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

j. Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/ <i>Years</i>	
Kendaraan	4	Vehicles
Peralatan	4	Equipment
Renovasi bangunan	3	Building improvement
Jaringan tegangan menengah	15	Medium voltage transmission
Bangunan proyek	30	Project building
Turbin	15	Turbine

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

Aset yang telah disusutkan sepenuhnya yang masih digunakan tetap termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian .

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

j. Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are stated at costs, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/ <i>Years</i>	
Kendaraan	4	Vehicles
Peralatan	4	Equipment
Renovasi bangunan	3	Building improvement
Jaringan tegangan menengah	15	Medium voltage transmission
Bangunan proyek	30	Project building
Turbin	15	Turbine

The estimated useful lives, residual value and depreciation method are reviewed at each year-end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Land is stated at cost and is not depreciated.

The cost of maintenance and repairs is charged to operations as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably. When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in profit or loss.

Fully depreciated assets still in use are retained in the consolidated financial statements.

Construction in-progress is stated at cost and transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

**k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan –
kecuali Goodwill**

Pada akhir setiap periode pelaporan konsolidasian, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset dengan estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dibalik, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

l. Goodwill

Goodwill timbul atas akuisisi dari suatu bisnis dicatat pada biaya perolehan yang ditetapkan pada tanggal akuisisi bisnis tersebut dikurangi akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis, dialokasikan sejak tanggal akuisisi ke masing-masing unit penghasil kas milik Grup yang diharapkan dapat memperoleh manfaat dari sinergi kombinasi bisnis, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan ke unit-unit tersebut.

**k. Impairment of Non-Financial Asset –
except for Goodwill**

At the end of each consolidated reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

The recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

l. Goodwill

Goodwill arising on an acquisition of a business is carried at cost as established at the date of acquisition of the business less accumulated impairment losses, if any.

For the purpose of impairment testing, goodwill from business combination, is allocated to each of the Group's cash-generating unit expected to benefit from the synergies of the combination, excluded if the other assets or liabilities from acquiree placed in those units.

Unit penghasil kas yang goodwill-nya telah dialokasikan diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan bila ada indikasi bahwa unit penghasil kas mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ditentukan untuk goodwill dengan menilai jumlah yang dapat dipulihkan dari masing-masing unit penghasil kas dimana goodwill dilekatkan. Apabila jumlah yang dapat dipulihkan dari unit penghasil kas kurang dari nilai tercatat, kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi. Kerugian penurunan nilai yang diakui untuk goodwill tidak dibalik pada periode berikutnya.

Apabila *goodwill* merupakan bagian dari unit penghasil kas dan bagian dari operasi di dalam unit penghasil kas tersebut dihentikan, *goodwill* dengan operasi yang dihentikan dimasukkan dalam jumlah tercatat operasi saat menentukan keuntungan atau kerugian dari penghentian operasi. *Goodwill* yang dihentikan dalam keadaan ini diukur berdasarkan nilai wajar relatif dari operasi yang dihentikan dan porsi unit penghasil kas yang dipertahankan.

m. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Ketika pinjaman dengan suku bunga variabel digunakan untuk membiayai aset kualifikasian dan dilindungi nilai dengan lindung nilai arus kas yang efektif dari risiko suku bunga, bagian efektif dari derivatif tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi ke laba rugi ketika aset kualifikasian berdampak pada laba rugi. Ketika suku bunga pinjaman tetap digunakan untuk membiayai aset kualifikasian dan nilai wajarnya dilindungi nilai secara efektif dari risiko suku bunga, biaya pinjaman yang dikapitalisasi mencerminkan tingkat bunga yang dilindungi nilai.

Biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

A cash generating unit to which goodwill has been allocated is tested for impairment annually and if there is an indication that the unit may be impaired. Impairment determined for goodwill by assess recoverable amounts from each of cash generating unit where the goodwill is pledged. If the recoverable amount of the cash-generating unit is less than its carrying amount, the impairment loss is recognized in profit and loss. An impairment loss recognized for goodwill is not reversed in subsequent periods.

If the goodwill is part of cash generating unit and part of discontinued operation inside those cash generating unit, the goodwill with discontinued operation recorded under operation book value when determine gain or loss from discontinued operation. Disposal goodwill in this situation measured at fair value from discontinued operation and operating cash generating unit portion.

m. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

To the extent that variable rate borrowings are used to finance a qualifying asset and are hedged in an effective cash flow hedge of interest rate risk, the effective portion of the derivative is recognized in other comprehensive income and reclassified to profit or loss when the qualifying asset impacts profit or loss. To the extent that fixed-rate borrowings are used to finance a qualifying asset and are hedged in an effective fair value hedge of interest rate risk, the capitalized borrowing costs reflect the hedged interest rate

Borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

n. Sewa

Grup sebagai penyewa

Grup menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Grup merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

n. Leases

The Group as lessee

The Group assesses whether a contract is, or contains a lease, at the inception of the contract. The Group recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Group recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Group uses its incremental borrowing rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives;
- variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;
- the amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;
- the exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; and
- payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.

The lease liability is presented as a separate line in the statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

Grup mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan).
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Grup tidak melakukan penyesuaian tersebut selama periode yang disajikan.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Grup dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan.

The Group remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- the lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.
- the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used).
- a lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.

The Group did not make any such adjustments during the periods presented.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Group incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 57. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Group expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the statement of financial position.

Grup menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Sebagai cara praktis, PSAK 73 mengizinkan penyewa untuk tidak memisahkan komponen nonsewa, dan mencatat masing-masing komponen sewa dan komponen nonsewa sebagai kesepakatan sewa tunggal. Grup tidak menggunakan cara praktis ini.

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan untuk penjualan listrik diakui pada saat pengendalian barang dialihkan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan akan menjadi hak Grup dalam pertukaran barang tersebut. Grup secara umum menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah yang utama dalam pengaturan pendapatannya. Pemenuhan kewajiban pelaksanaan diukur dengan menggunakan metode *output* berdasarkan unit yang diproduksi dan dikirim dalam bulan produksi. Kuantitas yang dikirim ditentukan melalui meteran pengukuran listrik di titik pengiriman.

Pendapatan yang berkaitan dengan jasa konstruksi berdasarkan perjanjian konsesi jasa diakui sepanjang waktu ketika kewajiban pelaksanaan terpenuhi. Grup mencatat pendapatan tersebut dengan mengukur progres penyelesaian kewajiban pelaksanaan berdasarkan proporsi biaya kontrak yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang dilakukan hingga saat ini secara relatif terhadap perkiraan jumlah biaya kontrak. Metode pengukuran penyelesaian melibatkan penggunaan pertimbangan dan estimasi yang signifikan, termasuk estimasi jumlah biaya kontrak.

Karena Grup menyediakan lebih dari satu jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa, imbalan yang diterima dialokasikan dengan mengacu pada harga jual berdiri sendiri dari jasa yang diserahkan.

Terkait pendapatan dari perjanjian jasa konsesi, Grup mengalokasikan pembayaran yang diterima untuk setiap kWh listrik yang ditransfer ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") menjadi pelunasan pokok dan bunga aset keuangan dari proyek konsesi dan operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik yang disajikan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Grup menggunakan metode nilai sisa untuk mengalokasikan jumlah pembayaran yang diterima dari PLN antara pendapatan untuk aktivitas pembiayaan dan operasi dan pemeliharaan. Penghasilan pembiayaan diakui berdasarkan pola yang mencerminkan tingkat pengembalian periodik yang konstan atas saldo aset keuangan dari proyek konsesi.

The Group applies PSAK 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

As a practical expedient, PSAK 73 permits a lessee not to separate non-lease components, and instead account for any lease and associated non-lease components as a single arrangement. The Group has not used this practical expedient.

o. Revenue and Expense Recognition

Revenue from contracts with the customers for sale of electricity is recognized when electricity is delivered to the customer at an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those electricity. The Group has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements. Progress towards satisfaction of the performance obligation is measured using an output method based on units produced and delivered within the production month. Quantities delivered are determined through electrical measurement meters at the delivery point.

Revenue relating to construction services under a service concession arrangement is recognised over time when the performance obligations are satisfied. The Group accounted for such revenue by measuring progress towards completion of the performance obligations based on the proportion of contract costs incurred for work performed to date relative to the estimated total contract costs. The measuring progress method involves the use of significant judgements and estimates of total contract costs.

Since the Group provides more than one service in a service concession arrangement, the consideration received is allocated with reference to the relative stand-alone selling prices of the services delivered.

For revenue from service concession arrangement, the Group allocates the consideration that it receives for each kWh of electricity delivered to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") into: repayment of principal and interest of financial assets from concession project and operation and maintenance of the power plant. The Group uses the residual value method to allocate the total consideration received from PLN between revenue for the construction service and operation and maintenance activities. Finance income is recognized based on a pattern reflecting constant period rate of return on the Group's outstanding financial assets from concession project.

Pendapatan yang berkaitan dengan jasa operasi dan pemeliharaan diakui sepanjang waktu sesuai dengan penyerahan jasa operasi dan pemeliharaan.

Beban

Beban diakui berdasarkan saat terjadi. Beban yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak meliputi beban langsung dan tidak langsung yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak. Beban diakui pada tahun yang bersangkutan (*accrual basis*).

p. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Liabilitas Grup untuk pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terhutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan professional pajak dalam Grup yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

Revenue relating to the operation and maintenance services is recognized over time based on the delivery of the operation and maintenance services.

Expenses

Expense are recognized when incurred. Expenses incurred in the execution of the contract include direct and indirect expenses associated with contract performance. Expenses are recognised in the relevant year (*accrual basis*).

p. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

Current tax

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Group's liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

A provision is recognized for those matters for which the tax determination is uncertain but it is considered probable that there will be a future outflow of funds to a tax authority. The provisions are measured at the best estimate of the amount expected to become payable. The assessment is based on the judgement of tax professionals within the Group supported by previous experience in respect of such activities.

Deferred tax

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arise from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi, atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

q. Liabilitas Imbalan Kerja

Grup memberikan imbalan kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja). Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Grup sehubungan dengan imbalan paska kerja ini.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

q. Employee Benefits Obligation

The Group provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 11 of year 2021 on Job Creation (Job Creation Law). No funding has been made by the Group to the defined benefit plans.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya.

Pengukuran kembali diakui dalam sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas tidak direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup.

Imbalan kerja jangka panjang lain

Liabilitas yang diakui sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang lain diukur pada nilai kini estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan akan dilakukan oleh Grup sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh karyawan hingga tanggal pelaporan.

r. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognised in other comprehensive income in the period in which they occur.

Remeasurement recognised in other comprehensive income as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognised in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorised as follows:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements)
- Net interest expense or income
- Remeasurement

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognised in the consolidated statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group's defined benefit plans.

Other long-term employee benefits

Liabilities recognized in respect of other long-term employee benefits are measured at the present value of the estimated future cash outflows expected to be made by the Group in respect of services provided by employees up to the reporting date.

r. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by "the chief operating decision maker" in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- a) that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);

- b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap proyek.

s. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3 manajemen Grup diwajibkan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang perkiraan tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari yang melibatkan estimasi yang telah dibuat direksi dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Penentuan perjanjian kontraktual terhadap ruang lingkup ISAK 16, Perjanjian Konsesi Jasa

Perusahaan dan entitas anak, PT Arkora Sulawesi Selatan (ASS) dan PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS), telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dimana Perusahaan, ASS dan AHS akan membangun pembangkit listrik tenaga mini hydro, seperti yang ditentukan dalam kontrak. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun dari *Commercial Operating Date* (COD) untuk Perusahaan dan ASS dan 25 tahun dari COD untuk AHS.

- b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- c) for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each project.

s. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 3, the Group's management are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations that the directors have made in the process of applying the Group's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Determining whether the contractual arrangements is within the scope of ISAK 16, Service Concession Arrangement

The Company and its subsidiaries, PT Arkora Sulawesi Selatan (ASS) and PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS), have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), whereby the Company, ASS and AHS shall construct a mini hydro power plant as specified in the contract. The agreement is valid for 15 years from Commercial Operating Date (COD) for the Company and ASS and 25 years from COD for AHS.

Dalam melakukan evaluasi apakah PPA dengan PLN termasuk dalam ruang lingkup ISAK 16, Perjanjian Konsesi jasa, manajemen mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepemilikan atas infrastruktur pada saat akhir masa PPA;
2. Masa berlakunya PPA dibandingkan dengan umur ekonomis infrastruktur;
3. Pengendalian atas kepentingan residu atas infrastruktur setelah masa PPA berakhir.

Manajemen telah mengevaluasi bahwa PPA antara Perusahaan dan PLN tidak termasuk dalam ruang lingkup ISAK 16 "Perjanjian Konsesi Jasa" dan PPA antara ASS dan AHS dengan PLN termasuk dalam ruang lingkup ISAK 16 "Perjanjian Konsesi Jasa".

Penilaian manajemen berdasarkan fakta dan kondisi sesuai tanggal perjanjian dan pelaporan; penilaian kembali dapat dilakukan jika ada informasi baru yang tersedia.

Sumber utama ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam keuangan tahun depan dijelaskan dibawah ini:

Pengakuan pendapatan terkait dengan jasa konstruksi berdasarkan perjanjian konsesi jasa

Grup mengakui pendapatan dari jasa konstruksi dari waktu ke waktu sesuai dengan PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dengan mengacu pada persentase kemajuan konstruksi Grup. Persentase kemajuan konstruksi diukur dengan mengacu pada proporsi biaya kontrak yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang dilakukan sampai saat ini secara relatif terhadap perkiraan jumlah biaya kontrak. Estimasi pendapatan jasa konstruksi ditentukan dengan mengacu pada jumlah biaya kontrak pada saat penyelesaian yang membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Biaya kontrak, yang terutama terdiri dari biaya subkontrak dan biaya material, diestimasi oleh manajemen berdasarkan penawaran dari waktu ke waktu yang diberikan oleh subkontraktor atau pemasok utama yang terlibat dan berdasarkan pengalaman manajemen. Sekalipun manajemen mereview dan merevisi estimasi biaya kontrak untuk kontrak konstruksi selama kontrak berlangsung, hasil aktual dari kontrak dalam hal jumlah biaya mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dari estimasi dan hal ini akan mempengaruhi pendapatan dan laba yang diakui selama periode konstruksi. Manajemen yakin bahwa estimasi tersebut adalah wajar pada akhir periode pelaporan.

In their assessment to determine whether the PPA with PLN is within the scope of ISAK 16, Service Concession Arrangement, management considered the following:

1. The ownership of the infrastructure at the end of PPA;
2. PPA period compared to the infrastructure's useful life;
3. Control over the residual interest of the infrastructure after the PPA.

Management has assessed that the PPA between the Company and PLN did not qualify within the scope of ISAK 16 "Service Concession Arrangements" while the PPA between ASS and AHS with PLN qualified within the scope of ISAK 16 "Service Concession Arrangements".

Management's assessments are based on facts and conditions available to management as of the date of agreement and at reporting date; reassessment may be made in the future when additional information is available.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are discussed below:

Revenue recognition related to construction services under a service concession arrangement

The Group recognises revenue from construction service over time in accordance with PSAK 72 Revenue from Contracts with Customers by reference to the Group's percentage of construction progress. The percentage of construction progress is measured by reference to the proportion of contract costs incurred for the work performed to date relative to the estimated total contract costs. Estimated construction service revenue is determined with reference to the estimate total contract costs on completion which requires significant judgement. Contract costs, which mainly comprise subcontracting charges and costs of materials, are estimated by the management on the basis of quotations from time to time provided by the major subcontractors or suppliers involved and the experience of the management. Notwithstanding that management reviews and revises the estimates of contract costs for the construction contract as the contract progresses, the actual outcome of the contract in terms of its total costs may be higher or lower than the estimates and this will affect the revenue and profit recognised during the course of construction. Management is satisfied that the estimates are reasonable as at the end of the reporting period.

Pada tanggal 31 Desember 2022, nilai tercatat aset kontrak dan pendapatan jasa konstruksi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa diungkapkan masing-masing pada Catatan 10 dan 18 pada laporan keuangan konsolidasian.

Manfaat karyawan

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan kerja Grup.

5. PERJANJIAN KONSESI JASA

ASS dan AHS, entitas anak telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan, ASS dan AHS akan membangun pembangkit listrik tenaga minihidro, seperti yang ditentukan dalam kontrak.

Pekerjaan konstruksi ASS dimulai pada tahun 2017 dan pada tanggal 10 Maret 2020 ASS mendapatkan *Commercial Operation Date* (COD) dari PLN dan memulai kegiatan komersialnya sejak saat itu. Berdasarkan PPA, periode konsesi yang berlaku adalah 15 tahun sejak COD.

Pekerjaan konstruksi AHS dimulai pada bulan Februari 2021 dan tanggal operasi komersial (COD) direncanakan akan tercapai pada Juli 2023. Berdasarkan PPA, periode konsesi yang berlaku adalah 25 tahun sejak COD.

Terkait dengan perjanjian jasa konsesi, Grup mencatat pendapatan jasa konstruksi (Catatan 18) dan beban konstruksi (Catatan 19).

As at 31 December 2022, the carrying amounts of contract assets and construction service revenue arising from service concession arrangement are disclosed in Note 10 and 18 to the consolidated financial statements respectively.

Employee Benefits

The determination of provision for employment benefits is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions recognized as other comprehensive income and affect the recognized expense and recorded provision. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's provision for employment benefit.

5. SERVICE CONCESSION ARRANGEMENTS

ASS and AHS, subsidiary, have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), whereby the Company and ASS shall construct a mini hydro power plant as specified in the contract.

Construction works of ASS were started in 2017 and on March 10, 2020, ASS obtained Commercial Operation Date (COD) from PLN and started its commercial operation since then. Under the PPA, the valid concession period is 15 years from COD.

Construction works of AHS were started in February 2021 and the commercial operation date (COD) is planned to be achieved in July 2023. Under the PPA, the valid concession period is 25 years from COD.

Related to service concession arrangement, the Group recorded construction service revenue (Note 18) and construction cost (Note 19).

6. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember/ December 31, 2022 Rp
Kas - Rupiah	438.625.445
Bank - Pihak Ketiga Rupiah	
PT Bank Central Asia Tbk	46.642.897.238
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.129.081.009
PT Bank Permata Tbk	1.144.032.347
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	61.507.035
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	52.029.867
PT Bank Bukopin Tbk	49.312.712
PT Bank Mega Tbk	39.487.365
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	18.364.344
PT Bank OCBC NISP Tbk	14.264.900
PT Bank BTPN Tbk	12.098.453
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-
Dolar Amerika Serikat	
PT Bank Central Asia Tbk	1.889.471.596
PT Bank OCBC NISP Tbk	725.385.040
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	61.323
Euro	
PT Bank OCBC NISP Tbk	97.936
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-
Deposito berjangka - Pihak Ketiga Rupiah dengan tingkat bunga rata- rata per tahun 3,75% - 5,25%	
PT Bank Mega Tbk	20.000.000.000
PT Bank Bukopin Tbk	12.000.000.000
PT Bank Permata Tbk	7.500.000.000
Jumlah	<u>92.716.716.610</u>

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, tidak terdapat saldo kas dan setara yang tidak dapat digunakan oleh Grup dan kas dan setara kas yang dijamin.

7. PIUTANG USAHA

Piutang usaha merupakan piutang usaha dalam mata uang Rupiah dari PLN. Tidak ada bunga yang dibebankan pada piutang usaha.

Cadangan kerugian kredit untuk piutang usaha telah diukur sejumlah ECL sepanjang umur. ECL pada piutang usaha diestimasi dengan mengacu pada pengalaman gagal bayar debitur masa lalu dan analisis posisi keuangan debitur saat ini, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik dari debitur, kondisi ekonomi umum industri di mana debitur beroperasi. Tidak ada perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan berjalan.

Seluruh nilai piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 belum jatuh tempo dan oleh karena itu, Grup menentukan bahwa piutang usaha memiliki kerugian kredit yang minimal atau tidak material.

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp
Cash on hand - Rupiah	113.728.465
Cash in banks - Third Parties Rupiah	
PT Bank Central Asia Tbk	15.268.145.844
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	388.019.812
PT Bank Permata Tbk	20.497.139
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	37.013.288
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	52.029.867
PT Bank Bukopin Tbk	9.496.000
PT Bank Mega Tbk	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	365.483
PT Bank OCBC NISP Tbk	12.428.662
PT Bank BTPN Tbk	12.389.391
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	79.001.121
U.S. Dollar	
PT Bank Central Asia Tbk	20.723.395
PT Bank OCBC NISP Tbk	11.005.683
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	61.323
Euro	
PT Bank OCBC NISP Tbk	94.776
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	143.494.271
Time Deposit - Third Parties Rupiah, average interest rates per annum at 3.75% - 5.25%	
PT Bank Mega Tbk	-
PT Bank Bukopin Tbk	-
PT Bank Permata Tbk	-
Total	<u>16.168.494.520</u>

As of December 31, 2022 and December 31, 2021, there were no cash and cash equivalent that are not available for use by the Group nor pledged as collateral.

7. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE

Trade accounts receivable represents trade receivable in Rupiah from PLN. No interest is charged on trade receivables.

Allowance for credit losses for trade accounts receivable has been measured at an amount equal to lifetime ECL. The ECL on trade accounts receivable is estimated by reference to past default experience of the debtor and an analysis of the debtor's current financial position, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions of the industry in which the debtors operate. There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting period.

All balance of trade account receivables as of December 31, 2022 and December 31, 2021 are not yet due and thus, the Group determines the trade accounts receivable are subject to minimal or immaterial credit loss.

Piutang usaha dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman berjangka (Catatan 15).

Trade receivables are pledged as collateral for term loan (Note 15).

8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp	Rp	
Asuransi	906.546.429	937.263.850	Insurance
Sewa	96.340.514	287.840.514	Rent
Biaya emisi Penawaran Umum Saham Perdana	-	3.900.000.000	Issuance cost for Initial Public Offering of Shares
Lainnya	118.140.000	-	Others
Jumlah	1.121.026.943	5.125.104.364	Total

8. PREPAID EXPENSES

9. ASET TETAP

	1 Januari/ January 1, 2022	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya perolehan						At cost
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Tanah	5.168.126.760	-	-	-	5.168.126.760	Land
Peralatan	1.509.777.142	155.262.965	-	-	1.665.040.107	Equipment
Renovasi bangunan	473.370.157	-	-	-	473.370.157	Building improvement
Kendaraan	1.172.957.636	733.325.920	-	-	1.906.283.556	Vehicles
Jaringan tegangan menengah	15.632.374.311	-	-	-	15.632.374.311	Medium voltage transmission
Bangunan proyek	112.557.024.003	1.208.900.000	-	-	113.765.924.003	Project building
Turbin	50.439.082.989	-	-	-	50.439.082.989	Turbine
Jumlah	186.952.712.998	2.097.488.885	-	-	189.050.201.883	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Peralatan	1.365.944.323	51.617.924	-	-	1.417.562.247	Equipment
Renovasi bangunan	473.370.157	-	-	-	473.370.157	Building improvement
Kendaraan	1.056.652.448	156.345.563	-	-	1.212.998.011	Vehicles
Jaringan tegangan menengah	3.096.754.761	1.814.512.554	-	-	4.911.267.315	Medium voltage transmission
Bangunan proyek	17.942.214.423	4.162.147.189	-	-	22.104.361.612	Project building
Turbin	15.090.661.785	3.587.495.524	-	-	18.678.157.309	Turbine
Jumlah	39.025.597.897	9.772.118.754	-	-	48.797.716.651	Total
Jumlah Tercatat	147.927.115.100				140.252.485.232	Net Carrying Value

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2021	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya perolehan						At cost
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Tanah	5.168.126.760	-	-	-	5.168.126.760	Land
Peralatan	1.479.670.872	30.106.270	-	-	1.509.777.142	Equipment
Renovasi bangunan	473.370.157	-	-	-	473.370.157	Building improvement
Kendaraan	1.101.507.636	71.450.000	-	-	1.172.957.636	Vehicles
Jaringan tegangan menengah	15.632.374.311	-	-	-	15.632.374.311	Medium voltage transmission
Bangunan proyek	112.557.024.003	-	-	-	112.557.024.003	Project building
Turbin	46.583.825.988	2.903.579.001	-	951.678.000	50.439.082.989	Turbine
Pekerjaan dalam penyelesaian Bangunan	951.678.000	-	-	(951.678.000)	-	Construction in progress Building
Jumlah	183.947.577.727	3.005.135.271	-	-	186.952.712.998	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Peralatan	1.216.645.027	149.299.296	-	-	1.365.944.323	Equipment
Renovasi bangunan	473.370.157	-	-	-	473.370.157	Building improvement
Kendaraan	878.173.475	178.478.973	-	-	1.056.652.448	Vehicles
Jaringan tegangan menengah	2.006.324.333	1.090.430.429	-	-	3.096.754.761	Medium voltage transmission
Bangunan proyek	14.153.375.011	3.788.839.411	-	-	17.942.214.423	Project building
Turbin	11.904.755.531	3.185.906.254	-	-	15.090.661.785	Turbine
Jumlah	30.632.643.534	8.392.954.363	-	-	39.025.597.897	Total
Jumlah Tercatat	153.314.934.193				147.927.115.100	Net Carrying Value

	Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:		Depreciation expense was allocated to the following:
	2022 Rp	2021 Rp	
Beban pokok pendapatan (Catatan 19)	8.161.058.583	8.070.605.841	Cost of revenues (Note 19)
Beban umum dan administrasi (Catatan 20)	1.611.060.171	322.348.522	General and administrative expenses (Note 20)
Jumlah	<u>9.772.118.754</u>	<u>8.392.954.363</u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada PT Asuransi FPG Indonesia dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 389.277.321.664 (31 Desember 2021: Rp 458.516.521.920) terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya.

On December 31, 2022, property, plant and equipment except land are insured with PT Asuransi FPG Indonesia with total sum insure amounting to Rp 389,277,321,664 (December 31, 2021: Rp 458,516,521,920) against fire, theft and other possible risks.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan timbulnya kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverages are adequate to cover possible losses on related assets insured.

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset tetap tertentu dengan nilai buku bersih sebesar Rp 140.051.072.009 (31 Desember 2021: Rp 147.665.334.396) dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman berjangka (Catatan 15).

On December 31, 2022, certain property, plant and equipment with net book value of Rp 140,051,072,009 (December 31, 2021: Rp 147,665,334,396) is pledged as collateral for term loan (Note 15).

Jumlah biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan Grup pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 473.370.157 (31 Desember 2021: Rp 473.370.157).

Total acquisition costs of property, plant and equipment which were fully depreciated and still used by the Group at December 31, 2022 amounted to Rp 473,370,157 (December 31, 2021: Rp 473,370,157).

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

At December 31, 2022 and December 31, 2021, there is no temporary idle property, plant and equipment and retired from active use and not classified as held for sale.

10. ASET KEUANGAN DARI PROYEK KONSESI

10. FINANCIAL ASSETS FROM CONCESSION PROJECT

	31 Desember/ December 31, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	
Penerimaan kapasitas minimum masa depan:			Future minimum capacity receipts:
Kurang dari satu tahun	74.436.063.117	41.958.426.562	Not later than one year
Lebih dari satu tahun tapi kurang dari lima tahun	565.294.755.767	469.438.710.130	Later than one year but not later than five years
Lebih dari lima tahun	900.810.549.952	1.056.280.478.656	Later than five years
Jumlah	1.540.541.368.836	1.567.677.615.348	Total
Dikurangi:			Less:
Pendapatan keuangan yang belum diterima	(774.311.149.512)	(799.457.019.314)	Unearned financial revenue
Jumlah yang belum ditagihkan	(118.945.359.014)	(296.397.098.175)	Amounts not yet due
Nilai kini penerimaan kapasitas masa depan	647.284.860.310	471.823.497.859	Present value of future capacity receipts
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(74.436.063.117)	(15.375.516.256)	Less current maturity
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>572.848.797.193</u>	<u>456.447.981.603</u>	Long-term portion

Perusahaan mencatat aset kontrak sebagai bagian dari aset keuangan dari proyek konsesi untuk setiap pekerjaan konstruksi yang dilakukan. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah aset kontrak yang berkaitan dengan kontrak konstruksi adalah sebesar Rp 326.890.436.668 (31 Desember 2021: Rp 140.592.960.241).

The Company recorded contract asset as part of financial assets from concession project for any work performed. As at December 31, 2022, contract assets balance related to construction contracts amounted to Rp 326,890,436,668 (December 31, 2021: Rp 140,592,960,241).

Manajemen mengharapkan harga transaksi yang dialokasikan untuk kontrak yang belum selesai pada tanggal 31 Desember 2022 akan diakui sebagai pendapatan pada periode pelaporan berikutnya sebesar Rp 118.945.359.014 (31 Desember 2021: Rp 296.397.098.175).

Management expects the transaction price allocated to the unsatisfied contracts as of December 31, 2022 will be recognized as revenue during the next reporting period amounting to Rp 118,945,359,014 (December 31, 2021: Rp 296,397,098,175).

Grup mencatat penghasilan keuangan dari aset keuangan sebagai berikut:

The Group recorded financial income from the financial assets as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	
Penghasilan keuangan	<u>47.651.380.284</u>	<u>33.793.555.410</u>	Finance income

Manajemen mengestimasi cadangan kerugian aset keuangan dari proyek konsesi sejumlah ECL sepanjang umur, dengan mempertimbangkan pengalaman gagal bayar historis dan prospek masa depan industri pelanggan. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat cadangan penurunan nilai untuk aset keuangan dari proyek konsesi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Management estimates the loss allowance on financial assets from concession project at an amount equal to lifetime ECL, taking into account the historical default experience and the future prospects of the customer's industry. Management assessed that there is no ECL allowance should be made for financial assets from concession project as at December 31, 2022 and 2021.

11. ASET TAK BERWUJUD

11. INTANGIBLE ASSET

	31 Desember/ December 31, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	
Biaya perolehan	22.987.990.622	10.155.207.861	Cost
Akumulasi amortisasi	<u>-</u>	<u>-</u>	Accumulated amortization
Bersih	<u>22.987.990.622</u>	<u>10.155.207.861</u>	Net

Aset tak berwujud merupakan hak konsesi yang timbul dari Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara AHS, entitas anak dengan PLN yang memenuhi kriteria dari perjanjian konsesi jasa (Catatan 5).

Intangible asset represents concession right arising from Power Purchase Agreement between AHS, a subsidiary with PLN that meets the criteria of a service concession arrangement (Note 5).

Aset tak berwujud akan diamortisasi pada periode tahap 2 sesuai Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara AHS dengan PLN (Catatan 26) yang dimulai dari tahun ke-21 sejak tanggal operasi komersial sampai dengan akhir periode konsesi.

Intangible asset will be amortized at phase 2 as stated in Power Purchase Agreement between AHS with PLN (Note 26) which is started from year 21st from commercial operation date until the end of the concession period.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tak berwujud pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Management believes that there is no impairment in intangible assets as of December 31, 2022 and December 31, 2021.

12. ASET LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp	Rp	
Beban ditangguhkan	20.310.029.545	16.362.617.062	Deferred charges
Uang jaminan	1.657.345.075	1.657.345.076	Security deposit
Jumlah	<u>21.967.374.620</u>	<u>18.019.962.138</u>	Total

Beban ditangguhkan sebagian besar merupakan beban terkait dengan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTMH).

12. OTHER ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp	
	16.362.617.062	Deferred charges mostly represent costs incurred for the Mini Hydro Power Plant (PLTMH).

13. UTANG USAHA DAN LAINNYA

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp	Rp	
Pihak berelasi (Catatan 24)	86.000.000	24.472.527.414	Related party (Note 24)
Pihak ketiga	3.932.994.770	1.732.804.512	Third parties
Jumlah	<u>4.018.994.770</u>	<u>26.205.331.926</u>	Total

Semua utang usaha dan lainnya dalam mata uang Rupiah.

All trade and other accounts payable in Rupiah.

Periode kredit pembelian adalah 30 hari. Bunga tidak dibebankan atas utang usaha dan lainnya.

The average credit period on purchases is 30 days. No interest charge on the trade and other accounts payable.

14. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp	Rp	
Jasa profesional	1.503.966.711	3.900.000.000	Professional fees
Biaya konstruksi (Catatan 25)	1.243.387.726	-	Construction fees (Note 25)
Bunga pinjaman	438.149.011	149.178.718	Interest from loan
Lain-lain	145.525.314	845.482.449	Others
Jumlah	<u>3.331.028.762</u>	<u>4.894.661.167</u>	Total

14. ACCRUED EXPENSES

15. PINJAMAN BERJANGKA

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp	Rp	
PT Indonesia Infrastructure Finance	327.475.183.872	218.962.171.383	PT Indonesia Infrastructure Finance
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(3.669.384.461)	(751.884.434)	Unamortized transaction cost
Jumlah	<u>323.805.799.411</u>	<u>218.210.286.949</u>	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(17.655.000.000)</u>	<u>(16.785.000.000)</u>	Less current maturities
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>306.150.799.411</u>	<u>201.425.286.949</u>	Long-term term loan net of current maturities

Perusahaan

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 10 Desember 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dengan jumlah maksimal Rp 90.000.000.000, dengan jangka waktu maksimal selama 12 tahun yang akan jatuh tempo pada 30 Juni 2030. Pinjaman ini digunakan untuk melunasi seluruh pinjaman kepada BCA dan membiayai tambahan belanja modal Perusahaan dan entitas anak.

Tingkat bunga per tahun sebesar JIBOR ditambah margin sebesar 5%.

Pada tanggal 2 September 2022, Perusahaan dan AEB (entitas anak) memperoleh fasilitas *Non-Cash loan* dari PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dengan jumlah maksimal Rp 7.513.502.372, dan akan jatuh tempo pada April 2026. Pinjaman ini digunakan untuk penerbitan jaminan pelaksanaan sehubungan dengan proyek AEB dan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Kukusan.

Jumlah fasilitas *Non-Cash Loan* yang telah digunakan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 7.513.502.372.

Pada tanggal 12 Desember 2022, Perusahaan dan AHS (entitas anak) memperoleh fasilitas Pinjaman Berjangka Senior dari PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dengan jumlah maksimal Rp 35.000.000.000, dengan jangka waktu maksimal yang akan jatuh tempo pada Maret 2030. Pinjaman ini akan digunakan untuk mendukung proyek AHS.

Tingkat bunga per tahun sebesar JIBOR ditambah margin sebesar 5,5%.

ASS

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 10 Desember 2019, ASS memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Indonesia Infrastructure Finance dengan jumlah maksimal Rp 150.000.000.000, dengan jangka waktu maksimal selama 12 tahun yang akan jatuh tempo pada bulan September 2031. Pinjaman ini digunakan untuk melunasi seluruh pinjaman kepada BCA dan pembayaran penalti ke PLN atau pembayaran pencadangan penalti.

Tingkat bunga per tahun sebesar JIBOR ditambah margin sebesar 5%.

Pinjaman Perusahaan dan ASS tersebut dijamin dengan:

- Hak tanggungan atas tanah dan bangunan terkait dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Perusahaan dan ASS ("Proyek")

The Company

Based on the Senior Note Credit Facility dated December 10, 2019, the Company obtained long-term credit facility from PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) with maximum loan facility amounting to Rp 90,000,000,000 with period maximum of 12 years and will be matured in June 30, 2030. This loan facility is used to refinance existing loan to BCA and to finance additional capital expenditure of the Company and its subsidiaries.

Annual interest rate is JIBOR plus margin 5%.

On September 2, 2022, the Company and AEB (a subsidiary) obtained Non-cash loan facility from PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) with maximum loan facility amounting to Rp 7,513,502,372 and will be matured in April 2026. This loan facility is used to issuance of implementation guarantees in connection with the AEB Project and based on the Power Purchase Agreement from the Mini Hydro Powerplant Kukusan.

Total drawdown of the Non-cash loan used by Company as of December 31, 2022 amounted to Rp 7,513,502,372.

On December 12, 2022, the Company and AHS (a subsidiary) obtained long term credit facility from PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) with maximum amount Rp 35,000,000,000, and maximum period in March 2030. This loan will use to support AHS project.

Annual interest rate is JIBOR plus margin 5.5%.

ASS

Based on the Senior Note Credit Facility dated December 10, 2019, ASS obtained long-term credit facility from PT Indonesia Infrastructure Finance with maximum loan facility amounting to Rp 150,000,000,000 with period maximum of 12 years and will be matured in September 2031. This loan facility is used to refinance existing loan to BCA and for payment of penalty to PLN or any penalty accrual.

Annual interest rate is JIBOR plus margin 5%.

These loan facility of the Company and ASS are secured by:

- Mortgage of land and building related to the Company and ASS' Mini Hydro Power Plant projects ("Projects")

- Jaminan fidusia atas peralatan dan aset bergerak terkait dengan proyek Perusahaan dan ASS
- Jaminan fidusia atas hasil pembayaran asuransi yang berkaitan dengan proyek Perusahaan dan ASS
- Jaminan gadai atas rekening bank Perusahaan dan ASS terkait Proyek;
- Jaminan fidusia atas Piutang sehubungan dengan proyek Perusahaan dan ASS
- Jaminan perusahaan dari PT Arkora Bakti Indonesia, ACEI Singapore Holding Private Ltd., dan untuk fasilitas pinjaman kepada ASS, termasuk jaminan perusahaan dari Perusahaan
- Dokumen Pengalihan Perjanjian Pokok Proyek untuk Tujuan Penjaminan
- Jaminan gadai atas saham setiap pemegang saham penerima pinjaman.
- Surat kesanggupan dari PT Arkora Bakti Indonesia dan ACEI Singapore Holding Private Ltd. untuk menanggung seluruh *cash deficiency* dan *cost overrun* sehubungan dengan Proyek dengan cara memberikan pinjaman dan/atau meningkatkan modal.

Berdasarkan fasilitas pinjaman ini, Perusahaan dan ASS harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari IIF untuk beberapa hal, termasuk di antaranya perubahan struktur permodalan dan kepemilikan, perubahan kegiatan usaha dan pembayaran dividen.

Perusahaan dan ASS juga harus memenuhi ketentuan rasio keuangan sebagai berikut:

- rasio *Debt to Equity* maksimal 2.5 di mana perhitungan *Debt* tidak termasuk pinjaman kepada ACEI;
- rasio *Debt Service Coverage* minimal 1.20

Jumlah fasilitas pembiayaan yang sudah digunakan ASS pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 128.533.115.539 (31 Desember 2021: Rp 128.533.115.539).

AHS

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 28 Desember 2021, AHS memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Indonesia Infrastructure Finance dengan jumlah maksimal Rp 194.500.000.000 termasuk *Non-Cash Loan* dengan jumlah maksimal Rp 35.000.000.000, dengan jangka waktu maksimal selama 17 tahun setelah COD. Pinjaman ini digunakan untuk pembangunan PLTM Koro Yaentu 2x5 MW di Sulawesi tengah.

- Fiduciary security over equipment and moveable assets related to the Company and ASS' Projects
- Fiduciary security over insurance proceed related to the Company and ASS' Projects
- Fiduciary security over bank statements related to the Company and ASS' Projects
- Fiduciary security over receivables related to the Company and ASS' Projects
- Corporate guarantee from PT Arkora Bakti Indonesia, ACEI Singapore Holding Private Ltd., and for loan facility to ASS, including corporate guarantee from the Company
- All material contracts related to the Projects
- Collateral of the shares for each shareholder of the recipient of the loans.
- Letter of Understanding (LoU) from PT Arkora Bakti Indonesia and ACEI Singapore Holding Private Ltd. to fund and finance cash deficiency and cost overrun related to the Projects by giving additional loan and/or capital injection.

Based on these credit facilities, the Company and ASS must obtain written approval from IIF for several matter, including changes in capital structure and ownership, changes in business activities and dividend payment.

The credit facilities above require the Company and ASS to maintain certain financial ratios as follows:

- Debt to Equity ratio maximum 2.5 times, which the debt is not included loan from ACEI;
- Debt Service Coverage Ratio minimum 1.20

Total facility used of the loan facility used by ASS as of December 31, 2022 amounted to Rp 128,533,115,539 (December 31, 2021: Rp 128,533,115,539).

AHS

Based on the Senior Note Credit Facility dated December 28, 2021, AHS obtained long-term credit facility from PT Indonesia Infrastructure Finance with maximum loan facility amounting to Rp 194,500,000,000 including Non-Cash Loan with maximum amount Rp 35,000,000,000 with period maximum of 17 years after COD. This loan facility is used to financing the construction of PLTM Koro Yaentu 2x5 MW in Central Sulawesi province.

Tingkat bunga per tahun sebesar JIBOR ditambah margin sebesar 5,5%.

Jumlah fasilitas pembiayaan yang sudah digunakan AHS pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 121.011.590.059 dan fasilitas *Non-cash loan* sebesar Rp 26.137.609.200 (31 Desember 2021: Nil).

Pada tanggal 27 April 2022, IIF selaku pemberi pinjaman berjangka telah memberikan persetujuan pelepasan jaminan atas gadai saham Perusahaan tanpa syarat apapun.

Pada tanggal 25 Mei 2022, IIF selaku pemberi pinjaman berjangka telah memberikan persetujuan penghapusan pembatasan pembayaran dividen ASS dan AHS.

Pinjaman Perusahaan dan AHS tersebut dijamin dengan:

- Hak tanggungan atas tanah dan bangunan terkait dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Perusahaan dan AHS ("Proyek")
- Jaminan fidusia atas peralatan dan aset bergerak terkait dengan proyek Perusahaan dan AHS
- Jaminan fidusia atas hasil pembayaran asuransi yang berkaitan dengan proyek Perusahaan dan AHS
- Jaminan gadai atas rekening bank Perusahaan dan AHS terkait Proyek;
- Jaminan fidusia atas Piutang sehubungan dengan proyek Perusahaan dan AHS
- Jaminan perusahaan dari PT Arkora Bakti Indonesia, ACEI Singapore Holding Private Ltd., dan untuk fasilitas pinjaman kepada AHS, termasuk jaminan perusahaan dari Perusahaan
- Dokumen Pengalihan Perjanjian Pokok Proyek untuk Tujuan Penjaminan
- Jaminan gadai atas saham setiap pemegang saham penerima pinjaman.
- Surat kesanggupan dari PT Arkora Bakti Indonesia dan ACEI Singapore Holding Private Ltd. untuk menanggung seluruh cash deficiency dan cost overrun sehubungan dengan Proyek dengan cara memberikan pinjaman dan/atau meningkatkan modal.

Berdasarkan fasilitas pinjaman ini, Perusahaan dan AHS harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari IIF untuk beberapa hal, termasuk di antaranya perubahan struktur permodalan dan kepemilikan.

Annual interest rate is JIBOR plus margin 5.5%.

Total facility used of the loan facility used by AHS as of December 31, 2022 amounted to Rp 121,011,590,059 and Non-cash loan facility amounted to Rp 26,137,609,200 (December 31, 2021: Nil).

On April 27, 2022, IIF as lender of term loan has approved to release the collateral for the pledge of the Company's share without any condition.

On May 25, 2022, IIF as lender of term loan has approved the removal of restriction on the ASS and AHS' dividend payment.

These loan facility of the Company and AHS are secured by:

- Mortgage of land and building related to the Company and AHS' Mini Hydro Power Plant projects ("Projects")
- Fiduciary security over equipment and moveable assets related to the Company and AHS' Projects
- Fiduciary security over insurance proceed related to the Company and AHS' Projects
- Fiduciary security over bank statements related to the Company and AHS' Projects
- Fiduciary security over receivables related to the Company and AHS' Projects
- Corporate guarantee from PT Arkora Bakti Indonesia, ACEI Singapore Holding Private Ltd., and for loan facility to AHS, including corporate guarantee from the Company
- All material contracts related to the Projects
- Collateral of the shares for each shareholder of the recipient of the loans.
- Letter of Understanding (LoU) from PT Arkora Bakti Indonesia and ACEI Singapore Holding Private Ltd. to fund and finance cash deficiency and cost overrun related to the Projects by giving additional loan and/or capital injection.

Based on these credit facilities, the Company and ASS must obtain written approval from IIF for several matter, including changes in capital structure and ownership, changes in business activities and dividend payment.

Perusahaan dan AHS juga harus memenuhi ketentuan rasio keuangan sebagai berikut:

- rasio *Debt to Equity* maksimal 3.0 di mana perhitungan *Debt* tidak termasuk pinjaman kepada ACEI;
- rasio *Debt Service Coverage* minimal 1.20.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan, ASS dan AHS telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh perjanjian fasilitas pinjaman ini.

The credit facilities above require the Company and AHS to maintain certain financial ratios as follows:

- Debt to Equity ratio maximum 3.0 times, which the debt is not included loan from ACEI;
- Debt Service Coverage Ratio minimum 1.20.

As of December 31, 2022 and 2021, the Company, ASS and AHS meet the financial ratio as required by the loan facilities.

16. MODAL SAHAM

Nama pemegang saham/ <i>Name of stockholders</i>	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Jumlah/ <i>Total</i> Rp
PT Arkora Bakti Indonesia	1.391.760.000	47,52%	34.794.000.000
PT Energia Prima Nusantara	777.487.893	26,55%	19.437.197.325
ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	295.038.107	10,07%	7.375.952.675
Aldo Henry Artoko (Direktur Utama/ <i>President Director</i>)	3.000.000	0,10%	75.000.000
Masyarakat/ <i>Public</i> (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%/ <i>less than 5% ownership for each stockholder</i>)	<u>461.209.000</u>	<u>15,76%</u>	<u>11.530.225.000</u>
Jumlah/ <i>Total</i>	<u>2.928.495.000</u>	<u>100,00%</u>	<u>73.212.375.000</u>

Nama pemegang saham/ <i>Name of stockholders</i>	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Jumlah/ <i>Total</i> Rp
PT Arkora Bakti Indonesia	695.880.000	60,00%	34.794.000.000
ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	<u>463.920.000</u>	<u>40,00%</u>	<u>23.196.000.000</u>
Jumlah/ <i>Total</i>	<u>1.159.800.000</u>	<u>100,00%</u>	<u>57.990.000.000</u>

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perusahaan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 12 tertanggal 4 Maret 2022 oleh Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan memutuskan antara lain untuk:

- Menyetujui pemecahan nilai saham dari sebelumnya sebesar Rp 50 per lembar saham menjadi sebesar Rp 25 per lembar saham.
- Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").

16. CAPITAL STOCK

31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>			
Nama pemegang saham/ <i>Name of stockholders</i>	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Jumlah/ <i>Total</i> Rp
PT Arkora Bakti Indonesia	1.391.760.000	47,52%	34.794.000.000
PT Energia Prima Nusantara	777.487.893	26,55%	19.437.197.325
ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	295.038.107	10,07%	7.375.952.675
Aldo Henry Artoko (Direktur Utama/ <i>President Director</i>)	3.000.000	0,10%	75.000.000
Masyarakat/ <i>Public</i> (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%/ <i>less than 5% ownership for each stockholder</i>)	<u>461.209.000</u>	<u>15,76%</u>	<u>11.530.225.000</u>
Jumlah/ <i>Total</i>	<u>2.928.495.000</u>	<u>100,00%</u>	<u>73.212.375.000</u>

31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>			
Nama pemegang saham/ <i>Name of stockholders</i>	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Jumlah/ <i>Total</i> Rp
PT Arkora Bakti Indonesia	695.880.000	60,00%	34.794.000.000
ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	<u>463.920.000</u>	<u>40,00%</u>	<u>23.196.000.000</u>
Jumlah/ <i>Total</i>	<u>1.159.800.000</u>	<u>100,00%</u>	<u>57.990.000.000</u>

Based on Circular Resolution of Shareholders in lieu of extraordinary meeting of shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 21 dated March 4, 2022 of Sugih Haryati S.H., M.Kn., notary in Jakarta, the Company's stockholders, among other, agreed to:

- Approve the stock split from the previous amount of Rp 50 (fifty Rupiah) per share to Rp 25 (twenty-five Rupiah) per share.
- Approve the Company's plan to conduct Initial Public Offering and list such the Company shares at PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").

- Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:

a. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perusahaan paling banyak 773.200.000 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu) saham baru atau 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perusahaan ("Saham Baru") melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat.

b. Menyetujui penyisihan laba bersih untuk cadangan Perusahaan, senilai Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) atau setara dengan 3,45% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perusahaan;

Berdasarkan Akta Notaris No. 58 tertanggal 16 September 2022 dari Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan melalui Penawaran Umum Saham dari sebesar Rp 57.990.000.000 (2.319.600.000 lembar saham) menjadi Rp 73.212.375.000 (2.928.495.000 lembar saham). Akta perubahan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0184868.AH.01.11 tanggal 16 September 2022.

- Approve in relation to the Initial Public Offering:

a. The issuance of reserved shares of the Company at a maximum of 773,200,000 (seven hundred seventy-three million two hundred thousand) new shares or 25% (twenty five percent) of the entire issued and paid-up capital of the Company ("New Shares") through the Initial Public Offering to the public.

b. Approve the net profit allowance for the Company's reserve, in the amount of Rp 2,000,000,000 (two billion Rupiah) or equivalent to 3.45% of the total issued and paid-up capital of the Company;

Based on Notarial Deed No. 58 dated September 16, 2022 of Dr. Sugih Haryati, SH., M.kn, notary in Jakarta, the Company's stockholders agreed to increase the Company's issued and fully paid capital through Initial Public Offering from Rp 57,990,000,000 (2,319,600,000 shares) to Rp 73,212,375,000 (2,928,495,000 shares). This change was accepted by Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia through Decision Letter No. AHU-0184868.AH.01.11 dated September 16, 2022.

17. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	Agio saham/ <i>Premium on capital stock</i> Rp	Biaya emisi saham/ <i>Share issuance cost</i> Rp	Jumlah/ <i>Total</i> Rp
Selisih antara modal disetor dengan modal dasar saham pada saat pendirian	92.685.000.000	-	92.685.000.000
Saldo per 31 Desember 2021	92.685.000.000	-	92.685.000.000
Penerbitan 608.895.000 lembar saham melalui penawaran umum saham perdana pada 8 Juli 2022	167.446.125.000	(6.422.918.641)	161.023.206.359
Saldo per 31 Desember 2022	260.131.125.000	(6.422.918.641)	253.708.206.359

Dalam rangka penawaran umum perdana saham yang telah mendapat persetujuan pencatatan efek di PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2022, Perusahaan menerbitkan 608.895.000 saham dengan nilai nominal Rp 25 per saham dan harga penawaran Rp 300 per saham.

17. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

The difference between paid-up capital and the authorized share capital at the time of establishment

Balance as of December 31, 2021

Issuance of 608,895,000 shares through initial public offering on July 8, 2022

Balance as of December 31, 2022

In relation to the initial public offering of shares in which the approval for listing of its shares on the Indonesian Stock Exchange on July 8, 2022, the Company issued 608,895,000 shares with par value of Rp 25 per share and offer price of Rp 300 per share.

18. PENDAPATAN

	2022 Rp	2021 Rp	
Jasa konstruksi (Catatan 5)	187.801.963.444	142.514.403.770	Construction services (Note 5)
Penjualan listrik	59.047.348.800	47.428.726.400	Sale of electricity
Jasa lainnya	1.035.180.630	8.450.290.119	Other services
Jumlah	247.884.492.874	198.393.420.289	Total

18. REVENUES

Seluruh pendapatan Grup dilakukan dengan PLN di wilayah Indonesia. Pendapatan jasa konstruksi dan jasa lainnya diakui sepanjang waktu sedangkan penjualan listrik diakui pada waktu tertentu.

All of the Company's revenue are conducted with PLN in Indonesia. Construction services revenue and other services are recognized overtime while sale of electricity are recognized point in time.

Rincian pelanggan pihak ketiga dengan transaksi lebih dari 10% dari jumlah pendapatan konsolidasian pada periode yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

Revenue to the following third party customer represented more than 10% of the total consolidated revenues of the respective period:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	Rp	Rp	
PT Perusahaan Listrik Negara	<u>246.849.312.244</u>	<u>197.054.517.289</u>	PT Perusahaan Listrik Negara

19. BEBAN POKOK PENDAPATAN

19. COST OF REVENUES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	Rp	Rp	
Beban konstruksi (Catatan 5)	99.938.682.776	69.440.251.975	Construction cost (Note 5)
Penyusutan (Catatan 9)	8.161.058.583	8.070.605.841	Depreciation (Note 9)
Beban operasi dan pemeliharaan	6.929.511.583	6.916.215.667	Operation and maintenance expenses
Beban proyek	4.604.541.219	3.770.835.306	Project site expense
Asuransi	580.593.360	597.782.809	Insurance
Lain-lain	550.665.370	480.555.000	Others
Jumlah	<u>120.765.052.891</u>	<u>89.276.246.598</u>	Total

Rincian pembelian dengan transaksi lebih dari 10% dari jumlah pendapatan konsolidasian pada tahun yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

Purchase represented more than 10 % of the total consolidated revenues of the respective year:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	Rp	Rp	
PT Arkora Indonesia	72.541.186.877	31.736.144.066	PT Arkora Indonesia

20. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

20. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	Rp	Rp	
Gaji, tunjangan dan imbalan kerja	10.494.635.411	6.689.393.073	Salaries, allowances and employee benefits
Jasa profesional	6.953.047.894	1.680.126.351	Professional fee
Beban pajak	2.628.408.926	2.443.561.610	Tax expense
Penyusutan (Catatan 9)	1.611.060.171	322.348.522	Depreciation (Note 9)
Sewa jangka pendek dan aset nilai rendah	1.506.943.100	588.900.002	Short term loan and low value assets
Pencarian dan survei lokasi	1.281.779.215	1.852.214.440	Search dan survey location
Perjalanan dinas	873.245.073	387.533.780	Business trip
Biaya penjaminan	808.512.068	632.500.000	Guarantee fee
Utilitas	571.776.612	435.241.255	Utilities
Penyusutan aset hak guna	357.807.120	952.274.353	Depreciation right-of-use assets
Perbaikan dan pemeliharaan	85.652.872	860.135.006	Repair and maintenance
Lain-lain	3.901.798.394	1.165.542.344	Others
Jumlah	<u>31.074.666.856</u>	<u>18.009.770.736</u>	Total

21. BEBAN KEUANGAN

21. FINANCE COSTS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	Rp	Rp	
Bunga atas pinjaman dari pihak-pihak berelasi	23.839.256.774	31.294.530.585	Interest loans from related parties
Bunga atas pinjaman dari IIF	<u>27.026.335.205</u>	<u>20.760.751.341</u>	Interest on term loan from IIF
Jumlah	<u>50.865.591.979</u>	<u>52.055.281.926</u>	Total

22. PAJAK PENGHASILAN

22. INCOME TAXES

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp	Rp	
Lebih bayar pajak penghasilan badan Perusahaan	1.592.643.794	1.242.989.522	Overpayment of corporate income tax The Company
Entitas anak	1.382.038.107	958.301.678	Subsidiary
Pajak pertambahan nilai	<u>882.997.485</u>	<u>138.818.632</u>	Value added tax
Jumlah	<u>3.857.679.386</u>	<u>2.340.109.832</u>	Total

b. Utang pajak

b. Taxes payables

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp	Rp	
Pajak penghasilan Pasal 4(2)	134.190.351	111.383.733	Income tax Article 4(2)
Pasal 21	64.333.313	93.832.990	Article 21
Pasal 23	151.192.698	102.989.546	Article 23
Pajak pertambahan nilai	<u>327.345.249</u>	<u>312.798.149</u>	Value added tax
Jumlah	<u>677.061.611</u>	<u>621.004.418</u>	Total

c. Beban pajak

c. Tax expenses

Beban pajak Grup terdiri dari:

Tax expenses of the Group consists of:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp	Rp	
Pajak tangguhan Perusahaan	3.710.107.715	2.959.280.968	Deferred tax The Company
Entitas anak	<u>23.378.309.355</u>	<u>22.781.338.618</u>	Subsidiaries
Jumlah	<u>27.088.417.070</u>	<u>25.740.619.586</u>	Total

<u>Pajak Kini</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Current Tax</u>
	Rp	Rp	
Rekonsiliasi antara laba sebelum laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba fiskal sebagai berikut:			The reconciliation between profit before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable profit is as follows:
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	79.795.262.735	75.470.962.895	Profit before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak	<u>(100.610.596.691)</u>	<u>(82.622.093.560)</u>	Profit before tax of subsidiaries
Rugi sebelum pajak Perusahaan	<u>(20.815.333.956)</u>	<u>(7.151.130.664)</u>	Loss before tax of the Company
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Beban imbalan kerja	887.179.643	(262.206.373)	Employee benefits
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	<u>(3.870.324.099)</u>	<u>(6.830.191.400)</u>	Difference between commercial and fiscal depreciation
Jumlah	<u>(2.983.144.456)</u>	<u>(7.092.397.773)</u>	Total
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Non-deductible expenses (non-taxable income):
Beban bunga	23.444.766.617	31.294.530.585	Finance cost
Amortisasi suku bunga efektif atas pinjaman	-	(9.418.347.241)	Amortization on effective interest rate on loan
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(260.621.311)	(71.474.539)	Interest income subject to final tax
Lain-lain	<u>1.196.723.627</u>	<u>(399.563.883)</u>	Others
Jumlah	<u>24.380.868.933</u>	<u>21.405.144.922</u>	Total
Laba kena pajak	<u>582.390.521</u>	<u>7.161.616.484</u>	Taxable income
Akumulasi rugi fiskal yang telah disesuaikan dengan Surat Ketetapan Pajak			Accumulated fiscal losses adjusted based on Tax Assessment Letters
2016	-	(12.474.889.409)	2016
2017	(5.581.310.847)	(5.581.310.847)	2017
2018	(32.642.629.827)	(32.642.629.827)	2018
2019	(8.013.965.038)	(8.013.965.038)	2019
2020	<u>(7.464.212.410)</u>	<u>(13.605.134.362)</u>	2020
Jumlah rugi fiskal	<u>(53.702.118.122)</u>	<u>(72.317.929.483)</u>	Total fiscal losses
Rugi fiskal yang tidak dapat diutilisasi	<u>4.998.920.326</u>	<u>5.313.272.925</u>	Unutilized fiscal losses
Akumulasi rugi fiskal - bersih	<u>(48.120.807.275)</u>	<u>(59.843.040.074)</u>	Accumulated fiscal losses - net

Sesuai peraturan perpajakan, kerugian fiskal tersebut dapat ditangguhkan ke tahun berikutnya dan dikompensasikan kepada penghasilan kena pajak yang terjadi selama lima tahun sesudah kerugian fiskal tersebut.

Laba fiskal dan lebih bayar pajak penghasilan badan Perusahaan tahun pajak 2021 sudah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak ("SPT") yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pajak.

According to tax regulation, such losses may be carried forward and applied against taxable income in any of the five years following the year in which the fiscal loss was incurred.

Taxable income and overpayment of corporate income tax of the Company for fiscal year 2021 are in accordance with the corporate tax returns filed with the Tax Service Office and tax assessment letters issued by Tax Office.

Surat Ketetapan Pajak

Pada bulan September 2020, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak lebih bayar untuk pajak penghasilan badan tahun buku 2018 sebesar Rp 453.922.648 dan juga mendapatkan surat tagihan denda pajak pertambahan nilai periode Januari - Desember 2018 sebesar Rp 602.256.864 menyebabkan Perusahaan menjadi kurang bayar sebesar Rp 148.334.216. Tidak terdapat perbedaan antara jumlah lebih bayar pajak badan dengan jumlah yang dilaporkan sebelumnya dalam surat pemberitahuan pajak badan, akan tetapi terdapat koreksi atas rugi fiskal dari Rp 37.531.080.911 yang dilaporkan sebelumnya menjadi Rp 32.642.629.827. Perusahaan setuju dengan hasil surat ketetapan pajak ini.

Pada bulan Maret 2021, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak lebih bayar untuk pajak penghasilan badan tahun buku 2019 sebesar Rp 355.581.481. Tidak terdapat perbedaan antara jumlah lebih bayar pajak badan dengan jumlah yang dilaporkan sebelumnya dalam surat pemberitahuan pajak badan, akan tetapi terdapat koreksi atas rugi fiskal dari Rp 22.108.904.979 yang dilaporkan sebelumnya menjadi Rp 8.013.965.038. Perusahaan setuju dengan hasil surat ketetapan pajak ini.

Pada bulan Oktober 2022, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak lebih bayar untuk pajak penghasilan badan tahun buku 2020 sebesar Rp 538.789.944. Tidak terdapat perbedaan antara jumlah lebih bayar pajak badan dengan jumlah yang dilaporkan sebelumnya dalam surat pemberitahuan pajak badan, akan tetapi terdapat koreksi atas rugi fiskal dari Rp 13.605.134.362 yang dilaporkan sebelumnya menjadi Rp 7.464.212.410. Perusahaan setuju dengan hasil surat ketetapan pajak ini.

Entitas anak

Pada bulan November 2022, ASS (entitas anak) menerima surat ketetapan pajak lebih bayar untuk pajak penghasilan badan tahun buku 2020 sebesar Rp 391.098.730. Tidak terdapat perbedaan antara jumlah lebih bayar pajak badan dengan jumlah yang dilaporkan sebelumnya dalam surat pemberitahuan pajak badan, akan tetapi terdapat koreksi atas rugi fiskal dari Rp 8.916.820.659 yang dilaporkan sebelumnya menjadi Rp 3.940.295.540. Perusahaan setuju dengan hasil surat ketetapan pajak ini.

Tax Assessment Letter

In September 2020, the Company received tax assessment confirming overpayment of corporate income tax fiscal year 2018 amounted to Rp 453,922,648 and received penalty letter for VAT period January - December 2018 amounted Rp 602,256,864 impact to the Company to be underpaid by Rp 148,334,216. There is no difference on overpayment of corporate income tax with the amount reported previously in its annual corporate income tax return. However, there is a correction of fiscal loss from Rp 37,531,080,911 as reported previously to Rp 32,642,629,827. The Company agrees with the tax assessment result.

In March 2021, the Company received tax assessment confirming overpayment of corporate income tax fiscal year 2019 amounted to Rp 355,581,481. There is no difference on overpayment of corporate income tax with the amount reported previously in its annual corporate income tax return. However, there is a correction of fiscal loss from Rp 22,108,904,979 as reported previously to Rp 8,013,965,038. The Company agrees with the tax assessment result.

In October 2022, the Company received tax assessment confirming overpayment of corporate income tax fiscal year 2020 amounted to Rp 538,789,944. There is no difference on overpayment of corporate income tax with the amount reported previously in its annual corporate income tax return, but there is a correction of fiscal loss from Rp 13,605,134,362 as reported previously to Rp 7,464,212,410. The Company agrees with the tax assessment result.

Subsidiaries

In November 2022, ASS (a subsidiary) received tax assessment confirming overpayment of corporate income tax fiscal year 2020 amounted to Rp 391,098,730. There is no difference on overpayment of corporate income tax with the amount reported previously in its annual corporate income tax return. However, there is a correction of fiscal loss from Rp 8,916,820,659 as reported previously to Rp 3,940,295,540. The Company agrees with the tax assessment result.

Pajak Tangguhan

Rincian dari aset (liabilitas) pajak tangguhan
Grup adalah sebagai berikut:

Perusahaan	1 Januari/ January 1, 2021	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to income for the year	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	Penyesuaian perubahan tarif pajak/ Change in tax rate adjustment	31 Desember/ December 31, 2021	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to income for the year	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Perusahaan									
Aset tetap	(7.671.804.664)	(1.502.642.108)	-	143.799.759	(9.030.647.013)	(851.471.302)	-	(9.882.118.315)	The Company
Liabilitas imbalan kerja	962.067.364	(57.685.402)	(91.898.681)	55.049.995	867.533.276	195.179.521	(30.504.467)	1.032.208.330	Property and equipment
Rugi fiskal	9.758.623.860	(1.575.555.627)	-	(22.247.585)	8.160.820.648	(3.053.815.934)	-	5.107.004.714	Employee benefits obligations
Sub-jumlah	3.048.886.560	(3.135.883.137)	(91.898.681)	176.602.169	(2.293.089)	(3.710.107.715)	(30.504.467)	(3.742.905.271)	Fiscal losses
Entitas Anak									
Penyesuaian jasa konsesi	(25.757.785.951)	(18.892.805.947)	-	(3.905.645.172)	(48.556.237.070)	(23.488.264.283)	-	(72.044.501.353)	Sub-totals
Liabilitas imbalan kerja	32.964.015	17.710.167	(45.938.510)	(597.666)	4.138.006	109.954.928	21.155.972	135.248.906	Subsidiaries Concession service adjustment
Sub-jumlah	(25.724.821.936)	(18.875.095.780)	(45.938.510)	(3.906.242.838)	(48.552.099.064)	(23.378.309.355)	21.155.972	(71.909.252.447)	Employee benefits obligations
Jumlah	(22.675.935.375)	(22.010.978.917)	(137.837.191)	(3.729.640.669)	(48.554.392.153)	(27.088.417.070)	(9.348.495)	(75.652.157.718)	Sub-totals
Aset pajak tangguhan	3.048.886.560								Total Deferred tax asset
Liabilitas pajak tangguhan	(25.724.821.936)				(48.554.392.153)			(75.652.157.718)	Deferred tax liabilities

Rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa lima tahun mendatang sejak kerugian fiskal terjadi. Manajemen berpendapat bahwa akumulasi kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan laba fiskal masa mendatang dan oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 2022 aset pajak tangguhan diakui atas rugi fiskal sebesar Rp 5.107.004.714 (31 Desember 2021: Rp 8.160.820.648).

Deferred Tax

The details of the Group's deferred tax assets
(liabilities) is as follows:

The fiscal loss can be utilized against the taxable income for a period of five years subsequent to the year the fiscal loss was incurred. Management believes that probable future taxable profits will be available to utilize accumulated fiscal losses, hence, as of December 31, 2022, deferred tax of Rp 5,107,004,714 (December 31, 2021: Rp 8,160,820,648), were recognized on such fiscal losses.

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian rugi akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rate to loss before tax is as follows:

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	79.795.262.735	75.470.962.895	Profit before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak	(100.610.596.691)	(82.622.093.560)	Profit before tax of subsidiaries
Rugi sebelum pajak Perusahaan	(20.815.333.956)	(7.151.130.664)	Loss before tax of the Company
Pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif	(4.579.373.470)	(1.573.248.747)	Income tax at effective tax rate
Pengaruh pajak atas (beban) manfaat yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal			Tax effect of non-deductible expenses (non-taxable income)
Beban bunga	5.157.848.655	6.884.796.729	Finance cost
Amortisasi suku bunga efektif atas pinjaman	-	(2.072.036.393)	Amortization of effective interest rate on loan
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(57.336.688)	(15.724.399)	Interest income subject to final tax
Lain - lain	263.279.198	(87.904.053)	Others
Perubahan tarif pajak	-	(176.602.169)	Change in tax rate
Rugi fiskal yang diutilisasi	(128.125.914)	-	Utilized fiscal loss
Rugi fiskal yang tidak diutilisasi	3.053.815.934	-	Unutilized fiscal loss
Beban pajak Perusahaan	3.710.107.715	2.959.280.968	Tax expense of the Company
Beban pajak entitas anak	23.378.309.355	22.781.338.618	Tax expense of subsidiaries
Jumlah beban pajak - bersih	27.088.417.070	25.740.619.586	Total tax expense - net

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA

	31 Desember/ December 31, 2022 Rp
Imbalan pasca kerja	4.474.172.593
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	<u>832.451.217</u>
Saldo akhir nilai kini liabilitas	<u><u>5.306.623.810</u></u>

Grup menghitung dan mencatat estimasi imbalan pasca kerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020.

Program kewajiban imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

	2022 Rp
Biaya jasa kini	1.422.545.419
Biaya jasa lalu	(706.283.666)
Biaya bunga	<u>270.538.520</u>
Komponen beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam laba rugi	<u>986.800.273</u>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto	
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	-
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	<u>(42.493.158)</u>
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	<u>(42.493.158)</u>
Jumlah	<u><u>944.307.115</u></u>

23. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATIONS

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp
	4.368.637.694
	<u>-</u>
	<u><u>4.368.637.694</u></u>

Post-employment benefits
Other long-term employee benefit

Ending balance defined benefit obligation

The Group calculates and records estimated employment benefits as required Omnibus Law No. 11 year 2020.

The defined benefit plan typically expose the Group to actuarial risk such as interest risk and salary risk.

Interest risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Amounts recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income in respect of the benefits are as follows:

	2021 Rp
	718.110.694
	(1.124.977.880)
	<u>227.328.729</u>
	<u>(179.538.457)</u>
	(907.441)
	<u>(717.384.532)</u>
	<u>(718.291.973)</u>
	<u><u>(897.830.430)</u></u>

Current service cost
Past service cost
Interest costs
Components of Post-employment benefit cost recognized in profit or loss

Remeasurement on the net defined benefit liability:
Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments
Components of defined benefit costs recognized in other comprehensive income

Total

Jumlah liabilitas imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan yang timbul dari liabilitas Grup sehubungan dengan imbalan kerja adalah nilai kini dari liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The amounts included in the statement of financial position arising from the Group's obligations in respect of these employee benefit obligation are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	
Saldo awal nilai kini liabilitas	4.368.637.694	5.310.185.830	Opening defined benefit obligation
Biaya jasa kini	1.422.545.419	718.110.694	Current service cost
Biaya bunga	270.538.520	(1.124.977.880)	Interest cost
Dampak dari perubahan atribusi imbalan	(763.691.651)	-	Impact of changes in the attributing benefit
Biaya jasa lalu	57.407.985	227.328.729	Past service cost
Pembayaran imbalan dari pemberi kerja	(6.320.999)	(43.717.706)	Benefit payments from employer
Pengukuran kembali liabilitas	(42.493.158)	(718.291.973)	Remeasurement on the net defined
Saldo akhir nilai kini liabilitas	<u>5.306.623.810</u>	<u>4.368.637.694</u>	Closing defined benefit obligation

Perhitungan imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dihitung Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, FSAI & Rekan. Asumsi utama aktuaris yang digunakan oleh Grup adalah sebagai berikut:

The cost providing employee benefits as at December 31, 2022 and December 31, 2021 were calculated by Actuarial Consulting Office I Gde Eka Sarmaja, FSAI & Partner. The actuarial valuation used by the Group was carried out using the following key assumptions:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Tingkat diskonto	7% per tahun/per year	7,25% per tahun/per year	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5% per tahun/per year	5% per tahun/per year	Salary increment rate
Tingkat kematian	100% TMI2019/100% TMI2019	100% TMI2019/100% TMI2019	Mortality rate
Tingkat cacat	10% dari TMI2019/10% of TMI2019	10% dari TMI2019/10% of TMI2019	Disability rate
Tingkat pensiun normal	57 tahun/57 years	57 tahun/57 years	Normal retirement rate

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

	31 Desember/ December 31, 2022		31 Desember/ December 31, 2021		
	+1% Rp	-1% Rp	+1% Rp	-1% Rp	
Tingkat diskonto	(331.666.579)	384.723.506	(354.453.965)	423.924.966	Discount Rate
Tingkat kenaikan gaji	426.943.596	(371.799.816)	481.122.815	(406.912.707)	Salary Increment Rate

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan sebesar 10,54 tahun per 31 Desember 2022 (31 Desember 2021: 8,57 tahun).

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognized in the statement of consolidated financial position.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

The average duration of the benefit obligation at are is 10.54 years at December 31, 2022 (December 31, 2021:8.57 years).

24. LABA PER LEMBAR SAHAM

	2022 Rp
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	52.660.421.379
Rata-rata tertimbang jumlah saham	2.624.047.500
Laba bersih per saham dasar	20

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham dasar telah disesuaikan untuk mencerminkan pengaruh dari pemecahan nilai saham dari sebelumnya sebesar Rp 50 per lembar saham menjadi sebesar Rp 25 per lembar saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan tidak memiliki saham biasa yang berpotensi dilutif.

24. EARNINGS PER SHARE

	2021 Rp
Net profit for the year attributable to the owners of the Company	48.959.115.032
Weighted average number shares	2.624.047.500
Basic earnings per share	19

The weighted average number of shares for the computation of basic earnings per share has been adjusted to reflect the effect of stock split from the previous amount of Rp 50 per share to Rp 25 per share and the Increase of Company's issued and fully paid capital in relation with the Initial Public Offering of Shares.

For the year ended December 31, 2022 and 2021, the Company does not have dilutive potential ordinary shares.

25. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan dengan pihak berelasi/ <i>Relationship with the related parties</i>
PT Arkora Bakti Indonesia (ABI)	Entitas induk terakhir dan pemegang saham Perusahaan/ <i>Ultimate shareholder and parent of the Company</i>
ACEI Singapore Holdings Private Ltd (ACEI)	Pemegang saham Perusahaan/ <i>Shareholder of the Company</i>
PT Arkora Indonesia	Pemegang saham PT Arkora Bakti Indonesia/ <i>Shareholder of PT Arkora Bakti Indonesia</i>
Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan/ <i>Board of Commissioner and Directors</i>	Manajemen kunci Perusahaan/ <i>Key management personnel</i>

25. RELATED PARTIES TRANSACTION

Nature of Relationship

Transaksi yang signifikan <i>Significant transactions</i>
Pemberi pinjaman/ <i>loan</i>
Pemberi pinjaman/ <i>loan</i>
Kontraktor pembangkit listrik tenaga mini hydro di AHS dan ASS, entitas anak/ <i>Contractor of mini hydro power plant at AHS and ASS, subsidiaries</i>
-

Transaksi Pihak Berelasi

- a. Grup menyediakan manfaat pada komisaris dan direktur Grup sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp
Imbalan kerja jangka pendek		
Komisaris	255.344.102	218.035.720
Direktur	3.229.966.567	2.401.580.611
Jumlah	<u>3.485.310.669</u>	<u>2.619.616.331</u>
Persentase terhadap beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi	<u>2,30%</u>	<u>2,44%</u>

- b. Piutang lain-lain

	31 Desember/ December 31, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp
Piutang lain-lain		
Aldo Henry Artoko	-	181.000.000
Arya Pradana Setiadharna	-	80.000.000
Ardi Dwinanta Setiadharna	-	80.000.000
Lainnya	102.671.988	2.671.988
Jumlah	<u>102.671.988</u>	<u>343.671.988</u>
Persentase terhadap total aset konsolidasian	<u>0,01%</u>	<u>0,05%</u>

- c. Pinjaman dari pihak berelasi

	31 Desember/ December 31, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp
Pokok pinjaman		
ACEI	62.924.000.000	114.152.000.000
ABI	-	7.000.000.000
Akrual bunga		
ACEI	65.187.426.088	90.062.086.060
ABI	-	118.333.333
Jumlah	128.111.426.088	211.332.419.393
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(128.111.426.088)</u>	<u>(115.140.470.994)</u>
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>-</u>	<u>96.191.948.399</u>
Persentase terhadap jumlah liabilitas konsolidasian	<u>23,38%</u>	<u>40,83%</u>

Transaction with Related Parties

- a. The Group provides benefits to the commissioners and directors of the Group as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp
Short-term employee benefits	
Commissioners	218.035.720
Directors	2.401.580.611
Total	<u>2.619.616.331</u>
Percentage to total cost of revenue and general administrative expenses	<u>2,44%</u>

- b. Other accounts receivables

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp
Other accounts receivable	
Aldo Henry Artoko	181.000.000
Arya Pradana Setiadharna	80.000.000
Ardi Dwinanta Setiadharna	80.000.000
Others	2.671.988
Total	<u>343.671.988</u>
Percentage to total consolidated asset	<u>0,05%</u>

- c. Loan from related parties

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp
Principal loan	
ACEI	114.152.000.000
ABI	7.000.000.000
Accrued interest	
ACEI	90.062.086.060
ABI	118.333.333
Total	<u>211.332.419.393</u>
Less current maturity	<u>(115.140.470.994)</u>
Long-term loan net of current maturities	<u>96.191.948.399</u>
Percentage to total consolidated liabilities	<u>40,83%</u>

ACEI

Pada tanggal 2 Oktober 2015, PT Arkora Bakti Indonesia (sebagai sponsor), ACEI Singapore Holdings Private Ltd. (sebagai investor) dan Perusahaan menandatangani perjanjian *Note Agreement*.

Perusahaan akan menjual kepada investor dan investor akan membeli surat utang dengan jumlah keseluruhan sebesar US\$ 12.500.000 dengan menerbitkan 8 surat utang sebesar US\$ 1.562.500 per surat utang. Surat utang ini akan dikenakan bunga sebesar 14% per tahun dengan jangka waktu selama 5 tahun dari tanggal penerbitan.

Pada tanggal 16 Mei 2017 perjanjian ini diamandemen untuk perubahan jumlah keseluruhan sebesar US\$ 12.500.000 dengan menerbitkan 25 surat utang sebesar US\$ 500.000 per surat utang.

Pada tanggal 5 Juni 2017 Perusahaan menerbitkan sebanyak 8 surat utang dengan nilai keseluruhan sebesar US\$ 4.000.000 (Tahap 1). Surat utang ini akan dikenakan bunga sebesar 14% per tahun dari jumlah terutang (termasuk bunga yang belum dibayar) dengan jangka waktu selama 5 tahun dari tanggal penerbitan.

Pada tanggal 23 Maret 2018 Perusahaan menerbitkan sebanyak 8 surat utang dengan nilai keseluruhan sebesar US\$ 4.000.000 (Tahap 2). Surat utang ini akan dikenakan bunga sebesar 14% per tahun dari jumlah terutang (termasuk bunga yang belum dibayar) dengan jangka waktu selama 5 tahun dari tanggal penerbitan.

Pada tanggal 24 Mei 2022, ACEI, ABI dan Perusahaan setuju untuk memperpanjang jatuh tempo surat-surat utang Tahap 1 menjadi 15 Juli 2022. Perusahaan telah melunasi seluruh pokok pinjaman dan bunga terutang Tahap 1 pada tanggal 19 September 2022.

ABI

Pada tanggal 28 Oktober 2021, PT Arkora Bakti Indonesia dan Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp 12.000.000.000 dengan bunga sebesar 10% per tahun dan jangka waktu jatuh tempo adalah 1 tahun sejak tanggal perjanjian.

Pada bulan Juli 2022, Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman dan bunga terutang kepada PT Arkora Bakti Indonesia.

ACEI

On October 2, 2015, PT Arkora Bakti Indonesia (as sponsor), ACEI Singapore Holdings Private Ltd. (as investor) and the Company signed *Note Agreement*.

The Company shall sell to investor and investor shall purchase the Note amounting to US\$ 12,500,000 in aggregate by issuing 8 notes payable amounted to US\$ 1,562,500 per Note. The Note will bear interest at 14% per annum with a term of 5 years from the issuance of note.

On May 16, 2017, the agreement was amended for the change the Note amounted to US\$ 12,500,000 in aggregate by issuing 25 notes payable amounted to US\$ 500,000 per note.

On June 5, 2017 the Company issued 8 notes amounting to US\$ 4,000,000 (Phase 1). The Note will bear interest at 14% per annum from outstanding amount (including unpaid interest) with a term of 5 years from the issuance of note.

On March 23, 2018 the Company issued 8 notes amounting to US\$ 4,000,000 (Phase 2). The Note will bear interest at 14% per annum from outstanding amount (including unpaid interest) with a term of 5 years from the issuance of note.

On May 24, 2022, ACEI, ABI and the Company agree to extend the maturity date of notes Phase 1 to July 15, 2022. The Company has fully paid the loan principal and accrued interest on September 19, 2022.

ABI

On October 28, 2021, PT Arkora Bakti Indonesia and the Company have signed loan agreement with maximum principal amount of Rp 12,000,000,000 with interest 10% per annum and with a term of 1 year from the date of agreement.

In July 2022, the Company has fully paid its loan principal and accrued interest to PT Arkora Bakti Indonesia.

- d. Pada tanggal 7 Desember 2020, PT Arkora Indonesia dan AHS, entitas anak menandatangani perjanjian *Civil and Metal Works* PLTMH Koro Yaentu Mini Hydro, dengan nilai kontrak sebesar Rp 158.412.292.000.

Biaya konstruksi terkait dengan perjanjian ini dicatat sebagai beban pokok pendapatan sebagai berikut:

	2022 Rp	2021 Rp	
Biaya konstruksi	<u>72.541.186.877</u>	<u>68.027.855.551</u>	Construction cost
Persentase terhadap beban pokok pendapatan konsolidasian	<u>59,86%</u>	<u>76,20%</u>	Percentage to consolidated cost of revenue

Jumlah akrual serta utang usaha dan lainnya kepada PT Arkora Indonesia pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.243.387.726 (31 Desember 2021: Rp 24.472.527.414).

Persentase utang usaha dan lainnya terhadap jumlah liabilitas konsolidasian masing-masing sebesar 0,95% pada tanggal 31 Desember 2022. (31 Desember 2021: 4,73%).

- e. Utang retensi kepada PT Arkora Indonesia adalah sebesar Rp 7.028.949.528 pada tanggal 31 Desember 2022 (31 Desember 2021: Rp 3.401.392.771).

Persentase utang retensi terhadap jumlah liabilitas konsolidasian sebesar 1,26% pada tanggal 31 Desember 2022 (31 Desember 2021: 0,66%)

- d. On December 7, 2020, PT Arkora Indonesia and AHS, a subsidiary have signed Civil and Metal Works agreement of PLTMH Koro Yaentu Mini Hydro with contract amount of Rp 158,412,292,000.

The construction costs related to this agreement were recorded at cost of revenue as follows:

Total amount accrual and trade and other accounts payable to PT Arkora Indonesia as of December 31, 2022 amounting to Rp 1,243,387,726 (December 31, 2021: to Rp 24,472,527,414).

Percentage of trade and other accounts payable to total consolidated liabilities as of December 31, 2022 is 0.95%. (December 31, 2021: 4.73%).

- e. Retention payable to PT Arkora Indonesia amounting to Rp 7,028,949,528 as of December 31, 2022 (December 31, 2021: Rp 3,401,392,771).

Percentage of retention payable to total consolidated liabilities is 1.26% as of December 31, 2022 (December 31, 2021: 0.66%).

26. IKATAN

- a. Pada tanggal 19 Juli 2012, Perusahaan dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan ketersediaan tenaga listrik rata-rata sebesar 39.492.278 kWh/tahun atau setara dengan *capacity factor* sebesar 70% di Garut, Jawa Barat. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun dari *Commercial Operating Date* (COD). Pada tanggal 23 Oktober 2014, perjanjian ini diadendum dengan mengubah ketersediaan tenaga listrik rata-rata menjadi sebesar 47.400.992 kWh/tahun atau setara dengan *capacity factor* sebesar 74,02%.

Pada tanggal 28 September 2016, perjanjian ini diadendum dengan mengubah harga beli tenaga listrik menjadi Rp 1.100 per kWh untuk tahun ke 1 sampai dengan tahun ke 8 dari COD, dan Rp 850 per kWh untuk tahun ke 9 sampai dengan tahun ke 15.

26. COMMITMENTS

- a. On July 19, 2012, the Company and PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with average availability for electric power of 39,492,278 kWh/ year or equal with capacity factor amounted 70% at Garut, West Java. The agreement is valid for 15 years from Commercial Operating Date (COD). On October 23, 2014, the agreement was amended by changing the average availability for electric power to 47,400,992 kWh/year or equal with capacity factor amounted 74.02%.

On September 28, 2016, the agreement was amended by changing power purchase price to Rp 1,100 per kWh for the year 1 to year 8 from COD, and Rp 850 per kWh for the year 9 to year 15.

- b. Pada tanggal 30 September 2014, PT Arkora Sulawesi Selatan (ASS), entitas anak dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan ketersediaan tenaga listrik rata-rata sebesar 61.424 GWh/tahun atau setara dengan *capacity factor* sebesar 70,2% di Sulawesi Tengah. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun dari *Commercial Operating Date* (COD).
- c. Pada tanggal 21 Oktober 2020, PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS), entitas anak dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan kapasitas 10MW. Perjanjian ini berlaku selama 25 tahun dari *Commercial Operating Date* (COD).
- d. Pada tanggal 1 November 2021, AHS dan Voith Hydro Privat Limited, India menandatangani perjanjian kontrak untuk suplai peralatan elektro-mekanikal untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Yaentu dengan nilai kontrak sebesar US\$ 2.330.000. Waktu penyelesaian kontrak adalah delapan belas bulan untuk mencapai komisioning semua unit sejak tanggal dimulainya kontrak.
- e. Pada tanggal 22 Desember 2021, AHS dan PT Voith Hydro Indonesia menandatangani perjanjian kontrak onshore untuk penyediaan, transportasi dan layanan pemasangan dan komisioning peralatan elektro-mekanikal untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Yaentu dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.815.000.000.
- f. Pada tanggal 14 Maret 2022, Perusahaan, PT Asripower Prima dan pemegang saham PT Asripower Prima menandatangani Perjanjian Pemesanan Saham Bersyarat, di mana Perusahaan akan memesan dan mengambil bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh PT Asripower Prima dengan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh PT Asripower Prima dan para pemegang saham PT Asripower Prima dan disetujui oleh Perusahaan. Jika seluruh persyaratan pendahuluan termasuk pemesanan dan penyertaan saham baru tidak diselesaikan paling lama 365 hari sejak tanggal perjanjian maka perjanjian ini akan secara otomatis berakhir dan tidak berlaku.
- Jumlah saham baru yang akan diterbitkan oleh PT Asripower Prima adalah sebanyak 34.000 lembar saham atau sebesar 54,85% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor PT Asripower Prima setelah penerbitan saham baru dengan nilai sebesar Rp 34.000.000.000.
- g. Pada tanggal 24 Maret 2022, PT Arkora Energi Baru, entitas anak, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan kapasitas 2 x 2,7 MW. Perjanjian ini berlaku selama 25 tahun sejak *Commercial Operating Date* (COD).
- b. On September 30, 2014, PT Arkora Sulawesi Selatan (ASS), a subsidiary and PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with average availability for electric power of 61,424 GWh/year or equal with capacity factor amounted 70.2% at Central Sulawesi. The agreement is valid for 15 years from Commercial Operating Date (COD).
- c. On October 21, 2020, PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS), a subsidiary and PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with capacity of 10MW. The agreement is valid for 25 years from Commercial Operating Date (COD).
- d. On November 1, 2021, AHS entered into contract agreement with Voith Hydro Privat Limited, India for supply of electro-mechanical equipment of Yaentu Mini Hydro Power Plant project with total contract amounting to US\$ 2,330,000. Time for completion of the contract shall be eighteen months to attain the commissioning of all unit from the commencement date of the contract.
- e. On December 22, 2021, AHS entered into contract agreement with PT Voith Hydro Indonesia for onshore supply, inland transportation and service for erection and commissioning of electro-mechanical equipment of Yaentu Hydro Power Plant project with total contract amounting to Rp 5,815,000,000.
- f. On March 14, 2022, the Company, PT Asripower Prima and shareholders of PT Asripower Prima signed a Conditional Share Subscription Agreement, in which the Company will subscribe new shares to be issued by the PT Asripower Prima with several prerequisites that must be met by PT Asripower Prima and the shareholders of PT Asripower Prima and approved by the Company. If all prerequisites, including subscriptions and issuance of new shares are not completed within 365 days from the date of the agreement, this agreement will automatically expire and became null.
- The number of new shares to be issued by PT Asripower Prima is 34,000 shares or 54.85% of the total issued and paid-up capital of PT Asripower Prima after the issuance of new shares with a value of Rp 34,000,000,000.
- g. On March 24, 2022, PT Arkora Energi Baru, a subsidiary, and PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with capacity of 2 x 2.7 MW. The agreement is valid for 25 years from Commercial Operating Date (COD).

27. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, Grup memiliki aset moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

		31 Desember/ December 31, 2022		31 Desember / December 31, 2021		
		Mata uang asing/ Foreign Currencies	Ekuivalen/ Equivalent in Rp	Mata uang asing/ Foreign Currencies	Ekuivalen/ Equivalent in Rp	
Aset						Assets
Kas dan setara kas	EURO	6	97.936	8.904	143.589.047	Cash in banks and cash equivalent
	US\$	166.227	2.614.917.959	2.228	31.790.401	
Jumlah Aset			2.615.015.895		175.379.448	Total Assets
Liabilitas						Liability
Pinjaman dari pihak berelasi	US\$	8.143.883	128.111.426.089	14.311.725	204.214.086.060	Loan from a related party
Liabilitas bersih			(125.496.410.194)		(204.038.706.612)	Net liabilities

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, kurs konversi yang digunakan Grup adalah sebagai berikut:

At December 31, 2022 and December 31, 2021, the Group had monetary assets in foreign currencies, as follows:

The conversion rates used by the Group on December 31, 2022 and December 31, 2021 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022		31 Desember/ December 31, 2021		
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Mata uang					Foreign currencies
1 US\$		15.731		14.269	US\$ 1
1 EURO		16.713		16.127	EUR 1

28. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tabel berikut ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

28. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

The following table explains changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	1 Januari/ January 1, 2022	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ financing cash flow	Beban bunga Interest expenses	Perubahan transaksi non-kas/ non-cash change	31 Desember/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pinjaman berjangka	218.210.286.949	78.888.992.963	26.706.519.500	-	323.805.799.412	Term loans
Pinjaman dari pihak berelasi	211.332.419.393	(122.703.609.081)	23.839.256.774	15.643.359.002	128.111.426.088	Loan from related parties
Jumlah	429.542.706.342	(43.814.616.118)	50.545.776.274	15.643.359.002	451.917.225.500	Total
	1 Januari/ January 1, 2021	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ financing cash flow	Beban bunga Interest expenses	Perubahan transaksi non-kas/ non-cash change	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pinjaman berjangka	233.346.837.857	(35.897.302.249)	20.760.751.341	-	218.210.286.949	Term loans
Liabilitas sewa	360.197.062	(2.149.232.633)	-	1.789.035.571	-	Lease liabilities
Pinjaman dari pihak berelasi	171.775.808.808	7.000.000.000	31.244.610.585	1.312.000.000	211.332.419.393	Loan from related parties
Jumlah	405.482.843.727	(31.046.534.882)	52.005.361.926	3.101.035.571	429.542.706.342	Total

**29. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS
INVESTASI DAN PENDANAAN NONKAS**

	2022 Rp	2021 Rp
Penambahan pinjaman dari pihak berelasi melalui penambahan akrual bunga	14.966.083.477	32.556.610.585

**29. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NON-CASH
INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES**

Increase in loan from related party through additional accrued interest

30. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN

	Aset keuangan pada biaya perolehan yang diamortisasi/ <i>Financial assest at amortized cost</i> Rp	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortized</i> Rp
31 Desember 2022		
<u>Aset keuangan</u>		
Bank dan setara kas	92.278.091.165	-
Piutang usaha - pihak ketiga	10.467.345.260	-
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	102.671.988	-
Pihak ketiga	76.299.350	-
Aset keuangan dari proyek konsesi	320.394.423.642	-
Aset lain-lain	1.657.345.076	-
Jumlah	<u>424.976.176.481</u>	<u>-</u>
<u>Liabilitas keuangan</u>		
Utang usaha dan lainnya		
Pihak berelasi	-	86.000.000
Pihak ketiga	-	3.932.994.770
Pinjaman berjangka	-	323.805.799.412
Pinjaman dari pihak berelasi	-	128.111.426.088
Biaya masih harus dibayar	-	3.331.028.762
Utang retensi	-	7.028.949.528
Jumlah	<u>-</u>	<u>466.296.198.560</u>

**30. CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL
INSTRUMENTS**

December 31, 2022

Financial assets

Cash in banks and cash equivalent
Trade accounts receivable - third party
Other accounts receivable
 Related parties
 Third parties
Financial assets from concession project
Other assets

Total

Financial liabilities

Trade and other accounts payable
 Related parties
 Third parties
Term loans
Loan from related parties
Accrued expenses
Retention payable

Total

	Aset keuangan pada biaya perolehan yang diamortisasi/ <i>Financial assest at amortized cost</i> Rp	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortized</i> Rp
31 Desember 2021		
<u>Aset keuangan</u>		
Bank dan setara kas	16.054.766.055	-
Piutang usaha - pihak ketiga	14.456.449.975	-
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	343.671.988	-
Pihak ketiga	369.001.049	-
Aset keuangan dari proyek konsesi	331.230.537.618	-
Aset lain-lain	1.657.345.076	-
Jumlah	<u>364.111.771.761</u>	<u>-</u>
<u>Liabilitas keuangan</u>		
Utang usaha dan lainnya		
Pihak berelasi	-	24.472.527.414
Pihak ketiga	-	1.732.804.512
Pinjaman berjangka	-	218.210.286.949
Pinjaman dari pihak berelasi	-	211.332.419.393
Biaya masih harus dibayar	-	4.894.661.167
Utang retensi	-	3.401.392.771
Jumlah	<u>-</u>	<u>464.044.092.206</u>

December 31, 2021

Financial assets

Cash in banks and cash equivalent
Trade accounts receivable - third party
Other accounts receivable
 Related parties
 Third parties
Financial assets from concession project
Other assets

Total

Financial liabilities

Trade and other accounts payable
 Related parties
 Third parties
Term loans
Loan from related parties
Accrued expenses
Retention payable

Total

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Manajemen modal

Grup mengelola modalnya untuk memastikan mereka dapat mempertahankan kelangsungan usaha disamping memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham melalui optimalisasi saldo liabilitas dan ekuitas.

Struktur modal Grup terdiri dari utang pihak ketiga dan pinjaman dari pihak berelasi yang saling hapus dengan kas dan setara kas dan ekuitas pemegang saham yang terdiri dari modal saham, agio saham dan laba.

Direksi Grup secara berkala melakukan struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari revidi ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Tidak terdapat perubahan terhadap eksposur risiko modal Grup dimana risiko ini telah dikelola dan diukur.

b. Manajemen risiko mata uang asing

Grup terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama karena transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing atas pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing.

Analisis sensitivitas mata uang asing

Grup terutama terekspos terhadap Dollar Amerika Serikat ("USD").

Jika Rupiah menguat atau melemah sebesar 3% (2021: 1%) terhadap USD dengan semua variabel lainnya, maka laba sebelum pajak untuk tahun berjalan akan meningkat / menurun sebesar Rp 4.271.032.225 pada 31 Desember 2022 (Desember 31 2021: Rp 2.041.822.957). 3% (2021: 1%) adalah tingkat sensitivitas yang digunakan ketika melaporkan secara internal risiko mata uang asing kepada para karyawan kunci, dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup item mata uang asing moneter yang ada dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode untuk perubahan 3% (2021: 1%) dalam nilai tukar mata uang asing.

Menurut pendapat manajemen, analisis sensitivitas tidak representatif dari risiko valuta asing melekat karena eksposur pada akhir periode pelaporan tidak mencerminkan eksposur selama tahun berjalan.

31. FINANCIAL RISK AND CAPITAL MANAGEMENT

a. Capital management

The Group manages its capital to ensure that it will be able to continue as a going concern while maximizing the return to stakeholders through the optimization of debt and equity balance.

The capital structure of the Group consists of third party loan and loan from related party, offset by cash and cash equivalents and equity shareholder consist of capital stock, agio capital and retained earnings.

The Directors of the Group periodically review the Group's capital structure. As part of this review, the Directors consider the cost of capital and related risk.

There has been no change to the Group's exposure to capital risk or the manner in which these risks are managed and measured.

b. Interest rate risk management

The Group is exposed to the effect of foreign currency exchange rate fluctuation mainly because of foreign currency denominated transactions from term loans denominated in foreign currencies.

Foreign currency sensitivity analysis

The Group is mainly exposed to the U.S. Dollar ("USD").

If the Rp had strengthened or weakened by 2%(2021: 1%) against USD with all other variables held constant, profit before tax of the year would have been increase / decrease Rp 4,271,032,225 as of December 31, 2022 (December 31, 2021: Rp 2,041,822,957) The 3% (2021: 1%) is the sensitivity rate used when reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation at the period end for a 3% (2021: 1%) change in foreign currency rates.

In management's opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative of the inherent foreign exchange risk because the exposure at the end of the reporting period does not reflect the exposure during the year.

c. Manajemen risiko tingkat bunga

Grup terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Grup meminjam dana dengan tingkat bunga tetap dan mengambang. Risiko ini dikelola oleh Grup dengan mempertahankan gabungan yang tepat antara pinjaman suku bunga tetap dan mengambang.

Grup terekspos pada acuan suku Bunga IDR JIBOR dalam transaksi dana pinjaman, yang terdampak reformasi acuan suku bunga.

Grup telah memantau pasar dan output dari kelompok kerja berbagai industri yang mengelola transisi ke suku bunga acuan yang baru. Sampai dengan laporan keuangan ini terbit, Grup tetap menggunakan JIBOR dan akan menggunakan IndONIA yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia setelah proses pergantian tersebut selesai secara penuh.

Eksposur Grup terhadap suku bunga dalam aset keuangan dan liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

Untuk utang dengan suku bunga mengambang, Grup akan memulai diskusi dengan IIF terkait dengan perubahan atas suku bunga acuan yang baru.

d. Manajemen risiko likuiditas

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk manajemen Grup dan pendanaan jangka pendek, menengah dan panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel risiko likuiditas dan suku bunga

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan dengan periode pembayaran yang disepakati Grup. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang tak terdiskonto dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal di mana Grup dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal di mana Grup mungkin akan diminta untuk membayar.

c. Interest rate risk management

The Group is exposed to interest rate risk because entities in the Group borrow funds at both fixed and floating interest rates. The risk is managed by the Group by maintaining an appropriate mix between fixed and floating rate borrowings.

The Group is exposed to the IDR JIBOR interest rate benchmark in transaction loan which is subject to interest rate benchmark reform.

The Group has closely monitored the market and the output from the various industry working groups managing the transition to new benchmark interest rates, the Group continues to use JIBOR and will use IndONIA as issued by Bank Indonesia after the replacement process is fully completed.

The Group's exposures to interest rates on financial assets and financial liabilities are detailed in the liquidity risk management section of this note.

For the Group's floating rate debt, the Group will start discussions with IIF for the new benchmark interest rate.

d. Liquidity risk management

Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Directors, which has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short-, medium- and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Liquidity and interest risk tables

The following tables detail the Group's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The tables have been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Group can be required to pay. The tables include both interest and principal cash flows. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Group may be required to pay.

	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ Weighted average effective interest rate	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 sampai 5 tahun/ 1 to 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/Total	
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	
31 Desember 2022						December 31, 2022
Tanpa bunga						Non-interest bearing
Utang usaha dan lainnya						Trade and other accounts payable
Pihak berelasi		86.000.000	-	-	86.000.000	Related parties
Pihak ketiga		3.932.994.770	-	-	3.932.994.770	Third parties
Utang retensi		7.028.949.528	-	-	7.028.949.528	Retention payable
Biaya masih harus dibayar		3.331.028.762	-	-	3.331.028.762	Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variable						Variable interest rate instruments
Pinjaman berjangka	JIBOR plus 5,5% - 6%	41.422.892.666	341.744.658.930	150.070.509.888	533.238.061.484	Term loans
Instrumen tingkat bunga tetap						Fixed interest rate instruments
Pinjaman dari pihak berelasi	10%-14%	126.200.990.605	-	-	126.200.990.605	Loan from related parties
		<u>182.002.856.331</u>	<u>341.744.658.930</u>	<u>150.070.509.888</u>	<u>673.818.025.149</u>	
31 Desember 2021						December 31, 2021
Tanpa bunga						Non-interest bearing
Utang usaha dan lainnya						Trade and other accounts payable
Pihak berelasi		24.472.527.414	-	-	24.472.527.414	Related parties
Pihak ketiga		1.732.804.512	-	-	1.732.804.512	Third parties
Utang retensi		3.401.392.771	-	-	3.401.392.771	Retention payable
Biaya masih harus dibayar		4.894.661.167	-	-	4.894.661.167	Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variable						Variable interest rate instruments
Pinjaman berjangka	JIBOR plus 5,5% - 6%	35.549.391.422	169.458.105.207	119.102.883.149	324.110.379.778	Term loans
Instrumen tingkat bunga tetap						Fixed interest rate instruments
Pinjaman dari pihak berelasi	10%-14%	124.181.279.305	114.472.184.536	-	238.653.463.842	Loan from related parties
		<u>194.232.056.591</u>	<u>283.930.289.743</u>	<u>119.102.883.149</u>	<u>597.265.229.484</u>	

e. Manajemen risiko kredit

Tinjauan eksposur Grup terhadap risiko kredit

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan cadangan kerugian, mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

Selain itu, Grup terekspos terhadap risiko kredit dalam kaitannya dengan jaminan keuangan yang diberikan kepada bank oleh Grup. Eksposur maksimum Grup dalam hal ini adalah jumlah maksimum yang harus dibayar Grup jika jaminan tersebut ditarik.

Kerangka peringkat risiko kredit kini Grup terdiri dari kategori berikut:

Kategori/ Category	Deskripsi/Description	Dasar pengakuan ECL/ Basis for recognizing ECL
Lancar/ Performing	Pihak lawan memiliki risiko gagal bayar yang rendah dan tidak memiliki tunggakan. <i>The counterparty has a low risk of default and does not have any past-due amounts.</i>	ECL 12 bulan/ 12-month ECL

e. Credit risk management

Overview of the Group's exposure to credit risk

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses, represents the Group's exposure to credit risk.

In addition, the Group is exposed to credit risk in relation to financial guarantees given to banks provided by the Group. The Group's maximum exposure in this respect is the maximum amount the Group could have to pay if the guarantee is called upon.

The Group's current credit risk grading framework comprises the following categories:

Kategori/ Category	Deskripsi/Description	Dasar pengakuan ECL/ Basis for recognizing ECL
Dicadangkan/ <i>Doubtful</i>	Jumlah yang tertunggak > 60 hari atau telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal./ <i>Amount is >60 days past due or there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.</i>	ECL sepanjang umur –kredit tidak memburuk/ <i>Lifetime ECL – not credit-impaired</i>
Gagal bayar/ <i>In default</i>	Jumlah yang tertunggak > 90 hari atau ada bukti yang mengindikasikan aset mengalami penurunan nilai kredit./ <i>Amount is >90 days past due or there is evidence indicating the asset is credit-impaired.</i>	ECL sepanjang umur – kredit memburuk/ <i>Lifetime ECL – credit-impaired</i>
Penghapusan/ <i>Write-off</i>	Ada bukti yang mengindikasikan bahwa debitur dalam kesulitan keuangan yang buruk dan Grup tidak memiliki prospek pemulihan yang realistis./ <i>There is evidence indicating that the debtor is in severe financial difficulty and the Group has no realistic prospect of recovery.</i>	Saldo dihapuskan/ <i>Amount is written off</i>

Tabel di bawah merinci kualitas kredit aset keuangan Grup serta eksposur maksimum risiko kredit menurut peringkat risiko kredit:

The table below details the credit quality of the Group's financial assets as well as maximum exposure to credit risk by credit risk rating grades:

Akun deskripsi/ <i>Accounts description</i>	Peringkat Kredit Internal/ <i>Internal Credit Rating</i>	ECL 12 bulan atau sepanjang umur/ <i>12-month or lifetime ECL</i>	31 Desember/December 31, 2022			31 Desember/December 31, 2021		
			Jumlah tercatat bruto/ <i>Gross carrying amount</i>	Cadangan kerugian/ <i>Loss allowance</i>	Jumlah tercatat bersih/ <i>Net carrying amount</i>	Jumlah tercatat bruto/ <i>Gross carrying amount</i>	Cadangan kerugian/ <i>Loss allowance</i>	Jumlah tercatat bersih/ <i>Net carrying amount</i>
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i>	Lancar/ <i>Performing</i>	ECL 12 bulan/12-month ECL	92.278.091.165	-	92.278.091.165	16.054.766.055	-	16.054.766.055
Piutang usaha pihak ketiga/ <i>Trade accounts receivable third party</i>	(i)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ <i>Lifetime ECL (simplified approach)</i>	10.467.345.260	-	10.467.345.260	14.456.449.975	-	14.456.449.975
Piutang lain-lain pihak ketiga/ <i>Other account receivable third parties</i>	(i)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ <i>Lifetime ECL (simplified approach)</i>	76.299.350	-	76.299.350	369.001.049	-	369.001.049
Piutang lain-lain pihak berelasi/ <i>Other account receivable third parties</i>	(i)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ <i>Lifetime ECL (simplified approach)</i>	102.671.988	-	102.671.988	343.671.988	-	343.671.988
Aset lain-lain/ <i>Other assets</i>	Lancar/ <i>Performing</i>	ECL 12 bulan/12-month ECL	1.657.345.076	-	1.657.345.076	1.657.345.076	-	1.657.345.076
Aset keuangan dari proyek konsesi/ <i>Financial assets from concession project</i>	(i)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ <i>Lifetime ECL (simplified approach)</i>	320.394.423.642	-	320.394.423.642	333.398.131.256	-	333.398.131.256

i. Perusahaan menentukan ECL pada pos-pos tersebut menggunakan matriks provisi, yang diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis berdasarkan status utang debitur masa lalu, yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi di masa depan.

i. The Company determines the ECL on these items by using a provision matrix, estimated based on historical credit loss experience based on the past due status of the debtors, adjusted as appropriate to reflect current conditions and estimates of future economic conditions.

f. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Kecuali aset finansial dari proyek konsesi (Catatan 10) manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik karena mempunyai jangka waktu pendek atau menggunakan tingkat suku bunga pasar.

Nilai wajar aset keuangan dari proyek konsesi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp 647.284.860.310 (31 Desember 2021: Rp 471.823.497.859).

Nilai wajar instrumen keuangan diatas, ditentukan melalui analisis arus kas yang didiskonto dengan menggunakan tingkat diskonto yang setara dengan tingkat pengembalian yang berlaku bagi instrumen keuangan yang memiliki syarat dan periode jatuh tempo yang sama.

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan posisi keuangan

Tingkatan nilai wajar adalah sebagai berikut:

- Pengukuran nilai wajar Level 1 adalah yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Pengukuran nilai wajar Level 2 adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan
- Pengukuran nilai wajar Level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Nilai wajar aset finansial dari proyek konsesi termasuk dalam Level 3.

32. SEGMENT OPERASI

Pengambil keputusan dalam operasional utama adalah Direksi. Direksi memeriksa kinerja Grup dari sudut pandang geografis yang terdiri dari 3 segmen yang dapat dilaporkan: pembangkit listrik tenaga mini hydro 7,4 MW di Cikopo (Jawa Barat), pembangkit listrik tenaga mini hydro 10 MW di Tomasa (Sulawesi Tengah) dan pembangkit listrik tenaga mini hydro 10 MW di Yaentu (Sulawesi Tengah).

f. Fair value Measurements

Fair value of financial instruments carried at amortized cost

Except for the financial asset from concession project (Note 10), management consider that the carrying amounts of the Company's financial assets and financial liabilities recognized in the financial statements approximate their fair values because they have either short-term maturities or carry market interest rate.

The fair value of financial assets from concession project as of December 31, 2022 is Rp 647,284,860,310 (December 31, 2021: Rp 471,823,497,859).

The fair value for the above financial instruments, was determined by discounting estimated cash flows using discount rates for financial instruments with similar term and maturity.

Fair value measurement hierarchy of the Company's financial statement

The fair value hierarchy are as follows:

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The fair value of financial asset from concession project falls into Level 3.

32. OPERATING SEGMENTS

The chief operating decision-maker has been identified as the members of Board of Directors. The Board of Directors examine the Group's performance from a geographic perspective which consists of 3 reportable segments: 7.4 MW mini hydro powerplant in Cikopo (West Java), the 10 MW mini hydro power plant in Tomasa (Sulawesi Tengah) and the 10 MW mini hydro power plant in Yaentu (Central Sulawesi).

PT ARKORA HYDRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021 DAN UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)

PT ARKORA HYDRO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021 AND FOR THE
YEARS THEN ENDED (Continued)

	31 December / December 31, 2022						
	Cikopo Rp	Tomasas Rp	Yaentu Rp	Lainnya/ Others Rp	Eliminasi/ Elimination	Total/ total Rp	
PENDAPATAN	59.047.348.800	7.849.286.964	179.952.676.480	1.035.180.630	-	247.884.492.874	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	13.896.858.532	6.929.511.583	99.938.682.776	-	-	120.765.052.891	COST OF REVENUES
LABA KOTOR	45.150.490.268	919.775.381	80.013.993.704	1.035.180.630	-	127.119.439.983	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	20.707.200.690	3.297.135.541	4.291.394.020	2.778.936.605	-	31.074.666.856	OPERATING EXPENSES
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN							
Penghasilan keuangan	260.621.311	26.402.429.831	21.350.482.840	218.944.261	-	48.232.478.243	Finance income
Beban keuangan	(31.002.235.080)	(12.389.767.493)	(7.473.589.405)	-	-	(50.865.591.979)	Finance cost
Keuntungan (kerugian) atas selisih kurs	(15.508.279.598)	33.059.765	549.478	-	-	(15.474.670.354)	Gain (loss) on foreign exchanges
Keuntungan (kerugian) lain-lain - bersih	852.369.792	1.005.903.905	-	-	-	1.858.273.697	Other gain (losses) - net
TOTAL PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(45.397.523.575)	15.051.626.008	13.877.442.913	218.944.261	-	(16.249.510.392)	TOTAL OTHER INCOME (EXPENSES)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(20.954.233.997)	12.674.265.848	89.600.042.597	(1.524.811.714)	-	79.795.262.735	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
(BEBAN) MANFAAT PAJAK	(3.710.107.715)	676.200.744	(24.163.583.196)	109.073.097	-	(27.088.417.070)	TAX (EXPENSES) BENEFIT
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(24.664.341.712)	13.350.466.592	65.436.459.401	(1.415.738.617)	-	52.706.845.665	NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK							OTHER COMPREHENSIVE (LOSS) PROFIT NET OF TAX
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: (Kerugian) keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja pasti	138.656.668	(494.021)	-	(95.669.489)	-	42.493.158	Items that will not reclassified subsequently to profit or loss: Actuarial gain (loss) of defined benefit plan
Pajak dari keuntungan (kerugian) aktuarial	(30.504.467)	108.685	-	21.047.288	-	(9.348.495)	Tax of actuarial gain (loss)
Jumlah laba komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	108.152.201	(385.336)	-	(74.622.201)	-	33.144.663	Total other comprehensive (loss) profit for the year - net of tax
JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(24.556.189.511)	13.350.081.256	65.436.459.401	(1.490.360.818)	-	52.739.990.328	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali						52.660.421.379 46.424.286	NET PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO: Owners of the Company Non-controlling interest
JUMLAH						52.706.845.665	TOTAL
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali						52.712.221.666 27.768.662	TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO: Owners of the Company Non-controlling interest
JUMLAH						52.739.990.328	TOTAL
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
Aset segmen	363.331.031.818	375.865.571.442	357.962.317.493	187.436.810.062	(336.652.497.198)	947.943.233.617	Segment assets
Liabilitas segmen	261.319.352.914	98.581.850.670	161.828.533.711	15.478.956.683	10.723.347.720	547.932.041.698	Segment liabilities

	31 December / December 31, 2021						
	Cikopo Rp	Tomasas Rp	Yaentu Rp	Lainnya/ Others Rp	Eliminasi/ Elimination	Total/ total Rp	
PENDAPATAN	47.428.726.400	7.111.387.119	142.514.403.770	1.338.903.000	-	198.393.420.289	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	12.919.778.956	6.916.215.667	69.440.251.975	-	-	89.276.246.598	COST OF REVENUES
LABA KOTOR	34.508.947.444	195.171.452	73.074.151.795	1.338.903.000	-	109.117.173.691	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	11.989.667.975	1.405.804.578	3.009.507.955	1.604.790.227	-	18.009.770.736	OPERATING EXPENSES
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN							
Penghasilan keuangan	71.474.539	27.798.793.727	6.066.522.582	948.441	-	33.937.739.289	Finance income
Amortisasi suku bunga efektif atas pinjaman	9.418.347.241	(5.845.985.765)	(3.572.361.476)	-	-	-	Amortization effective interest rate on loan
Beban keuangan	(38.825.084.381)	(13.230.197.545)	-	-	-	(52.055.281.926)	Finance cost
Keuntungan (kerugian) atas selisih kurs	(1.302.666.026)	(4.321.266)	38.735	-	-	(1.306.948.557)	Gain (loss) on foreign exchanges
Keuntungan (kerugian) lain-lain - bersih	967.518.493	2.959.652.416	-	(139.119.776)	-	3.788.051.133	Other gain (losses) - net
TOTAL PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(29.670.410.134)	11.677.941.567	2.494.199.841	(138.171.335)	-	(15.636.440.060)	TOTAL OTHER INCOME (EXPENSES)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(7.151.130.664)	10.467.308.441	72.558.843.680	(404.058.562)	-	75.470.962.895	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	(2.959.280.968)	(1.218.812.544)	(21.562.526.074)	-	-	(25.740.619.586)	TAX EXPENSES
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(10.110.411.632)	9.248.495.898	50.996.317.606	(404.058.562)	-	49.730.343.309	NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK							OTHER COMPREHENSIVE (LOSS) PROFIT NET OF TAX
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: (Kerugian) keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja pasti	417.721.279	208.811.408	-	91.759.286	-	718.291.973	Items that will not reclassified subsequently to profit or loss: Actuarial gain (loss) of defined benefit plan
Pajak dari keuntungan (kerugian) aktuarial	(91.898.681)	(45.938.510)	-	-	-	(137.837.191)	Tax of actuarial gain (loss)
Jumlah laba komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	325.822.598	162.872.898	-	91.759.286	-	580.454.782	Total other comprehensive (loss) profit for the year - net of tax
JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(9.784.589.035)	9.411.368.796	50.996.317.606	(312.299.276)	-	50.310.798.091	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali						48.959.115.032 771.228.277	NET PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO: Owners of the Company Non-controlling interest
JUMLAH						49.730.343.309	TOTAL
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali						49.488.546.872 822.251.219	TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO: Owners of the Company Non-controlling interest
JUMLAH						50.310.798.091	TOTAL
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
Aset segmen	275.441.960.454	373.507.387.034	157.379.821.134	31.896.207.896	(149.611.629.815)	688.613.746.702	Segment assets
Liabilitas segmen	325.258.573.491	218.582.497.495	82.229.635.459	5.367.993.696	(113.850.573.671)	517.588.126.470	Segment liabilities

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN

- a. Pada tanggal 31 Januari 2023, Perusahaan dan AGN (entitas anak) telah mendirikan entitas anak baru dengan nama PT Arkora Hydro Pamulihan ("AHP"). Pendirian AHP tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Pendirian No.80 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0007536.AH.01.01 tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023. Dalam anggaran dasar AHP disebutkan bahwa kegiatan usaha dari AHP adalah pembangkitan tenaga listrik melalui sumber energi baru terbarukan yang berasal dari aliran air (PLTA). Susunan pemegang saham dari AHP terdiri dari PT Arkora Guna Nergi dan PT Arjuna Hidro dengan persentase kepemilikan masing-masing sebesar 99,96% dan 0,04% dengan jumlah saham sebanyak 2.500 lembar dan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 1.000.000.
- b. Pada tanggal 15 Pebruari 2023, AHP (entitas anak) dan Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat ("PPJB") dengan PT Global Metal Raya (GMR) untuk pembelian saham senilai Rp 250.000.000. Lebih lanjut, AHP dan Perusahaan melakukan pelunasan dan penyelesaian atas utang pemegang saham sebelumnya sebesar Rp 18.630.000.000. Tujuan dilakukan transaksi ini adalah sehubungan dengan rencana Grup mengambil alih saham beserta aset GMR berupa unit kantor yang berlokasi di Jakarta Selatan.

34. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 1 sampai 67 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur Utama untuk diterbitkan kembali pada tanggal 10 Maret 2023.

33. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

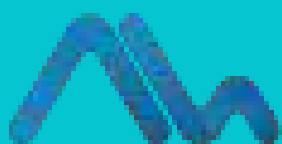
- a. On January 31, 2023, the Company and AGN (a subsidiary) has established a new subsidiary Company named PT Arkora Hydro Pamulihan ("AHP"). The establishment of AHP has been stated through the Deed of Establishment No. 80 dated 31 January 2023 made before Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notary in Jakarta and has ratified by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0007536.AH.01.01 year 2023 dated January 31, 2023. In Article of the AHP mentioned the activities of AHP is generation of electric power through new and renewable energy sources originating from running water (Hydro power plants). The composition of shareholder from AHP consist of PT Arkora Guna Nergi and PT Arjuna Hidro with percentage of ownership amounted to 99.96% and 0.04%, respectively with total 2,500 shares an nominal value of the shares amounting Rp 1,000,000.
- b. On February 15, 2023, AHP (a subsidiary) and the Company signed a Conditional Sale and Purchase Agreement ("CSPA") with PT Global Metal Raya (GMR) for the shares purchase plan in the amount of Rp 250,000,000. Furthermore, AHP and the Company also paid off and settled the previous shareholders loan with total amount Rp 18,360,000,000. The purpose of this transaction is in connection with the Group's plan to carry out the an acquisition of the GMR's shares and asset in the form an office unit located in South Jakarta.

34. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements on pages 1 to 67 were the responsibilities of the management, and were approved for reissued by the President Director and authorized for issue on March 10, 2023.

2022

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT



ARKORA HYDRO

PT ARKORA HYDRO Tbk

21st Floor Unit C & D, Office 8 Building
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Lot 28 SCBD
Jakarta 12190, Indonesia

P. +62 (021-29333-288; 021-29333-299)
F. +62 (021-29333-298)
E. hydro@arkora.com

www.arkora-hydro.com